

**PELEMBAGAAN NILAI DAN NORMA BAGI PECANDU
NARKOBA DI BALAI REHABILITASI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BADDOKA
MAKASSAR**

AGUSTINUS SOLLU

M. ALIMIN MAIDIN

HASBI

ANSAR ARIFIN

ANDI M. RUSDI MAIDIN

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku ini yang berjudul “Pelebagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar”. Tujuan dari Penulisan Buku ini adalah untuk mengkaji pelembagaan nilai dan norma dalam proses pemulihan klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar proses rehabilitasi pelembagaan nilai dan norma dengan metode *Theurapeutic Community* (TC) yang disesuaikan dengan tingkat keparahan kecanduan klien.

Buku ini juga mengkaji keselarasan teori sosiologi dalam penerapan teori fungsionalisme dan Talcot Parsons dan Teori Strukturasi dan Anthony Giddens mulai dari struktur Balai, para agen (aktor) atau para staf dan para klien hingga terjadinya keteraturan dalam balai sebagai suatu sistem struktur.

Kami sadar bahwa buku ini merupakan kerja keras dari berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran serta saran dan masukan dalam penulisan buku ini. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga buku ini dapat berada ditangan pembaca saat ini.

Kami sadar apa yang telah kami usahakan dengan sebaik – baiknya masih jauh dari kesempurnaan olehnya itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat kami butuhkan dan akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan Rahmat-Nya kepada kita semua dan buku yang telah diterbitkan ini bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.

Makassar, Awal Juli 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PRAKATA	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PELEMBAGAAN NILAI DAN NORMA	11
A. Teori Fungsionalisme.....	11
B. Teori Tindakan	12
C. Teori Tindakan fungsionalisme	14
D. Teori Strukturasi	24
E. Teori Sosialisasi	26
F. Konsep Nilai.....	30
G. Konsep Norma	40
H. Konsep Pemulihan.....	49
I. Therapeutic Community (TC).....	55
J. Individual Treatment (IT).....	63
K. Klien.....	63
BAB 3 DESKRIPSI UMUM BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	86
A. Gambaran Umum	86
B. Gambaran Program Rehabilitasi.....	98
C. Kerjasama	113
D. Pengembangan	114
BAB 4 PROSES PELEMBAGAAN NILAI DAN NORMA BAGI KLIEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	116
A. Nilai.....	116
B. Norma	130
C. Pelembagaan Nilai dan Norma	143
BAB 5 IMPLEMENTASI PRASYARAT FUNGSI AGIL PADA	

KLIEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA.....	153
A. Implementasi Prasyarat Fungsi Adaptasi (Adaptation)	154
B. Implementasi Prasyarat Fungsi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment).....	163
C. Implementasi Prasyarat Fungsi Integrasi	169
D. Implementasi Prasyarat Fungsi Latensi.....	188
 BAB 6 JUSTIFIKASI TEORI GIDENS DALAM PROSES REHABILITASI	204
A. Teori Stukturasi	204
B. Pandangan tentang Struktur	207
C. Relasi Struktural Antara Klien dan Balai Rehabilitasi	216
D. Strukturasi dalam Teori Giddens	226
 BAB 7 PENERIMAAN DIRI KLIEN PADA BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA.....	233
 DAFTAR PUSTAKA.....	243

DAFTAR TABEL

No	Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	3.1	Daftar Pemanfaatan Lahan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar	89
2	3.2	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar	95
3	3.3	Jumlah klien yang Dirawat Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019	97
4	7.1	Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 2017	237
5	7.2	Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 2018	237
6	7.3	Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 2019	238

DAFTAR GAMBAR

No	Nomor Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	2.1	Unsur-unsur Tindakan Sosial	13
2	2.2	Sistem Hierarki Sibernetik Pengendali	19
3	2.3	Fungsi AGIL Dalam Lembaga dan Sistem Sosial Kemasyarakatan	23
4	2.4	Proses Rehabilitasi dan Pelembagaan Nilai	55
5	2.5	Hierarki Behavior Shapping Tools	68
6	2.6	Struktur dalam TC	73
7	2.7	Stages Of Change Model	81
8	3.1	Struktur Organisasi	93
9	3.2	Alur Proses Rehabilitasi	100
10	5.1	Implementasi Fungsi Agil	203
11	7.1	Keterbaruan Penelitian Pelembagaan Nilai dan Norma	241
12	7.2	Korelasi Teori Agil dengan Stage of Change Model untuk melihat tingkat perubahan diri klien	242
	7.3	Rehabilitasi Transformatif	242

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
BNN	Badan Narkotika Nasional
EEG	<i>Electroencephalography</i>
EKG	<i>Elektrokardiogram</i>
ICU	<i>Intensive Care Unit</i>
UGD	Unit Gawat Darurat
HAM	Hak Asasi Manusia
AGIL	<i>Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency</i>
TC	<i>Theurapeutic Community</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
MOD	<i>Major On Duty</i>
FHC	<i>Family Hair Cut</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan Narkoba bukan untuk maksud pengobatan tetapi ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan. Pada satu sisi narkoba sangat bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun pada sisi lainnya sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Dewasa ini justru penyalahgunaan narkoba menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan.

Menurut data survei tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bekerjasama dengan Puslitkes UI, angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia adalah 2,4% dari penduduk Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan, dan telah merasuk ke sebagian besar sendi kehidupan masyarakat. Pecandu narkoba diperkirakan 80% adalah generasi muda, yang berusia 12 hingga 25 tahun (Profil Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 2018). Bangsa dan negara mendapat gangguan besar dan amat kompleks dengan adanya penggunaan zat adiktif (termasuk golongan narkotika). Mengatasi masalah ini memerlukan suatu metode yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek, yakni medis, sosial dan hukum. Berdasarkan Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, Pasal 70 huruf d, BNN mendapat amanah untuk melakukan penguatan kemampuan lembaga rehabilitasi, khususnya yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat, baik penguatan secara kualitas maupun kuantitas.

Pasal 70 huruf d Undang-Undang Narkotika 2009 ini mendorong Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi segala daya upaya dalam mengatasi

masalah penyalahgunaan narkoba dan narkotika. Salah satu bentuk upaya pemerintah pusat adalah menyediakan sarana dan prasarana yang berguna bagi proses pemulihan para pecandu narkoba, yaitu Balai Rehabilitasi. Di dalam balai rehabilitasi ini, selama proses pemulihan, segala kebutuhan pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dipenuhi dan disesuaikan dengan tingkat penggunaan maupun jenis zat yang digunakan.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar (untuk selanjutnya disebut Balai Baddoka) adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Balai Baddoka dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Balai Baddoka mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (Narkoba), memfasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor (rehabbaddoka.com, 2019).

Para pengguna narkoba yang menjalani proses rehabilitasi di Balai rehabilitasi sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu berada pada kisaran tiga ratus orang sesuai dengan target output yang ditargetkan bagi balai BNN Baddoka, kecuali tahun 2016 itupun karena mengalami penurunan anggaran dari BNN pusat. Tahun 2015 terdapat 315 klien, tahun 2016 terdapat 251 klien, tahun 2017 terdapat 313 klien, tahun 2018 terdapat 304 klien, dan tahun 2019 terdapat 305 klien. Para klien ini selama menjalani proses rehabilitasi dikelompokkan menjadi enam golongan, yang disesuaikan dengan kebutuhan terapi dan rehabilitasi mereka.

Pertama, kelompok pengguna narkoba yang tidak mengalami ketergantungan (*non-dependent drug user*). Masalah utama yang dihadapi kelompok ini adalah konsekuensi negatif dari penggunaannya dan risiko menjadi ketergantungan. Layanan utama yang dibutuhkan adalah deteksi dan intervensi dini.

Kedua, kelompok pengguna Narkoba dengan cara suntik (*injecting drug user*). Masalah utama mereka adalah komplikasi medis, semisal abses

dan virus yang menular melalui darah. Layanan utama yang dibutuhkan adalah program terapi rehabilitasi, layanan HIV/AIDS, program pertukaran jarum suntik steril, layanan medis, dan konseling.

Ketiga, kelompok pecandu (*dependent drug user*). Masalah utama yang diderita adalah gangguan penggunaan zat, konsekuensi kesehatan dan risiko buruk lainnya. Layanan utama yang dibutuhkan adalah program terapi rehabilitasi.

Keempat, kelompok pengguna Narkoba yang terintoksikasi secara akut (*acutely intoxicated drug user*). Masalah yang dihadapi kelompok ini adalah gangguan perilaku akut dan/atau overdosis. Layanan utama yang mereka butuhkan adalah perawatan medis jangka pendek dan/atau psikiatrik intensif.

Kelima, kelompok pengguna Narkoba dalam kondisi gejala putus zat (*drug user in withdrawal*). Masalah utama yang dihadapi adalah gejala putus zat, dan layanan utama yang dibutuhkan adalah program detoksifikasi jangka pendek.

Keenam, kelompok pengguna Narkoba dalam masa pemulihan (*drug user in recovery*). Kelompok terakhir ini menghadapi masalah utama seperti risiko kekambuhan, sehingga pelayanan utama yang mereka butuhkan adalah program pencegahan kambuh dan rehabilitasi (Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, 2017).

Keenam kategori pengguna narkoba ini harus mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara benar dan tepat guna pemulihan mereka dari ketergantungan zat. Mereka yang ditetapkan untuk dirawat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selanjutnya disebut sebagai klien. Kata klien adalah istilah yang digunakan Balai Baddoka untuk menyebut semua pengguna narkoba yang menjalani pelayanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Selama proses pemulihan para klien, maka Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diharapkan dapat memainkan peran dalam memformulasikan dan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma positif kepada klien yang selanjutnya kemudian disebut sebagai pelebagaan nilai dan norma. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berharap besar agar semua program rehabilitasi

yang dijalankan mampu memulihkan para klien yang sedang menjalani program rehabilitasi, sehingga mereka dapat produktif, dapat menjalankan fungsi sosialnya dan pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali menjadi anggota masyarakat yang normal.

Mengingat efek narkoba adalah kesehatan fisik maka pelayanan medis menjadi sangat utama. Pelayanan medis yang dimaksud adalah layanan kesehatan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu narkoba yang dirawat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sarana dan prasarana pendukung layanan medis ini di antaranya: fasilitas laboratorium, apotek, fisioterapi, poli umum, poli gigi, poli penyakit dalam, poli neurologi, poli jiwa, ruang EEG, ruang EKG, ruang radiologi, ruang bedah, ruang ICU, dan ruang UGD. Sedangkan pelayanan sosial-psikis yang dimaksud seperti layanan konseling psikologi, religi, dan terapi musik (Profil Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, 2018: 2).

Di samping menyediakan berbagai layanan medis, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga menanamkan kesadaran bagi para klien bahwa apapun yang disarankan oleh unit-unit struktural dalam lembaga BNN tersebut adalah sumber utama nilai. Klien wajib menaati saran-saran medis dan konselor selama hal itu menunjang proses rehabilitasi. Pada saat bersamaan, Balai Baddoka tidak saja berperan sebagai “produsen nilai” melainkan juga sebagai objek nilai. Ada aturan dimana BNN tidak boleh melanggar nilai-nilai tersebut. Salah satu contoh standar nilai oleh Balai Baddoka adalah keharusan memberikan pelayanan rehabilitasi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Etika (Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba , 2017: 5). Upaya pelebagaan nilai dan norma oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terhadap klien melibatkan banyak aktor di dalamnya. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi standar perilaku, wajib diikuti oleh para klien selama menjalani proses rehabilitasi.

Secara operasional, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengklasifikasi nilai menjadi dua kategori utama yaitu nilai pokok dan nilai penunjang. Nilai-nilai pokok yang wajib diketahui, dijalankan, ditaati dan dipertahankan terdiri dari dua macam: 1) nilai-nilai medikal, dan 2) nilai-nilai sosial dan nilai

agama. Sementara nilai-nilai penunjang yang dianjurkan untuk diketahui, dijalankan, dan dipatuhi terdiri dari: 1) nilai budaya, seperti kepedulian terhadap lingkungan, 2) nilai seni, seperti seni lukis, seni rupa, kerajinan tangan, dan seni musik, dan 3) nilai jurnalistik, seperti pelatihan dan penugasan jurnalistik dan lain-lain.

Praktik-praktik sosial dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana seluruh staf terutama konselor, klien, nilai, norma, dan sumber daya penunjang lainnya adalah lima komponen utama yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan struktur yang utuh. Prinsip dasar dari nilai dan norma adalah mengarahkan, membatasi dan membentuk perilaku-prilaku aktor dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial dalam struktur kelembagaan Balai Rehabilitasi BNN maupun klien itu sendiri. Dua institusi terakhir ini (Balai dan Klien) terhubung pada institusi nilai dan norma.

Simon Stewart (2013: 105-106) mengatakan, “kita menjalani hidup, bernapas, dan menghembuskan nilai. Tidak satupun aspek kehidupan manusia yang terpisah dari nilai (*values*), penilaian (*valuations*), pengabsahan (*validations*).” Bersandar pada pandangan Bourdieu, Stewart menegaskan bahwa sangatlah berguna untuk melihat lebih jauh momen evaluasi (*evaluative moment*), lantaran penilaian (*value-judgement*) merupakan praktik sehari-hari, kerja aktif, bergantung pada ragam faktor kontekstual yang terus dinamis.

Sebagai contoh, lembaga konselor BNN Baddoka, yang sehari-hari bertugas berhubungan dengan klien, diarahkan dan dibatasi oleh nilai-nilai etis tertentu (kode etik). Nilai etika ini merupakan pedoman bagi para konselor dalam bersikap dan berperilaku terhadap klien. Layanan yang diberikan oleh konselor harus berlandaskan pada kesejahteraan dan kepentingan penerima layanan yang bersangkutan (klien). Prinsip-prinsip etika yang harus dipegang teguh oleh konselor meliputi: perlindungan terhadap klien sesuai lingkup kompetensi konselor, bertanggung jawab terhadap tugas dan menghindari eksploitasi yang merugikan klien, menjaga kerahasiaan dan privasi klien, dan memelihara integritas profesi (Buku Saku

Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba , 2017).

Menurut Giddens bahwa tindakan (*human action*), manusia (*the acting self*), dan interaksi yang dikonseptualisasikan dalam hubungannya dengan institusi maupun praksis sosial, merupakan tiga pokok utama teori strukturasi (Giddens, 2010: xi-xiii).

Sebagai konsekuensi penerapan nilai berbasis Hak Asasi Manusia, Balai Rehabilitasi BNN melarang segala macam tindakan intervensi yang mengakibatkan trauma fisik, psikologis, maupun mental. Pelanggaran tersebut dianggap sebagai tindakan mal-praktek yang berujung pada pelanggaran hukum. Metode penghukuman yang tidak konstruktif dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Semua upaya pemulihan klien sepanjang proses rehabilitasi berlangsung, baik berupa layanan medis maupun layanan sosial, harus berpijak pada nilai HAM.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam merumuskan nilai dan norma, serta menanamkan yang dalam tulisan ini disebut pelebagaan nilai dan norma pada diri klien adalah hal yang paling utama. Kinerja Balai Rehabilitasi BNN tersebut ditopang oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70 Huruf d bahwa BNN bertugas untuk memperkuat lembaga rehabilitasi. Di sisi lain, dalam kerangka berpikir strukturasi ala Anthony Giddens, nilai-nilai yang merupakan produk BNN adalah sarana konseptual, yang dibutuhkan dalam rangka menganalisa pengetahuan para aktor tentang alasan dibalik tindakan mereka (Giddens, 2010: xvii).

Hubungan strukturasi antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan klien, oleh Giddens menyebutnya sebagai hubungan agensi dan kekuasaan. Balai Baddoka memiliki kuasa untuk menciptakan nilai dan memaksakannya sesuai tingkat kebutuhan layanan pada klien. Pengamatan dan pendampingan yang intensif dari para konselor terhadap klien memberi makna hubungan yang bersifat fungsional-struktural yang berbalut kekuasaan. Keberhasilan para konselor menggali suasana psikologis para klien dan menuliskan resep-resep penyembuhan yang harus diikuti oleh klien

adalah praktik dari kekuasaan. Klien wajib menaati resep-resep dari dokter, konselor, psikolog, dan agamawan sebagai syarat utama untuk dinyatakan pulih.

Hal penting lain yang dilakukan oleh BNN dalam menanamkan nilai dan norma pada klien adalah didasarkan pada pertimbangan tentang latar belakang klien itu sendiri. Efektifitas perumusan dan penanaman nilai tidak saja bergantung pada laporan psikologis semata melainkan juga pada latar belakang kehidupan klien. Mereka yang memiliki latar belakang agama berbeda mendapat layanan spiritual yang berbeda pula. Di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tersedia Gereja maupun Masjid. Para klien yang berjenis kelamin laki-laki memiliki ruang asrama yang dipisah dari klien wanita. Para klien juga dibedakan berdasarkan tingkat kecanduan dan pemakaian mereka. Balai Rehabilitas Baddoka memiliki buku panduan penilaian, yang berisi jenis-jenis fase dan kriteria layanan.

Kebijakan BNN di atas dilandaskan pada fakta sosial bahwa bila dilihat dari data tahun 2016 hingga tahun 2019, latar belakang agama para klien beragam. Mayoritas beragama Islam dan Kristen, sebagian kecil beragama Hindu dan Buddha. Usia mereka berkisar dari 13 tahun yang termuda hingga 64 tahun yang tertua. Laki-laki dan perempuan, baik menikah maupun belum menikah, juga menjadi klien. Tingkat pendidikan mereka juga beragam, mulai dari SD, SLTP, SMA, hingga Perguruan Tinggi (Data Klien 2016-2019).

Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dari berbagai macam sudut pandang ilmu yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Hasil penelitiannya tentu berbedah sesuai dengan bidang masing-masing namun mereka telah membuat terobosan ilmu pengetahuan tentang bahaya narkoba terutama dampak buruknya bagi penyalahguna narkoba dilihat dari sudut pandang dan pendekatan ilmu pengetahuan.

Penelitian dengan pendekatan hukum; beberapa penelitian terdahulu, misalnya Anang Iskandar (2013) meneliti dari sisi hukum dengan judul penelitian "Dekriminalisasi Penyalahguna Narkoba dalam konstruksi Hukum Posistif Indonesia". Agung Senna Ferrari (2015) Analisis Yuridis Terhadap

Pidana Rehabilitasi Sebagai Implementasi Pembaharuan Pidana Bagi Pengguna Narkotika (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang); Arin Rosalia (2016 dengan judul Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Junto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru. Kemudian Sarlis Puang Tiku dengan judul Analisis Rehabilitas Medis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar Rio Atma Putra dengan judul Penerapan Sanksi Rehabilitasi terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Kemudian Sri Handayani (2011) "Pengaruh Keluarga, Masyarakat & Pendidikan Terhadap Pencegahan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja"

Penelitian dengan pendekatan medis telah banyak pula dilakukan antara lain; Diah Setia Utamai, 2014 menulis dengan judul "Model layanan Rehabilitasi Pengguna Amphetamine Type Stimulan (ATS)". Penelitian lain menggunakan pendekatan medis, seperti dilakukan Muh. Risal dengan judul Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Paracetamol Caffeine Carisoprodol di Kota Makassar (Makassar, 2018); Wiwik Windiarsih, Gambaran karakteristik Penyalahguna Napza pada Masa Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar (Makassar, 2018); Ady Multazam berjudul Analisis Kadar Kalsium dalam Saliva pada Penyalahguna Narkoba : Penelitian di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar (Makassar, 2013), Zainal Abidin berjudul Analisa Kadar Fosfat dalam Saliva Penyalahguna Narkoba di Badan Rehabilitasi Narkotika Nasional Baddoka Makassar (Laporan Penelitian, Universitas Hasanuddin, 2013), dan Suehartono Syam berjudul Terapi Holistik terhadap Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar (TERAPUTIK; Jurnal Bimbingan dan Konselig, 2015).

Penelitian dengan pendekatan psikologi dilakukan oleh Nurul Utami Safaruddin dengan mengangkat judul Efektifitas Expressive Writing dalam Meningkatkan Self-Esteem Pecandu Narkoba di Program Rehabilitasi BNN Baddoka (Makassar, 2018); Arul, Murtiani dan Yasir Haskas berjudul Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Stress pada Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar (Stikes Nani Hasanuddin, 2014).

Penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengkaji hubungan erat antara individu, lingkungan dan jenis napza yang digunakan, ditulis oleh Elsa Palinggi, Dian Sidik dan Rismayanti. Mereka mengangkat judul Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan dengan Jenis Napza Pasien BNN Baddoka Makassar (Universitas Hasanuddin, 2015).

Penelitian dengan pendekatan agama seperti penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jabir menulis Sistem Pembinaan Keagamaan pada Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makassar (Makasar, 2017).

Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis lakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan judul *“Analisis Pelembagaan Nilai dan Norma Bagi Pecandu Narkoba di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka Makasar”*. Secara teoritik, penelitian ini sungguh sangat berbeda dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Pemakaian Teori Fungsionalisme dari Talcot Parsons dan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens, dalam melihat, menelusuri, mengimpretasi, dan menganalisa hasil penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Bahkan penulis belum menemukan artikel-artikel yang sama dengan tulisan ini.

Penulis melihat bahwa, pelembagaan nilai dan norma sangat efektif untuk pemulihan para klien. Permasalahan setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Sehingga penanganannya pun disesuaikan dengan kebutuhan masing masing individu. Anthony Giddens mengatakan, individu tidak saja bergantung pada sesama individu, tetapi juga pada konteks interaksi sosial. Karenanya, diperlukan teknik/pendekatan geografi-masa (2010: xxv-xxvi). Memahami kebutuhan akan layanan setiap klien yang beragam adalah bagian dari pendekatan geografi-massa, yang membantu BNN memahami masalah dan layanan yang tepat bagi setiap klien.

Topik tentang Analisis pelebagaan nilai dan norma bagi pecandu narkoba dengan teori fungsionalisme dan strukturasi adalah topik yang belum diangkat oleh penelitian sebelumnya. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai objek material penelitian. Peneliti melihat nilai dan norma dalam konteks relasi fungsional-struktural. BNN dan klien adalah agen-agen yang berinteraksi dalam sebuah konsep kekuasaan berupa sistem nilai dan norma. Di satu sisi, Balai Rehabilitasi BNN bertugas dan berwenang memformulasikan kebijakan dan menentukan nilai dan norma yang harus dijadikan standar pelayanan rehabilitasi, disisi lain klien wajib menaatinya, dengan cara menginternalisasikan berupa pelebagaan nilai-nilai tersebut ke dalam kesadaran reflektif-diskursif-praktis mereka.

BAB 2

PELEMBAGAAN NILAI DAN NORMA

A. Teori Fungsionalisme

Teori fungsionalisme Imperatives oleh Talcott Parsons yang disejajarkan dengan “Teori Fungsionalisme Struktural” oleh para ahli, dipakai untuk menjustifikasi realitas objektif pada fokus kajian penelitian ini.

Parsons berbicara tentang beberapa konsep penting dalam teori yang disebut fungsionalisme struktural (Turner and Holton, 2015: 3-6). Fungsionalisme struktural ini secara umum adalah kerangka analisa untuk melihat aksi sosial. Tindakan masyarakat terbentuk karena adanya fungsi-fungsi di dalam tindakannya, dikarenakan satu tindakan berfungsi pada entitas lain di luar dirinya. Hubungan yang fungsional semacam ini menjelma menjadi satu struktur dalam kehidupan sosial dan dari struktur tersebut muncul sebuah sistem sosial (Dillon, 2013: 158-159).

Fungsi juga bisa dimaknai sebagai sekumpulan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi sebuah sistem. Selain itu, Parsons juga mengemukakan pandangan tentang tindakan sosial, ketika manusia berproses untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan menciptakan diferensiasi. Setidaknya, diferensiasi atau perbedaan lahir dengan cara membuang aspek lama yang sudah diberikan dan menggantinya dengan sub-sistem baru yang dihasilkan dari proses adaptasi dan integrasi. Aksi sosial yang semakin kompleks dari waktu ke waktu membutuhkan upaya

generalisasi nilai, yang mampu merangkum kompleksitas sistem aksi yang berkembang terus-menerus dalam sistem sosial kemasyarakatan.

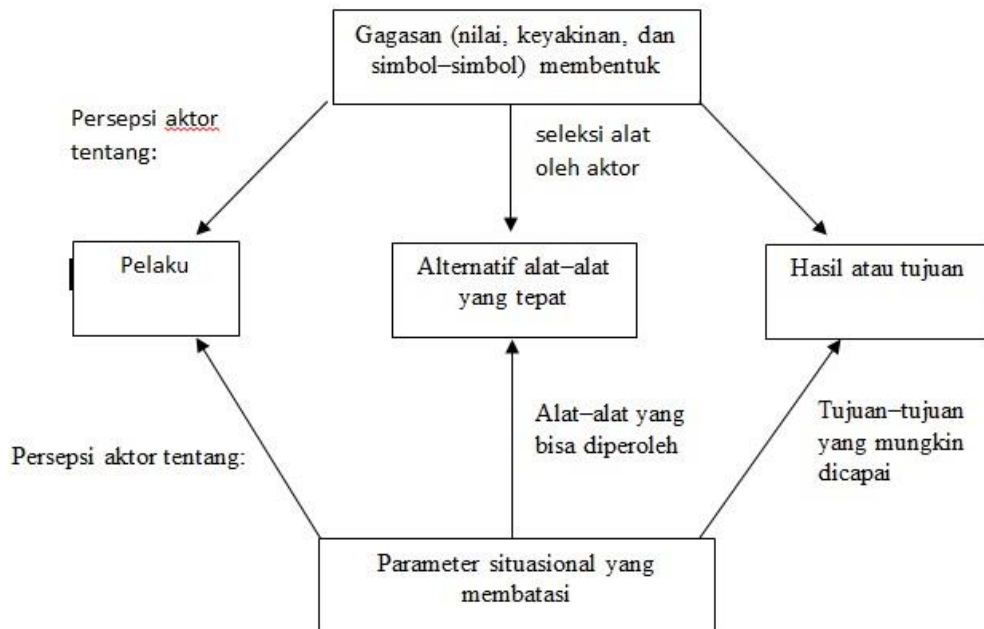
Aksi sosial menurut Parsons terdiri dari empat sub-sistem yaitu diferensiasi sosial, peningkatan adaptasi, inklusivitas sosial dan generalisasi nilai-nilai. Diferensiasi aksi sosial atau aksi aktor individu itu sudah pasti terjadi, karena ia butuh untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika menjalankan proses adaptasi, ada perkara baru yang diterima dan perkara lama yang dibuang atau ditinggalkan, itulah inklusi. Karena perubahan ini bersifat laten dan terus-menerus menuju kompleksitas yang rumit, maka generalisasi dibutuhkan untuk membantu memberikan kerangka pemahaman yang utuh.

B. Teori Tindakan

Karya pertama Talcott Parsons yang berjudul *The Structure of Social Action*, diterbitkan pada 1937 kira-kira saat skema Malinowski telah menjadi sepenuhnya berkembang. Namun demikian, karya ini mengungkapkan isyarat-isyarat yang sedikit saja tentang analisis fungsional di masa mendatang. Karya ini terutama berkaitan dengan upaya mensintesis alur pemikiran yang beragam ke dalam suatu konsepsi sebagai suatu yang: (1) diarahkan pada tujuan; (2) melibatkan penyeleksian alat yang tepat di antara berbagai alternatif; (3) diatur oleh ide-ide, dan (4) dibatasi oleh parameter-parameter fisik-biologis.

Parsons dalam fase awal ini berkaitan dengan “unsur-unsur” dasar yang terlibat dalam tindakan manusia, dan di banyak sisi, fase ini merupakan analisis tindakan individu bukan tindakan kolektif di antara satuan-satuan korporat seperti kelompok dan organisasi, secara diagramatis, skema awal Parsons diperlihatkan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
Unsur-unsur Tindakan Sosial



Meskipun dalam buku *The Structure of Social Action*, tidak disebutkan fungsi dan kebutuhan sistem, namun ada dua hal yang ternyata menentukan perkembangan akhir orientasi fungsional. Salah satu hal tersebut adalah kecenderungan Parsons, yang diwarisi dari Max Weber, untuk menggunakan metode “tipe ideal” (*ideal type*) dan untuk mengembangkan sistem kategori yang merefleksikan dunia sosial yang sesungguhnya. Parsons menamai strategi ini “realisme analitis” dan dia menyatakan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem konsep yang secara memadai mencakup aspek-aspek dunia eksternal yang objektif. Konsep-konsep tersebut bersesuaian dengan fenomena konkrit, tetapi dengan unsur-unsur yang ada dalam fenomena-fenomena yang secara analitis bisa dipisahkan dari unsur-unsur yang lain. Karena alasan inilah Parsons mengembangkan suatu model yang berisi unsur-unsur analitis dasar tindakan manusia sebagaimana yang diperlihatkan pada di atas.

Keperhatian lain yang mendorong Parsons menuju paham fungsionalisme adalah pengakuannya yang hampir mendekati tujuan *Structure of Social Action* bahwa para aktor tidak hadir secara terpisah satu sama lain. Para aktor berinteraksi dalam sistem sosial, sehingga membuat potret konseptual unsur–unsur tindakan individu menjadi tidak memadai untuk menguraikan sistem *interaksi*. Apa yang diperlukan adalah suatu sistem tambahan atau yang lebih luas tentang konsep–konsep guna memahami piranti dasar organisasi sosial manusia. Sisa karier intelektual Parsons dikembangkan untuk memperluas sistem konsep yang bisa “memahami secara memadai” dan menekankan, sebagaimana yang diakui oleh Weber, dimensi utama pola–pola kompleks organisasi manusia. Menjelang tahun 1945, Parsons telah memutuskan, bersama–sama dengan pakar lain di Harvard, bahwa fungsionalisme harus menyediakan alat untuk mengembangkan taksonomi konseptual. Hal ini seperti yang dia kemukakan berikut: “Struktur sistem sosial tidaklah bisa diderivasikan secara langsung dari kerangka acuan situasi pelaku.” Struktur ini memerlukan analisis fungsional terhadap kerumitan–kerumitan yang diperkenalkan oleh interaksi pluralitas aktor”. Upaya oleh Parsons untuk memahami kompleksitas organisasi manusia, taksonomi konseptualnya telah dielaborasi. Nyaris seperti ahli biologi, Parsons memulai mengetengahkan konsep fungsi dan kebutuhan untuk kategori konseptualnya. Dalam berbagai cara, fungsionalisme Parsonian menggambarkan usaha yang keras untuk merealisasikan impian Comte bahwa “sosiologi akan memberikan dasar bagi sistematisasi di bidang biologi”.

C. Teori Tindakan Fungsionalisme

Fungsionalisme Parsons bergerak melalui dua fase yang berbeda: (a) fase mekanisme–keseimbangan, dan (b) fase kebutuhan fungsional. Karena fase kedua berkembang dari fase pertama dan menyertakan analisis mekanisme–keseimbangan, paling bagus jika kita menelaah masing–masing

fase secara terpisah, terutama jika kita memerhatikan kritik bahwa skema Parsons itu inspiratif.

Fase Mekanisme–keseimbangan. Pada 1952, lahir dua karya utama Parsons dan kolaboratornya: *The Social System* dan usaha kolaboratif, *Toward a General Theory of Action*. Dalam karya–karyanya, Parsons secara analitis memisahkan tiga sistem tindakan: budaya, sosial dan kepribadian (belakangan dia menambahkan sistem tindakan ke empat, yakni organismik). “Budaya” adalah sistem lambang yang diciptakan dan digunakan oleh manusia–penekanan yang mengingatkan akan perhatian Malinowski terhadap lambang dan “kebutuhan integratif” maupun perhatian Parsons sendiri dalam bukunya *The Structure of Social Action* mengenai dampak “ide” pada tindakan individu. “Sosial” adalah sistem hubungan yang diciptakan ketika terjadi interaksi di antara individu–sekali lagi, penekanan yang mengingatkan kita akan perhatian Radcliffe–Brown dan Malinowski tentang institusi sebagai fenomena yang muncul atau kengototan Durkheim bahwa masyarakat itu merupakan “fakta sosial” dan realitas yang bertumbuh secara *sui generis* (istilah ini digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik). Karena itu, sistem sosial adalah konsep yang dipakai oleh Parsons ketika mempertimbangkan fakta bahwa para aktor itu tidak hanya mengeluarkan tindakan satuan (*unit act*), tetapi juga *berinteraksi*, sehingga membentuk pola–pola hubungan sosial stabil. “Kepribadian” adalah sistem hal ikhwal seperti kebutuhan, kecenderungan, keadaan kognitif dan keterampilan interpersonal yang dimiliki dan digunakan oleh para aktor ketika mereka berinteraksi satu sama lain.

Parsons di dalam banyak hal telah mengelaborasi masing-masing “unsur tindakan” dasar yang dibahas dalam buku *The Structure of Social Action* ke dalam suatu “sistem tindakan”. Gagasannya telah menjadi sistem kultural yaitu aktifitas mempertimbangkan dan mencari tujuan para aktor yang dikonsepsikan sebagai “sistem kepribadian” dan unsur yang hilang dalam analisis “tindakan satuan” (*unit act*), yakni *interaksi*, sekarang dikonsepsikan sebagai “sistem sosial”. Unsur–unsur lain seperti tindakan satuan, parameter

biologis dan fisik, belakangan menjadi sistem tindakan ke empat yakni “organismik” (alasan mengapa Parsons menambahkan sistem ke empat itu akan tampak jelas ketika kita menganalisis empat prasyarat fungsional).

Kemudian Parsons pada mulanya memvisualisasikan organisasi manusia sebagai organisasi yang berisi tiga sistem yang berbeda secara analisis: budaya, sosial, dan kepribadian. Parsons memandang sistem sosial sebagai sasaran utama analisis sosiologis, namun dia mengenali bahwa simbol budaya (ide, keyakinan, dogma, teknologi, bahasa, dan komponen-komponen simbolik lainnya) dan keadaan kepribadian (motif, kognisi, komitmen, dan keterampilan) mempengaruhi bagaimana para aktor berinteraksi dalam sistem sosialnya. Sehingga, kendati tugas utama teori sosiologis adalah memahami proses pelebagaan atau pembentukan hubungan sosial yang stabil (yakni “sistem sosial”), pemahaman ini tidak dapat terjadi tanpa mengenali dampak simbol budaya dan komponen kepribadian.

Kebanyakan isi *The Social System* membahas isu bagaimana para aktor bertekad dan mampu berinteraksi dan bagaimana pola-pola budaya mengatur interaksi. Secara tersirat dalam analisisnya adalah dua syarat fungsional: (1) Sistem sosial itu harus memiliki “promosi yang cukup dari aktor komponennya yang secara memadai termotivasi untuk bertindak sejalan dengan persyaratan sistem peranannya.” (2) Sistem sosial tersebut harus berusaha menghindari situasi dimana pola-pola budaya itu “gagal dalam menetapkan keteraturan minimal ataupun mengajukan tuntutan yang Perhatian ini kemudian menggiring Parsons untuk melakukan analisis terhadap “mekanisme” yang memastikan bahwa kedua syarat itu terpenuhi. Bagi Parsons, beroperasinya mekanisme-mekanisme tersebut merupakan sesuatu yang membuat sistem sosial bisa berjalan. Sebaliknya, macetnya mekanisme itu akan menimbulkan ketidakstabilan dan perubahan dalam sistem sosial.

Selanjutnya, Parsons mulai mengeksplorasi mekanisme-mekanisme tersebut dengan menggunakan kosakata yang patut disayangkan. Dengan meminjam dari teori ekonomi, terutama dari Pareto dan dari analogi biologi

dan fisika—dalam derajat tertentu mengingatkan kita akan Comte—Parsons menciptakan sebuah citra yang menyeluruh tentang organisasi sosial yang menjadi sasaran kritik yang tajam, dan sering tidak fair. Parsons lalu memulai pembahasannya dengan menyatakan bahwa untuk tujuan *Analitis* (Bukan Praktis, Tujuan Empiris, Sebagaimana yang kurang disadari oleh para pengkritiknya), sistem sosial bisa dikonsepsikan berada dalam “keseimbangan”. Maka, analisis harus difokuskan pada “mekanisme” yang beroperasi mempertahankan keseimbangan ini.

Satu perangkat mekanisme bekerja disekitar sistem integrasi dan sistem kepribadian ke dalam sistem sosial. Dalam mekanisme tersebut terdapat dua kelompok umum:

(1) mekanisme sosialisasi; (2) mekanisme kendala sosial. Mekanisme sosialisasi melibatkan proses: (a) terinternalisasikannya lambang budaya utama oleh sistem kepribadian; (b) diperolehnya motif dan keterampilan dalam memainkan peran dalam sistem sosial, dan (c) berkurangnya ketegangan (*Strain*) dan kecemasan yang berhubungan dengan pembelajaran dan pertumbuhan kepribadian (Ritzer, 2017).

Mekanisme kendala sosial meliputi berbagai jalan diorganisasikannya posisi dan peran dalam sistem sosial dengan tujuan untuk mengurangi timbulnya konflik dan ketegangan. Mekanisme tersebut meliputi:

1. Pelembagaan, sehingga harapan normatif atas posisi itu jelas dan peran yang berpotensi kontradiktif itu dipisahkan dalam waktu dan ruang;
2. Sanksi interpersonal informal untuk mengurangi penyimpangan dari perilaku yang diharapkan;
3. Pelaksanaan ritual, dari isyarat kesopan—santunan (misalnya berjabat tangan) sehingga pelaksanaan upacara keagamaan yang simbolis guna melepaskan ketegangan dan/atau membuat interaksi menjadi teratur;
4. Organisasi katup keamanan yang memungkinkan kecenderungan penyimpangan yang luas dilakukan diluar pola–pola konvensional;
5. Struktur reintegrasi yang berusaha merehabilitasi dan meresosialisasikan penyimpangan;

6. Konsentrasi kekuasaan dan kapasitas untuk melaksanakan paksaan sehingga keteraturan bisa diberlakukan.

Dua jenis mekanisme umum untuk sosialisasi dan kendali sosial tersebut dengan begitu “memecahkan” masalah dalam menjamin bahwa para aktor bertekad dan mampu memainkan peran dalam sistem sosial dan bahwa mereka akan terus menyesuaikan dengan harapan – harapan normatif. Tentu saja, pada derajat tertentu saat mekanisme – mekanisme tersebut tidak efektif, keseimbangan sosial akan terganggu dan perubahan sosial akan terjadi. Syarat utama lain yang ada dalam fungsionalisme awal Parsons terkait dengan integrasi pola–pola budaya—nilai, keyakinan dan komponen–komponen simbolis lain ke dalam sistem sosial. Parsons secara eksplisit tidak menamai proses itu “mekanisme”, tetapi secara jelas dia memandang sistem simbol budaya merupakan sesuatu yang beroperasi sebagai “mekanisme” guna mempertahankan keseimbangan sosial.

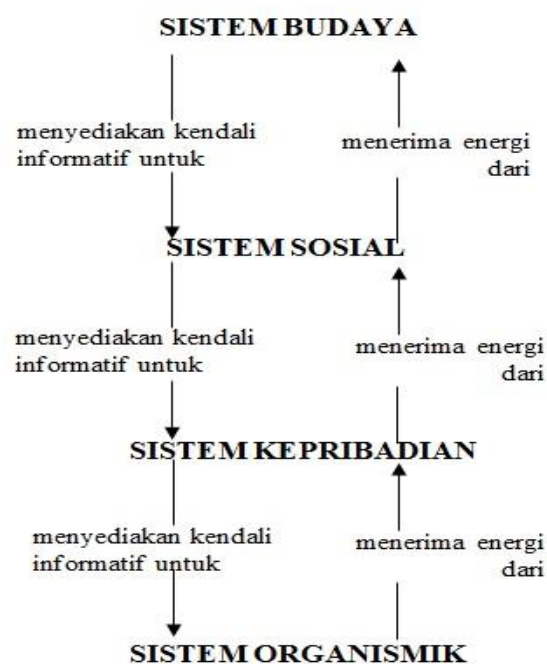
Parsons membahas dua cara sistem kultural dalam melaksanakan fungsi ini. *Pertama*, banyak komponen budaya seperti bahasa, berfungsi sebagai sumber bagi interaksi. Tanpa adanya sumber daya simbolik bersama, seperti bahasa, interaksi dalam sistem sosial tidak bisa terjadi. Dalam pengertian ini, budaya merupakan suatu “fasilitas”. *Kedua*, dengan mengikuti penekanan yang diberikan Durkheim pada nurani kolektif (*collective conscience*) dan analisis Max Weber tentang dampak ide–ide terhadap “aksi sosial”, Parsons memvisualisasikan sistem lambang tertentu yang berfungsi membatasi dan membentuk jalannya interaksi: Keterbatasan seperti itu terjadi paling tidak dalam dua cara: nilai, keyakinan, dan komponen simbolik lain: (a) memberi kepada aktor asumsi bersama yang dia gunakan untuk menentukan situasi dan (b) memberi perintah kepada aktor mengenai cara bertindak dan berinteraksi (Ritzer, 2017).

Paham fungsionalisme awal Parsons mengikuti pembedaan yang dilakukan Malinowski dan Radcliffe–Brown antara struktur sosial (Sistem sosial) dan sistem simbol (sistem budaya), dan kemudian memperkenalkan sistem tindakan ketiga, yakni sistem kepribadian. Sistem–sistem tersebut, dan dengan begitu dia menganalisis mekanisme yang mengintegrasikan tiga

tataran sistem yang berbeda itu. Funkisionalisme Parsons yang belakangan mempertahankan masalah ini, namun menempatkan syarat pada tempat yang lebih penting dan lingkup skemanya diperluas.

Parsons mengembangkan apa yang dia istilahkan “hierarki sibermetik Pengendali” yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan–hubungan yang terjadi di antara sub-sub-sistem pada sistem tindakan secara keseluruhan

Gambar 2.2
Sistem Hierarki Sibermetik Pengendali



Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa gagasan dasarnya adalah sistem yang lebih tinggi tingkatan informasinya, seperti sistem kultural karena merupakan sistem lambang yang didasari oleh sistem nilai dan berfungsi sebagai sistem norma yang menyediakan regulasi dan kendali bagi sistem yang lebih rendah tingkatan informasinya, tetapi lebih tinggi energinya. Karena itu, lambang sebagai sistem norma dalam sistem kultural itu mengarahkan, membatasi, dan mengatur interaksi yang ada dalam sistem sosial; sedang sistem sosial memberi pengaturan terhadap sistem kepribadian; dan sistem kepribadian memberi pengaturan pada sistem organismik. Begitu pun sebaliknya, sistem organismik memberi energi pada

sistem kepribadian; sistem kepribadian memberi energi kepada sistem sosial; dan sistem sosial memberi energi kepada sistem budaya.

Ada kecenderungan bahwa sistem yang besar energinya akan memberikan kondisi dan sumber daya energi bagi sistem yang lebih tinggi dalam hal informasi. Sistem kepribadian tidak dapat eksis tanpa adanya energi dari organisme biologik (manusia); sistem sosial tidak bisa ada tanpa adanya dorongan motif dari sistem kepribadian yang memainkan peran; dan komponen nilai, norma, pengetahuan, teknologi, kepercayaan/keyakinan, bahasa dan atau komponen simbolik lain dari sistem kultural tidak dapat terwujud tanpa adanya interaksi dalam sistem sosial yang menggiring ke arah penciptaan sistem nilai, norma, dan lambang–lambang.

Skema ini, menurut Parsons, memungkinkan lahirnya pemahaman lebih besar terhadap dinamika dunia sosial. Jika terjadi ketidakseimbangan energi dan informasi, maka bisa diprediksikan konsekuensi–konsekuensi tertentu. Misalnya, jika kendala informasi dari sistem kultural tidak memadai–suatu pernyataan yang oleh Durkheim diistilahkan sebagai “anomie” (sikap dan tindakan masa bodoh), maka interaksi yang lahir dalam sistem sosial akan terganggu. Atau jika sistem kepribadian tidak bersedia menyimpan energi yang terkandung untuk penguatan dalam peran sistem sosial, lahirlah situasi alienasi (pengunduran diri/pengasingan diri) dan interaksi akan terganggu. Konsekuensi serupa bisa saja mengganggu karena timbul ketidakseimbangan energi atau informasi antara sistem–sistem yang lain. Misalnya, super-ego yang kuat yang terdapat pada sistem kepribadian bisa menciptakan kesalahan dan kecemasan (terlalu banyak informasi) yang pada gilirannya bisa menggiring ke arah patologi organik, seperti borok dan tekanan darah tinggi. Begitu pula asupan kalori yang tidak memadai atau gangguan-gangguan organik bisa menyebabkan timbulnya gangguan pada sistem kepribadian.

Selain itu, gangguan di antara dua sistem tindakan apapun mengguncang hierarki yang ada. Kurangnya kejelasan atas nilai-nilai yang mendasari sistem kultural, maka akan menghasilkan interaksi yang diwarnai konflik dalam sistem sosial; kemudian, konflik akan memobilisasi sistem

kepribadian, sehingga menciptakan ketegangan dan kecemasan yang memiliki konsekuensi psikologi yang jelas bagi sistem organisme biologik (manusia). Sebaliknya, kalori yang tidak mencukupi dalam sistem organisme biologik, bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian yang pada gilirannya memiliki konsekuensi bagi interaksi dalam sistem sosial yang dapat mempengaruhi nilai dan keyakinan sistem kultural.

Fase Fungsionalisme Syarat. Pendekatan fungsionalisme Parsons berkembang pesat sesudah diterbitkannya buku *The Social System and Toward a General Theory of Action* pada tahun 1951. Perkembangannya yang paling penting meliputi perluasan empat prasyarat sistem yang harus dipenuhi oleh semua sistem tindakan itu—apakah kultural, sosial, kepribadian dan organismik (yang ditambahkan pada ketiga sistem sebelumnya)—jika sistem tersebut ingin tetap bertahan hidup.

Syarat-syarat tersebut, yang sesungguhnya sama dengan empat “kebutuhan yang diderivasikan” dari struktur sosial Malinowski, bisa diikhtisarkan sebagai berikut:

Adaptasi (Adaptation) : Semua sistem sosial harus mencari sumber daya dari lingkungannya, mengubahnya ke dalam fasilitas yang bisa digunakan, dan kemudian mendistribusikannya ke bagian lain sistem tersebut. Inilah syarat bagi terjadinya adaptasi.

Pencapaian Tujuan (Goal Attainment) : Semua sistem tindakan harus menetapkan tujuan, memberikan prioritas dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Inilah masalah pencapaian tujuan.

Integrasi (Integration) : Semua sistem tindakan harus mempertahankan interelasi koheren di antara bagian-bagian konstituennya, dan menghambat kecenderungan bagi abnormalitas dalam relasi di antara bagian-bagian. Inilah masalah integrasi.

Latensi (*Latency*) : Semua sistem tindakan harus: (a) menghasilkan satuan–satuan penggunaan yang bisa cocok dengan sistemnya (masalah “mempertahankan pola”) dan (b) mengurangi ketegangan dalam unit sistem itu (“pengelolaan ketegangan”). Masalah–masalah gabungan itu diistilahkan dengan nama latensi.

Elaborasi syarat–syarat tersebut (disingkat AGIL [*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*]) hanya memperlihatkan perluasan ide–ide yang sudah jelas sejak 1937 dalam karya Malinowski. Namun, Parsons menggunakan konsep syarat untuk menciptakan suatu skema fungsional yang luas. Untuk sistem tindakan manapun, sub-struktur sistem tindakan bisa dianalisis berdasarkan pada empat syarat pemenuhannya.

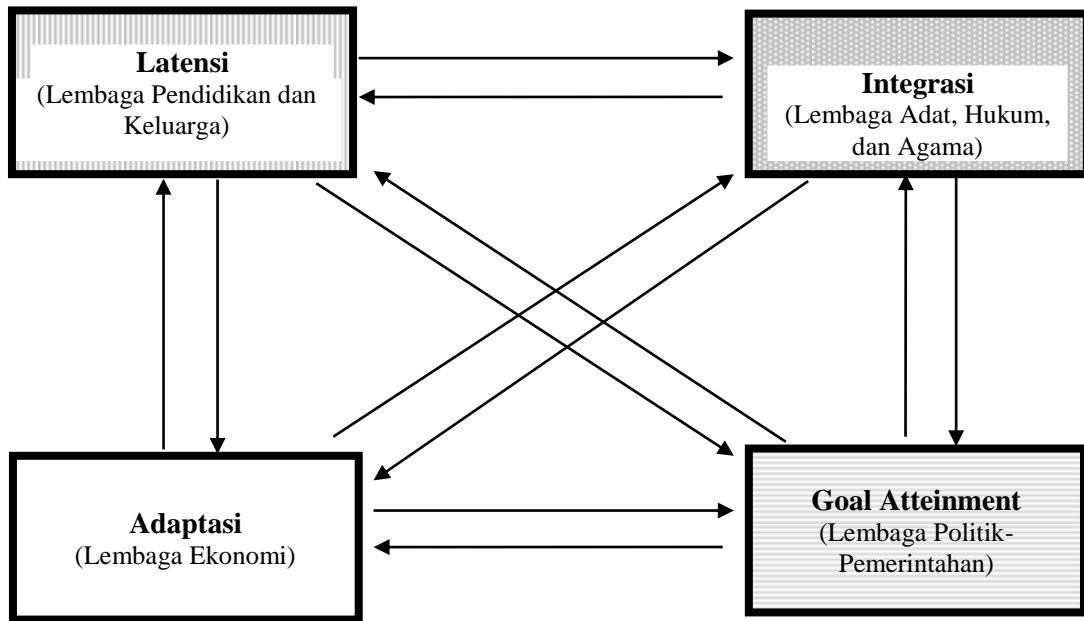
Pada tataran kemasyarakatan, misalnya, lembaga–lembaga yang dominan pertama–tama akan dikategorikan berdasarkan keterlibatan terbesar mereka dalam pertemuan. Analisis seperti itu tentu saja sangat mirip dengan analisis “lembaga” yang dikemukakan Malinowski dalam hubungannya dengan “kebutuhan yang diderivasikan”.

Namun, Parsons melangkah lebih jauh dibandingkan Malinowski. Dia menggunakan diagram untuk memetakan sektor fungsional sub-struktur dalam suatu tindakan dan untuk melacak interelasi di antara dan dalam struktur berbagai sektor. Gambar 2.3 mengetengahkan sebuah diagram bagaimana Parsons mungkin pertama–tama mengkategorisasikan beberapa lembaga “sistem sosial” kemasyarakatan.

Pada tataran paling analitis, Parsons menanyakan bagaimana sektor–sektor yang terlibat dalam pemenuhan salah satu dari empat pra-syarat itu saling terkait. Di sini, Parsons mencoba menggambarkan cara sub-sub sistem berinteraksi dalam suatu sistem sosial yang lebih inklusif.

Gambar 2.3

Fungsi AGIL Dalam Lembaga dan Sistem Sosial Kemasyarakatan



Sumber: Parsons dan Plat (1972 :12) dalam Poloma (1979 : 182).

Tabel diatas menggambarkan aplikasi atas apa yang dikenal sebagai Sesungguhnya, struktur sosial apapun, seperti lembaga rehabilitasi sosial kemasyarakatan, juga perlu memenuhi ke empat prasyarat fungsional. Oleh sebab itu, dalam suatu wadah rehabilitasi sosial, kita bisa berharap menemukan struktur organisasi lembaga yang memiliki ciri khas tersendiri, yang implementasinya secara khusus terlibat dalam adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi.

Skema pra-syarat fungsional Parsons memperlihatkan kegunaan dalam mengalokasikan fungsi suatu sub sistem, menganalisis hubungannya dengan sub-sub-sistem yang ada dalam sektor-sektor fungsional lain maupun memperlihatkan pertukaran A, G, I, L diantara bagian-bagian konstituennya. Menurut pandangan ini, teori sosiologis menjadi suatu operasi pemetaan dan taksonomi yang luas tempat pertama-tama diklasifikasikannya fungsi-fungsi struktur dan kemudian dilacaknya interaksi-interaksi yang terjadi di antara bagian-bagian yang secara fungsional berbeda.

Pada perkembangan lebih lanjut, Parsons kemudian memvisualisasikan bahwa Sistem Sosial, maupun Sistem Kultural, Sistem Kepribadian (psikologis) dan Sistem Organismik dapat dianalisis dengan melihat hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya secara cholistik. Sistem organismik (sebagai sistem yang memberi energi kepada manusia) memecahkan masalah–masalah adaptif; sistem kepribadian (sebagai pembuat keputusan) berhubungan dengan masalah pencapaian tujuan; sistem sosial (sebagai seperangkat hubungan interaksi di antara aktor) memenuhi masalah integratif, dan sistem kultural (sebagai sistem lambang) menangani masalah latensi. Seperti halnya dengan analisis lain yang menggunakan skema A, G, I, L. Parsons kemudian mencoba mengeksplorasi hubungan di antara ke empat sistem.

D. Teori Strukturasi

Berbicara tentang fungsi dan sistem sosial tidak bisa dilepaskan dari mazhab strukturalisme. Sedangkan teori strukturasi dari Anthony Giddens yang lebih menekankan pada upaya untuk menganalisa struktur masyarakat dengan cukup mendalam, terutama menyangkut karakter aktif dan reflektif dari manusia, dianggap paling cocok untuk penelitian ini. Perilaku manusia bukan saja hasil dari kekuatan eksternal yang mengontrol tetapi juga lahir dari pemahaman para pelaku tindakan (Giddens, 2010: xi).

Paling sedikit, fokus Teori strukturasi Giddens pada tiga topik utama; tindakan manusia (*human action*), manusia (*the acting self*), dan interaksi yang dikonseptualisasikan dan dihubungkan pada institusi. Sederhananya lagi, strukturasi menjadikan tema agensi dan institusi sosial sebagai topik utamanya (Giddnes, 2010: xiii). Giddens, dalam memahami struktur dibanding dengan para fungsionalis lain, tidak lantas menghilangkan unsur utama teori strukturalisme pada umumnya. Giddens tetap menekankan agensi dan struktur sebagai unsur utama teorinya. Namun, dapat dikatakan bahwa strukturasi Giddens berdasar pada premis bahwa dualisme (subjek dan objek) disusun sebagai dualitas struktur. Hal ini dimaksudkan bahwa

agen sosial dan struktur sosial sama-sama bekerja dan bersenyawa (Giddens, 2010: 22, 25).

Agen sebagai subjek di dalam 'kurungan' sedang struktur jauh lebih dinamis dan aktif. Agen adalah manusia yang selalu berkarya dan berkreasi. Tidak heran bila Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu tentang motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif (Giddens, 2010: 64). Sebab, terbentuknya kehidupan sehari-hari berakar dari kesadaran maupun ketidaksadaran manusia dalam bertindak. Setiap manusia memiliki alasan dan argumentasi di balik setiap tindakan mereka. Inilah yang hendak dicari oleh Giddens, dan karenanya pendekatan psikologi menjadi dibutuhkan.

Konsep strukturasi dalam teori sosiologi Anthony Giddens cukup populer dalam kajian sosiologi kontemporer. Namun sebagai suatu teori, terkesan agak sulit dipahami dan seolah-olah abstrak. Tetapi, ketika dipahami dan dielaborasi secara lebih luas konsep strukturasi, sebenarnya cukup menarik dan dapat dijadikan alat analisis yang tajam terutama mengenai relasi antara agen (aktor) dan struktur (sistem) dalam kehidupan masyarakat sebagai fakta sosial yang objektif. Inti teori strukturasi terletak pada tiga konsep utama yaitu tentang "struktur", "sistem", dan "dualitas struktur" (Giddens, 2010: 25), lebih khusus lagi dalam hubungannya antara agen (pelaku, aktor) dan struktur. Menurut Giddens, seperti dikutip Ritzer dan Goodman (2008: 568), bahwa "Setiap penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan antara tindakan (seringkali digunakan secara sinonim dengan *agensis*) dengan struktur. Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada "praktik sosial yang tengah berlangsung" sebagaimana dinyatakannya, bahwa "ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu".

Strukturasi memandang pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada "suatu cara dimana struktur sosial (*social structure*) diproduksi, direproduksi, dan

diubah di dalam dan melalui praktik-praktik sosial". Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas struktur, dimana struktur-struktur diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial. Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur (*agency and structure*) dalam sosiologi.

Menurut teori strukturasi, domain dasar ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi dalam ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembangbiak sendiri, saling terkait satu sama lain. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu (Giddens, 2010).

E. Teori Sosialisasi

Perilaku sosial dipahami sebagai kegiatan mempersepsikan, berpikir, disengaja atau rasional yang merupakan ekspresi diri seseorang dan melibatkan apa yang diharapkan dari tindakan yang sudah dilakukannya. Yang membedakan perilaku sosial dengan perilaku non-sosial adalah apa yang diperhitungkan dalam tindakan atau praktik seseorang yang dalam praktik terdapat norma, peraturan dan adat istiadat (Rummel, 1976:1-2).

Sedangkan interaksi sosial adalah tindakan atau praktik dari dua orang atau lebih yang saling berorientasi masing-masing, yaitu setiap perilaku yang mencoba untuk mempengaruhi atau memperhitungkan pengalaman subjektif masing-masing antara orang yang berinteraksi

(Rummel, 1976:1-2).

Ini berarti bahwa para pihak dalam interaksi sosial harus menyadari satu sama lain yang tidak berarti bahwa orang berinteraksi harus berada di hadapan atau langsung bersikap terhadap satu sama lain. Interaksi sosial tidak didefinisikan hanya dengan hubungan fisik atau perilaku, akan tetapi orientasi subjektif terhadap satu sama lain. Selain itu, interaksi sosial memerlukan orientasi bersama dan tidak akan terjadi interaksi sosial jika yang lain tidak menyadari. Dalam berinteraksi dan berperilaku sosial, individu masing-masing membawa nilai dan norma yang dipelajari dalam lingkungannya yang kita kenal sebagai proses sosialisasi.

Menurut Vembriarto (dalam Khairudin 2008,: 63), menyebutkan Sosialisasi adalah sebuah proses belajar yaitu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standard tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup. Semua sifat kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Menurut Jaeger (dalam Sunarti Kamanto 2000,: 33), membagi dua pola sosialisasi antara lain; Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Dalam pola sosialisasi represif, juga menekankan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah; penekanan titik berat sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*.

Sedangkan dalam Pola Sosialisasi yang partisipatoris (*participatory socialization*), merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam

proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

Dalam sosiologi, sosialisasi sangat berpengaruh dalam kehidupan anak dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, anak dibentuk menjadi pribadi yang seutuhnya sesuai dengan nilai dan norma dimana anak tinggal. Konteks dari sosialisasi dapat terjadi dalam aspek biologis, psikologis dan konteks sosial. Dalam kajian ini, konteks sosial adalah kajian utama yang digunakan dalam konseptualisasi penelitian ini. Konteks sosial sangat penting dalam perkembangan anak, khususnya orang tua dan keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan awal kehidupan mereka. Selain itu, terdapat beberapa media yang dalam konteks proses sosialisasi disebut sebagai agen sosialisasi yang tercakup dalam keluarga, sekolah, kelompok bermain, media massa dan komunitas dimana anak tinggal (Berns, 2007:42).

Dari sekian banyak agen yang berpengaruh dalam proses sosialisasi, keluarga sebagai tempat pertama dimana individu berada dan tinggal, memiliki peran dan fungsi yang strategis dan sangat penting dalam proses sosialisasi terkait dengan pola pengasuhan yang diberikan orang tua.

Disinilah tahapan sosialisasi menurut Mead (Ritzer, 2011: 365) terangkai dalam sebuah proses tahapan *play stage*. Selanjutnya, dalam tahapan berikutnya yang dilalui anak adalah dimana individu belajar kebudayaan, nilai dan norma, proses perkembangan diri individu dan proses menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Untuk membentuk diri anak dalam proses sosialisasi, individu membutuhkan proses interaksi dengan kebudayaan dan lingkungan sosial mereka. Diri individu berkembang sebagai hasil dari interaksi dengan keluarga, lingkungan yang terdiri teman bermain atau teman sebaya dan juga media lain yang berpengaruh dalam proses sosialisasi (Lindsey dan Beach, 2004:2).

Setelah anak mengenal dunia luar secara luas, maka proses perkembangan dalam diri anak akan terus menerus berkembang seiring luasnya komunikasi anak dengan lingkungan luar sehingga nantinya akan

memunculkan dinamika kehidupan sosial mereka.

Menurut tahapannya sosialisasi oleh Berger dan Luckman dibedakan (Soe'oad dalam Ihromi, 1999: 32), menjadi dua tahap yakni:

1. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum, dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.
2. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Ada juga sosialisasi yang digunakan oleh orang tua dalam menanamkan disiplin pada anak-anaknya yang dikembangkan Elizabeth B. Hurlock, Pola Sosialisasi (Soe'oad dalam Ihromi, 1999 : 51) dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. Pola Sosialisasi Otoriter, dalam pola sosialisasi ini orang tua memiliki kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka melaksanakan aturan tersebut. Tingkah laku anak dikekang secara kaku dan tidak ada kebebasan berbuat kecuali, perbuatan yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil keputusan sendiri atas perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana harus berbuat. Dengan demikian, anak tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya.
2. Pola Sosialisasi Demokratis, Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan dan alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti

mengapa ia diminta untuk mematuhi suatu aturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan ketimbang aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang harus ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia lakukan orang tua memberikan pujian. Orang tua yang demokratis adalah orang tua yang berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam diri anak sendiri.

Pola Sosialisasi Permisif, Orang tua bersikap membiarkan atau mengizinkan setiap tingkah laku anak, dan tidak pernah memberikan hukuman kepada anak. Pola ini, ditandai oleh sikap orang tua yang membiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya. Pada saat terjadi hal, yang berlebihan barulah orang tua bertindak. Pada pola ini pengawasan menjadi sangat longgar.

F. Konsep Nilai

Nilai pada dasarnya bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diraba, difoto, difilmkan, dan tak dapat di lihat dengan mata telanjang. Tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan, sesuatu yang mestinya dilakukan. Penjelmaan atau wujud konkrit dari sebuah nilai ada pada norma (aturan-aturan). Karena itu, sebuah norma atau aturan merupakan konkritisasi dari sebuah nilai yang dianggap berharga bagi kehidupan manusia. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komponen pembentuk nilai-nilai dalam realitas objektif sesungguhnya bersumber dari “Adat”, “Hukum”, dan “Agama”.

Nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia, seperti halnya tentang apa yang dianggap baik atau buruk, layak atau tidak layak, benar atau salah, penting atau tidak penting, indah atau tidak indah, dan tumbuh secara organik dalam realitas empirik.

Di dalam setiap kehidupan sosial pasti terdapat aturan-aturan pokok untuk mengatur perilaku anggota-anggota masyarakat yang terdapat

dilingkungan sosial tersebut. Manusia merupakan sistem yang senyatanya ada, artinya manusia adalah kumpulan makhluk yang unik, yang di dalam kehidupan terdapat seperangkat pola hubungan tertata yang tidak disamai oleh makhluk lain. Manusia itu ada, tingkah laku manusia itu ada. Manusia ada dengan tingkah laku yang dipengaruhi oleh dorongan naluri yang bebas. Akan tetapi, dorongan naluri yang bebas tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi sebagai batas-batas hubungan antarmanusia dalam mencegah benturan-benturan antar manusia, sebab selain kehendak bebas tersebut, manusia juga memiliki dorongan untuk hidup tenang, tertib, nyaman, aman, dan sebagainya.

Perasaan inilah yang mendorong manusia untuk membuat pola-pola di dalam kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam kelompok tersebut. Pola-pola tersebut menjadi konsep abstrak yang berada dalam angan-angan dan pikirannya yang berisi sesuatu yang seharusnya ada. Sesuatu yang harus ada menjadi patokan-patokan atau sandaran dalam tata cara pergaulan antar-umat manusia, antar suku bangsa, antar bangsa hingga terbentuk masyarakat dunia yang memiliki budaya.

Pola-pola tersebut meliputi: (1) segala sesuatu yang menjadi dasar-dasar tujuan kehidupan sosial yang ideal atas dasar pola-pola yang terbentuk di dalam realitas sosial tersebut. Sesuatu yang menjadi dasar tujuan kehidupan sosial tersebut merupakan awal lahirnya sistem nilai, yaitu sesuatu yang menjadi patokan di dalam kehidupan sosial yang mengandung kebaikan, kemaslahatan. Manfaat, kepatutan, yang biasa menjadi tujuan kehidupan bersama. (2) sesuatu yang menjadi pola-pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial, yang di dalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya yang dinamakan sistem norma. Nilai dan norma merupakan konstruksi (susunan) imajinasi, artinya konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran-pikiran, dan banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental.

Menurut Horton dan Hunt, nilai adalah gagasan tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah

sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat diterima) jika harmonisasi atau selaras dengan nilai-nilai yang di sepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan (dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011: hal 119).

Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka jika terdapat orang tidak beribadah tentu akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Demikian pula seseorang yang dengan ikhlas menyumbang sebagian harta bendanya untuk kepentingan ibadah dan rajin mengamalkan ibadah, maka ia akan dinilai sebagai orang yang terhormat dan menjadi teladan bagi masyarakatnya.

Pada kenyataannya seseorang dapat mengembangkan perasaan dirinya yang mungkin berbeda dengan perasaan masyarakat yang ada di sekelilingnya, atau kadang-kadang juga sama atau seiring dengan perasaan dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Gejala ini bisa melahirkan adanya nilai individual, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh seseorang secara individual yang selanjutnya bisa saja nilai-nilai tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang demikian ini dinamakan nilai individual, sedangkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disebut nilai sosial. Dengan demikian nilai sosial adalah nilai-nilai kolektif yang dianut oleh masyarakat kebanyakan. Nilai-nilai sosial merupakan hal yang dituju oleh kehidupan sosial itu sendiri, sedangkan metode pencapaian nilai-nilai (tujuan) sosial tersebut adalah norma, sehingga fungsi norma sosial adalah sebagai petunjuk atau arah tentang cara untuk mencapai nilai (tujuan) tersebut.

Pada dasarnya BNN diharapkan dapat berfungsi menciptakan nilai, dan nilai yang diproduksi juga bersifat tidak independen. Karena itu, nilai yang dirumuskan oleh BNN mempertimbangkan latar belakang dari klien yang beragam. Layanan yang diberikan BNN juga cenderung berdasarkan pada tingkat kebutuhan klien. Begitu pun sebaliknya, perilaku sosial klien juga tidak bisa di lihat sebagai perkara yang independen. Setiap individu klien memiliki latar belakang yang berbeda, masalah penggunaan narkoba juga berbeda, sehingga perlakuan yang dibutuhkan juga berbeda. Tiga komponen

ini (nilai, klien, dan Balai Rehabilitasi BNN) adalah organ-organ utama yang terus berinteraksi tanpa henti dalam struktur sosial yang stabil.

Struktur sosial dikonstruksi dengan harapan masing-masing organ dapat bersifat fungsional kepada yang lain. Keberadaan balai rehabilitasi sejak awal didirikan untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna/pecandu narkoba. Keberadaan klien yang “sakit” dan berada di bawah pengaruh obat keras/terlarang pun membutuhkan balai rehabilitasi untuk memulihkan kondisi kesehatan dan mental mereka. Menurut Giddens, bahwa nilai adalah kerangka konseptual yang berguna sebagai analisa tindakan sosial sekaligus unit penghubung organ-organ sosial lainnya, seperti antara Balai Rehabilitasi dengan klien-klien.

1. Definisi Nilai

Nilai adalah perkara yang dianggap penting untuk dilakukan. Secara filosofis, Christine Tappolet dan Mauro Rossi mendefinisikan nilai sebagai perkara yang dianggap positif untuk dilakukan. Jika sebagian orang melihat pengetahuan dan keadilan sebagai nilai, berarti pengetahuan dan keadilan merupakan perkara-perkara yang positif untuk dipromosikan (Tobias Brosch and David Sander(ed.), 2016:4-5).

Dalam *Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology, and Sociology*, Christine Tappolet dan Mauro Rossi (Tobias Brosch and David Sander (ed.), 2016: 4-5) melihat definisi nilai secara filosofis sebagai perkara yang dianggap positif untuk dilakukan. Jika sebagian orang melihat pengetahuan dan keadilan sebagai nilai, maka hal itu berarti pengetahuan dan keadilan merupakan perkara-perkara yang positif untuk dipromosikan. Pengetahuan dan keadilan dianggap bernilai positif lantaran manusia melihatnya sebagai hal yang bersifat positif.

Beberapa kasus-kasus sosial lainnya, seperti persoalan imigran, nilai-nilai kesetaraan, toleransi dan kejujuran (*fairness, tolerance, and equality*) merupakan hal-hal penting sekaligus merupakan solusi berjangka panjang untuk mengatasi persoalan imigran (Tobias Brosch and David Sander (ed.),

2016: 244). Dengan begitu, nilai dapat diartikan sebagai perkara yang baik dan positif, dengan jenis yang beragam, sesuai konteks persoalan.

Pengertian nilai dan norma serta fungsinya, pada akhirnya, dapat saja dimaknai secara tidak tunggal dan bisa berbeda-beda. Dalam konteks pelayanan rehabilitasi klien pecandu narkoba, Balai Baddoka sebagai unit pelaksana teknis dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Pusat, juga memiliki pengertian tersendiri tentang definisi dan makna nilai dan norma. Bagi BNN, ada seperangkat kriteria tertentu yang wajib dijalankan dan penting ditanamkan ke dalam kesadaran klien. Proses penanaman nilai dan norma ini menjadi prosedur formal bagi pemulihan klien itu sendiri.

Secara sosiologis, nilai adalah perkara yang penting untuk dijadikan solusi dari sebuah masalah sosial. Misalnya, nilai-nilai seperti kesetaraan, toleransi dan kejujuran (*fairness, tolerance, and equality*) merupakan nilai-nilai penting sekaligus solusi berjangka panjang yang diyakini mampu mengatasi persoalan imigran (Tobias Brosch and David Sander (ed.), 2016: 244). Perbedaan definisi tentang nilai tidak menghalangi adanya kesepakatan substansial. Nilai tetap dipahami sebagai esensi yang melekat dan sangat berguna bagi kehidupan manusia (Thoha, 1996: 61), mengandung kebaikan dan penting sekali bagi kemanusiaan (Purwadaminta, 1999: 677).

Jika dilihat dari sifatnya, nilai merupakan perkara abstrak, ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta. Nilai tidak saja menyangkut perkara baik dan buruk, tetapi juga menuntut penghayatan sosial tentang hal-hal yang dikehendaki, disenangi, maupun yang tidak dikehendaki dan tidak disenangi (Isna, 2000: 98). Bagi Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah bagian dari tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem keyakinan. Nilai ini menjadi standar acuan atau rujukan tentang perkara yang harus dilakukan dan harus dihindari (Kartawisastra, 1980: 1).

Gambaran yang lebih sistematis tentang nilai datang dari Louis D. Kattsof bahwa nilai memiliki tiga pengertian. *Pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Namun, manusia dapat secara langsung memahami dan mengalami nilai yang berupa kualitas tersebut dan mendapatinya di dalam objek-objek. Dari sini, tolak ukur nilai

dapat berupa subjektifitas dan sekaligus objektifitas. *Kedua*, nilai adalah objek kepentingan, baik yang berada dalam pikiran manusia maupun realitas objektif dari objek tersebut. *Ketiga*, nilai merupakan pemberian atau produk yang diciptakan oleh situasi kehidupan sehari-hari manusia (Ma'arif, 2007: 114).

Chabib Thoha melihat fungsi relasional sebuah nilai, yang menghubungkan antara objek dan subjek. Bagi Thoha, nilai itu memang melekat pada objek tetapi sekaligus berhubungan atau berelasi dengan subjek yang menciptakan nilai dan memberikan nilai pada objek. Sehingga nilai dijadikan satu standar ukuran tentang apa yang berguna dan tidak berguna, sebagai acuan bagi tingkah laku manusia (Thoha, 1996: 61).

Pengertian nilai dan fungsi nilai, pada akhirnya, dapat berbeda-beda sesuai konteks kebutuhan. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memiliki satu buku saku sebagai standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Di dalam buku saku ini terdapat standar nilai yang dianggap positif dan harus dilakukan demi kebaikan klien rehabilitasi. Setidaknya ada dua standar nilai, yaitu medis dan sosial. Nilai medis maupun nilai sosial ini harus dipegang teguh, dipahami, dijalankan atau diamalkan, ditaati, dan dipertahankan dalam praktik kehidupan sehari-hari para klien. Nilai-nilai yang dianggap positif dan direkomendasikan oleh Balai Rehabilitasi menjadi standar perilaku bagi para klien. Tetapi, pada saat bersamaan, Balai Rehabilitasi sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Narkotika Nasional juga harus menaati standar pelayanan medis supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia, Hukum, maupun agar tidak terjadi mal-praktek. Nilai mengikut klien maupun Balai Rehabilitasi itu sendiri.

2. Jenis Nilai

Mengklasifikasikan nilai berdasarkan jenisnya tidaklah mudah. Rumayulis (2012: 250) melihat pengklasifikasian nilai dari segi komponen utama dan dari sumbernya. Agama menjadi salah satu komponen pembentuk nilai. Semua agama memiliki acuan nilai yang sama, yaitu kitab suci mereka, dimana sistem nilai yang diyakini berbeda satu sama lain. Rumayulis

mencontohkan, di dalam Islam, ada tiga bagian nilai: nilai keimanan, nilai ritual ibadah, dan nilai akhlak.

Jika dilihat dari sumber nilai, Rumayulis melihat ada dua jenis nilai: pertama nilai yang bersumber dari Tuhan dan bersifat ilahiah dan kedua nilai yang bersumber dari perjalanan sejarah peradaban umat manusia itu sendiri dan bersifat insaniah. Nilai ilahiah maupun insaniah, bagi Rumayulis, sama-sama membentuk norma atau kaidah kehidupan yang melembaga dan diikuti oleh umat pendukungnya (Rumayulis, 2012: 250). Mengingat di luar religi/agama, nilai juga lahir dari perjalanan sejarah peradaban manusia, maka sumber nilai pun tidak saja lahir dari langit. Ideologi, adat, tradisi, budaya, kearifan lokal, semua dapat menjadi sumber nilai (Uus dan Iwan, 2007: 71-78).

Jika dibedakan berdasarkan kandungannya, menurut Berbecher, nilai dapat dikelompokkan menjadi dua jenis; pertama, nilai instrumental, dan kedua, nilai intrinsik. Nilai instrumental ini adalah nilai yang dianggap positif lantaran berguna untuk sesuatu yang lain. Tanpa adanya nilai guna terhadap sesuatu yang lain tersebut maka nilai tidak dianggap sebagai yang positif. Sebaliknya, nilai intrinsik adalah nilai yang dianggap positif sekalipun tidak berguna pada sesuatu yang lain, di luar dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri sudah terkandung nilai positif (Syam, 1984: 132).

Jika dilihat dari segi perkembangan historis-kronologisnya, nilai dapat tumbuh dan berkembang. Dalam rentang waktu sejarah, nilai berubah dan menjadi semakin lebih matang. Auguste Comte membagi nilai menjadi tiga kelompok: pertama, nilai teologis, kedua, nilai metafisik, dan ketiga, nilai positif. Tahapan perkembangan dari teologi ke metafisis dan berakhir di positif ini mendorong Comte mengatakan bahwa nilai teologis adalah nilai tahap dasar yang belum matang. Nilai metafisik sedikit lebih matang dibanding nilai teologis. Puncak kematangan nilai adalah saat tiba dan berada pada level positif (Syam, 1984: 132).

Menurut Notonegoro (dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011: hal 124-125) nilai bisa dibedakan menjadi tiga macam yakni:

- a. Nilai material, yaitu meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur dengan alat ukur tertentu seperti uang, atau benda-benda berharga lainnya.
- b. Nilai vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Suatu benda akan dinilai daya guna yang dimiliki benda tersebut. Misalnya pasir akan bernilai karena digunakan untuk membuat konstruksi bangunan. Tetapi ketika pasir berada di gurun pasir tertentu tidak bernilai sebab di sana pasir tidak berguna.
- c. Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti:
 - 1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada rasio (akal manusia), misalnya sesuatu itu dianggap benar atau salah karena akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian.
 - 2) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur perasaan, misalnya daya tarik suatu benda, sehingga nilai daya tarik atau pesona yang melekat pada benda tersebut dihargai.
 - 3) Nilai moral, yang bersumber pada unsur pada kehendak, terutama pada tingkah laku manusia antara penilaian perbuatan yang dianggap baik atau buruk, mulia atau hina menurut tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut.
 - 4) Nilai keagamaan, yang bersumber pada kitab suci (Wahyu Tuhan).

Berdasarkan pengalaman Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, nilai religi yang bersifat ilahiah maupun nilai sosial-medis yang bersifat insaniah sama-sama diakomodir. Pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai keyakinan ditekankan dengan kadar yang sama besarnya dibanding nilai-nilai medis dan sosial. Para klien Balai Rehabilitas juga mendapatkan layanan pendidikan nilai, yang dianggap berguna bagi program pemulihan mereka dari gangguan Napza maupun kerusakan mental.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga melihat bahwa praktek pelayanan klien tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Aturan HAM adalah nilai insaniah dan aturan menaati HAM juga nilai insaniah. Kedua nilai ini dipraktekkan, dan dengan mudah ditemukan, dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Nilai-nilai penunjang, seperti nilai kesenian dan keterampilan, nilai-nilai jurnalistik, atau bahkan rasa peduli pada lingkungan, juga bagian dari nilai insaniah. Selanjutnya, jika diklasifikasikan secara praktis, jenis-jenis nilai yang ditanamkan kepada klien selama proses rehabilitasi adalah sebagai berikut: *pertama* disiplin, *kedua* pengenalan diri, *ketiga* pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan *keempat*, penugasan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kelompok. Nilai-nilai ini disebut nilai praktis karena Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengharapkan semua klien dapat memahami, menerima, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

3. Manfaat Nilai

Nilai bermanfaat bagi manusia sebagai acuan atau pedoman tindakan. Sesuatu dianggap bernilai apabila penghayatan reflektif seseorang berhasil meraih makna nilai dan melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan dirinya. Karenanya, pencapaian setiap orang tentu berbeda dibanding orang lain dalam melihat manfaat nilai. Perbedaan satu orang dengan orang lain dalam melihat sesuatu sebagai perkara yang bernilai adalah perbedaan tingkat penghayatan. Namun, perbedaan tingkat penghayatan akan manfaat nilai tidak menghalangi relasi yang menghubungkan antara subjek nilai (manusia) dengan objek nilai (Isna, 2001: 98).

Hubungan yang erat antara subjek dan objek nilai ini melahirkan tindakan sosial yang berbasis nilai. Hubungan yang erat berbasis nilai ini dapat bersifat emosional ataupun intelektual, dapat pula berupa kombinasi dari keduanya. Seseorang bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sosial kadang didasari oleh nilai yang sangat emosional, dan kadang pula nilai yang bernuansa intelektual. Kombinasi antara emosi dan intelektualisme ini

melahirkan apa yang disebut norma dan prinsip. Norma dan prinsip ini menjadi bernilai apabila telah dijewantahkan ke dalam aksi sosial (Kaswardi, 1993: 25).

Alhasil, nilai tidak saja menjadi acuan dari tindakan manusia, tetapi juga menjadi sistem norma dan prinsip-prinsip keyakinan maupun intelektual. Manusia yang berpegang pada nilai, niscaya akan melahirkan tindakan yang bernilai, tentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam kasus klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dapat ditemukan adanya catatan harian para klien yang berbeda-beda. Dengan kata lain, nilai yang sama yang ditanamkan oleh Balai Rehabilitasi, lalu dipahami, diinternalisasi, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara berbeda-beda. Satu individu tidak sama pemaknaannya dengan individu lainnya.

4. Pelembagaan Nilai

Proses pelembagaan nilai diawali dari bagaimana kemampuan klien mengenal dan memahami serta menjalankan nilai tersebut. Seluruh komponen staf Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memformulasikan dan menanamkan nilai dan norma bagi klien. Setelah itu, melalui proses yang sangat panjang, dimana nilai yang telah dijalankan dalam interaksi sehari-hari, mulai ditaati oleh para klien hingga menunjukkan perilaku yang mempertahankan nilai tersebut. Dalam kondisi dimana nilai telah dipertahankan oleh para klien, maka berarti nilai itu telah melembaga, dalam arti bahwa nilai tersebut telah menjadi bagian dari sistem kepribadian dan sistem sosial para klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Penanaman nilai adalah kerja aktif dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka atau dalam Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi disebut sebagai intervensi. Intervensi adalah layanan yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi kepada klien. Aktifitas intervensi ini lahir disebabkan adanya bentuk-bentuk pergeseran, penyelewengan dan perubahan pada sistem nilai, baik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pergeseran sistem nilai ini adalah gangguan, ketegangan, konflik, dan ketidakseimbangan sosial.

Dorongan untuk kembali hidup wajar adalah bagian motivasi intervensi. Untuk itulah, diperlukan adanya strategi efektif dan efisien agar dapat mengembalikan kondisi kacau menjadi normal. Pada proses intervensi inilah berlangsung proses penanaman nilai (Muhadjir, 1993: 109). Penanaman nilai adalah praktek pendidikan itu sendiri. Bahkan, pendidikan karakter didefinisikan sebagai proses penanaman nilai (Koesoema, 2007: 193), nilai hidup manusia yang paling baik adalah budi pekerti yang luhur, yang dapat diambil dan digali dari realitas masyarakat itu sendiri (Suparno, 2002: 62).

Mohammad Noor Syam mengatakan bahwa pendidikan secara praktis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai, terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama. Semua aspek ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, yaitu membina kepribadian manusia yang ideal (Syam, 1984: 132).

Praktek penanaman nilai di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berlangsung untuk mengembalikan perilaku sosial para klien yang dianggap telah menyimpang dari kewajaran masyarakat umum. Mengacu kepada teori Robert K. Perkinson, Arthur E. Jongsma, Jr., dan Timothy J. Bruce (2014), Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mendefinisikan beberapa contoh perilaku menyimpang yang perlu dikembalikan lagi ke batas normal. Di antaranya, *adult-Child-of-an-Alcoholic Traits, Anger, Antisocial Behavior, Anxiety, hyperactivity disorder, bipolar, family conflict, implusivity*, dan banyak perilaku menyimpang lainnya.

G. Konsep Norma

Lebih spesifik dari nilai-nilai adalah norma sosial, baik yang bersifat formal dan tertulis maupun informal yang tak tertulis. Norma-norma ini akan menjabarkan nilai-nilai ini lebih terperinci ke dalam bentuk tata aturan atau tata kelakuan yang secara makro adalah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah konveksi, dan aturan tak tertulis lainnya.

Jika nilai-nilai yang abstrak, moralistik, statis itu ingin dijadikan motivasi perilaku manusia dan masyarakat, maka nilai-nilai inilah yang dinamakan norma. Norma-norma yang formal-tertulis maupun yang informal-tak tertulis, merupakan cermin dari nilai-nilai yang mencoba mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam situasi sosial tertentu.

Begitupun metode Pemulihan di Balai Rehabilitas BNN Baddoka tidak saja dengan pelebagaan nilai, melainkan juga melalui pelebagaan norma. Karenanya, membahas konsep norma secara teoritis menjadi penting untuk memberikan gambaran pengertian, jenis, manfaat dan praktik pelebagaannya dalam proses rehabilitasi para klien Balai Rehabilitasi Baddoka. Nilai dan norma merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain.

1. Definisi Norma

Cambridge Dictionary, kata norma berasal dari *norm* yang berarti *an accepted standards or a way of behaving or doing things that most people agree with*. Norma adalah standar-standar perilaku atau perbuatan yang kebanyakan orang setuju untuk dilakukan dan diperbuat (dictionary.cambridge.org, 2019). Dalam *Merriam Webster*, pengertian norma diartikan sebagai *a principle of right action biding upon the members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior*. Bahkan, *Merriam Webster* mengutip seorang filsuf, Robert K. Merton yang mengatakan bahwa *no society lacks norms governing conduct*. Tidak ada masyarakat yang mampu mengatur tindakan tanpa ada norma (merriam-webster.com, 2019).

Pengertian di atas, norma sebagai sebuah prinsip memiliki kekuatan aktif untuk mengatur sekelompok manusia dalam berbuat dan bertindak. Norma menjadi kekuatan kontrol, pengarah perilaku, bahkan mengatur tindakan-tindakan agar mengarah pada apa yang bisa diterima. Tanpa aturan-aturan ini, masyarakat tidak bisa terorganisir, tertata, dan menjurus pada kekacauan (*chaos*).

Pada hakikatnya nilai dan norma tidak akan terpisah dari kehidupan sosial masyarakat, adapun nilai formal terbentuk melalui mekanisme yang resmi. Nilai dan norma merupakan sesuatu yang sering kali disamakan, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Pembedaannya terletak pada orientasi, bahwa nilai lebih merupakan sikap dan perasaan yang dilibatkan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, benar salah, suka tidak suka, dan sebagainya terhadap objek tertentu baik secara material atau immaterial. Adapun norma orientasinya adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif (bersama) yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Adapun pemberlakuan atas norma ditujukan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatan (perilaku) yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, antara nilai dan norma selalu bergandengan bagai dua sisi mata uang. Adapun dari keduanya tidak lain adalah untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan bersama.

2. Jenis Norma

Norma dapat dibagi menjadi tiga macam; pertama anjuran (*prescription*), kedua larangan (*forbidden actions*), dan ketiga hipotesa (*hypothetical*). Dengan begitu, seseorang dapat mengklasifikasi apa saja perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang terdapat di dalam masyarakat. Setiap ada perintah selalu ada larangan. Perintah dan larangan ini secara alamiah sudah hidup di dalam kesadaran sehari-hari masyarakat. Namun, norma tidak terbatas pada perintah dan larangan melainkan juga bisa lahir dari hipotesa-hipotesa baru yang dinamis dan progressif, yang selalu diproduksi dan direproduksi oleh masyarakat itu sendiri, yang terakhir ini disebut norma hipotesis (Driver, 1992: 286-295).

Pembagian norma menjadi tiga macam di atas karena melihat norma dari segi karakteristiknya (*formal features*). Sementara norma juga bisa dilihat pembagiannya dari aspek konten atau isi. Melihat norma dari segi kontens

membuat kita harus fokus pada objek dari norma tersebut, yakni perilaku-perilaku manusia yang diatur berdasarkan aturan-aturan norma. Perilaku-perilaku manusia ini bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Perubahan situasi dan kondisi membuat seseorang berperilaku atau bertindak secara berbeda. Norma mengatur perubahan-perubahan perilaku tersebut. Seperti kasus seseorang memakai pakaian tebal yang menghangatkan tubuh pada saat musim hujan. Masyarakat sepakat untuk memakai pakaian tebal, atau pakaian anti panas ketika musim kemarau (Mikhail, 2007: 143-152, Greene, 2014:695-726).

Menurut Elly (2011) Dalam etika norma sosial manusia dibedakan menjadi norma khusus dan norma umum. Khusus sering disebut dengan norma teknis dan permainan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu atau kegiatan yang bersifat sementara dan terbatas. Norma umum berlaku bagi setiap warga masyarakat. Norma umum dapat dikelompokkan kedalam tiga norma, yakni norma sopan santun, hukum, dan moral. Norma sopan santun berlaku berdasarkan kebiasaan dan atau konvensi saja, sehingga prinsipnya bisa diubah. Norma hukum adalah norma yang pelaksanaannya dapat dituntut dan dipaksakan oleh yang berwenang dalam masyarakat, sehingga pelanggaran atas norma hukum dapat ditindak tegas oleh penguasa sah-norma-norma hukum biasanya berlaku berdasarkan undang-undang (Elly, 2011: hal 131).

Dengan demikian, mulainya norma hukum dan berakhirnya keberlakuannya dapat diketahui secara pasti. Lain halnya dengan keberlakuan norma moral tidak pernah dapat ditentukan secara pasti pada saat atau tanggal tertentu. Pelaksanaan norma moral belum tentu dapat dituntut dan pelanggarannya dapat ditindak. Norma moral selalu berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Norma moral berlaku di masyarakat diantaranya:

a. Norma Agama

Yaitu ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai wahyu dari Tuhan yang keberadaannya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Norma agama berisi perintah dan larangan atas

sesuatu perbuatan yang diperintah dan larangan atas suatu perbuatan yang diperintahkan disebut wajib, sedangkan dilarang disebut haram. Adapun sanksi bagi para pelanggar atas norma agama adalah sanksi kehidupan di alam baka, yang disebut siksaan neraka dan bagi yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala di surga.

b. Norma Kesopanan

Yaitu ketentuan-ketentuan hidup sumbernya adalah pola-pola perilaku sebagai hasil interaksi sosial di dalam kehidupan kelompok. Pola-pola atau ketentuan-ketentuan ini merupakan produk interaksi sosial, sehingga dari interaksi tersebut menghasilkan pola-pola perilaku antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

c. Norma Kesusilaan

Yaitu ketentuan-ketentuan kehidupan yang berasal dari hati nurani, yang produk dari norma susila ini adalah moral. Bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi norma ini dianggap tidak asusila atau amoral (tidak memiliki tata kesusilaan atau tidak memiliki moral).

d. Norma Hukum

Yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang berlaku dalam kehidupan sosial yang bersumber adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga formal kenegaraan. Tujuan dibuat ketentuan hukum formal tersebut selain untuk mencapai kehidupan sosial yang tertib, aman, dan damai juga mencapai tujuan dari cita-cita berdirinya negara tersebut. Untuk mencapai tujuan negara selain menciptakan kehidupan yang aman dari berbagai gangguan sosial, juga perlu menjaga stabilitas suatu negara agar proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang dicanangkan.

Masyarakat memiliki norma-norma yang berbeda, dalam soal pakaian misalnya. Perbedaan norma ini lahir dari perilaku alamiah manusia dalam rangka menyasati lingkungan dan kondisi dimana mereka tinggal. Ketika manusia memakai penutup wajah (seperti cadar) di wilayah berdebu, atau memakai penutup hidung (masker) di kota yang penuh asap pabrik, maka

pada saat itu norma masyarakat sudah terbentuk secara alamiah. Memakai cadar dan masker menjadi norma yang diterima oleh masyarakat. Inilah norma yang berangkat dari perilaku-perilaku manusia sebagai konteks dari normal itu sendiri.

Lebih luas lagi, pembagian norma dapat berangkat dari selain konten atau isi. Norma bisa pula berangkat atau berasal dari pemahaman manusia akan konteks. Bukan perilaku manusia yang menjadi fokus perhatian atau objek norma melainkan situasi-kondisi itu sendiri yang menjadi objek dari norma. Sehingga muncullah di sana apa yang disebut sebagai norma bahasa (*linguistic norm*), norma epistemologis (*epistemic norm*), norma estetika (*aesthetic norm*), norma hukum (*legal norm*), etiket (*etiquette*), moral (*moral*), norma agama (*religious norm*), dan lainnya (Dungan dan Young, 2015: 1-15).

Memperhatikan konteks itulah, norma dibentuk sangat beragam sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Ketika seseorang sedang makan, maka muncul norma ketika makan. Begitu pula ketika manusia sedang berpakaian, hidup berkeluarga/menikah, hidup bertetangga dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka norma-norma terbentuk berdasarkan konteks dimana perilaku manusia berhubungan dengan hal tersebut.

3. Manfaat Norma

Sebagaimana dibahas di atas, bahwa norma berfungsi untuk mengontrol dan mengatur perilaku individual maupun kehidupan sosial manusia. Tetapi, lebih dari sekadar itu fungsi dari norma adalah memberikan ruang gerak bagi manusia yang bebas, karena perilaku manusia dan konteks perilaku manusia itu tidak sama. Perbedaan perilaku sebagai konten norma dan situasi-kondisi sebagai konteks norma maka otomatis norma itu beragam, variatif, dan plural. Kumar (2015: 2887-2910) mengatakan bahwa klasifikasi sistem norma sebagaimana disebutkan di atas dapat digunakan untuk berbagai tujuan akhir yang beragam.

Keragaman norma yang dibentuk oleh masing-masing individu atau kelompok sosial, pada akhirnya, dapat menjadi bahan untuk melakukan

komparasi. Perbandingan antara satu masyarakat dalam menciptakan norma dan norma yang berlaku di masyarakat lain dapat dilakukan. Proses menimbang mana norma yang lebih cocok untuk diterapkan dan mana yang tidak cocok untuk dijadikan pegangan dapat dilakukan. Memakai masker yang semula ditujukan untuk menghindari diri dari debu atau asap bisa saja ditinggalkan ketika hidup di kondisi atau situasi yang steril dan higienis. Satu norma bisa dinilai apakah layak diterapkan atau tidak. Mengingat norma dibentuk berdasarkan perilaku manusia maupun kondisi tertentu yang sedang dihadapi maka norma dapat dijadikan pintu masuk untuk memahami psikologi individu atau sosial (Narvaes, 2008: 95-119). Mengapa masker dipakai pada saat kondisi udara kotor atau berdebu dapat digunakan untuk membaca keinginan dan harapan yang terdapat dalam hati atau pikiran masyarakat.

Nilai dan norma memiliki hubungan yang saling terkait, kendati keduanya memiliki perbedaan. Jika nilai merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang baik, patut, layak, maka norma merupakan perwujudan dari nilai yang di dalamnya terdapat kaidah, aturan, patokan, atau kaidah pada suatu tindakan (aksi). Bagi orang yang melanggar norma maka ia akan mendapatkan sanksi, atau hukuman oleh masyarakat yang berupa gosipan teguran, dimarahi, diancam, hingga sampai pada hukuman yang diberikan oleh negara melalui aparat hukum. Dengan demikian, norma merupakan petunjuk, kaidah, atau aturan-aturan untuk membuat atau berperilaku yang dibenarkan untuk mewujudkan nilai atau tujuan tersebut.

4. Pelembagaan Norma

Berangkat dari asal mula terbentuknya norma di tengah-tengah kehidupan masyarakat, kita dapat melihat bahwa pelembagaan masyarakat bersifat manipulatif. Dalam artian, dengan tujuan-tujuan tertentu, dalam menjaga kepentingan individu, dan menyikapi situasi dan kondisi yang berbeda, manusia melembagakan norma-norma untuk kepentingan bagi diri mereka sendiri. Masyarakat menciptakan satu aturan yang bisa diterima oleh mereka sendiri untuk kepentingan mereka sendiri, dalam beragam tujuan dan harapan. Pelembagaan norma merupakan perkara yang alamiah.

Proses pertumbuhan norma sosial akan berjalan dengan harapan masyarakat, yaitu terlaksananya nilai-nilai yang telah diciptakannya. Pada dasarnya, proses pertumbuhan norma terbentuk melalui proses sosial yang tidak disengaja atau dibuat melalui proses yang tidak disadari oleh perseorangan maupun kelompok. Terbentuknya norma sosial pada mulanya timbul setelah kehidupan anggota masyarakat senantiasa belajar dari manfaat dan kerugian pola-pola perilaku tersebut, seperti mengambil barang milik orang lain baik secara sembunyi maupun secara paksa untuk dimiliki atau dimanfaatkan oleh pengambilnya adalah tindakan yang merugikan pihak yang memiliki barang.

Menurut Elly (2011) proses pertumbuhan norma dapat dilihat dari pola-pola kebiasaan berikut sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggarnya. Masing-masing pengertian tersebut memiliki dasar yang sama, yaitu norma-norma sosial memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai petunjuk arah bagi tingkah laku di dalam kehidupan sosial masyarakat. Proses pertumbuhan norma ini dikelompokkan kedalam empat macam, namun beberapa sosiolog lainnya mereka menambahkan satu lagi yaitu hukum (*laws*), sehingga menjadi lima macam, yaitu:

a. Cara (*Usage*)

Usange merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sebagai produk dari hubungan sosial antar-individu di dalam masyarakat yang tidak mengakibatkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

b. Kebiasaan (*Folkways*)

Folkways merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, karena dirasakan kebiasaan itu dianggap baik, enak dirasakan kebiasaan itu dianggap baik, enak dirasakan dan banyak manfaatnya dan sebagainya, sehingga banyak orang yang menyukainya.

c. Tata kelakuan (*Mores*)

Mores mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, baik secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap para anggota. Tata kelakuan sudah menempati posisi kuat dimana salah satu pihak memiliki kekuatan

memaksa di pihak lain memiliki kekuatan melarang atas suatu perbuatan para anggotanya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat yang ada di dalamnya menyesuaikan perbuatannya dengan tatakelakuan tersebut. Tata kelakuan disini memiliki berbagai peranan yakni:

- 1) Tata kelakuan memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu, selain itu tata kelakuan juga merupakan alat untuk memerintah dan melarang anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan.
- 2) Tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, artinya kelakuan memaksa anggotanya untuk menyesuaikan tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakatan yang berlaku, sehingga pihak lain juga berusaha menerima orang lain karena kesanggupannya menyesuaikan diri di dalam kelompoknya.
- 3) Tata kelakuan menjaga solidaritas antar-anggota masyarakat yang setiap masyarakat memilikinya. Tata kelakuan yang kekal dan kuat daya integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya, sehingga menjadi adat istiadat (*custom*).

d. Adat istiadat (*custom*)

Custom atau adat istiadat adalah pola-pola kelakuan yang tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat pada para anggotanya, sehingga bagi yang melanggar adat istiadat tersebut akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang jatuhnya sanksi tersebut tidak secara langsung.

e. Hukum (*laws*)

Laws atau hukum merupakan tata kelakuan sosial yang dibuat secara formal dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Hukum merupakan salah satu norma yang memiliki alat kelengkapan, seperti undang-undang, aparat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengadilan, penjaga, sekolah hukum dan sebagainya, sedangkan norma lainnya tidak memiliki unsur-unsur kelengkapan seperti unsur-unsur yang ada pada hukum.

Pada dasarnya, norma-norma yang ada di dalam masyarakat tidak langsung ada, tetapi keberadaannya melalui proses, proses melembagakan norma di dalam kehidupan sosial dinamakan proses pelembagaan (*institutionalized*), yaitu proses yang dilewati oleh norma ke masyarakat yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang dimaksud dalam pelembagaan ini adalah norma tersebut dikenalkan, diakui, dihargai, dan dikemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Balai Rehabilitasi Baddoka memanfaatkan norma-norma yang sudah berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melengkapi instrumen penyembuhan para klien. Sehingga kelak para klien yang dinyatakan telah sembuh dan berhasil menempuh semua tahapan rehabilitasi, dapat kembali berkumpul dan hidup bergaul dengan masyarakat secara normal. Sebab, klien ini telah mendapatkan penanaman norma yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat, mulai dari norma sosial, norma agama, maupun norma-norma lain yang bersifat progresif, seperti kreatifitas.

H. Konsep Pemulihan

Sosialisasi yang sempurna (dalam artian sosialisasi yang mengharuskan anggota masyarakat secara mutlak yang berupa keharusan penyesuaian perilakunya dengan tata aturan sosial) secara riil memang tidak pernah terwujud di dalam kehidupan sosial secara utuh. Sejumlah pelanggaran terhadap apa yang harus disebut acap kali terjadi, sehingga menimbulkan gangguan dalam ketertiban sosial. Intensitas ketaatan dan pelanggaran tersebut sangat tergantung pada bagaimana intensitas sosial itu sendiri. Selain melalui proses sosial proses sosialisasi harus pula dilakukan sejumlah pengawasan sosial (*social control*). Pengawasan sosial yang dimaksud disini adalah semua proses yang ditempuh dan semua alat yang digunakan oleh masyarakat untuk membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran nilai-nilai dan norma sosial oleh anggota masyarakat.

Tertib sosial (*social order*) tidak terwujud dengan sendirinya (secara adikodrati). Adanya tertib sosial selalu diusahakan melalui; (1) Melakukan transfer nilai-nilai dan norma sosial melalui proses sosialisasi kepada masing-masing individu warga masyarakat, sebab melalui proses sosialisasi ini nilai-nilai dan norma masyarakat, (2) melakukan kontrol sosial, yaitu sarana-sarana pemaksa (sanksi) yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikis jika proses sosialisasi yang dilaksanakan tidak menghasilkan dampak ketertiban sebagaimana diharapkan dalam kehidupan masyarakat (Ritzer, 2017).

Pembahasan tentang pemulihan ini, ada beberapa poin yang penting untuk di ketahui, yaitu bagaimana cara mensosialisasikan dan bagaimana cara melakukan sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran norma dan nilai sosial, ada berbagai macam metode yang digunakan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, untuk menanamkan nilai dan norma terhadap para pelanggar nilai dan norma itu sendiri, salah satunya adalah metode pemulihan dengan pendekatan Program Therapeutic Community (TC).

1. Pengertian Pemulihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemulihan adalah nomina atau kata benda, yang memiliki arti: pertama proses, cara, perbuatan memulihkan. Contoh, masyarakat membantu TNI dalam pemulihan keamanan, dan kedua pengembalian; pemulangan hak, harta benda, dan sebagainya (kbbi.kata.web.id). Menurut Kamus Thesaurus, pemulihan berarti: pertama penyembuhan, perbaikan, rehabilitasi, dan kedua pemulangan, pengembalian. Pemuliharaan berasal dari kata pulih, yang berarti membaik, sehat, sembuh (kamus.sabda.org).

Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional tahun 2017 tidak secara eksplisit mendefinisikan kata “pemulihan”. Tetapi, secara konseptual definisi pemulihan mencerminkan tentang sebuah proses tertentu, yang dimulai dari klasifikasi

populasi, pemetaan masalah yang dihadapi, dan penentuan jenis layanan utama yang dibutuhkan sesuai klasifikasi sub-populasi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Apabila semua rangkaian ini terpenuhi dan Balai Rehabilitasi BNN menilai bahwa klien layak kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal, maka berarti klien dianggap telah pulih kembali.

Klasifikasi populasi tersebut adalah *Pertama*, kelompok pengguna Napza yang tidak mengalami ketergantungan (*non-dependent drug user*). *Kedua*, kelompok pengguna Napza dengan cara suntik (*injecting drug user*). *Ketiga*, kelompok pecandu (*dependent drug user*). *Keempat*, kelompok pengguna Napza yang terintoksikasi secara akut (*acutely intoxicated drug user*). *Kelima*, kelompok pengguna Napza dalam kondisi gejala putus zat (*drug user in withdrawal*). *Keenam*, kelompok pengguna Napza dalam masa pemulihan (*drug user in recovery*). Setiap sub populasi memiliki masalah utama yang berbeda dan kebutuhan layanan yang juga berbeda.

2. Standart dan Kriteria Pemulihan

Sepanjang proses pemulihan ini, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memiliki standar-standar penilaian dan kriteria-kriteria dan fase-fase tertentu. Apabila seorang klien telah menempuh setiap fase dan memenuhi standar minimal dari kriteria yang ada, maka klien bersangkutan dinyatakan telah pulih. Kemampuan setiap klien untuk memenuhi kriteria dan menjalani fase tidak sama, tergantung kualitas diri per individu. Catatan tentang pencapaian setiap individu klien tertuang dalam buku harian yang didampingi oleh petugas konselor.

Setidaknya ada tiga jenis buku harian dengan kriteria dan fase berbeda. Pertama, *rumah Growth*. Jangka waktu klien yang mendapatkan buku harian dengan kategori *fase growth* ini adalah enam (6) bulan yaitu 2 minggu fase detoksifikasi dan 2 minggu pada fase entry unit kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial selama 4 bulan yaitu 1 bulan di fase *younger*, 2 bulan pada fase *middle* dan 1 bulan pada fase *eldest*. Kemudian dilanjutkan 1 bulan di fase *re-entry*. Buku panduan penilaian dengan kategori *rumah growth* diberikan kepada klien dengan jenis kelamin laki-laki dengan

menitik beratkan program rehabilitasi *behavior* klien. Kedua, *rumah Maturity*. Jangka waktu klien yang mendapatkan buku harian dengan kategori fase maturity ini juga enam (6) bulan, hanya saja khusus bagi klien dengan jenis kelamin perempuan. Ketiga, *rumah Faith*. Jangka waktu klien yang mendapatkan buku panduan penilaian dengan kategori ini hanya tiga (3) bulan saja, yaitu 1 bulan di rehabilitasi medis yaitu proses detoksifikasi dan entry unit kemudian menjalani rehabilitasi sosial 2 bulan. Dalam rumah *faith* seluruh klien menjalani rehabilitasi dengan menitik beratkan program rehabilitasi pada *cognitive* klien.

Tiga fase di atas ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi Baddoka Misalnya, buku penilaian diserahkan pada klien, setelah semua klien menjalani tahapan sebelumnya, yaitu tahap detoksifikasi dan entry unit selama dua (2) bulan kemudian memasuki tahap rehabilitasi sosial selama empat (4) bulan. Klien yang ditetapkan mendapatkan buku penilaian dengan kategori *Growth* dan *Maturity* atau yang berjangka 6 bulan, rata-rata adalah para pengguna/pecandu narkoba tahap akut, dimana perilaku dan kondisi kesehatan mereka sudah terserang oleh penyakit berat. Sebaliknya, klien yang ditetapkan mendapat buku penilaian dengan kategori *fase faith* atau yang berjangka 3 bulan adalah klien yang belum parah, dimana kerusakan hanya dilihat dari pola pikir.

Setiap fase memiliki program yang sama, yaitu Program Therapeutic Community (TC) (SBIRT, 2010). Sekalipun memiliki program TC yang sama, masing-masing dari fase *growht*, *maturity* dan *faith* berbeda pada aspek kriteria penilaian. Contoh, di dalam buku rumah *faith* atau yang berjangka 3 bulan terdapat dua fase, yaitu Fase A awal berupa rehabilitasi medis atau biasa juga disebut fase stabilisasi dan Fase B berikutnya atau biasa disebut rehabilitasi sosial. Pada Fase A ini, ada Dua Belas (12) Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Klien telah menjalani program rehabilitasi Medis yaitu proses stabilisasi klien dengan durasi waktu kurang lebih 30 hari dengan menunjukkan perkembangan/progres yang baik,

- b. Klien wajib memahami dan mematuhi: *cardinal rules*, *major rules*, dan *house rules*,
- c. Klien telah membuat jurnal *feeling*, signed by *major on duty* (MOD),
- d. Klien berpartisipasi aktif dalam setiap grup/sesi (*morning meeting & wrap up*), serta membawakan atau memberikan : *awareness* 5 kali, *Issue* 5 kali, *intra personal pull up* 5 kali, *personal pull up* 3 kali, *pull up board* 2 kali, motivasi 5 kali, penghargaan 4 kali, *suggest TOTD* 3 kali, dan menyebutkan 20 jargon yang dibuktikan dengan *sign* MOD,
- e. Membuat 3 *theme writing* elaborasi perangkat rumah (*tools of house*)
- f. Partisipasi aktif dalam *confrontation* rumah
- g. Membuat resume riwayat pemakaian dan alur program yang dilalui
- h. Mampu memahami dan menghafal *serenity prayer* dan *the creed*
- i. Menyelesaikan kriteria religi
- j. Membawakan seminar tentang pengertian penerimaan diri, manfaat dan tujuan penerimaan diri, serta isu di dalam diri
- k. Menjadi moderator/*conduct* seminar klien sebanyak 3 kali, dan
- l. Klien telah melakukan individual *counseling*, *family dialogue*, dan *static group* minimal 2 kali.

Pada rehabilitasi medis atau stabilisasi mensyaratkan 12 kriteria yang harus diselesaikan setiap klien. Dalam buku SBIRT Screening, Brief, Intervention and, Referral to Treatment pada tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar nilai pemulihan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Setelah Fase stabilisasi selesai, klien akan melanjutkan pada fase berikutnya yakni rehabilitasi sosial dengan 17 kriteria berbeda dibanding pada fase stabilisasi (SBIRT, 2010). Pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terdapat empat rumah perawatan yaitu:

- a. Pertama, rumah rawatan growth yakni dikhususkan bagi klien dengan tingkat keparahan yang besar yaitu bagi mereka dengan gangguan cognitive dan behavior nya dengan durasi waktu rehabilitasi selama 6 bulan.

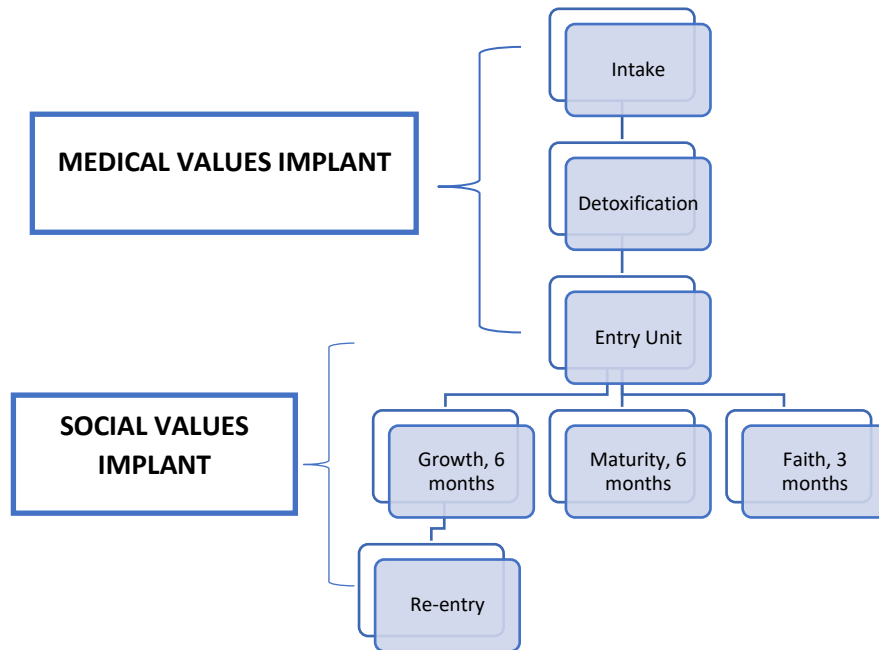
- b. Kedua Rumah rawatan faith yakni dikhususkan untuk klien dengan gangguan mental cognitive saja dengan durasi waktu rehabilitasi 3 bulan.
- c. Ketiga rumah rawatan maturity yakni dikhususkan untuk wanita dengan durasi waktu rehabilitasi 6 bulan.
- d. Keempat rumah rawatan buat anak-anak dengan durasi waktu 3 bulan.

Setiap klien yang ditempatkan pada masing-masing rumah rawatan terlebih dahulu menjalani masa (fase) detoksifikasi dan entry unit selama 1 bulan yang juga disebut masa rehabilitasi media atau masa stabilisasi.

Masing masing rumah rawatan mempunyai kriteria untuk meningkat tidaknya klien ke fase berikutnya. Kriteria dalam *rumah growth*, *rumah Faith*, rumah *Maturity*, maupun rumah anak berbedah satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh tingkat keparahan dari klien yang masuk kebalai. Semua rumah rawatan tersebut memakai TC sebagai metode rehabilitasi yang dipakai di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sebagai kontrol perkembangan setiap individu maka masing-masing klien mempunyai buku panduan penilaian yang berbeda dengan kriteria dan klasifikasi terminologis dengan klien lainnya.

Menurut buku harian, dikenal beberapa kriteria. Pertama, Kriteria Fase *Acceptance*. Pada fase ini ada 12 kriteria. Kedua, Kriteria Fase *Change*. Pada fase ini ada 16 kriteria. Ketiga, Kriteria Fase Sosialisasi. Pada fase ini ada 11 kriteria. Di dalam rumah Growth, kriteria kembali berbeda dibanding Maturity maupun Faith. Dalam rumah growth ini terdapat beberapa tingkatan. Pertama, *Younger member primary*, dengan 7 kriteria, kedua, *middle member-primary* dengan 13 kriteria, ketiga, *older member-primary* dengan 11 kriteria, keempat, fase *observation* dengan 7 kriteria, kelima, fase *vocational* dengan 6 kriteria, dan keenam, fase *survival* dengan 5 kriteria (BNN RI, 2019). Untuk mempermudah analisa di atas, berikut bagannya:

Gambar 2.4
Proses Rehabilitasi dan Pelembagaan Nilai



Seorang klien ditetapkan pulih oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka apabila telah menyelesaikan seluruh kriteria yang tertuang dalam *individual treatment plan*. Standar kepulihan seseorang harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagaimana tercantum dalam buku penilaian. Dalam buku penilaian ini terdapat banyak kriteria pada masing-masing fase, dan kriteria ini menjadi standar nilai atau acuan nilai tentang konsep pemulihan klien. Di sisi lain, kriteria yang menjadi standar nilai tersebut juga menjadi objek material penelitian ini, dengan tujuan mendapatkan informasi dan mengetahui perilaku individu klien.

I. Therapeutic Community (TC)

Istilah *Therapeutic community* (TC) atau TC sering dihubungkan dengan pergerakan Synanon pada akhir tahun 50-an dan 60-an di California. Titik acuan umum yang lain adalah inovasi kerja dalam Psikiatri sosial oleh ahli psikiatri dari Inggris selama perang dunia kedua untuk merawat penyakit trauma dan jiwa tentara-tentara Inggris. Pekerjaan mereka memberikan

peningkatan pada perkembangan TC demokrasi, sebagaimana dipopulerkan oleh pekerjaan dan tulisan Maxwell Jones (Kennard, 1983; Harisson, 1999; Raimo, 2001). Pergerakan Synanon yang terkenal di Amerika Utara mendominasi kegiatan perawatan obat selama kejayaannya.

Hal ini menarik banyak perhatian di antara perawatan obat profesional, tidak begitu banyak untuk kepopulerannya tetap lebih kepada janjinya untuk menyembuhkan. Saat itu, dipercaya secara luas bahwa kecanduan obat tidak dapat disembuhkan. Semua tahu dan menerima perawatan bagi pecandu obat, dari farmakologi untuk semua bentuk "kesembuhan berbicara", telah gagal. Untuk pertama kali, ada sebuah janji kesembuhan yang dibuktikan dengan beberapa perangkat pecandu heroin yang mengatur untuk tetap berhenti. Melalui program saling membantu antara penghuni mantan pecandu yang memilih hidup sebagai anggota komunitas, banyak yang dapat berhenti dari segala bentuk penyalahgunaan selama periode waktu yang tak pernah termimpikan sebelumnya.

Synanon, sebagai pelopor TC untuk pecandu obat, perkembangan disebagian besar teknik dasar konsep dasar dari hirarki TC. Pendekatan tersebut adalah permulaan yang radikal dengan diterimanya suatu model perawatan konvensional waktu. TC adalah komunitas mantan pecandu yang satu dengan lainnya saling membantu untuk pulih dan tetap berhenti dari obat-obatan. Kurangnya respon efektif dari profesional pada pecandu obat dan ketergantungan mereka pada obat-obat ringan untuk menghilangkan rasa sakit menimbulkan kekecewaan, dengan synanon memahami kekuatan dinamika kelompok untuk membentuk perilaku dan menegakkan norma-norma masyarakat. Saat ini, sumber penyembuhan utama TC tidak tergantung pada individu tetapi pada dorongan kekuatan kelompok masyarakat.

Sejak awal TC telah mengalami banyak transformasi seorang mantan pemabuk dan kelompok inti pecandu obat. Namun demikian, usaha pribadi atau kemandirian, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keprihatinan, tanggung jawab sosial dan nilai-nilai keluarga yang telah tertanam. Telah menghasilkan sebuah pendekatan TC praktis dalam perilaku manusia melalui

proses pembelajaran sosial dalam pengaturan masyarakat. Gagasan Bandura (1986) *penentuan resiprokal* menerima secara memadai dinamika pembelajaran sosial yang mengambil lokasi di sebuah TC. Dia berpendapat bahwa manusia belajar bertingkah laku dalam konteks sosial yang memasukkan karakteristik seseorang, perilaku seseorang, dan dalam lingkungan yang mana perilaku terjadi. Ketiga faktor ini mempengaruhi dan saling mengendalikan dalam keadaan interaksi dinamika yang konstan.

Therapeutic community (TC) menganggap kecanduan obat adalah suatu kondisi yang melibatkan seluruh orang dan pengaruh obat sebagai suatu gejala yang mendasari persoalan-persoalan bahwa orang yang kecanduan obat haruslah belajar untuk mengatasi. Tujuan *Therapeutic community* (TC) adalah membantu pecandu untuk terlepas dari narkoba, sebagai individu dewasa, dalam mengembangkan gaya hidup bebas narkoba, usaha untuk tumbuhan sebagai bagian dari “perawatan” tradisional. Perawatan mengendalikan sebuah hubungan antara penyedia perawatan (profesional) dan penerima (klien atau pasien) (BNNRI, 2009).

Therapeutic community (TC) menghindari efek institusional yang mendorong klien tergantung pada perawatan kesehatan atau terapi untuk proses perubahan, selain mengandalkan masyarakat sebagai sumber utama penyembuhan, konsep bukti dalam komunitas Report sebagai dokter (lokai di Jones, 1968), atau komunitas sebagai “metode” perawatan.

Therapeutic community (TC) bukanlah sebuah komunitas yang biasa. Ada elemen-elemen tertentu yang unik yang berada pada TC, mengaturnya terpisah dari bentuk lain komunitas. Apa yang membuat TC adalah kombinasi efek pengaturan, penghuninya dan staffnya, peraturan dan norma-norma yang mengatur interaksi anggota, sistem filosofi dan kepercayaan dan metode penyembuhan. Efek total dari semua elemen ini adalah apa yang dikatakan dengan tepat “lingkungan TC”. Ini juga berkaitan dengan “lingkungan pembelajaran”. Kata lingkungan, seperti digunakan disini, kurang mengacu pada atribut fisik dari pada atribut yang kurang nyata dari suasana hati dan suasana, sebagai konsekuensinya, TC menciptakan fisik, emosi, sosial dan akibat moral tertentu pada persepsi orang. Misalnya, awal seorang

berjumpa dengan TC meninggalkan kesan tertib dan mendesak kebersamaan dengan dinamika perasaan sesuatu yang hidup dan penuh tujuan mengenai tempat dan orang-orangnya. Walaupun TC memiliki fasilitas yang sederhana, ada perwujudan yang bermanfaat tentang mereka dan penghuninya (Dr. Fernando Perfas, 2014).

TC menjelaskan sebagai fungsi keluarga dengan struktur hirarki penghuni tertua (anggota senior) dan penghuni termuda (pendatang baru). Setiap anggota memiliki peran yang jelas dan bertanggung jawab atas kelanjutan pelaksanaan TC yang tepat. Ada perangkat aturan dan norma masyarakat bahwa penghuni berjanji untuk patuh dan ditegakkan saat akan masuk.

Therapeutic community (TC) adalah sekelompok yang mempunyai masalah sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Konsep *Therapeutic community* (TC) yang dapat menolong diri sendiri dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa; (1) setiap orang bisa berubah, (2) kelompok bisa mendukung untuk berubah, (3) setiap individu harus bertanggung jawab, (4) program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan, (5) adanya partisipasi aktif (Dr. Fernando Perfas, 2014).

Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus ada pada program perawatan untuk mengkualifikasi sebagai TC. TC merupakan suatu modalitas penyembuhan yang merupakan ciri adanya interaksi-interaksi dari beberapa aktor, bagaimana faktor-faktor utama dari TC adalah sebagai berikut; (1) personil dan penghuni, dan dinamika hubungan yang ada di antara “orang yang berwenang” dan penghuni, (2) pengaturan fisik dan bagaimana kehidupan sehari-hari dibentuk, (3) aturan-aturan dan macam-macam komunitas, (4) cara-cara yang dijalankan untuk membentuk dan mengelola perilaku yang menyimpang, (5) cara-cara yang digunakan untuk berhubungan dengan isu-isu psikologi dan peningkatan kesadaran diri, dan

(6) perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi diri dan kepercayaan diri (Dr. Fernando Perfas, 2014).

1. Sejarah Ringkas TC

Program terapi bagi pecandu Narkoba merupakan hal yang baru berkembang pada permulaan tahun 1960. Pada awalnya sektor kesehatan secara global saat itu belum siap secara intelektual maupun secara organisasi untuk merespon timbulnya epidemi penyalahgunaan narkoba, sehingga berkembanglah suatu sistem alternatif. Tahun 60-an sampai 70-an di Amerika Serikat dan Eropa mulai tumbuh fasilitas-fasilitas terapi yang mencerminkan pandangan yang berbeda-beda tentang gangguan penggunaan Narkoba. Perbedaan pandangan ini tentu saja mempengaruhi tata cara pendekatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan program yang efektif. Pada tahun 90-an muncul program rawat inap jangka pendek. Pada akhir tahun 90-an, Belanda dan Australia mulai memodifikasi program TC yang mengadopsi pendekatan pengurangan dampak buruk sebagai suatu upaya menekan laju penularan HIV dikalangan pengguna Narkoba.

Program TC munculnya berawal dari perawatan masalah kesehatan jiwa (psikiatri) pada tahun 40-an di Inggris. Pionir atas program TC di rumah sakit jiwa Inggris adalah Jones dkk (1953). Kehadiran TC psikiatri dipandang sebagai bagian dari revolusi psikiatri. Dimana terjadi perubahan dari pendekatan individual kepada pendekatan sosial dengan menekankan keterlibatan banyak pihak, penggunaan metode kelompok, terapi norma dan nilai dan psikiatri administratif. Menurut Rapoport, 1960 dalam BNN 2012, disebut TC karena

“a place which organized as a community in which all are expected to contribute to the shared goals of creating a social organization with healing properties” (Rapoport, 1960.p. 10).

(tempat yang dikelola sebagai sebuah komunitas dimana seluruh anggotanya diharapkan memberikan kontribusi untuk meraih tujuan bersama dengan menciptakan organisasi sosial yang memiliki komponen menyembuhkan)

Pada sekitar tahun 1997 rehabilitasi dengan pendekatan TC mulai diperkenalkan di Indonesia, ditandai dengan berdirinya Yayasan Titihan Respati. Pendirian rehabilitasi berbasis TC dipengaruhi oleh maraknya penggunaan heroin dikalangan pecandu dan terbatasnya ketersediaan modalitas terapi rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saat itu, penyelenggara TC di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tata cara penyelenggaraan TC di Malaysia (Rumah Pengasih) dan Singapura (Pertapis) karena sebagai besar penggiat program ini di Indonesia adalah alumnus dari kedua lembaga tersebut. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya kiblat utama TC saat ini adalah Daytop Village di New York, Amerika Serikat.

2. Pemulihan Menurut Konsep TC

Konsep *Therapeutic community* (TC) mempercayai bahwa pemulihan (*recovery*) akan berhasil jika tercipta dari perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan yang telah dirusak oleh penyakit adiksi. Perjalanan pemulihan akan melibatkan penanganan terhadap trauma, masalah emosi, masalah keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan mental, kurangnya pengetahuan bantu diri, kriminalitas, vokasional, dsb.

Self-help dan *mutual help* adalah hal mendasar dalam TC yang menjadi bagaian dari pemulihan individu dan komunitas. Menurut TC, setiap orang pasti bisa berubah, namun dalam prosesnya perubahan itu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa dilakukan seorang diri. Setiap kesempatan yang ada dalam TC adalah media belajar bagi anggota komunitas yang saling membantu untuk berlatih mengatasi masalah dalam diri masyarakat luas nanti.

Dalam metode *Therapeutic community* (TC), terdapat 4 katagori program (Dr. Fernando Perfas, 2014 : 96-105), antaranya adalah:

- a. Behavior Management shapping (pembentukan perilaku)

Roles & function sebagai klien di dalam program Therapeutic community (TC), yaitu; (1) dalam menjalankan program primary, Therapeutic community (TC) klien akan diatur untuk menjalankan aktivitas harian mereka, (2) ada hirarki atau penempatan level dari klien itu sendiri, (3) biasanya untuk klien yang baru masuk/ menjalankan program, akan ada Buddy system (penjagaan dari senior klien), (4) walaupun memang tidak ada senioritas di dalam Therapeutic community (TC) program, tetapi hirarki akan tetap berjalan yang gunanya untuk memperlajari/menjalankan program dengan pemahaman maksimal.

Hubungan di dalam program Therapeutic community (TC) itu sendiri: (1) ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan sangat sakral untuk lancarnya menjalankan program, (2) peraturan itu sendiri sudah dirancang dan dibentuk seperti berikut ini; budaya Therapeutic community (TC) paling kental dengan anti-drug dan anti kekerasan, yang paling utama dari rules Therapeutic community (TC) adalah; no drugs, no violence dan no sexual acting out.

- b. Emotional and psychological (pengendalian emosi dan psikologi)
- c. Intelektual dan spiritual (pengembangan pemikiran dan kerohanian)
- d. Vocational and survival (keterampilan kerja dan ketrampilan bersosial serta bertahan hidup)

3. Norma dan Nilai yang Dianut dalam TC

TC memandang dan percaya bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki sifat yang baik, meskipun kadang ada perilaku buruk yang tampak. Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa kebaikan, namun pada perjalanan hidupnya ia akan belajar segala hal yang mungkin saja semuanya baik. Keburukan yang ada pada manusia adalah hasil belajar dari kondisi sosial lingkungan dan keadaan keluarga yang menaunginya. Namun TC percaya bahwa manusia selalu bisa untuk mempelajari ulang hal-hal yang baik sehingga hal buruk yang ada pada dirinya dapat hilang dan digantikan.

TC secara nyata menyediakan seperangkat etika dan nilai dalam konsepnya yang mengajarkan keyakinan bagi para klien. Beberapa konsep kebaikan dan etika tersebut tentang dalam *unwritten philosophy* dan slogan-slogan yang banyak terlihat dan dibahas dalam lingkup TC. Nilai dan etika tersebut sangat kontras dengan *sub-culture* 'kehidupan jalanan' yang selama ini dianut oleh pecandu (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018). Nilai dan etika dalam TC tersebut antara lain:

- a. *Honesty*; kejujuran-dipercaya sebagai hal mendasar dalam *treatment* yang efektif untuk menciptakan pemulihan yang stabil, hidup sesuai aturan dan hubungan interpersonal yang sehat.
- b. *Act As If (And Soon You Will Become)*; bertindak sebagaimana yang seharusnya-sikap dan emosi berubah seiring perubahan perilaku.
- c. *I Am My Brother Keeper*; aku adalah pelindung saudaraku-tanggung jawab sosial untuk saling melindungi dalam hal baik.
- d. *Personal Responsibility*; tanggung jawab pribadi-klien diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena menyalahkan orang lain hanya akan merusak kekuatan diri.
- e. *No free lunch*; tidak ada yang gratis – dituangkan dalam sistem *privilege* dalam TC.
- f. *Pride In Quality*; semua yang dilakukan dengan sebaik-baiknya akan mendatangkan kualitas yang memberi kepuasan batin.
- g. *What Goes Around Shall Comes Around*; semua hal pasti ada konsekuensinya – memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan, mengajarkan adanya hukum karma.
- h. *Responsible Concern*; kepedulian yang bertanggung jawab – peduli kepada orang lain bentuknya tidak hanya dengan memberikan hal yang menyenangkan kepadanya, membuat orang itu berbuat tidak melanggar merupakan sebuah kepedulian yang bertanggung jawab, begitulah yang dinamakan *tough love*.
- i. *Here & Now*; sekarang dan saat ini – klien didukung untuk menghabiskan energinya pada hal-hal yang mampu ia kontrol (fokus) serta memaafkan dirinya dan orang lain mengenai kesalahan masa lalu.

- j. *Know Thyself*; mengenali diri sendiri – refleksi, self-awareness, pemahaman terhadap diri sendiri sangat penting untuk pertumbuhan dan memaafkan masa lalu.

4. Tujuan TC

Metode pemulihan Therapeutic community (TC) memiliki tujuan utama untuk membuat anggota komunitasnya kembali sehat dan produktif dan dapat menjalankan fungsi sosialnya sesuai perannya dalam keluarga dan masyarakat dengan cara (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018):

1. Mengubah *sub-culture* (kebiasaan pecandu) yang selama ini telah melekat dengan cara mengajarkan pemahaman baru yang lebih membangun (konstruksi)
2. Mengubah *faulty belief system* (sistem kepercayaan/nilai diri yang salah) yang selama ini dianut oleh klien sebagai pecandu dengan cara memberikan pengetahuan baru yang benar dan valid tentang dampak penyalahgunaan zat dan kemampuan bantu diri (*self-help*).

5. Komunitas Sebagai Penyembuh

Komunitas adalah “*healer*” (penyembuh) sekaligus agen perubahan dalam konteks pemulihan (*recovery*). Menurut De Leon (1997), tujuan adalah komunitas sebaya adalah untuk memfasilitasi perubahan sosial dan psikologis dari masing-masing individu. Dalam TC bentuk kegiatan disusun untuk memfasilitasi perubahan terapeutik (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018)..

Adapun elemen-elemen kunci dalam TC, yakni;

- a. *Roles* – setiap anggota komunitas memiliki perannya masing-masing dan harus dihargai.
- b. *Feedback System* – mengajarkan anggota komunitas memberikan masukan dan mendengarkan saran

- c. *Role Modelling* – semua anggota komunitas mempunyai tanggung jawab bersikap baik agar menjadi contoh untuk anggota lain.
- d. *Collective Format* – hampir semua kegiatan bersifat kelompok, namun bertujuan untuk perubahan individual yang mengajarkan kebersamaan dan kerjasama.
- e. *Norma & value* – TC dianggap sukses yang aturan dan nilainya dipercayai semua anggota komunitas.
- f. *Structure & system* – TC memiliki unsur dan sistem yang mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan kepada semua anggota komunikasi.
- g. *Open communication* – mengajarkan klien asertif dan terbuka dalam mengutarakan pikiran dan perasaannya.
- h. *Relationship* – mengajarkan kembali kodrat mantan pecandu sebagai manusia yang merupakan anggota dari keluarga dengan memberi pengetahuan *healthy relationship*.
- i. *Terminologi* – jargo, slogan dan istilah-istilah yang ada dalam program bertujuan untuk menumbuhkan kekompakan dalam komunitas.

6. Perangkat Terapeutik dalam TC

Konsep *Therapeutic community* (TC) dalam memulai dan memelihara pemulihan adalah dengan memfasilitasi dan menuntun klien untuk memperbaiki aspek kehidupan yang telah rusak oleh adiksi dengan empat struktur dan lima pilar (SBIRT, 2010).

- a. Empat struktur perubahan yang ada, yaitu:
 - 1) Behaviour Management Shaping (pembentukan/pemangkasan tingkah laku). Klien mempelajari kembali teknik dan sistem perubahan perilaku dengan menggunakan *tools of house* secara benar sehingga terbentuk kembali perilaku klien yang produktif sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.
 - 2) Emotional dan Psychological (pengelolaan aspek emosi dan Psikologis)
Klien dituntun untuk memahami permasalahan diri sehingga mampu belajar mengurangi beban perasaannya. Klien juga difasilitasi dalam

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis. Ini bisa dilakukan melalui kelompok statis group, teguran rekan sebaya serta kegiatan dan tugas-tugas lain yang melibatkan kemampuan mengelola emosi.

3) Intellectual and Spiritual (pengembangan proses berpikir dan kerohanian)

Klien dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bantu diri dan dampak adiksi dalam kehidupan. Pengetahuan tersebut akan membangkitkan kembali proses berpikir (kognitif) sehingga akan mempengaruhi pula produktivitas perilaku.

Klien dituntun untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar selain dalam dunia yang akan membantunya dalam mengatasi adiksi dan memelihara pemulihan seumur hidupnya. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan aspek pengetahuan dan nilai spiritualnya.

Kegiatan-kegiatan dalam Intellectual & Spiritual ini bisa berupa seminar dampak narkoba, rekreasi, ibadah dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

4) Vocational and Survival Skills (keterampilan kerja, bersosialisasi dan bertahan hidup)

Klien belajar untuk beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dengan bantuan struktur kerja di dalam program. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal yang dapat diterapkan setelah selesai menjalani program.

b. Five Pillars (lima pilar)

Metode Therapeutic Community (TC) menyediakan lingkungan belajar sosial dan pemulihan bagi klien dengan 5 pilar yang menjadikan sebuah program yang kuat. Kelima pilar tersebut harus selalu ditegakkan bersama oleh semua anggota komunitas agar program pemulihan tetap efektif. Berikut adalah penjelasan tentang kelima pilar tersebut:

1) Family Milieu (Konsep Kekeluargaan)

Therapeutic Community (TC) adalah Komunitas yang bersifat Milieu, yaitu sesuatu yang dilingkupi dengan kehidupan sosial yang rutin dengan aktivitasnya, terdapat hubungan antar manusia di dalamnya, memiliki nilai-norma yang dianut, dan memiliki struktur yang jelas.

Penerapan sistem kekeluargaan yang milieu di dalam program bertujuan untuk memperbaiki kembali nilai hidup di dalam keluarga. Menyamakan persepsi seluruh anggota komunitas agar bersama-sama menjadi bagian dari sebuah keluarga karena pada dasarnya dalam kehidupan nyata setiap klien adalah anggota dari keluarganya di rumah masing-masing.

2) Peer Pressure (tekanan rekan sebaya)

Menciptakan tekanan positif antar rekan anggota komunitas yang dapat memicu perubahan ke arah positif dengan menggunakan teknik yang ada di dalam "*Therapeutic Community*".

3) Therapeutic Session (sesi terapi)

Pembinaan Emosional/Spikologis dan Kognitif yang memberikan nilai terapi dalam bentuk berbagai kegiatan untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi guna menunjang proses pemulihan (Recovery).

4) Spiritual session (sesi spiritual)

Proses peningkatan nilai-nilai dan pemahaman spiritual serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai hubungan diri klien dengan Tuhan dan juga lingkungannya.

5) Role Modelling (ketauladanan)

Proses pembelajaran di mana anggota komunitas saling belajar dan mengikuti ketauladanan di dalam komunitasnya (contoh positif). Belajar untuk saling memiliki dan menjadi panutan satu sama lain. Semua anggota komunitas adalah contoh bagi anggota yang lainnya sehingga harus menunjukkan sikap positif

7. Tools Of The House

a. Rules

1) Cardinal Rules

Kata Cardinal dapat diartikan sebagai hal utama yang bersifat prinsip dan sangat penting. Cardinal rules adalah peraturan tertinggi yang paling prinsipil dalam rumah program. Jika klien melanggar cardinal rules, maka ia akan mendapatkan pembelajaran melalui sesi tertinggi yaitu *General Meeting*.

Cardinal rules biasanya mengatur larangan paling mendasar yang merupakan sebuah kejahatan yang bisa merusak tatanan nilai pribadi, komunitas bahkan masyarakat luas. Cardinal rules biasanya meliputi (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018):

- a) NO DRUGS (tidak dibenarkan memakai narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya).
- b) NO SEX (tidak melakukan hubungan seksual, sesama/lawan jenis)
- c) NO VIOLENCE (tidak melakukan tindakan kekerasan)
- d) NO VANDALISM (tidak melakukan tindakan pengrusakan)
- e) NO STEALING (tidak melakukan tindakan pencurian)

Cardinal Rules bisa bertambah dan dikurangi jumlah maupun jenisnya sesuai dengan *culture* yang berlaku dalam rumah program. Misalnya jika dalam komunitas *female* tidak diperkenankan merokok maka *cardinal rules* berupa NO SMOKING bisa ditambahkan.

2) Major Rules

Merupakan peraturan utama yang mengatur hal-hal penting dalam rumah program. Jika klien melanggar Major Rules, maka ia akan mendapatkan pembelajaran melalui sesi *Family Hair Cut (FHC)*.

3) House Rules

House Rules adalah peraturan yang muncul melalui kesepakatan komunitas dalam suatu rumah program agar segala kegiatan dalam rumah program tersebut berjalan efektif dan kondusif.

Klien yang melanggar *house rules* akan mendapatkan pembelajaran melalui tahapan sesi yang berlaku dalam rumah program. Jika *house rules* masih sering dilanggar, maka item *house rules* yang dimaksud bisa dinaikan statusnya menjadi *major rules*.

4) Awareness

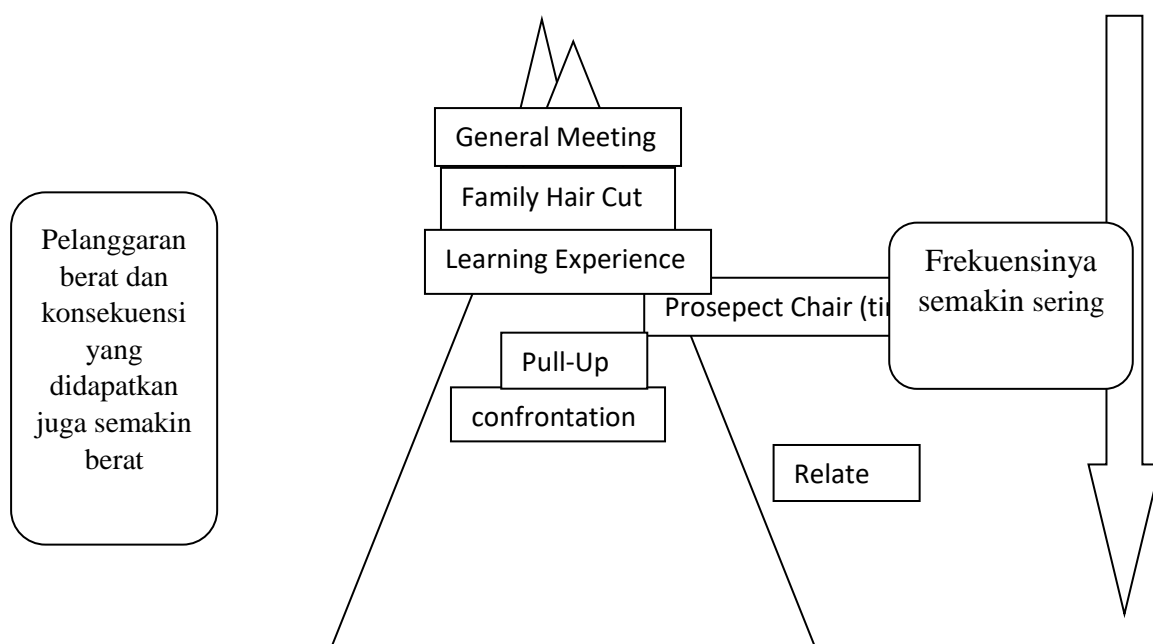
Awareness adalah peringatan yang sering muncul secara verbal dalam Sesi Morning meeting atau Morning Briefing sehingga perlu dijadikan dalam bentuk tertulis karena sering berulang. Jika sudah dijadikan awareness tertulis namun masih sering dilanggar, maka item peringatan yang dimaksud bisa dinaikan statusnya menjadi House Rules.

5) Hierarki Behavior Shaping Tools

Behavior Shaping Tools (seringkali disebut *tools of the house*) dalam Therapeutic Community (TC) dikembangkan untuk mengoreksi perilaku yang melanggar norma Therapeutic Community (TC). Behavior Shapping Tools digunakan untuk menguatkan proses belajar terhadap perilaku adaptif dalam lingkungan belajar sosial Therapeutic Community (TC).

Gambar 2.5

Hierarki Behavior Shapping Tools



Dalam program Therapeutic Community (TC), *Behavior Shaping Tools* memiliki tingkatan-tingkatam atau hierarki sesuai fungsinya masing-masing. Level paling bawah adalah tools yang paling sering dilaksanakan dan biasanya dilakukan secara individual. Semakin ke atas, level dari tools yang memangkas perilaku, maka konsekuensinya semakin berat dan dihadiri oleh semakin banyak anggota komunitas namun frekuensinya jarang terjadi (kejadian luar biasa).

Berikut ini adalah jenis-jenis tools of the house beserta sebagai alat untuk memangkas perilaku yang tidak produktif (SBIRT, 2010);

- a. *Relate*, bisa disebut dengan *Share Feeling* atau *Belly Check* adalah kegiatan berbagi/mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif (misalnya, senang, lega, teharu, bangga, sedih, kecewa, marah, dsb). Berbagai perasaan tersebut mungkin saja mempengaruhi perilaku klien. Berbagai perasaan seperti ini akan membuat anggota komunitas yang lain sadar tentang kondisi anggota komunitas. Harapannya, perasaan yang positif akan menular jika diketahui oleh orang lain. Sebaliknya, komunikasi diharapkan dapat membantu jika ada yang mengutarakan perasaan negatif. Bantuan dapat diberikan dengan memberi masukan maupun komentar yang memberi ketenangan. Selanjutnya, diharapkan perilaku produktif KN muncul karena perasaan positif yang tersebar, dan perasaan negatif yang mampu diatasi oleh dukungan komunitas.
- b. *Confrontation*, kegiatan ini merupakan bentuk sapaan yang dilakukan oleh seorang klien lain dengan tujuan meningkatkan kesadaran (*Awareness*). *Confrontation* dilakukan sebagai bentuk kepedulian. Tujuannya adalah menguatkan perilaku produktif dan mengoreksi perilaku tidak produktif (negatif). Kegiatan ini dilakukan secara personal (empat mata)
- c. *Pull-Up*, kegiatan ini juga memiliki tujuan dasar seperti *Confrontation* namun bisa dilakukan di depan komunitas dengan tujuan memberi peringatan lebih intensif terhadap perilaku klien yang menyimpang akan merugikan komunitas.

- d. Prospect Chair (time out), dilakukan dengan staf sebagai fasilitator. Klien diminta untuk duduk di kursi dan memisahkan diri sejenak dari komunitasnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang meruang kepada sambil menunggu keputusan selanjutnya sesuai jenis prospect chair yang dijalani.
- e. Learning Experience (LE), adalah sebuah kegiatan pembelajaran sebagai konsekuensi dari perilaku menyimpang dan merugikan yang telah dilakukan oleh klien. Saat berstatus sebagai LE, seluruh *Privilege* klien akan ditarik sementara sampai mampu menyelesaikan berbagai tugas yang menyertai status LE-nya.
- f. Family Hair Cut (FHC), adalah kegiatan group untuk memberikan konfrontasi, Pull-Up dan peringatan keras terhadap klien yang telah melanggar MAJOR RULES. Dalam FHC akan mendapatkan pembelajaran (*Result*) berupa LR, demotion (turun fase), dan sebagainya sesuai besar kesalahan yang dilakukan.

General Meeting (GM), adalah kegiatan group untuk memberikan konforntasi, Pull-Up dan peringatan keras terhadap klien yang telah melanggar CARDINAL RULES dalam GM akan mendapat pembelajaran (*Result*) berupa *LE*, *demotion* (turun fase), bahkan hingga termination (dikeluarkan dari program).

8. Privilege System

Therapeutic Community (TC) memberikan berbagai macam batasan gerak kepada *recovering addict* (mantan pencandu). Konsep NO FREE LUNCH menjadi pengingat bahwa segala hal yang kita raih dan dapatkan dalam hidup ini pada dasarnya tidak ada yang gratis, selalu ada “bayaran” dibaliknya, baik materi maupun non-materi.

Konsep *NO FREE LUNCH* dalam program Therapeutic Community (TC) diterjemahkan salah satunya sebagai *Privilege system*. Hak-hak istimewa dengan segala batasan yang berlaku dalam aturan-aturan Therapeutic community (TC) bisa didapatkan dengan syarat-syarat tertentu sebagai bagian dari treatment.

a. Fungsi Privilege System

- 1) Privilege system mengajarkan klien untuk memaknai proses mendapatkan segala hal yang sudah dan akan dimilikinya. Proses tersebut membuat klien lebih merasakan efek dari perubahan perilaku yang terjadi padanya.
- 2) Hal yang paling penting dalam menciptakan sebuah perubahan arah pola pikir Recovering Addict adalah mendefinisikan ulang tujuan hidupnya.
- 3) Seorang pecandu (Addict) telah kehilangan segala *sense of personal value*, yaitu perasaan memiliki nilai kodrat sebagai manusia. Seorang pecandu (Addict) kemudian tidak lagi mampu menghargai kesenangan-kesenangan dalam hidup, sekecil apapun. Dalam Therapeutic Community (TC), langkah pertama untuk membuat recovering addict kembali mengapresiasi kesenangan-kesenangan sederhana dalam hidup adalah dengan cara menarik segala kesenangan itu untuk kemudian membuat mereka berusaha meraih kembali haknya dalam bentuk yang dinamakan Privilege.

b. Walking Paper

Ketika pertama kali seorang klien join pada sebuah program, semua kesenangan akan ditarik dari dirinya. *Privilege system* akan berlaku sejalan dengan kelayakan perubahan sikap dan perilaku yang ia tunjukkan.

Privilege pertama yang dimiliki oleh klien yang baru join dalam program (entry level) adalah walking paper. Dimana WALKING PAPER (buku berjalan) karena klien dalam fase entry hanya boleh berpindah tempat jika memegang buku ini.

WALKING PAPER berisi pengetahuan dan konsep dalam Therapeutic Community (TC) yang dapat dijadikan pedoman untuk lebih memahami keberadaannya dalam komunitas pemulihan/ Therapeutic Community (TC). Dengan pemahaman yang baik, diharapkan penerimaan diri klien juga meningkat.

c. *Buddy System*

Buddy System adalah treatment dalam program C dalam rangka membantu anggota komunitas baru yang baru bergabung untuk lebih mudah beradaptasi dan memahami segala aturan (Rules) yang berlaku dalam program. Seorang klien yang baru bergabung menjadi anggota dalam suatu komunitas Therapeutic community (TC) disebut *LITTLE BUDDY*. Ia akan mendapatkan seorang *BIG BUDDY*.

Big Buddy merupakan klien yang dianggap telah cukup baik memahami program dan mampu menjadi *role model* yang baik sehingga ia mendapatkan tanggung jawab untuk menemani *Little Buddy*-nya dalam mengenal rumah program dan komunitasnya.

Big Buddy & Little Buddy sebaiknya berada pada departement dan dorm yang sama. Dalam Buddy system ini seorang Little Buddy wajib mengikuti kemanapun Big Buddy-nya pergi. Little Buddy hanya boleh beranjak maksimal 2 meter dari big Buddy. Big Buddy akan memperkenalkan Little Buddy dengan semua hal baru yang ditemui dalam komunitas, baik berupa aturan, ritual, struktur rumah, maupun tata cara berperilaku dalam komunitas program. Little Buddy berhak menanyakan apapun tentang hal-hal yang terkait dengan program kepada Big Buddy.

Big Buddy yang meninggalkan sendiri Little Buddy-nya selama kegiatan rumah berjalan akan dianggap tidak bertanggung jawab (*Irresponsible*) terhadap *Little Buddy*. Jika Big Buddy harus meninggalkan *Little Buddy* karena keperluan penting, maka Big Buddy harus melakukan *Announcement* (diketahui oleh on chair & COD departementnya) *Delegate Buddy* kepada klien lain.

Selama 3 hari pertama, tools dalam program belum berlaku bagi Little Buddy karena merupakan masa observasi. Jika terjadi pelanggaran serius (melanggar Major Rules dan atau Cardinal Rules) dalam masa observasi, Big Buddy harus mengkomunikasikannya kepada Mayor On Duty- By Hierarchy.

Seorang klien dianggap telah layak lepas dari Buddy sistem jika memenuhi hal-hal berikut (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018).:

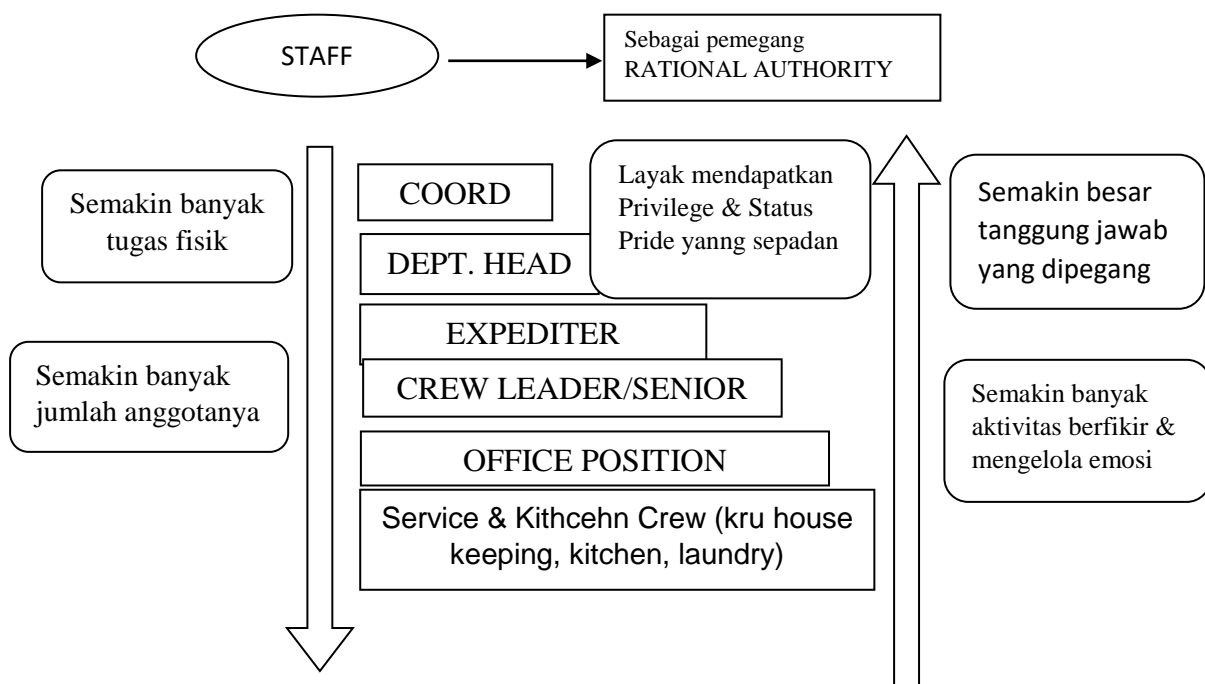
- 1) Telah menjadi Buddy sistem selama minimal 5 hari
- 2) Telah mampu memahami dan melaksanakan Conferentation dengan benar
- 3) Telah mampu menghafalkan doa Kedamaian
- 4) Telah mampu mengikuti ritual penting dalam program (sesi-sesi dalam Morning Meeting & Wrap Up, Screening tools, CB Group , dsb) tanpa dibantu oleh Big Buddy.

9. Job Function

Job Function (fungsi kerja), yaitu pembagian kerja atau pembagian tugas yang tidak hanya dalam konteks namun juga berkontribusi dalam pemulihan. Job Function ini merupakan hal yang diperlukan untuk melengkapi struktur dalam Therapeutic Community (TC). Setiap klien dalam komunitas pasti memiliki job Function masing-masing. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur TC pada tabel berikut :

Gambar 2.6

Struktur dalam TC



Struktur dalam Therapeutic Community (TC) bermaksud untuk menstimulasi kembali kemampuan klien dalam berorganisasi kerja jika nanti bergabung kembali dalam komunitas yang lebih besar.

Semakin tinggi level Job Function membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar. Semakin tinggi level Job Function juga akan memberikan kebanggaan (*pride*) dan *privilege* yang sepadan. Namun untuk mencapainya dibutuhkan pertumbuhan kemampuan mengelola emosi dan psikologis serta perkembangan diri untuk mencapai tujuan dari terapi dalam komunitas.

Job Function tidak hanya mengajarkan keterampilan kerja yang spesifik tetapi juga memberikan wadah terhadap perkembangan kemampuan psikologis dan sosial, seperti self-Confidence, Coping, kemampuan komunikasi Interpersonal, dan kemampuan Kepemimpinan. Kemampuan-kemampuan diri tersebut disediakan untuk menggantikan kebiasaan 'urakan' atau kebiasaan 'perilaku jalanan' sehingga para pecandu mendapatkan julukan *junkie*.

Fungsi Terapi dari Job Function (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018).

a. Coordinator (Chief, On Chair, dsb)

Menumbuhkan kemampuan untuk menjaga kepercayaan orang lain (figur otoritas).

- 1) Kepercayaan staf
- 2) Sebagai penghubung antara seluruh klien dengan staf yang bertugas
- 3) Melaksanakan fungsi administrasi
- 4) Pemimpin seluruh klien dalam komunitas
- 5) Role Modeling

b. Department Head (koor. Departemen)

Menumbuhkan kemampuan untuk kepemimpinan menjadi role model

- 1) Kepercayaan (Trust) yang diberikan oleh staf lebih besar
- 2) Memiliki pengaruh dan wibawa yang besar diantara para kru
- 3) Bekerja dengan empati
- 4) Belajar memimpin Kru & Role Modelling

c. Expediter (kru istimewa)

Menumbuhkan kemampuan untuk persisten terhadap peer pressure dan bujukan negatif

- 1) Mata dan telinga rumah (sebagai 'polisi' komunitas)
- 2) Mampu untuk tidak pandang bulu menegakkan aturan (No Comptomise)
- 3) Membatasi diri berinteraksi dengan komunitas untuk menjaga Obyektivitas
- 4) Responsible
- 5) Melatih Kejujuran dan Integritas

d. Crew Leader (kru senior, asisten, dsb)

Menumbuhkan kemampuan bersikap Asertif ketika menjadi pemimpin kru dan juniornya, melatih personal Accountability

- 1) Mengembangkan kemampuan Supervisi (mengawasi, mengatur)
- 2) Melatih kemampuan komunikasi Interpersonal lebih baik
- 3) Mengembangkan Coping Skill
- 4) Asertif
- 5) Mengembangkan Self-confidence
- 6) Mengembangkan Responsibility

e. Office Position (kru B.O, Religi)

Menumbuhkan motivasi internal, meningkatkan self-esteem, meningkatkan Self-efficacy

- 1) Memegang tanggung jawab lebih besar
- 2) Mengatasi tantangan & tekanan kerja yang lebih berat
- 3) Mengembangkan komunikasi & kerjasama tim
- 4) Bekerja lebih banyak dengan kognitif (aktivitas berpikir)

f. Service & Kithcehn Crew (kru house keeping, kitchen, laundry)

Menunjukkan Pride in Quality (PnQ), mendapatkan makna bahwa semua pekerjaan yang baik jika diselesaikan akan menimbulkan kepuasan/kebanggaan

- 1) Entry Level (kemampuan adaptasi)
- 2) Konformitas terhadap aturan komunitas

- 3) Follow Delegasi (menerima pemerintah)
- 4) Penerimaan diri & mengatasi frustrasi
- 5) Mengontrol Impulse
- 6) Menyelesaikan tugas tepat waktu

10. Membangun Lingkungan Therapeutic Community

(TC)

a. Bimbingan Therapeutic Community (TC)

Bimbingan, apakah kelompok atau individu, memberikan para penghuni kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu pribadi yang bersejarah atau kondisi saat ini yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat mereka dan tingkatan fungsinya. *Therapeutic Community* (TC) menggunakan pendekatan psiko pengobatan yang cocok untuk mengarahkan ketahanan khusus bahwa banyak pecandu obat bekerja. Penolakan pecandu terhadap realitasnya sering dilakukan bertahun-tahun terhadap kecanduan obat. senjata pertahanan tebalnya telah melayaninya dengan baik diadakannya sebagai pecandu obat. Untuk menurunkan senjata ini adalah mengkonfrontasi realita-realita kasar dari kehidupannya bahwa dia selalu menghindari atau menolak. Bagian dari penolakan ini adalah tetap diperlukan untuk merasionalisasi jatuhnya dan ketidakmampuannya berhenti dari obat-obatan. Untuk mengkonfrontasi penolakan ini seperti mengelupas lapisan kertas minyak oleh lapisan. Pendekatan bimbingan yang dipekerjakan di *Therapeutic Community* (TC) secara menyeluruh mulai dari empat kognitif dan direktif. Secara umum, para pembimbing klinis memfokuskan pada tantangan kepercayaan yang keliru pecandu dan menekankan tanggung jawab pribadi.

Selama fase perawatan awal, para penghuni sering melakukan pergolakan dengan isu-isu yang memotivasi. Untuk menjaga mereka

dalam perawatan, pembimbingan atau staf harus mengarahkan isu-isu ini dalam bimbingan mulai dari waktu penghuni menginjakkan kaki di program perawatan sampai mereka mencapai beberapa tingkat stabilitas.

b. Hirarki Organisasi Therapeutic Community (TC)

Therapeutic Community (TC) diorganisasikan dalam tingkatan posisi yang mendaki yang tegas terhadap pertanggungjawaban yang dihuni oleh penghuni yang ada di tahap perawatan yang berbeda. Untuk mencapai posisi dalam Therapeutic Community (TC), penghuni harus mempelajari nilai-nilai yang penting dalam dunia kerja. Tingkatan menjamin bahwa pekerjaan dilengkapi pada pengawasan yang tepat waktu dan benar tersedia. Rantai komando yang jelas memberikan pertanggungjawaban yang aman dari kegagalan. Tanggung jawab para penghuni selalu berdasarkan pemeriksaan dengan sesama mereka dan yang lebih tinggi. Kesalahan untuk melaksanakan fungsi pekerjaan seseorang atau hidup sampai perilaku yang diharapkan merupakan dasar untuk penurunan pangkat (atau “mematikan” di Lingoes Therapeutic Community (TC)).

Struktur organisasi Therapeutic Community (TC) membuat sistem yang sangat efisien. Sistem ini mampu melakukan pengorganisasian pekerjaan secara baik dalam rumah rawatan. Struktur Therapeutic Community sangat membantu untuk membuat Therapeutic Community (TC) dapat berjalan mandiri dengan melibatkan sejumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan dengan bermacam-macam tingkat keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. Sistem ini bekerja dan berjalan secara simultan antar bidang keahlian. Sistem ini memperbolehkan manajemen yang lebih tinggi untuk berkonsentrasi pada aspek-aspek yang lebih teknis dalam program rehabilitasi. Seluruh kegiatan merupakan kegiatan menyatukan pelaksanaan tugas-tugas kecil. Peningkatan hirarki merupakan pemberdayaan perasaan akan kemandirian.

Meskipun manajemen tertinggi biasanya tidak berhubungan dengan uraian waktu dari usaha hari ini ke hari dalam memperlakukan makanan, membagikan pengalihan pekerjaan atau memastikan bahwa sekelilingnya bersih, mereka mengawasi dan memonitor, secara dekat tingkah laku seluruh pada penghuni. Karena struktur hirarki, garis komunikasi sangat jelas. Ada umpan balik yang tetap mengenai pada yang terjadi dalam komunitas. Tergantung pada pentingnya informasi umpan balik, itu ditangan dengan tingkat hirarki yang khusus. Informasi penting yang mempengaruhi kesehatan dari setiap anggota atau keselamatan perawatan, seperti hadirnya obat-obat yang diselundupkan atau tindakan kekerasan, dibawa ke puncak hirarki organisasi.

c. Mempersiapkan Para Penghuni Untuk Integrasi Kembali ke Masyarakat.

Memperoleh serangkaian nilai-nilai dan mengaktualisasikan mereka dalam dunia kerja memperoleh peningkatan kesadaran sendiri dan komitmen ke kehidupan yang bebas obat. Koherensi antara bagaimana seorang melakukan untuk nilai-nilai kehidupan dan prososial dia telah peroleh selama perawatan adalah sering diuji ketika penghuni kembali ke dunia sesungguhnya. Ini tidak terbayangkan bahwa mantan alkoholik kronis mendapatkan pekerjaan sebagai alat tukar dan tetap tenang. Dalam lapisan yang sama, itu akan sulit untuk membayangkan mantan pecandu obat, terus menghindari menggunakan obat-obatan. seorang melakukan untuk nilai-nilai kehidupan dan prososial dia telah peroleh selama perawatan adalah sering diuji ketika penghuni kembali ke dunia sesungguhnya. Ini tidak terbayangkan bahwa mantan alkoholik kronis mendapatkan pekerjaan sebagai alat tukar dan tetap tenang. Dalam lapisan yang sama, itu akan sulit untuk membayangkan mantan pecandu obat, terus menghindari menggunakan obat-obatan.

Pada tahap terakhir perawatannya, penghuni secara perlahan-lahan dibersihkan dari lingkungan yang terkontrol dari *Therapeutic Community* (TC) dan diberikan lebih waktu dan mengeksposur ke dunia sesungguhnya. Dia harus baik menemukan pekerjaan, kembali ke sekolah, atau melibatkan dirinya sendiri dalam dorongan produktif. Dia membagi waktunya antara kegiatan di luar nya dan waktu dia harus habiskan dalam pusat perawatan, sering melibatkan kehadiran di kelompok-kelompok setelah perawatan atau sesi bimbingan dengan pembimbing yang masuk kembali. Dia harus menyelesaikan kursus pelatihan dan mendemonstrasikan keahliannya di pencegahan kekambuhan. Dia juga membantu keluar dalam melakukan kegiatan-kegiatan penyembuhan tertentu bagi penghuni lainnya. Kemampuan untuk mendapatkan dan menjaga pekerjaan, bergabung kembali kekeluarga seseorang dan melanjutkan untuk bekerja memelihara pemulihan seseorang merupakan tujuan utama dalam tahap perawatan ini. Selama fase ini, penghuni mendapatkan dukungan dari baik komunitas perawatan dan keluarga atau sistem mendukungnya. Apabila kambuh ke obat-obatan terjadi di tahap ini, penghuni dapat dipanggil kembali ke *Therapeutic Community* (TC). Diberikan campur tangan yang ekstra sampai dia dapat kembali pada jalur proses pemulihannya.

11. Tahapan Intervensi dalam TC

Wawancara motivasi dan tahapan perubahan perilaku sudah digunakan dalam pengobatan di masyarakat dan penelitian di berbagai belahan dunia. Model intervensi ini dianggap cukup efektif dalam membantu penggunaan narkoba untuk mengubah perilaku pengguna narkoba mereka ke arah perubahan perilaku ke arah yang positif. Dasar dari penerapan wawancara motivasional adalah positif. Dasar dari penerapan wawancara motivasional adalah memahami tahapan perubahan perilaku klien pada saat wawancara

ini dilakukan dan bagaimana mendorong mereka untuk mencapai tahapan selanjutnya.

Prochaska de Clemente, dan Norcross, menunjukkan ada enam tahapan perubahan yang akan dilalui oleh individu, dalam melewati tahapan tersebut tidak semua individu melalui dengan mulus, sering kali ketika sudah maju pada tahapan selanjutnya kemudian menjadi mundur ke tahapan sebelumnya. Kondisi ini sangat terkait dengan berbagai faktor baik dari dalam diri individu tersebut maupun eksternal atau lingkungan. Adapun enam tahapan tersebut yaitu (Dr. Ferdinando Perfas, 2014):

a) Precontemplation (Pra perenungan)

Individu belum memahami bahwa perilakunya menimbulkan masalah, meskipun sudah mendapat umpan balik dari berbagai pihak individu merasa bahwa penggunaan narkoba mereka tidak menimbulkan masalah baginya.

b) Contemplation (Perenungan)

Individu sudah mulai memahami bahwa penggunaan narkoba mereka sudah menimbulkan masalah, namun mereka masih ragu-ragu untuk menghentikan penggunaan narkoba. Pada tahapan ini individu sudah ingin berubah tetapi tidak yakin dapat berubah. Sikap ambivalen pada tahap ini cukup kuat sehingga pada waktu panjang untuk meningkat pada tahap berikutnya. Ambivalensi yang dialami klien bisa menjadi tolak ukur dalam mencapai suatu keseimbangan, perubahan ini tidak mungkin terjadi bila alasan untuk tetap pada perilaku sebelumnya lebih besar dari pada alasan mengapa mereka berubah.

c) Preparation (Persiapan)

Pada tahapan ini individu sudah memutuskan untuk berubah, mereka sudah menyiapkan diri untuk melakukan sesuatu. Terapis perlu mendorong individu untuk dapat melaksanakan rencana perubahan dengan suatu anjuran yang realistis.

d) Action (Aksi)

Individu sudah benar-benar melakukan rencana perubahan, penggunaan narkoba sudah mulai melakukan terapi untuk mengatasi sindroma putus

zat dan memutuskan hubungan dengan teman-teman pengguna narkoba. Dalam tahapan ini perlu dukungan dan penguatan agar mereka dapat mempertahankan perilakunya.

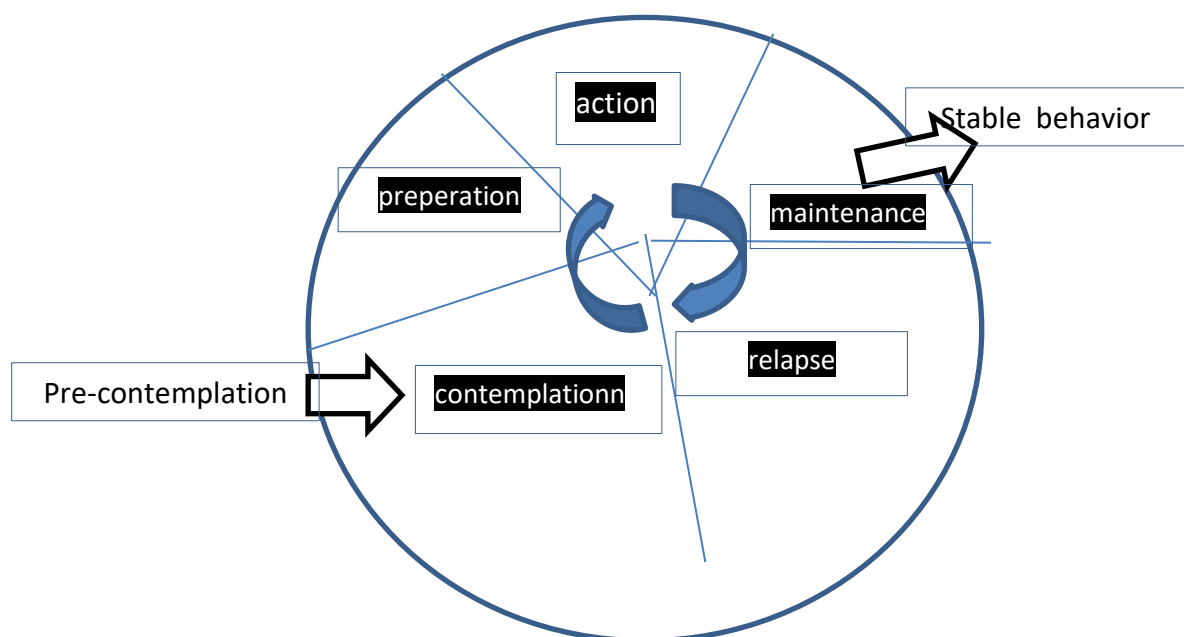
e) Maintenance (Rumatan)

Individu sudah merasakan suatu kondisi yang nyaman dengan perilaku tanpa narkoba. Untuk bertahan pada tahap ini individu perlu mendapat pengawasan agar tidak jatuh dalam kekambuhan. Mereka juga perlu memperbaharui strategi yang digunakan agar tidak kambuh, mereka juga butuh perubahan situasi dalam kehidupannya untuk tetap dalam tahap maintenance.

f) Termination (Terminasi)

Pada tahapan ini individu sudah benar-benar mampu meninggalkan perilaku penggunaan narkoba mereka dan tidak terpengaruh oleh situasi yang dapat menyebabkan mereka kambuh. Misalnya, seorang yang berhenti merokok kemudian kumpul dengan teman-temannya yang masih merokok tidak akan mencoba untuk merokok kembali

Gambar 2.7
Stages Of Change Model



seringkali menghadapi banyak masalah dan isu-isu yang membawa mereka harus berhadapan dengan terapis/konselor. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang efektif dan terbaik bagi mereka, pengalaman menunjukkan wawancara memotivasi yang dilakukan bersama dengan konsep tahapan perubahan memberikan hasil sangat efektif bagi mereka yang membutuhkan perubahan perilaku tersebut.

Beberapa kisi-kisi yang perlu diketahui oleh terapis dalam mengintegrasikan antara wawancara memotivasi dengan tahapan perubahan perilaku tersebut adalah, sebagai berikut (BNNRI, 2019);

- a. Penelitian menunjukkan integrasi tersebut memberikan keberhasilan dalam perubahan perilaku.
- b. Fokus dukungan pada individu/klien untuk meyakinkan dan menguatkan hasrat, motivasi, dan rasa percaya diri untuk berubah.
- c. Kenali bahwa memberikan penguatan dapat dilakukan dengan proses konseling dan terapis hadir sesuai dengan tahapan perubahan klien saat ini dengan menggunakan keterampilan terapis untuk mendorong klien ke tahapan berikutnya.
- d. Ciptakan suatu pola pikir untuk melihat bagaimana proses konseling berjalan.
- e. Identifikasi keterampilan dan strategi yang dapat bekerja dengan baik antara terapis bersama klien.
- f. Ciptakan petunjuk/ pedoman singkat yang dapat dikerjakan dengan klien dalam rencana perubahan perilaku.
- g. Ingatkan klien untuk menerapkan dalam aksi dari apa yang dianggap terbaik oleh klien.

Menurut Clemente dan Scott (1997), menyatakan bahwa dasar dari proses perubahan perilaku diwakili oleh beberapa faktor; kognitif, afektif, perilaku, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan dan motivasi untuk perubahan perilaku tidak hanya pada pengguna narkoba tetapi juga pada penyakit tertentu seperti diabetes melitus, obesitas, penyakit jantung, dan lain-lain.

J. Individual Treatment (IT)

Tujuan penerapan metode *individual treatment* yaitu (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018).:

1. Menerapkan metode rehabilitasi yang tepat untuk setiap individu sesuai kebutuhan;
2. Melaksanakan rehabilitasi yang bersifat individual dengan menggunakan pendekatan beberapa disiplin ilmu;
3. Meningkatkan/mengakselerasi percepatan penerimaan diri residen sehingga rehabilitasi dapat berjalan efektif dan efisien;
4. Menjadikan akselerasi pemulihan residen berbasis Individual Treatment Plan sebagai program unggulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka .

Sasaran penerapan metode *individual treatment* yaitu (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Dian A.O.F, 2018).:

1. Penerapan metode rehabilitasi yang tepat untuk setiap individu (residen) yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;
2. Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi yang bersifat individu melalui pendekatan beberapa disiplin ilmu;
3. Terwujudnya peningkatan kemampuan penerimaan diri residen sehingga rehabilitasi dapat berjalan efektif dan efisien.

K. Klien

Pada awalnya para klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memiliki julukan sebagai Residen, dimana kata residen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu ke kosakata bahasa Inggris, *resident*, yang berarti *the people who live in a house or an area* (Collins). Residen juga berarti *one who residenti a place*. Residen Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berarti orang-orang yang tinggal di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk mendapatkan pelayanan medis dan sosial demi pemulihan dari pengaruh narkoba.

Dalam artikel berjudul *Akselerasi Pemulihan Klien Berbasis Individual Treatment*) tidak mendefinisikan pengertian “klien” secara eksplisit. Demikian pula, kata “klien” tidak muncul dalam Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang dikeluarkan Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Nasional 2017. Sebaliknya, Buku Saku tersebut lebih menggunakan kata “klien” untuk menggantikan kosa kata “klien”.

Secara implisif, kata klien mengacu secara konseptual kepada individu-individu yang berhak mendapatkan layanan medis dan sosial untuk pulih kembali, dan menjadi anggota masyarakat seperti pada umumnya. Klien maupun klien meliputi para pengguna maupun pecandu narkoba yang memerlukan layanan khusus dan layanan pemulihan, baik secara medis maupun sosial.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar (untuk selanjutnya disebut Balai Baddoka) adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 54 berbunyi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi. Berdasarkan pemahaman pasal tersebut, Pemerintah Pusat/BNN memfasilitasinya menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 70 huruf d berbunyi BNN mempunyai tugas meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat. BNN memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga rehabilitasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bahwa

standarisasi tenaga rehabilitasi, metode rehabilitasi, sarana dan prasarana layanan rehabilitasi pecandu narkotika dapat terpenuhi.

Rehabilitasi BNN Baddoka merupakan salah satu dari beberapa Balai Rehabilitasi BNN yang terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2012, dengan tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya; fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi; dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berpedoman pada visi dan misi. Visi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu: "Menjadi Pusat Layanan Terbaik dalam Bidang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba", dan misi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yaitu: "Memberikan Layanan Rehabilitasi Secara Terpadu dan Profesional, Mendidik dan Mengembangkan SDM dalam Bidang Pelayanan Rehabilitasi, dan Melakukan Operasional Research dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi".

BAB 3

DESKRIPSI UMUM BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA

Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dibuat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan bahkan kematian. Pada prinsipnya narkotika tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya serta untuk keperluan medis dan keperluan penelitian, namun demikian kepemilikannya juga harus ada ijin dari pemerintahannya, seperti transaksi narkoba secara sembunyi-sembunyi untuk dikonsumsi dengan mengambil efek berupa kesenangan. Padahal dampaknya sangat berbahaya, yaitu dapat merusak sistem saraf otak, menimbulkan sistem komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin memprihatinkan dan telah merasuk ke semua sendi-sendi kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Pecandu narkoba yang sekitar 80% merupakan generasi muda berusia 12-25 tahun sebagai generasi penerus bangsa. Diperlukan langkah kongkrit untuk menyelamatkan generasi bangsa

dengan menekan angka penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkahnya adalah dengan mengadakan program rehabilitasi untuk memulihkan atau menyelamatkan para penyalahguna atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Dengan melakukan program rehabilitasi, kita dapat memperpanjang harapan hidup para penyalahguna atau pecandu serta menghindari risiko kematian. Selain itu kita dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, akibat yang ditimbulkan dan manfaat yang didapatkan jika dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional adalah upaya konkrit Pemerintah untuk memulihkan para pecandu narkoba yang semakin banyak.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka didirikan untuk melakukan rehabilitasi guna membantu dan menolong para penyalahguna narkoba untuk pulih dari ketergantungan narkoba sehingga bisa mendapatkan kembali masa depan yang baik. Pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud disini yaitu program pemulihan penyalahguna atau pecandu narkoba melalui pelayanan medis dan sosial/psikis. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Balai Rehabilitasi Baddoka dengan tersedianya fasilitas seperti laboratorium, apotek, fisioterapi, poli umum, poli gigi, poli penyakit dalam, poli neurologi, poli jiwa, ruang EEG, ruang EKG, ruang radiologi, ruang bedah, ruang ICU, dan ruang UGD. Sedangkan pelayanan sosial/psikis yang dimaksud adalah konseling psikologi, religi, terapi musik, dan lain-lain.

Kegiatan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menggunakan program Therapeutic Community (TC). Program tersebut terdiri dari beberapa tahapan/fase yaitu fase detoksifikasi, fase entry unit, fase primary, dan fase re entry. Tujuan utamanya adalah menolong para pecandu agar mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Pecandu yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka akan dibantu untuk mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen

perilaku, emosi, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, serta keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Makassar

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka didirikan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rehabilitasi BNN. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar diresmikan pada tanggal 26 Juni 2012 yang bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) oleh Prof. Dr. Boediono selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terletak di Jalan Batara Bira VI No. 35 Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Letak Geografis 5°05'24.90'LS dan 119°30'27.09'BT. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar berada di bawah naungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur.

Berdiri di atas lahan seluas 7.563 m² dari luas tanah 2,5 ha yang merupakan penyerahan hak pinjam pakai atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1232/IV/Tahun 2011.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana merupakan wujud nyata keseriusan antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba di Indonesia dan Sulsel pada khususnya. Berikut ini daftar pemanfaatan lahan yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Pemanfaatan Lahan di Balai Rehabilitasi BNN
Baddoka Makassar (2020)

NO	Jenis Bangunan	Luas (m ²)	Luas (%)
1	Gedung	7.563	30,25
2	Parkir	3.000	12
3	Jalanan	6.400	25,60
4	RTH/Taman	7.437	29,75
5	Gedung Olah Raga	600	2,40
	total	25.000	100

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddokka Makassar

Berdasarkan tabel di atas total luas area tanah yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar seluas 25.000 m² dengan total luas bangunan 7.563 m² dengan kapasitas tampung 300 orang per tahun yang siap direhabilitasi. Lahan parkir yang tersedia sebesar 3.000 m² yang terdiri atas ruang parkir roda empat 2.500 m² dan 500 m² untuk roda dua. Untuk luas ruang terbuka hijau atau taman diperuntukkan sebesar 7.437 m² atau sebesar 29,75%. Gedung olahraga tersedia pada lahan sebesar 600 m². Lahan untuk peruntukan ruang terbuka hijau di Balai Rehabilitasi BNN telah mencapai 7.437 m² atau 29,75% dengan jenis tanaman pohon mahoni, pohon trambesi, pohon ketapang, pohon mangga, rambutan dan tanaman hortikultura, serta tanaman lainnya.

2. Visi dan Misi Rehabilitasi BNN Baddoka

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar mempunyai visi yaitu: **“Menjadi Pusat Layanan Terbaik dalam Bidang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba”**. Sedangkan misi dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar adalah:

1. Memberikan layanan rehabilitasi secara terpadu dan professional;
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi;

3. Melakukan *Operasional Research* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi.

Semboyan nilai-nilai yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar:

- B : *Best* (Menjadi pusat layanan terbaik dalam bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba)
- A : *Accomodating* (Membantu korban penyalahgunaan narkoba)
- D : *Desent* (Mengutamakan nilai-nilai kesantunan)
- D : *Dedication* (Pengabdian diri)
- O : *Objective* (Memberikan penilaian yang objektif)
- K : *Keep Going* (Terus menerus)
- A : *Accountable* (Dapat dipertanggung jawabkan)

3. Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Balai Rehabilitasi BNN

Baddoka

1) Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan jangkauan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk direhabilitasi.
- b. Penurunan angka penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- c. Peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan pengurangan angka relapse.
- d. Peningkatan kemampuan SDM dalam program rehabilitasi.
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

2) Sasaran

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan di atas merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya jaringan kerjasama dari segenap komponen pemerintah/instansi terkait dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
- b. Terbangunnya partisipasi aktif Pemerintah/Instansi terkait dan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- c. Terwujudnya masyarakat sehat jasmani, jauh dari narkoba.
- d. Berkurangnya mantan pecandu yang relapse kembali.
- e. Terwujudnya manusia yang mandiri, produktif dan terampil setelah selesai program rehabilitasi.
- f. Terwujudnya SDM yang terampil dan berwawasan luas dalam pelaksanaan program rehabilitasi.

3) Fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Adapun fungsi Balai Rehabilitasi BNN antara lain;

- 1) Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN;
- 2) Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika;
- 3) Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesifik, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya;
- 4) Pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 5) Pelaksanaan pelayanan terapi psiko edukasi dan psiko sosial termasuk metode therapeutic community terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 6) Pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 7) Pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;

- 8) Pelaksanaan asesmen persiapan program rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 9) Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali ke dalam masyarakat dan keluarga bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 10) Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 11) Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi;
- 12) Penerimaan wajib lapor penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis;
- 13) Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode therapeutic community dan metode penunjang lainnya untuk petugas;
- 14) Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesmen terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- 15) Pelaksanaan penyelenggaraan database yang up to date di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN;
- 16) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Rehabilitasi BNN;
- 17) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN.

4. Startegi dan Kebijakan

1) Strategi

- a. Strategi riset terapi dan rehabilitasi terpadu
- b. Strategi untuk terapi dan rehabilitasi medis

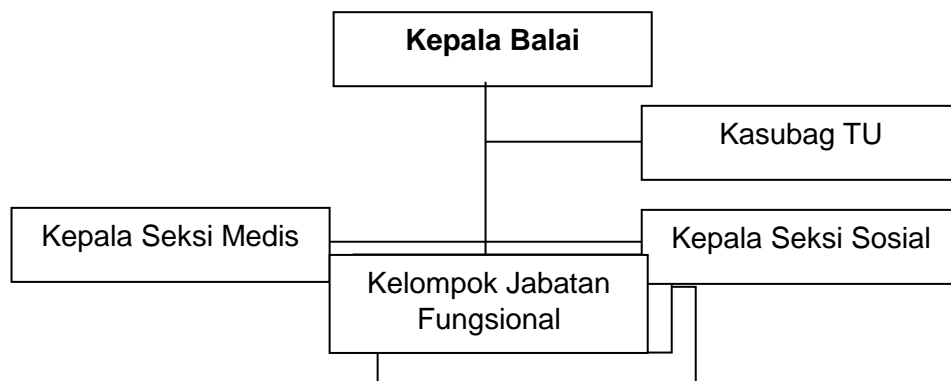
- c. Strategi untuk rehabilitasi sosial

2) Kebijakan

- a. Meningkatkan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba baik rehabilitasi medis ataupun sosial.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah/Instansi terkait untuk membantu program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- c. Memfasilitasi peran serta lembaga pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan SDM sebagai upaya peningkatan capaian target dan sasaran yang tepat.

5. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

6. Sarana Prasarana

1. Fasilitas Bangunan yang ada di dalam Rehabilitasi BNN

Baddoka terdiri atas:

- 1). Bangunan Utama terdiri dari:

- a) Lantai 1 : bangunan Utama terdiri dari Ruang Lobby, Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Ruang X-ray, Ruang Radiologi, Ruang Laboratorium, Ruang Fisioterapi, Ruang Poli Neurologi, Ruang Poli Interna, Ruang EKG, Ruang EEG, Ruang Poli Gigi, Ruang Psikologi, Ruang ICU, Ruang Dokter, Ruang Perawat, Ruang Tindakan, Ruang Bedah, Ruang Informasi, Ruang Rekam Medis, Apotek, dan UGD.
- b) Lantai 2 : pada bangunan utama digunakan untuk ruangan Kepala Balai, ruang sekretaris, ruang rapat, ruang tata usaha, ruang administrasi medis, dan ruang administrasi sosial. Bangunan/Gedung Wanita
- 1). Lantai 1 : terdiri dari Ruang Observasi, Ruang Konsultasi, Ruang Pertemuan, Ruang *Family Support Group/Family Conseling*.
- 2). Lantai 2 : pada bangunan utama digunakan untuk rehabilitasi pada *fase primary* yaitu *House Growth* yang dilengkapi dengan sarana tempat tidur, toilet, ruang cuci dan ruang jemur.
- 2) Bangunan/Gedung Pria
- a) Lantai 1 : terdiri dari Ruang Observasi, Ruang Konsultasi, Ruang Pertemuan, Ruang *Family Support Group/Family Conseling*, Ruang Pertemuan.
- b) Lantai 2 : pada bangunan utama digunakan untuk rehabilitasi wanita pada *fase detoks* wanita, *fase entry unit* wanita dan *fase primary* wanita, yang dilengkapi dengan sarana tempat tidur, toilet, ruang cuci dan ruang sholat.
- 3). Bangunan *Workshop* : 1 unit
- 4). Bangunan *Half Way House* : 3 unit
- 5). Bangunan Mess Karyawan : 4 unit
- 6). Bangunan Rumah Dinas : 2 unit

- 7). Bangunan Ruang Serba Guna : 1 unit
- 8). Bangunan *Guest House* : 4 kamar
- 9). Bangunan Masjid : 1 unit
- 10). Bangunan Gereja : 1 unit
- 11). Bangunan Olah Raga : 1 unit
- 12). Pos Jaga : 1 unit

2. Sumber Daya

Untuk menciptakan kualitas layanan rehabilitasi yang optimal Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar juga mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Distribusi Pegawai pada dua seksi dan bagian umum, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Berdasarkan jenis pekerjaan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

NO	JENIS PEKERJAAN	STATUS KEPEGAWAIAN			
		PNS		NON PNS	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	KEPALA BALAI	1	-	-	-
2	KEPALA SUB BAGIAN TU	-	1	-	-
3	DOKTER SPESIALIS	1	-	-	-
4	DOKTER UMUM	1	-	1	4
5	DOKTER GIGI	-	1	1	-
6	APOTEKER	-	2	-	1
7	ASISTEN APOTEKER	-	1	-	1
8	FISIOTERAPI	-	-	-	1

9	PENATA RADIOLOGI	-	-	-	1
10	NUTRISI	-	2	-	-
11	PSIKOLOGI	-	4	-	1
12	KONSELOR VCT	-	-	1	1
13	PEMBINA MENTAL AGAMA	1	2	3	-
14	PEMBINA MENTAL PSIKOLOGI	-	1	-	-
15	KONSELOR	1	3	24	6
16	ASISTEN KONSELOR	3	4	-	-
17	ANALIS LABORATORIUM	1	-	-	2
18	BIDAN	1	-	-	-
19	PERAWAT UMUM	1	3	11	9
20	PERAWAT GIGI	-	1	-	-
21	REKAM MEDIS	-	-	-	1
22	ELEKTROMEDIS	-	-	-	1
23	BENDAHARA PENGELUARAN	-	1	-	-
24	PENATA LAPORAN KEUANGAN	-	1	-	1
25	PENYUSUN RENCANA ANGGARAN	-	1	-	-
26	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	1	-	2	1
27	PENGADMINISTRASIAN	-	1	-	3
28	STAF INFORMASI	-	-	2	2
29	TEKNISI UMUM	-	-	2	-
30	PRANATA KOMPUTER	-	-	1	-
31	DRIVER	-	-	5	-
30	SECURITY			28	4
33	CLEANING SERVICE			9	3
	Jumlah	11	30	90	43
	Total	41	133		

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

7. Struktur Organisasi

Sejak berdiri pada bulan April 2012 sampai dengan sekarang, Balai Rehabilitasi Baddoka telah banyak membantu penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk menjalani program rehabilitasi sehingga dapat pulih dari ketergantungan narkoba. Dari tahun ke tahun, jumlah residen yang dirawat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba juga semakin meningkat sehingga banyak masyarakat yang ingin anggota keluarganya pulih atau banyak juga pecandu yang secara sadar ingin pulih atas keinginan sendiri.

Berikut ini adalah jumlah penyalahguna dan/atau pecandu yang telah direhabilitasi pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018.

Tabel 3.3

**Jumlah Klien yang Dirawat Di Balai Rehabilitasi
BNN Baddoka Makassar Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019**

Tahun	Total
2012	120
2013	336
2014	189
2015	315
2016	251
2017	313
2018	304
2019	306

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

B. Gambaran Program Rehabilitasi

1. Gambaran Penyelenggaraan Rehabilitasi

Demi berjalannya proses rehabilitasi dengan baik dan professional, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga memberikan pelayanan medis maupun psikis bagi para residen (penyalahguna narkoba). Pelayanan medis yang dimaksud adalah Fisioterapi, foto USG, Laboratorium, Apotek, *Medical Record*, Ruang EEG, Poli Neurologi, Poli Penyakit Dalam, Poli Gigi, Ruang ICU, Ruang Perawat, Ruang Dokter, Ruang X-Ray, Ruang Radiologi, Ruang Bedah, Ruang IGD, *Spot Check*. Sedangkan pelayanan psikis yang dimaksud adalah konseling psikologi, konseling religi, terapi musik, *family dialog*, kegiatan vokasional.

Kegiatan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menggunakan program *Therapeutic Community* (TC). Program tersebut terdiri dari beberapa tahapan/fase yaitu fase detoksifikasi, fase *entry unit*, fase *primary*, dan fase *re entry*. Fase detoksifikasi dan *entry unit* adalah fase awal sebelum masuk rehabilitasi sosial. Pada fase ini residen mengalami pengeluaran racun dari tubuh dengan terapi simptomatis atau tanpa obat. Selain itu juga dilakukan observasi kasus dual diagnosis atau penyakit penyerta dan pengenalan program *Therapeutic Community* (TC).

Fase *Primary* dan *Re-entry* adalah kombinasi program TC, Psikoterapi, konseling, *Narcotics Anonymous* (NA)/12 steps, religi, dan pengobatan penyakit penyerta fisik dan mental. Pada fase *primary* residen dianggap sudah bersih dari zat-zat terlarang. Pada fase ini residen diajarkan untuk disiplin, mengenal diri sendiri, kejujuran, mencoba mengatasi masalah sendiri dengan mengikuti program *Therapeutic Community* sepenuhnya yang terdiri dari 3 tahap. Tahap-tahap tersebut adalah *younger*, *middle*, dan *older*. Sedangkan pada fase *Re-entry* Residen sudah mulai diberikan kepercayaan untuk mandiri. Residen membuat *personal schedule* yang dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Pada tahap ini Residen diajarkan untuk mencari penghasilan untuk kebutuhannya sendiri dengan cara membuat proyek seperti cuci motor dan mobil, laundry, kerajinan

tangan, dan lain-lain. Selain itu, klien juga sudah diperbolehkan keluar dari lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam waktu tertentu untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar.

2. Alur Proses Rehabilitasi

Calon klien voluntary datang diantar keluarga, dan klien compulsory diantar penyidik atau dieksekusi oleh Jaksa. Kedua macam calon klien (voluntary dan compulsory) melakukan proses awal pada bagian pendaftaran, kemudian di periksa oleh tenaga medis untuk menentukan apakah calon klien tersebut layak untuk direhabilitasi rawat inap ataupun rawat jalan. Hasil pemeriksaan medis dengan menggunakan metode **Asisst** (*alcohol, smoking and substances involment screening test*). Ketika hasilnya positif sebagai pecandu maka calon klien tersebut masuk fase detoksifikasi (+_ 2 minggu) kemudian ke fase entry unit (+_ 2 minggu). Kemudian masuk fase rehabilitasi soaial yang berlangsung 2 bulan bagi klien dengan gangguan cognitive saja sedang klien yang mengalami gangguan cognitiv dan behavior dilakukan rehabilitasi sosial selama 4 bulan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar 3.2

Alur Proses Rehabilitasi

TAHAPAN ALUR PROGRAM

Screening & Intake

(Tes urin, Asesmen awal, Persetujuan, Body spot check)



Detoksifikasi

(Masa pemutusan zat, ± 2 minggu)

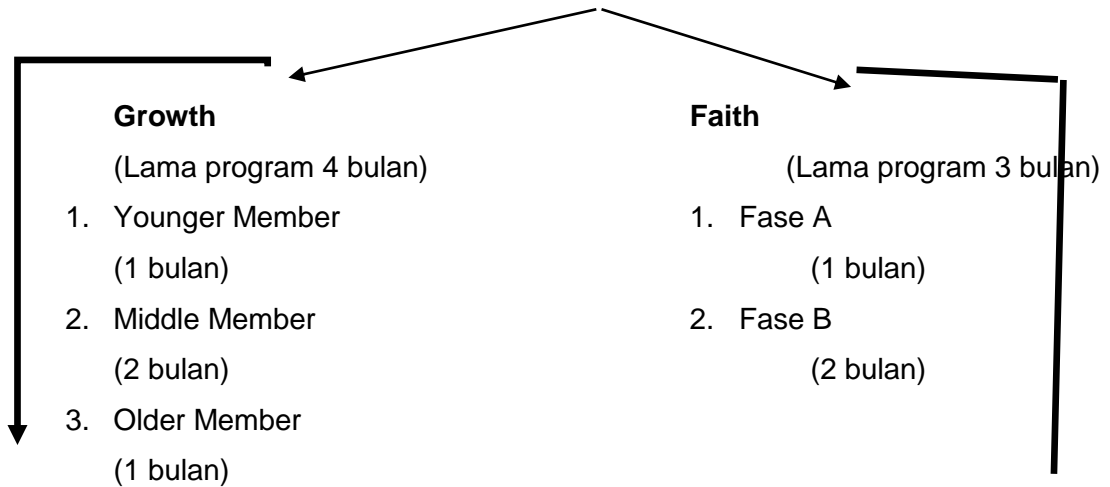


Entry Unit

(Stabilisasi putus zat, Pengenalan Program, Asesmen, Family Dialog, ± 2 minggu)



Primary



Re-Entry

1 minggu

Fase B

2 minggu

Fase C

1 minggu

Pasca Rehabilitasi

(Lama Program 2-3 bulan)

Hutan Pendidikan UNHAS
Bengo-Bengo



Rumah Damping

Back To Family

3. Metode Rehabilitasi

a. Rehabilitasi 1 Bulan

No	Kriteria	Sub Kriteria	Metode Layanan Rehabilitasi	
			Intervensi Medis	Intervensi Sosial
1	Tingkat penggunaan ringan s.d sedang	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat penggunaan dalam tahap rekreasional / situasional. Frekuensi penggunaan tidak tetap dan/atau jarang. Nilai skor ASI untuk dimensi penggunaan narkotika 0 s.d 3 	1. Pemeriksaan Status Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Darah Pemeriksaan EKG Pemeriksaan Rontgen Pemeriksaan HIV/AIDS Pemeriksaan Odontogram Pengkajian Keperawatan Pemeriksaan Dokter Umum 	Fase Intervensi Non Farmakologik (± 20 Hari) <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan bergabung dengan komunitas yang terstruktur, memiliki hierarki, dan jadwal harian, pembagian tugas dan tanggung jawab yang mendukung pemulihan
2	Masalah medis, psikiatris, maupun sosial yang memerlukan pemeriksaan lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> Gangguan fisik <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan fisik sedang s.d berat sehingga tidak dapat mengikuti aktivitas berat Gangguan psikiatris <ul style="list-style-type: none"> Terdapat gangguan psikiatris sedang s.d berat yang diakibatkan oleh penggunaan zat 	2. Pemeriksaan Status Mental <ol style="list-style-type: none"> Assesment Awal Psikiatri Psikometri (MCM) 	<ol style="list-style-type: none"> Terapi berbasis kebutuhan dengan berbagai metode: <ul style="list-style-type: none"> Konseling berorientasi abstinensi, psikoterapi kognitif spesifik/ wawancara motivasional, terapi berfokus pada solusi, pendekatan kognitif-perilaku (CBT), pendekatan 12 langkah Penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, peningkatan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dalam kelompok
3	Mempunyai kegiatan rutin	<ol style="list-style-type: none"> Mempunyai pekerjaan tetap yang tidak mengizinkan klien untuk mengikuti program pemulihan jangka panjang Sedang menempuh pendidikan atau pelatihan yang tidak mengizinkan klien untuk mengikuti program pemulihan jangka Panjang 	3. Observasi dan Layanan kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis <ol style="list-style-type: none"> Visite Dokter Konsultasi Pemberian Terapi 	<ol style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Penanaman nilai disiplin dalam diri residen, pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, peningkatan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, kerjasama dalam kelompok
4	Ada dukungan sosial yang baik	<ol style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan zat menyebabkan kegagalan dalam 	4. Terapi Okupasi <ol style="list-style-type: none"> Merawat Lingkungan Tempat Tinggal 	Fase Evaluasi (± 3 Hari)

		<p>melaksanakan peran dalam pekerjaan, sekolah, atau rumah</p> <p>2. Mendapat support yang baik dari keluarga dan berada pada lingkungan yang aman</p>	<p>b. Perawatan Diri</p> <p>c. Olahraga</p> <p>d. Ritual ibadah</p> <p>5. Terapi Edukasi</p> <p>a. Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat</p> <p>b. Pencegahan Penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS, dan TBC</p> <p>c. Perilaku Hidup Bersih Sehat</p> <p>d. Perilaku Seksual Sehat</p> <p>e. Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>f. Craving dan Craving Coping Skill</p> <p>6. Terapi Kelompok</p> <p>a. Role Play</p> <ul style="list-style-type: none"> • Training Menolak Narkoba • Manajemen Stress • Teknik Pencegahan Relapse • Teknik Menjadi Aseritif <p>b. Permainan Interaktif</p> <p>c. Penyusunan <i>Personal Time</i></p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi terapi secara menyeluruh</p> <p>2. Evaluasi dengan berbagai metode: seminar evaluasi diri dan rencana treatment lanjutan</p>
--	--	--	--	---

b. Rehabilitasi 3 Bulan

No	Kriteria	Sub Kriteria	Metode Layanan Rehabilitasi	
			Intervensi Medis	Intervensi Sosial
1	Teratur pakai (2-3 kali / minggu)	1. Penyalahgunaan zat teratur dalam rentang waktu tertentu	<p><u>Detoksifikasi selama ± 2 Minggu</u></p> <p>7. Pemeriksaan Status Kesehatan:</p> <p>a. Pemeriksaan Darah</p> <p>b. Pemeriksaan EKG (untuk usia di atas 35 tahun)</p> <p>c. Pemeriksaan Rontgen</p> <p>d. Pemeriksaan HIV/AIDS</p> <p>e. Pemeriksaan Odontogram</p> <p>f. Pengkajian Keperawatan</p> <p>g. Pemeriksaan Dokter Umum</p> <p>8. Pemeriksaan Status Mental</p> <p>a. Assessment Awal Psikiatri</p> <p>b. Psikometri (MCM)</p> <p>9. Observasi dan Layanan kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis</p> <p>a. Visite Dokter</p> <p>b. Konsultasi</p> <p>c. Pemberian Terapi</p>	<p><u>Fase Primary</u></p> <p>A. Fase Orientasi (±14 hari)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman nilai disiplin dalam diri residen - Pengenalan diri sendiri dan sesama anggota kelompok - Pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat - Pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab diri <p>B. Fase Pelaksanaan (± 38 hari)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan dan penguatan kedisiplinan diri, rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi. - Pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama (Teamwork Building) dan pembinaan kepada residen junior - Pemantapan pengendalian diri - Penguatan kerjasama dalam kelompok dan kehidupan sosial internal sebagai tahap awal dalam kehidupan bermasyarakat.
		2. Nilai skor ASI untuk dimensi penggunaan narkotika 4 s.d 5		
2	Komplikasi fisik maupun psikiatris tingkat ringan s.d sedang	1. Gangguan fisik	<p>-Penyakit / keterbatasan fisik ringan hingga sedang</p> <p>-Dapat mengikuti aktivitas fisik sedang hingga berat</p>	
		2. Gangguan psikiatris		
3	Ada dukungan sosial yang baik	1. Penyalahgunaan zat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan peran dalam pekerjaan, sekolah atau rumah.	<p>-Gangguan psikiatrik ringan akibat penyalahgunaan zat</p>	
		2. Penyalahgunaan zat menyebabkan masalah interpersonal atau sosial yang disebabkan (misalnya KDRT saat intoksikasi zat)		

		<p>3. Mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat.</p> <p>4. Mendapat support yang baik dari keluarga dan berada pada lingkungan yang aman.</p>	<p>10. Terapi Okupasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Merawat Lingkungan Tempat Tinggal Perawatan Diri Olahraga Ritual Ibadah <p>11. Terapi Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat <p>12. Terapi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> Role Play Training Menolak Narkoba Permainan Interaktif <p>Stabilisasi selama (± 2 Minggu)</p> <ol style="list-style-type: none"> Observasi dan Layanan Kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis Visite Dokter Konsultasi Pemberian Terapi <p>2. Psikoterapi</p> <ol style="list-style-type: none"> Art Therapy Enhancing Motivation Mengenal Diri Sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> Terapi berfokus pada solusi, pendekatan kognitif perilaku (CBT), pendekatan 12 langkah dan journal book. <p>C. Fase Pemantapan (± 14 hari)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan penyusunan rencana untuk menyiapkan mental percaya diri. Pelaksanaan rencana kegiatan yang didampingi oleh konselor/instruktur. Pemberian buku saku untuk menulis berbagai kegiatan. Pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh, pemberian kegiatan vokasional dan melaksanakan seminar pada sesama residen. Pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan Operasional tertentu dan pembinaan kepada residen yunior <p>Pelayanan Rehabilitasi Sosial diselenggarakan dengan metode Therapeutic Community modifikasi yang tetap mengacu pada 4 struktur dan 5 pilar.</p>
			<p>4 Struktur</p> <p>1. Behaviour Management Shaping (pembentukan tingkah laku)</p>	

		<p>3. Terapi Okupasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merawat Lingkungan Tempat Tinggal b. Perawatan Diri b. Olahraga c. Ritual Ibadat <p>4. Terapi Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat b. Kesehatan Gigi dan Mulut c. Pencegahan Penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS dan TBC d. Craving dan Craving Coping Skill e. Perilaku Seksual Sehat <p>5. Terapi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Role Play <ul style="list-style-type: none"> - Training Menjadi Aseritif - Teknik Pencegahan Relapse b. Permainan Interaktif c. Penyusunan <i>Personal Time</i> 	<p>Residen mempelajari teknik dan sistem yang ada dengan menggunakan tools of the house secara benar.</p> <p>2. Emotional and Psychological (Pengendalian emosi dan psikologi) Dilakukan melalui kelompok statik, konseling individual, psikoterapi, terapi kelompok, teguran rekan sebaya, FSG, dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan.</p> <p>3. Intellectual and Spiritual (Pengembangan pemikiran dan kerohanian) Pemberian terapi edukasi, group terapi, penerapan nilai-nilai agama (religi session).</p> <p>4. Vocational and Survival Skills (Keterampilan kerja dan bertahan hidup) Pemberian terapi edukasi, terapi kelompok, keterampilan diri, probing dan terapi vokasional.</p> <p>5 Pilar</p> <p>1. Family Milieu Concept (Konsep kekeluargaan) Untuk menyamakan persamaan di kalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga (Equal).</p>
--	--	--	---

			<p>Rawat Inap/Primary/Re-Entry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi dan Layanan Kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis 2. Konsultasi 3. Pemberian Terapi 6. Terapi Edukasi <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat b. Kesehatan Gigi dan Mulut c. Pencegahan Penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS dan TBC d. Perilaku Hidup Bersih Sehat e. Perilaku Seksual Sehat 	<p>2. Peer Pressure (tekanan rekan sebaya) Proses dimana kelompok memberikan tekanan positif kepada sesama komunitas.</p> <p>3. Therapeutic Session (sesi terapi) Berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam membantu proses pemulihan dalam bentuk terapi edukasi</p> <p>4. Religi Session (sesi agama) Proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama dan penerapannya</p> <p>5. Role Modeling (ketauladanan) Proses pembelajaran dimana seorang residen belajar dan mengajar mengikuti ketauladanan mereka.</p>
--	--	--	---	---

c. Rehabilitasi 6 Bulan

No	Kriteria	Sub Kriteria	Metode Layanan Rehabilitasi	
			Intervensi Medis	Intervensi Sosial
1	Tingkat penggunaan dalam fase ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya gejala withdrawal Terjadi toleransi dan peningkatan dosis penggunaan Nilai skor ASI untuk dimensi penggunaan narkotika 6 s.d 9 	<p>Detoksifikasi selama ± 2 Minggu</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Status Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Darah Pemeriksaan EKG (untuk usia di atas 35 tahun) Pemeriksaan Rontgen Pemeriksaan HIV/AIDS Pemeriksaan Odontogram Pengkajian Keperawatan Pemeriksaan Dokter Umum 	<p>Fase Primary (±4 bulan)</p> <ol style="list-style-type: none"> Fase Younger Member (± 2 bulan) <ul style="list-style-type: none"> Penanaman nilai disiplin dalam diri residen Pengenalan diri sendiri dan sesama anggota Pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat Pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab diri
2	Komplikasi fisik maupun psikiatris	<ol style="list-style-type: none"> Gangguan fisik <ul style="list-style-type: none"> Penyakit / keterbatasan fisik ringan Dapat mengikuti aktivitas fisik sedang hingga berat tanpa mengalami komplikasi fisik Gangguan psikiatris <ul style="list-style-type: none"> Gangguan psikiatrik ringan akibat penyalahgunaan zat 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan Status Mental <ol style="list-style-type: none"> Assesment Awal Psikiatri Psikometri (MCM) 	<ol style="list-style-type: none"> Fase Middle Member (±1 bulan) <ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kedisiplinan diri Peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota kelompok. Pemantapan pola hidup sehat Pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama (Teamwork Building) Pemantapan pengendalian diri
3	Bermasalah dengan kehidupan sosial	<ol style="list-style-type: none"> Aktivitas sosial, pekerjaan, dan rekreasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat penyalahgunaan zat Kehilangan kemampuan untuk menjadi produktif secara sosial maupun finansial 	<ol style="list-style-type: none"> Observasi dan Layanan kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis <ol style="list-style-type: none"> Visite Dokter Konsultasi Pemberian Terapi 	<ol style="list-style-type: none"> Fase Older Member (± 1 bulan)

	<p>a. Merawat Lingkungan Tempat Tinggal</p> <p>b. Perawatan Diri</p> <p>c. Olahraga</p> <p>d. Ritual Ibadah</p> <p>17. Terapi Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengenalan Tahap Program Pemulihan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat <p>18. Terapi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> Role Play Training Menolak Narkoba Manajemen Stress Permainan Interaktif <p>Stabilisasi selama (± 2 Minggu)</p> <p>5. Observasi dan Layanan Kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis</p> <ol style="list-style-type: none"> Visite Dokter Konsultasi Pemberian Terapi <p>6. Psikoterapi</p> <ol style="list-style-type: none"> Art Therapy 	<p>- Penguatan kedisiplinan diri menjadi suatu kebutuhan bukan sebagai pemaksaan</p> <p>- Pengenalan residen junior</p> <p>- Penguatan pola hidup sehat menjadi bagian dari kepribadian</p> <p>- Penguatan kerjasama dalam kelompok dan Kehidupan sosial internal tempat rehabilitasi sebagai tahap awal dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>- Pemberian peran dan tugas dalam pelaksanaan Operasional tertentu dan pembinaan kepada residen junior</p> <p><u>Fase Re-Entry (± 1 bulan)</u></p> <p>1. Tahap A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan tes bakat dan minat - Workshop untuk penyiapan mental percaya diri - Pelatihan penyusunan rencana kegiatan <p>2. Tahap B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dititikberatkan pada pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disusun - Residen didampingi oleh konselor - Evaluasi dilaksanakan setiap hari setelah - Kegiatan selesai
--	---	---

			<p>b. Enhancing Motivation</p> <p>c. Mengenal Diri Sendiri</p> <p>d. Relaksasi</p> <p>7. Terapi Okupasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Merawat Lingkungan Tempat Tinggal Perawatan Diri Olahraga Ritual Ibadah <p>8. Terapi Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat Kesehatan Gigi dan Mulut Pencegahan Penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS dan TBC Craving dan Craving Coping Skill Perilaku Seksual Sehat <p>9. Terapi Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> Role Play <ul style="list-style-type: none"> Training Menjadi Aseritif Teknik Pencegahan Relapse Permainan Interaktif Penyusunan <i>Personal Time</i> 	<p>- Kunjungan ke keluarga dapat dilakukan</p> <p>- Diberikan buku saku untuk menulis berbagai kegiatan</p> <p>3. Tahap C</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program Pascarehabilitasi Dititik beratkan pada pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh <p>Pelayanan Rehabilitasi Sosial diselenggarakan dengan metode Therapeutic Community yang memiliki 4 struktur dan 5 pilar.</p> <p>4. Struktur</p> <p>5. Behaviour Management Shaping (pembentukan tingkah laku) Residen mempelajari teknik dan sistem yang ada dengan menggunakan tools of the house secara benar.</p> <p>6. Emotional and Psychological (Pengendalian emosi dan psikologi) Dilakukan melalui kelompok statik, konseling individual, psikoterapi, terapi kelompok, teguran rekan sebaya, FSG, dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan.</p> <p>7. Intellectual and Spiritual (Pengembangan pemikiran dan kerohanian)</p>
--	--	--	---	---

<p>Pemberian terapi edukasi, group terapi, penerapan nilai-nilai agama (religi session).</p>	<p>8. Vocational and Survival Skills (Keterampilan kerja dan bertahan hidup)</p> <p>Pemberian terapi edukasi, terapi kelompok, keterampilan diri, probing dan terapi vokasional.</p>	<p>Pemberian terapi edukasi, group terapi, penerapan nilai-nilai agama (religi session).</p>
<p>5 Pilar</p> <p>6. Family Milieu Concept (Konsep kekeluargaan)</p> <p>Untuk menyamakan persamaan di kalangan komunitas supaya bersama menjadi bagian dari sebuah keluarga (Equal).</p> <p>7. Peer Pressure (tekanan rekan sebaya)</p> <p>Proses dimana kelompok memberikan tekanan positif kepada sesama komunitas.</p> <p>8. Therapeutic Session (sesi terapi)</p> <p>Berbagai kerja kelompok untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi dalam membantu proses pemulihan dalam bentuk terapi edukasi</p> <p>9. Religi Session (sesi agama)</p> <p>Proses untuk meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman agama dan penerapannya</p>	<p>Rawat Inap/Primary/Re-Entry</p> <p>a. Observasi dan Layanan Kesehatan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis</p> <p>b. Konsultasi</p> <p>c. Pemberian Terapi</p> <p>10. Terapi Edukasi</p> <p>a. Jenis Narkoba, Efek terhadap Otak dan Tubuh, dan Gejala Putus Zat</p> <p>b. Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>c. Pencegahan Penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, IMS dan TBC</p> <p>d. Perilaku Hidup Bersih Sehat</p> <p>e. Perilaku Seksual Sehat</p>	<p>Pemberian terapi edukasi, group terapi, penerapan nilai-nilai agama (religi session).</p>

				<p>10. Role Modeling (ketauladanan) Proses pembelajaran dimana seorang residen belajar dan mengajari mengikuti ketauladanan mereka.</p>
--	--	--	--	--

d. Rawat Jalan



No	Kriteria	Sub Kriteria	Metode Layanan Rehabilitasi	
			Intervensi Medis	Intervensi Sosial
1	Tingkat penggunaan ringan s.d sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian eksperimental/coba pakai 2. Frekuensi penggunaan tidak tetap dan/atau jarang 3. Nilai skor ASI untuk dimensi penggunaan narkotika 0 s.d 3 <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai penyakit/keterbatasan fisik ringan s.d berat b. Mempunyai riwayat masalah psikiatris sebelum penyalahgunaan zat c. Mempunyai masalah psikiatri akibat dari penyalahgunaan 	<p>19. Pemeriksaan Status Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> h. Pemeriksaan Darah i. Pemeriksaan HIV/AIDS j. Pemeriksaan Dokter Umum 	<p>Terapi berbasis kebutuhan dengan berbagai metode: Konseling berorientasi abstinensi, psikoterapi kognitif spesifik/ wawancara motivasional, terapi berfokus pada solusi, pendekatan kognitif-perilaku (CBT), NA , terapi kelompok, Family Dialogue</p>
2	Tidak memiliki komplikasi fisik/psikiatris/sosial akibat penyalahgunaan zat	<p>20. Pemeriksaan Status Mental</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Assessment Awal Psikiatri 	<p>21. Observasi dan Layanan kesehatan oleh dokter</p>	

		zat dengan fungsi kognitif yang cukup untuk menerima terapi	umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan fisioterapis d. Konsultasi e. Pemberian Terapi	
3	Mempunyai pekerjaan atau sedang menempuh pendidikan atau pelatihan	d. Mempunyai pekerjaan tetap yang tidak dapat ditinggalkan e. Sedang menempuh pendidikan atau pelatihan yang tidak dapat ditinggalkan		
4	Ada dukungan sosial yang baik	2. Keluarga dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh balai 11. Mendapat support yang baik dari keluarga dan berada pada lingkungan yang aman		
5	Anak-anak < 17 tahun			

C. Kerja Sama

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sejak berdiri tahun 2012 telah melakukan perjanjian kerjasama/MOU dengan beberapa instansi untuk kemajuan dan pengembangan program rehabilitasi bagi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka serta kemajuan dan perkembangan instansi terkait. Adapun perjanjian kerjasama/MOU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Perjanjian kerjasama/MOU tersebut tentang Kerjasama Penelitian dan Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar dalam rangka melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
2. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan Yayasan YKP2N "Kesuma Hati" Makassar. Perjanjian tersebut berisi tentang Kerjasama Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Rujukan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
3. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan Akademi Keperawatan Sandi Karsa Makassar. Perjanjian tersebut berisi tentang Pelaksanaan Praktik Pendidikan Kesehatan Bidang Keperawatan Mental Psikiatri serta Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dititikberatkan pada Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.
4. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan RSUD Sayang Rakyat Makassar. Perjanjian tersebut berisi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pasien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat Makassar dalam Rangka Melakukan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

5. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan PT. Mitra Hijau Asia. Perjanjian tersebut berisi tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Medis Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.
6. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Makassar. Perjanjian tersebut berisi tentang Pengujian/Kalibrasi Peralatan Kesehatan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.
7. Perjanjian kerjasama antara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan Kementerian Agama Kota Makassar. Perjanjian tersebut berisi tentang Peningkatan Pelayanan Keagamaan Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dalam Rangka Melakukan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Pengembangan

Sebuah instansi dapat dikatakan berhasil jika terus melakukan perbaikan dan pengembangan bagi kemajuan instansi tersebut, begitu juga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah melakukan beberapa pengembangan untuk kemajuan instansi sehingga secara langsung dapat membantu lebih banyak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk pulih dan kembali hidup sehat, mandiri dan produktif.

Salah satu program pengembangan yang akan dilakukan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ke depan adalah *Hospital Based Rehabilitation*. *Hospital Based Rehabilitation* yaitu rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang berbasis pada sistem Rumah Sakit, di mana terdapat pasien rawat inap dan rawat jalan. Layanan yang diberikan berupa layanan medis dan sosial yang dibuat seperti kondisi di Rumah Sakit, supaya pasien merasa bahwa dirinya sakit dan berada di tempat tersebut untuk menjalani pengobatan dan memperoleh kesembuhan. *Hospital Based Rehabilitation* ini akan

membantu penyalahguna dan/atau pecandu narkoba untuk pulih secara medis dan psikis. Hal ini didukung oleh akses yang mudah untuk menjangkau Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan hubungan kerjasama dengan banyak stakeholder, seperti Universitas Hasanuddin, Pertamina, Pelindo, Balai Latihan Kerja, perusahaan swasta, dll. Jejaring bersama ini sangat membantu Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk menjadikan klien pulih, produktif, dan dapat menjalankan fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat.

BAB 4

PROSES PELEMBAGAAN NILAI DAN NORMA BAGI KLIEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA

A. Nilai

1. Pengertian Nilai

Nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang berharga dalam kehidupan manusia, seperti halnya tentang apa yang dianggap baik atau buruk, layak atau tidak layak, benar atau salah, penting atau tidak penting, indah atau tidak indah, dan tumbuh secara organik dalam realitas empirik.

Perasaan inilah yang mendorong manusia untuk membuat pola di dalam kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam kelompok tersebut. Pola tersebut menjadi konsep abstrak yang berada dalam angan-angan dan pikirannya yang berisi sesuatu yang seharusnya ada. Sesuatu yang harus ada menjadi patokan-patokan atau sandaran dalam tata cara pergaulan antar-umat manusia, antar-suku bangsa, antar-bangsa hingga terbentuk masyarakat dunia yang memiliki budaya.

Pengertian nilai dan fungsi nilai, pada akhirnya, dapat berbeda sesuai konteks kebutuhan. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memiliki satu buku saku sebagai standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Di dalam buku saku ini terdapat standar nilai yang

dianggap positif dan harus dilakukan demi kebaikan klien rehabilitasi. Setidaknya ada dua standar nilai, yaitu medis dan sosial. Nilai medis maupun nilai sosial ini harus dipegang teguh, dipahami, dijalankan atau diamalkan, ditaati, dan dipertahankan dalam praktik kehidupan sehari-hari para klien. Nilai-nilai yang dianggap positif dan direkomendasikan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menjadi standar perilaku bagi para klien. Tetapi, pada saat bersamaan, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga harus menaati standar pelayanan medis supaya tidak melanggar Hak Asasi Manusia, Hukum, maupun agar tidak terjadi mal-praktek. Nilai mengikut klien maupun Balai Rehabilitasi BNN Baddoka itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak IF selaku kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, mengungkapkan bahwa:

”..... Untuk melihat kondisi evaluasi dari klien selama difase medis maka akan dilakukan *assessment* ulang, dimana dilakukan oleh 6 profesi, diantaranya dokter, perawat, spikiater, psikologi, konselor, bimbingan mental dan tenaga administrasi. Dimana ada 6 assesment yang dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi kondisi klien selama berada pada rehabilitasi medis, hasil asesmend ini akan dipakai dalam *case conferens* oleh para ahli sesuai bidang masing masing untuk menentukan apakah klien akan menjalani rehabilitasi jangka pendek, atau program jangka panjang. Dari hasil asesmen ini yang menjadi acuan pelaksanaan program rehabilitasi (*individual treatment plan*). ...” (IF, 24/07/2020).

Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral (etik), susila, dan religius, serta beberapa aspek dasar yang terkandung di dalamnya; juga norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Dari segi materil, baik individual, kolektif, maupun negara acap kali terpaksa harus menerima beban kerugian.

Begitu juga dari segi immateriil, baik individual, kolektif, maupun negara dengan tidak adanya rasa aman, ketenteraman, hidup dan kedamaian.

Masalah sosial mengundang minat para ilmuwan untuk melibatkan interdisiplin ilmu dalam pembasannya dari segala aspek, terutama dalam upaya pembinaan kembali pelaku penyimpangan sosial (deviasai sosial) dan untuk menghasilkan langkah preventatif serta penanggulangannya. Ahli sosiologi (sosiolog) terlibat langsung untuk mencari sebab-sebab masalah sosial serta menemukan solusi dari sisi ilmu sosial untuk menanggulangnya secara tepat. Demikian pula ahli hukum diharapkan memberikan sumbangan konsep dengan konstruksi baru sebagai upaya penanggulangan masalah ini. Dalam ilmu sosial, terkhusus lagi ilmu Patologi sosial, penyakit-penyakit sosial (sosiopatik) merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosiokultural di masa kini. Di samping itu, faktor yang melatarbelakangi disorganisasi sosial di era sekarang ini adalah faktor politik yang carut marut, banyaknya aliran-aliran keagamaan yang berbeda dan sifat keumuman, faktor sosial budaya, serta ekonomi yang labil sebagai faktor klasik.

Dimana yang dimaksud diatas adalah dalam penerapan nilai dan norma perlu adanya pemeriksaan awal terhadap klien, dimana yang dilakukan oleh para ahli dibidangnya masing-masing. Tes tersebut berguna untuk mengetahui sampai tahap apa zat adiktif mampu mempengaruhi klien tersebut. Jika sudah diketahui maka program apa saja yang sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Untuk mengukur tingkat kebutuhan penanganan, maka masing-masing dari klien memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda sesuai dengan hasil dari assesment yang sudah diterapkan, program yang diberikan oleh Balai Rehab setiap klien tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan yang lainnya sesuai dengan kondisi klien itu sendiri. Kondisi klien bisa dilihat dari proses tes yang dilakukan sesuai prosedur-prosedur yang sudah di tetapkan. Maka dalam hal ini perlu ada penanggulangan terhadap para penyalah guna zat adiktif, guna memulihkan klien dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap zat adiktif (narkoba), seperti yang dikatakan oleh ketua Balai Rehabilitas BNN bahwa:

“.... Dimana di fase stabilisasi (rehabilitasi medis), sudah ada pengenalan program dan pengenalan nilai-nilai juga norma. Mulai dari norma agama, norma sosial, dimana di fase ini sudah mulai diterapkan adanya pembelajaran.” (IF, 24/07/2020).

Pembinaan mental seseorang dilakukan sejak kecil, semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari maupun tidak disadari ikut menjadi sumber unsur-unsur yang tergabung dalam kepribadian seseorang. Di antara unsur yang akan menentukan corak kepribadian ada nilai yang diambil dari lingkungan terutama keluarga sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai agama, moral, serta sosial. Apabila dalam pengalaman di waktu kecil banyak didapat nilai agama, kepribadian akan mempunyai unsur-unsur baik. Demikian sebaliknya, jika nilai yang diterimanya itu jauh dari agama, unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan akan menjadi guncang. Nilai positif yang tetap dan tidak berubah adalah nilai agama, sedangkan nilai sosial dan moral yang didasarkan bukan kepada agama akan sering mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Mental yang hanya terbina dari nilai sosial dan moral yang mungkin akan berubah ketika ada guncangan yang akan membawa kepada keguncangan jiwa.

Orang yang merasa tidak tenang, aman, serta tentram dalam hatinya adalah orang yang sakit rohani atau mental. Para ahli psikiater mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar tertentu yang diperlukan untuk melangsungkan proses kehidupan secara lancar. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan jasmani dan rohani ataupun kebutuhan sosial. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari tak jarang dijumpai bahwa seseorang tak mampu menahan keinginan bagi terpenuhinya kebutuhan dirinya. Dalam kondisi seperti itu akan terjadi pertentangan dalam batin. Pertentangan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rohani, yang dalam kesehatan mental disebut kekusutan rohani atau kekusutan fungsional.

Menurut Paisol Burlian dalam bukunya Patologi Sosial (2016) mengungkapkan bahwa Penyimpangan dalam kelompok, masyarakat atau

lingkungan sosial bisa menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semuanya bergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan, dan penampakkannya juga bergantung pada harapan dan tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Oleh karena itu, norma sosial itu bersifat kompleks memaksa. Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, kemarahan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat, dan tindakan-tindakan konkret.

Kompleks dari reaksi-reaksi itu dapat dinyatakan sebagai kusien-toleransi, yakni ekspresi subjek dan kuantitatif terhadap penyimpangan (tingkah laku patologis), serta kesediaan masyarakat untuk menerima atau menolak penyimpangan tadi. Dengan kata lain, kusien-toleransi merupakan perbandingan tingkah laku objek yang terlihat sosiopat dengan kesediaan lingkungan sosial untuk menoleransinya.

Burlan dalam bukunya *Patologi sosial*, mengungkapkan bahwa penyimpangan penyalahgunaan zat adiktif dianggap sebagai Gangguan Mental (*mental disorder*) merupakan *perpektif Diagnosis and statistical manual of mental disorder (DSM)*. Adanya gangguan klinis yang bermakna berupa sindrom atau pola perilaku dan psikologi, gejala klinis tersebut menimbulkan “penderitaan” (*distress*), antara lain dapat berupa rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tenang dan disfungsi organ tubuh. Di samping itu, juga menimbulkan gejala “disabilitas” dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasanya dan diperlukan untuk perawatan diri dan keberlangsungan hidup.

Menurut Kartini Kartono (2001), gangguan mental merupakan bentuk gangguan dari kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) yang disebabkan oleh kegagalan bereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimulus eksternal dan ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan. Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimulus sosial yang dikombinasikan dengan faktor penyebab sekunder lainnya (Kartini Kartono dalam Paisol Burlan, 2016: 68).

Perubahan sosial sosial yang serba cepat merupakan proses organis yang sangat dinamis, yang menyebabkan banyak ketidakstabilan dan kurang adanya kesepakatan antara masing-masing anggota masyarakat mengenai pola kehidupan sehari-hari. Ini mengakibatkan banyak individu dan kelompok yang menggunakan cara penyelesaian masalah semauanya dan anarkistis. Lembaga dari organisasi sosial yang seharusnya mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat banyak yang tidak terkendali, lalu menjadi patologis secara psikis atau sosial. Semua itu pada hakikatnya merupakan efek samping dari modernisasi dan perkembangan zaman.

Sama halnya dengan yang terjadi sekarang, bahwasannya banyak dari pemuda-pemudi maupun masyarakat yang menggunakan narkoba sebagai bahan pelampiasan penyelesaian masalah yang mereka lalui. Dari awalnya yang hanya sebagai pelarian maka lambat laun zat adiktif ini menjadi titik acuan untuk mereka menjalani hidup. Sehingga timbulah rasa ketergantungan yang semakin hari semakin meningkat maka secara bersamaan akan timbul pula masala sosial baru yang ditimbulkan, seperti minuman alkohol, judi, anarkis, mencuri, dan sebagainya. Maka dalam hal ini perlu ada penanggulangan terhadap para penyalah guna zat adiktif, guna menyembuhkan klien dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap zat adiktif (narkoba), seperti yang dikatakan oleh ketua Balai Rehabilitas BNN bahwa:

2. Jenis-jenis Nilai

Menurut Notonegoro (dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011: hal 124-125) nilai bisa dibedakan menjadi tiga macam yakni:

- a. Nilai material, yaitu meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur dengan alat ukur tertentu seperti uang, atau benda-benda berharga lainnya. Seperti yang dikatakan oleh *Manajer On Duty* (MOD) Rehabilitas Sosial bahwa Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga memberikan penanaman nilai berupa bagaimana melatih skill untuk menciptakan karya seni:

“...di balai rehabilitas ini, klien diajarkan tentang kreativitas seni, untuk melatih kreatifitas seni. Selain itu dimana *daily activity* mereka sudah terstruktur dan terjadwal sesuai dengan program Balai salah satu contoh kegiatan *Saturday night activity* (SNA) untuk menumbuhkan kebersamaan, kekeluargaan, nilai kebersamaan. seminar dasar (terapi edukasi) dimana diberikan di fase stabilisasi, dimana materinya adalah adiksi, Kesehatan umum. kesehatan mulut, pemulihan, tentang masalah penyakit-penyakit fisik dan lain lain

 (Bro. SN, 20/08/2020).

Balai Rehabilitas BNN Baddoka, mencoba berikan pembelajaran yang efektif untuk kliennya dengan memberikan bahan edukasi yang mampu dimanfaatkan klien saat berada di luar balai. Salah satunya adalah kreatifitas seni rupa yaitu diajakannya membuat berbagai seni kerajinan tangan yang nantinya bisa mereka jual untuk dan menghasilkan uang guna melanjutkan hidup mereka diluar ketika mereka kembali ke masyarakat. Selain itu edukasi yang diberikan oleh balai rehap selain untuk bekal mereka saat mereka kembali ke masyarakat juga sebagai sarana agar mereka tidak mengingat kembali mengenai zat adiktif. Tujuannya adalah semakin sibuk seseorang maka orang itu tidak akan mengingat masa-masa lalu mereka dan tidak mengingatkan mereka dengan narkoba. Kegiatan ini juga berfungsi membuat mereka sadar bahwa ada kegiatan positif lain yang mampu mereka lakukan selain menggunakan narkoba.

Dalam nilai material ini diajarkan untuk mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selain itu banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa mereka dapat, juga mengeksplorasi skill mereka dalam karya seni. Entah dalam bentuk kerajinan tangan, musik, bercocok tanam dan lain sebagainya. Selain ilmu dan pengetahuan mereka bisa memanfaatkan karya mereka untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal, tanpa merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

- b. Nilai vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Suatu benda akan dinilai daya guna yang dimiliki benda

tersebut. Misalnya pasir akan bernilai karena digunakan untuk membuat konstruksi bangunan. Tetapi ketika pasir berada di gurun pasir tertentu tidak bernilai sebab di sana pasir tidak berguna. Di Balai Rehabilitasi Sosial juga diajarkan bagaimana bagaimana manajemen diri dalam lingkungan sosial mereka, seperti halnya yang di katakan oleh NR. Selaku Kepala Seksi Rehab Sosial, yakni:

“...Dimana dalam rumah tersebut ada berbagai program kegiatan-kegiatan pembinaan mental, ada koordinator, ada pembina mental, operasional dimana masing-masing ada koordinatornya. Psikologi ada jg koordinator, kegiatan terapoutic section, kegiatan family dialog, dan beberapa kegiatan moving class, dimana masing-masing kegiatan ada coordinator untuk mengkoordiner kegiatan tersebut” (NR, 24/07/2020).

Pada Balai Rehabilitas BNN Baddoka juga diajarkan kemampuan mengatur diri mereka sendiri, dari mengelola emosi sampai mengatur waktu. Tak hanya itu di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga diajarkan banyak hal misal; gotong royong, saling membantu, saling menyemangati dan sebagainya.

Pendapat umum menyatakan bahwa hidup individu-individu yang ditolak oleh masyarkat itu pada halibnya tidak bahagia. Perasaan bahagian dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosial oleh individu yang sosiopat, secara kualitatif bergantung pada sikap pribadinya terhadap diri sendiri, yaitu pada proses penanaman diri dan penentuan diri atau pendenifisian diri. Peristiwa itu dicerminkan oleh pertimbangan antara pendefinisian diri. Peristiwa itu dicerminkan oleh pertimbangan antara pendefinisian sosial dan definisi diri sendiri. Jadi, ada tingkah laku simbolis yang tersembunyi atau tidak nampak, yang mengolah penghukuman sosial dan pendefinisian diri secara batiniah. Hal tersebut bergantung pada besarnya penerimaan definisi sosial itu, yang kemudian dikontribusikan dalam pusat kepribadiannya. Jadi, bergantung pada besarnya introspeksi diri dalam diri sendiri yang kemudian dijadikan denifisi diri. Jadi, semua itu bergantung pada dinamisme atau mekanisme jiwa dalam bentuk

internalisasi, rasionalisasi, proyeksi, substitusi atau penggantian peranan, membenaran diri atau justifikasi diri.

Maka dalam hal ini nilai dan norma sangat vital berfungsi untuk menumbuhkan pemikiran bahwa mereka, para klien yang sedang menjalani rehabilitasi mampu kembali, berbaur, dan beradaptasi dengan masyarakat. Labeling yang diberikan oleh masyarakat sebagai pelaku kriminal membuat para klien itu sendiri merasa minder dan rendah diri. Mereka menganggap diri mereka tidak berguna, mereka menganggap diri mereka hina. Sehingga, mereka makin terjerumus oleh doktrin yang membuat mereka lebih jauh bergantung pada narkoba. Maka dengan pelebagaan nilai di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, berharap klien akan mulai muncul kepercayaan diri sendiri, dan mampu berbaur kembali dengan masyarakat tanpa bergantung pada narkoba atau zat adiktif lainnya.

c. Nilai kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti:

a). Nilai kebenaran, yang bersumber pada rasio (akal manusia), misalnya sesuatu itu dianggap benar atau salah karena akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian, seperti yang di ungkapkan oleh ketua balai rehabilitasi BNN yang menyatakan bahwa:

“.....Untuk beradaptasi mereka disetiap fase, di detoksifikasi kita belum terlalu memberikan Pendidikan lainnya, karena mereka harus diberi kesadaran dahulu menerima kondisi berada di rehabilitasi. Dimana di tahap detox ini mereka harus beradaptasi dengan kebiasaan yang ada di balai rehab yang ada disini. Norma-norma dan juga nilai-nilai yang sdh ditanamkan di balai rehab” (IF, 24/07/2020).

Kesehatan mental adalah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan). Agama merupakan salah satu

bentuk perilaku yang sangat memengaruhi keseharian seseorang. Dengan dasar keyakinan akan ajaran agama, seseorang akan berusaha mengubah dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika ajaran agama dan keyakinan yang berbeda membuat individu memunculkan perilaku yang berbeda sesuai dengan agamanya, maka dalam hal ini nilai kebenaran adalah nilai yang berasal dari agama.

- b) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur perasaan, misalnya daya tarik suatu benda, sehingga nilai daya tarik atau pesona yang melekat pada benda tersebut dihargai, dalam hal nilai keindahan diajarkan dan ditanamkan terhadap klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana seperti yang dikatakan oleh Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka:

“...Dimana proses selanjutnya yaitu proses stabilisasi dimana diproses ini sudah mulai ada pengenalan terhadap nilai dan norma, dan disini sudah ada pengenalan program. Betul-betul mereka mempunyai *daily activity* jadi sdh mulai terjadwal dari mereka bangun tidur sampai mereka akan tidur kembali semuanya sudah terjadwal semua...” (IF, 24/07/2020).

Nilai keindahan yang dimaksud disini adalah, bagaimana kehidupan para klien yang diatur sedemikian rupa untuk merubah pola hidup klien yang dahulu tidak terstruktur menjadi lebih terstruktur. Selain dalam kegiatan keseharian mereka yang diatur sedemikian rupa hingga menjadi pribadi yang lebih baik ada juga perubahan dalam hal berpakaian, bertindak, sopan santun dan sebagainya. Contoh; pada fase rehabilitasi sosial, semenjak klien masuk dan bergabung didalam maka dari pola menggunakan pakaian mereka perbaiki sedikit demi sedikit. Dimana dahulu mereka yang menggunakan baju berantakan atau menggunakan baju yang tidak nyaman dilihat, dan semenjak mereka bergabung di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mereka akan diberi pakaian yang layak pakai dan akan indah untuk dipandang, dimana

mereka diajarkan untuk rapi, bersih dan harum. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa klien yang berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sudah mulai menunjukkan bahwa mereka ingin pulih seperti dahulu kala.

- c) Nilai moral, yang bersumber pada unsur pada kehendak, terutama pada tingkah laku manusia antara penilaian perbuatan yang dianggap baik atau buruk, mulia atau hina menurut tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. Seperti yang dikatakan NR selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial yang mengatakan bahwa ada aturan yang ditetapkan bagi klien yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, yakni:

“... Ada penekanan norma atau peraturan untuk para klien, Norma atau nilai yang harus dipatuhi dalam rumah. Dimana setiap rumah ada namanya norma-norma yang memang harus dipenuhi oleh setiap residen (klien).

1. Norma kejujuran, setiap klien harus diajarkan jujur dalam bertindak maupun dalam berkata-kata.
2. Tanggung jawab, dimana setiap klien harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kelompoknya dalam rumah rawatannya.
3. Emosi, klien harus bisa mengontrol perubahan emosi atau disebut *handle filling* yang terjadi pada klien itu sendiri....”(NR, 24/07/2020).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bpk. SL selaku Program Manager balai rehabilitasi BNN baddoka, yang menyatakan juga mengenai bagaimana menerapkan nilai moral terhadap klien.

“....Nilai-nilai pokok yang terkandung kejujuran. Sesuatu nilai tatanan yang tidak tertulis tetapi selalu ada disetiap klien atau residen yang datang, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terdapat baju dinas. Dimana dibawah bajunya ada kata *honesty* sebagai penanda bahwa harus datang kesini untuk melihat kejujuran, dan kejujuran bukan saya yang lihat tapi orang lain yang bisa rasakan. Keagamaan, kemaafan, teman-teman residen dengan ketuhanan yang sangat jauh (jauh dari Tuhan)

tetapi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini kembali kita hidupkan atau kembali kita tanamkan nilai positif dalam beragama. Supaya nanti mereka akan kembali lagi. Dimana mereka dari awal sudah tahu semua nilai ini cuman karena pengaruh zat sehingga membawa mereka lebih condong ke zatnya dibandingkan ke fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial, dimana disini akan ditanamkan ulang...” (SL, 24/07/2020).

Penerapan nilai ini bertujuan untuk memupuk, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran serta tanggung jawab bagi keluarga masyarakat. Dengan demikian, perlu campur tangan pihak pemerintah, dan semua pihak yang terkait didalam penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan lainnya.

- d) Nilai keagamaan, yang bersumber pada kitab suci (Wahyu Tuhan). Metode ini sangat efektif dalam menyembuhkan kesadaran umat manusia terutama apabila dikaitkan dengan ajaran agama. Hal ini yang perlu konsentrasi adalah pembinaan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjelaskan berbagai dalil yang berhubungan dengan dampak dari narkoba dan sanksi hukum yang di terimanya. Untuk itu perlu adad kesadaran yang mapan bahwa bahwa di dalam hidup ini setiap insan hendaknya memiliki rasa cinta terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga didalam langkah dan perilaku senantiasa berpedoman pada ajaran agama. Seperti halnya dengan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diterapkannya nilai kegamaan, sama halnya dengan apa yang kita ketahui bahwa nilai agama adalah nilai yang sangat mendasar dalam hidup manusia sejak manusia itu lahir. Adapun pernyataan dari konselor senior Bpk HS mengungkapkan bahwa:

“...saat berada di Balai sini, para klien kita ajak danwajibkan untuk kegiatan agama mendekatkan diri pada sang pencipta, kita kenalkan dan tuntun kembali kejalan yang benar (Agama). Bagi klien muslim kita terapkan sholat 5 waktu tepat waktu, ditambah sholat sunnah, dan mengaji, bagi non muslim kita ajak beribadah sesuai ajaran agamanya dengan didampingi

para rohaniwan. Jadi ada pemandu khusus yang mengawasi mereka bagaimana pola keseharian mereka bisa berjalan sesuai apa yang sudah diterapkan oleh Lembaga Balai Rehabilitas itu sendiri..” (HS.2020)

Dengan demikian, akan terpolarisasi kepribadian yang taat kepada Tuhan, juga di dalam sikap hidupnya akan mempunyai landasan rasa kasih sayang di segala bidang kehidupannya. Di samping itu dijelaskan pula bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih senantiasa memberikan hikmat dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang setia menyembah dan memuji-Nya sehingga akan lebih tawakal dan benar-benar akan menggantungkan atau bersandar pada-Nya di dalam melaksanakan juga sepanjang hidupnya.

Pelaksanaan rehabilitasi, para korban penyalagunaan narkoba diutamakan mendapatkan pendidikan nilai spiritual agar mereka dapat mengenal akan Tuhan, memahami akan cinta kasih sayang Tuhan dan pengampunan-Nya sehingga selanjutnya dapat benar-benar bertaubat (tidak akan mengulangi kembali). Hal yang penting adalah mereka diajar untuk mengenal Tuhan dalam makna yang benar bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Pengampun, sehingga tertanam di dalam hatinya pentingnya dekat dengan Tuhan sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang penuh dengan dosa.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga melihat bahwa praktek pelayanan klien tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Aturan HAM adalah nilai insaniah dan aturan menaati HAM juga nilai insaniah. Kedua nilai ini dipraktekkan, dan dengan mudah ditemukan, dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Nilai-nilai penunjang, seperti nilai kesenian dan keterampilan, nilai-nilai jurnalistik, atau bahkan rasa peduli pada lingkungan,

juga bagian dari nilai insaniah. Selanjutnya, jika diklasifikasikan secara praktis, jenis-jenis nilai yang ditanamkan kepada klien selama proses rehabilitasi adalah sebagai berikut: *pertama* disiplin, *kedua* pengenalan diri, *ketiga* pengenalan konsep dan pembelajaran pola hidup sehat, dan *keempat*, penugasan kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial. Nilai-nilai ini disebut nilai praktis karena Balai Rehabilitas BNN Baddoka mengharapkan semua klien dapat memahami, menerima, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti yang diungkapkan salah satu klien di Balai Rehabilitas BNN Baddoka, yang mengungkapkan bahwa:

“...selama saya berada di sini (Balai Rehab), saya diajarkan banyak pelajaran penting dan berharga, seperti mengontrol emosi, ibadah, beradaptasi dengan lingkungan, berhenti menggunakan narkoba, berorganisasi, banyak teman, percaya diri, kebersamaan, menghargai proses, dan penerimaan diri, masih banyak yang bisa saya dapatkan dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini yang tidak pernah saya dapatkan dari luar saat saya menggunakan narkoba dulu..” (Dk, 20/08/2020).

Terapi keterampilan bertujuan untuk melatih para mantan pengguna narkoba atau klien melalui keterampilan baru sehingga dengan cara mengembangkan kemampuan baru tersebut, mereka dapat menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya. Akan tetapi, ini juga melatih rasa tanggung jawab dalam pekerjaan sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun kembali ke tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan yang di peroleh kelak dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal. Dengan ada pekerjaan yang mantap korban ini tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan lainnya. Keterampilan ini dapat dipelajari, antara lain perbengkelan, pertukangan, pembukuan dan lainnya.

B. Norma

1. Pengenalan Norma

Norma sebagai sebuah prinsip memiliki kekuatan aktif untuk mengatur sekelompok manusia dalam berbuat dan bertindak. Norma menjadi kekuatan kontrol, pengarah perilaku, bahkan mengatur tindakan-tindakan agar mengarah pada apa yang bisa diterima. Tanpa aturan-aturan ini, masyarakat tidak bisa terorganisir, tertata, dan menjurus pada kekacauan (*chaos*) (Paisol Burlian, 2016).

Menurut Paisol Burlian (2016) Pada hakikatnya nilai dan norma tidak akan terpisah dari kehidupan sosial masyarakat, adapun nilai formal terbentuk melalui mekanisme yang resmi. Nilai dan norma merupakan sesuatu yang sering kali disamakan, tetapi sebenarnya keduanya berbeda. Pembedaannya terletak pada orientasi, bahwa nilai lebih merupakan sikap dan perasaan yang dilibatkan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, benar salah, suka tidak suka, dan sebagainya terhadap objek tertentu baik secara material atau immaterial. Adapun norma orientasinya adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif (bersama) yang mengandung berbagai sanksi, baik sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial. Adapun pemberlakuan atas norma ditujukan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatan (perilaku) yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, antara nilai dan norma selalu bergandengan bagai dua sisi mata uang. Adapun dari keduanya tidak lain adalah untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan bersama. Seperti yang diungkapkan salah satu klien di Balai Rehabilitasi BNN, Dk, yang mengungkapkan bahwa:

“...sebelum saya berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka saya hanya fokus pada bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan narkoba, tetapi semenjak berada di Balai ini, saya jadi banyak mengalami perubahan yaitu diajarkan

bagaimana berfikir sebelum bertindak (membedakan mana yang baik dan mana yang buruk), berfikir positif, sudah mulai berpuasa, dapat membaca Iqra'/ Al-qur'an, sholat, bisa mulia menghargai orang lain, sudah bisa menghargai waktu.." (Dk, 20/08/2020).

Menurut pernyataan informan dapat digambarkan bahwa pengenalan Norma sangat penting bagi klien yang berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, sejatinya norma merupakan kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan, yang diterima secara utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari agar hidup terasa aman dan menyenangkan (Paisol Burlian, 2016).

Norma merupakan simbol dari loyalitas ideologis dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Norma itu bersifat institusional atau formal, juga noninstitusional atau sosial (norma umum). Norma juga bisa bersifat positif, yaitu mengharuskan, menekankan, atau kompleksif sifatnya.

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana penting dan diperlukannya penerapan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat sebagai alat pengontrol bagi masyarakat terutama klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Norma mengajarkan manusia bagaimana cara yang hidup dengan benar dikalangan masyarakat dimana baik buruk suatu tindakan sudah diatur berdasarkan kesepakatan kelompok masyarakat tersebut. Selain itu dalam norma juga dituliskan apa-apa saja sanksi yang mereka dapatkan jika melanggar norma yang sudah disepakati, sanksi dalam norma terdapat dua jenis yaitu sanksi tertulis dan tidak tertulis.

2. Jenis-jenis Norma

1. Norma Agama

Norma agama merupakan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai wahyu dari Tuhan yang keberadaannya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Norma agama berisi

perintah dan larangan atas sesuatu perbuatan yang diperintah dan larangan atas suatu perbuatan yang diperintahkan disebut wajib, sedangkan dilarang disebut haram. Adapun sanksi bagi para pelanggar atas norma agama adalah sanksi kehidupan di alam baka, yang disebut siksaan neraka dan bagi yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala di surga. Dalam hal ini salah satu klien yang berinisial DK, memberikan pernyataan bahwa:

“...sebelum berada di Balai saya tidak pernah menjalankan perintah agama, yaitu sholat, mengaji, bahkan saya tidak pernah sopan santun kepada orang tua saya, saya kadang membentak bahkan membuat sedih, berantem dengan saudara sendiri. Tetapi, semenjak saya berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini banyak pelajaran saya dapat terutama dalam hal agama, saya diajarkan yang dahulu waktu kecil saya dapat tetapi semenjak menggunakan narkoba saya melupakan itu semua, tetapi sekarang saya sudah berada di jalan yang dahulu kembali..” (Dk. 20/08/2020).

Kehidupan sehari-hari banyak kita lihat bahwa sekarang ini banyak para pemuda yang menjadi generasi tumpuan bangsa tidak melaksanakan bahkan mengabaikan perintah agama untuk beribadah. Belum lagi kehidupan Barat semakin membudaya di kalangan para pemuda, seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, perjudian, narkoba dan sebagainya, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut kajian agama islam menganggap bahwa patologi sosial yang terjadi dikalangan pemuda sekarang ini merupakan penyimpangan sosial yang harus diluruskan dalam hal ibadah. Menurut Maman Abdul Jalil dalam bukunya prinsip-prinsip dan strategi dakwah menjelaskan bahwa penyebab permasalahan yaitu (Maman Abdul Jalil, 2020: halaman 53-54):

- a) Problematika akidah akhlak serta syariah. Dengan banyak penyimpangan akidah dan syariah akan melahirkan generasi kelompok-kelompok yang sangat mengganggu umat islam lainnya. Oleh karena itu, sumber Islam yang aslinya, yaitu Al-qur'an, harus

benar-benar dipelihara secara sungguh-sungguh agar terlepas dari belenggu kesulitan.

- b) Problematika ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam sangat membantu dalam kehidupan bermasyarakat supaya kehidupan menjadi aman, tenntam, bahkan keadilan dan kemakmuran akan terjalin dengan adanya persaudaraan. Akan tetapi, karena dipengaruhi oleh sedikit perbedaan paham dalam masalah keagamaan, menimbulkan aliran-aliran yang menyebabkan ketimpangan diantara mereka. Hal ini memungkinkan antara satu aliran dengan aliran lainnya timbul perpecahan bahkan permusuhan.
- c) Problematika generasi. Generasi muda adalah penerus estafet perjuangan bangsa serta agama. Dalam perkembangannya, dan bahkan sampai saat sekarang ini generasi muda adalah harapan serta tumpuan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Disini dibutuhkan peranan orang tua serta bimbingan seorang pembimbing atau guru untuk melanjutkan cita-cita tersebut. Kurangnya peranan orang tua sebagai guru pertama bagi mereka akan menyebabkan mereka tidak berjalan kearah seharusnya yang mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh generasi muda.

Permasalahan penyakit masyarakat sekarang ini, seperti yang telah dijelaskan diatas, bukan hanya dilakoni oleh orang dewasa, miskin atau kaya, tetapi juga pejabat, yang ikut meresahkan masyarakat.

Terlepas dari peranannya dalam teori sosial, penggunaan konsep norma memang penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menjalankan fungsinya. Terlebih-lebih penggunaan ini terbukti demikian ketika menggambarkan masyarakat tradisional yang stabil. Norma yang stabil atau yang berubah secara perlahan-lahan merupakan komponen penting dari mekanisme pengaturan diri masyarakat yang stabil. Dibawah ini merupakan tabel sikap klien terhadap perbandingan ibadah mereka saat sebelum berada di Balai Rehabilitas BNN dan sesudah mereka berada di Balai Rehabilitas BNN Baddoka, dari data dibawah tabel inilah

bisa peneliti melihat bahwa Norma agama juga memiliki peran penting dalam merubah sikap dan perilaku juga tindakan masyarakat yang melakukan tindakan penyimpangan dapat berubah dengan diterapkannya nilai dan norma agama yang diajarkan kembali oleh lembaga Balai Rehabilitas BNN Baddoka.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menjelaskan bahwa perubahan klien dalam melakukan ibadah sesuai agamanya memiliki perubahan yang signifikan, dimana klien yang dahulunya 66.70% tidak pernah melakukan ibadah, tetapi saat berada di Balai rehabilitas sebagian dari mereka menjawab 66.70% sangat sering atau selalu melakukan ibadah tepat waktu dan sebanyak 33.30% menjawab sering atau menjalankan ibadah dan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah dan tidak pernah sama sekali menjalankan ibadah.

Disini dapat peneliti simpulkan bahwa norma agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terutama klien yang berada di Balai Rehabilitas BNN ini, dimana pada zaman dahulunya mereka mendapatkan nilai-nilai agama tetapi semenjak mereka mengenal dan menggunakan narkoba akhirnya mereka melupakan bagaimana ajaran dan nilai-nilai agama sehingga tidak lagi terpikirkan untuk menjalankan perintah agama. Maka di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diterapkannya penanaman dan penerapan nilai religius atau dalam bahasa sosiologi penerapan nilai dan norma agama yang bertujuan untuk menerapkan kembali keingatan dan memaksa kembali klien untuk mendekatkan diri mereka kepada sang Maha Pencipta.

Dibawah ini terdapat tabel perbandingan mengenai perubahan tingkah laku mereka terhadap kegiatan keagamaan, selain perubahan dalam menjalankan ibadah, adapun perbandingan perubahan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka lakukan, yaitu:

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan perubahan yang signifikan terjadi pada klien yang berada di Balai Rehabilitas BNN, dimana pada dahulu sebelum

klien berada di Balai Rehabilitas lebih cenderung tidak melakukan kegiatan keagamaan, sebanyak 50% menjawab tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan dan hanya 16.70% dari sampel klien yang menjawab melakukan kegiatan keagamaan sebelum mereka berada di Balai Rehabilitas BNN.

Sedangkan setelah mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN menjawab 66.70% menjawab melakukan kegiatan keagamaan dan sisanya 33.30% menjawab antusias atau sangat sering melakukan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berupa mengaji, pengajian, berzikir, berdoa, kebaktian dan sebagainya. Peneliti melihat dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwasannya banyak perubahan yang terjadi terhadap klien selama mereka menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Hal ini menunjukkan bahwa norma agama sangat berperan penting untuk memulihkan dan mencegah klien menggunakan narkoba kembali.

2. Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup sumbernya adalah pola-pola perilaku sebagai hasil interaksi sosial di dalam kehidupan kelompok. Pola-pola atau ketentuan-ketentuan ini merupakan produk interaksi sosial, sehingga dari interaksi tersebut menghasilkan pola-pola perilaku antara yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Seperti yang diungkapkan klien dengan inisial DK, dimana norma kesopanan juga diterapkan di lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Tujuan dalam penerapan nilai kesopanan disini adalah bagaimana menunjukkan dan menerapkan kembali terhadap klien bagaimana bersikap yang baik dan sopan juga menghargai sesama mahluk sosial. Salah satu bukti saling menghargai yaitu dengan ditanamkan kembali nilai dan norma sosial didalam diri mereka. Hal ini diungkapkan oleh salah satu klien, yaitu:

“...daluhu sebelum menggunakan narkoba, saya baik sama keluarga, teman dan saudara-saudara. Tetapi, semenjak menggunakan narkoba selalu cekcok dengan orang tua

(hubungan menjadi rusak), setelah berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kini hubungan saya dengan orang tua menjadi baik kembali..” (DK, 20/08/2020).

Adapun pendapat dari salah satu klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berinisial MT, yang juga menjelaskan bahwa nilai sosial juga sangat penting untuk ditanamkan dalam diri mereka, MT menegaskan bahwa perubahan pola kehidupan mereka saat mereka menggunakan narkoba menunjukkan hilangnya sifat sopan santun, kepedulian bahkan sifat saling menghargai pun hilang. Lebih lanjut MT mengungkapkan, bahwa:

“.... Dahulu sewaktu saya menggunakan narkoba, saya menjadi orang yang tidak sabaran dan memiliki sifat keras, dimana kalau saya butuh uang saya meminta kepada orang tua, jika tidak diberi maka saya akan merusak barang-barang yang ada di rumah...” (MT, 20/08/2020).

Norma bisa jadi dianggap aksiomatik oleh banyak pakar sosiologi, tetapi bagi pakar-pakar yang lain norma merupakan *dues ex machina* yang tidak dapat diterima, sebuah konsep yang dimasukkan ditingkat makro sosial untuk menjelaskan perilaku sosial, namun konsep itu sendiri tidak dijelaskan.

Sebagai teoritis pilihan rasional, yang berbekal pemaksimalan kegunaan sebagai prinsip tindakan, menganggap konsep norma sama sekali tidak penting terutama norma kesopanan. Namun, dengan mengambil sikap ini berarti mengabaikan proses penting pada fungsi sistem sosial dan karenanya membatasi teori tersebut. Norma -norma tersebut menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dianggap tepat atau benar, atau tidak tepat atau tidak benar, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memprakarsai atau ikut mempertahankan suatu norma merasa diuntungkan oleh kepatuhannya pada norma dan merugi karena melanggar norma. Norma biasanya ditegakkan melalui sanksi, yang berupa imbalan karena, melakukan tindakan-tindakan yang dipandang benar atau hukuman karena melakukan tindakan-tindakan yang dipandang tidak benar. Orang-orang yang tunduk pada sebuah norma, atau seperti pernyataan penulis, orang-orang yang berpegang pada

sebuah norma, menyatakan haknya untuk menerapkan sanksi dan mengakui hak orang lain yang berpegang pada norma tersebut untuk menerapkan sanksi.

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa pelebagaan berupa penanaman nilai dan norma kesopanan sangat berperan penting dalam perubahan diri para klien, peneliti melihat bahwa dahulu mereka selama menggunakan narkoba tidak ada sikap dan sifat sopan santun yang mereka miliki terhadap orang lain dan orang tua mereka sendiri, dari sini dapat disimpulkan bahwa narkoba membawa dampak buruk terhadap sikap dan tindakan mereka. Dengan didukung data tersebut membuktikan bahwa pengaruh narkoba yang kuat membawa perubahan yang signifikan.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang signifikan yang dialami oleh klien saat menggunakan narkoba dan saat mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Berdasarkan data tabel diatas peneliti melihat adanya data perbandingan yang signifikan, dimana sebelum mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sikap sopan santun yang mereka lakukan terhadap orang yang lebih tua sebanyak 66.70% sedangkan saat mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebanyak 100% mereka menjawab melakukan tindakan sopan santun terhadap orang lain (hasil data penelitian ada di lampiran).

Kemudian peneliti dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana sikap sopan santun sangat berperan penting dalam kehidupan sosial yang tentunya menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai seseorang saja mengalami perubahan sangat drastis disebabkan penggunaan narkoba, dari sinilah sangat diperlukan pelebagaan nilai berupa penanaman nilai dan norma kesopanan terhadap klien dan terhadap pengguna narkoba lainnya. Guna saat (klien) kembali ke masyarakat mereka akan mendapatkan nilai positif dan dapat berbaur

sehingga dapat hidup berdampingan kembali tanpa melihat kesalahan mereka dimasa dahulu.

3. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan kehidupan yang berasal dari hati nurani, yang produk dari norma susila ini adalah moral. Bagi anggota masyarakat yang tidak mematuhi norma ini dianggap asusila atau amoral tidak memiliki tata kesusilaan atau tidak memiliki moral. Kondisi yang memunculkan kepentingan pada suatu norma, dan karenanya menuntut norma, adalah bahwa suatu tindakan menimbulkan eksternalisasi yang sama bagi sekelompok orang lain, namun pasar dengan kontrol yang dibangun dengan mudah, dan tak seorang pelaku tunggal pun yang dapat melibatkan diri secara menguntungkan dalam pertukaran untuk mendapatkan hak-hak kontrol. Kepentingan-kepentingan semacam ini tidak membentuk sebuah norma dengan sendirinya, kepentingan tersebut juga tidak memastikan bahwa sebuah norma akan terbentuk, yaitu tuntunan akan sebuah norma dari pihak-pihak yang mengalami eksternalisasi tertentu.

Eksternalisasi yang diciptakan oleh tindakan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, bisa jadi positif atau negatif. Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memberikan pembelajaran bagi klien yang mengalami masalah terhadap moralnya, mereka yang memiliki gangguan terhadap cara berfikir dan bertindak akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan psikisnya, dalam memberikan pembelajaran itu sendiri pihak Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menekankan pada medis sosial, dalam hal ini moral yang mereka miliki akan diperbaiki dan diarahkan menjadi moral yang patut diterima di khalayak masyarakat umum. Contoh bagaimana mereka bertindak dan memperlakukan orang disekitar mereka sebagaimana mestinya, misal seorang klien yang memiliki pacar, bagaimana mereka memperlakukan pacar mereka, bagaimana klien memperlakukan orang-orang terdekat mereka, yang dahulunya mereka perlakukan dengan sesuka hati mereka. Justru di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mereka akan ditunjukkan bagaimana memperlakukan

orang-orang terdekat mereka sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan oleh klien yang berinisial DK, menyatakan bahwa:

“...dulu saya memiliki pacar, jika sedang marahan maka saya akan membentak, memukul dan memarahi pacar saya jika tidak mengikuti kemauan saya, terutama dalam hal hubungan badan. Selain itu saya juga sering membuat keributan di lingkungan tempat tinggal saya, gas-gas motor di jalan raya dan di lorong-lorong...” (DK, 20/08/2020).

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak para penyalahguna Narkoba yang memiliki masalah terhadap psikis mereka, salah satunya adalah hilangnya akal sehat mereka dalam berfikir dan bertindak. Seperti halnya yang dijelaskan diatas oleh klien DK, yang mengungkapkan bahwasannya atas rangsangan zat yang terkandung di dalam narkoba yang membuat mereka melakukan tindakan apa saja tanpa mereka sadari bahwa tindakan itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Dalam hal ini peneliti menyingkapi bahwa moralitas dalam diri klien sangat patut untuk diperhatikan dan dibenahi kembali. Maka perlu adanya pelebagaan norma kesusilaan guna, memberikan pengetahuan dan pengertian bahwa tindakan-tindakan seperti itu sangat tidak pantas dilakukan.

Selain hasil wawancara diatas, peneliti juga menyajikan data tabel dibawah ini untuk menjadi bahan perbandingan saat klien sebelum berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan saat klien berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Hal ini guna memudahkan peneliti untuk memperjelas bahwa pentingnya pelebagaan nilai dan norma kesusilaan terhadap klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap klien di Balai Rehabilitasi BNN, dimana sebelum mereka berada di balai 83.3% mereka menjawab tidak jujur terhadap orang lain, sedangkan 16.7% menjawab jujur kepada orang lain. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sifat jujur yang dimiliki klien menunjukkan hilangnya moralitas dalam diri mereka. Sedangkan selama

klien berada di balai sebanyak 83.3% mereka menjawab jujur kepada orang lain dan sisanya 16.7% menjawab tidak jujur. Artinya dari sampel yang diteliti sudah menunjukkan adanya kemajuan dari diri mereka untuk berubah, darinya dahulu mereka yang tidak jujur kepada orang lain setelah mereka berada di balai mereka menjadi orang yang mau jujur kepada orang lain. Selain data diatas mengenai sikap jujur, ada pula data sikap sabar yang menjadi bahan perbandingan untuk melihat sejauh mana perubahan klien saat sebelum berada di Balai Rehabilitasi BNN dan sesudah mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan yaitu sebelum klien berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, klien cenderung menjadi orang yang tidak sabaran dimana 83.3% menjawab bahwa mereka tidak berpikir terlebih dahulu sebelum mereka bertindak, dimana mereka lebih mengutamakan mengikuti logika mereka dibandingkan memikirkan kembali konsekuensi yang mereka dapat jika melakukan sesuatu tindakan. Sedangkan saat mereka sudah berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ada perubahan yang terjadi, dimana mereka akan berfikir terlebih dahulu sebelum mereka bertindak dengan ini dibuktikan dari tabel diatas bahwa data diatas menunjukkan 100% dari mereka memilih berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak (tabel hasil data penelitian ada di lampiran).

Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dimana sebelum mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan sesudah berada di balai ada banyak perubahan yang mereka alami. Secara tidak langsung penerapan norma dan nilai kesusilaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk membuat para klien kembali pulih dari ketergantungan zat narkoba tersebut. Dengan kata lain jika mereka mengalami perubahan yang lebih baik maka mereka dapat diterima dan kembali lagi ke lingkungan masyarakat.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan hidup yang berlaku dalam kehidupan sosial yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga formal kenegaraan. Tujuan dibuat ketentuan hukum formal tersebut selain untuk mencapai kehidupan sosial yang tertib, aman, dan damai juga mencapai tujuan dari cita-cita berdirinya negara tersebut. Untuk mencapai tujuan negara selain menciptakan kehidupan yang aman dari berbagai gangguan sosial, juga perlu menjaga stabilitas suatu negara agar proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Adapun pernyataan yang diungkapkan oleh klien yang berinisial DK, dimana DK menyatakan bahwa:

“... dahulu sebelum berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, saya tidak peduli jika melakukan kesalahan atau melanggar aturan, sanksi. Saya sering dapat cibiran dan teguran dari masyarakat dan orang tua dan saya tidak memperdulikan itu semua, tetapi semenjak berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka jika saya melakukan kesalahan maka saya akan mendapatkan sanksi misal teguran, nasehat dan sebagainya yang bersifat membantu saya sadar bahwa itu salah dan tidak boleh diulang kembali. Maka saya mulai sadar bahwa aturan tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi. Harus menunjukkan sifat baik bahwa saya sudah berubah..” (DK, 20/08/2020).

Pembentukan norma memang menguntungkan bagi setiap anggota dan efisiensi secara sosial sekaligus merugikan setiap anggota dan tidak efisien. Namun pembentukan norma bisa menguntungkan bagi pihak yang menjalankan norma tersebut dan merugikan bagi pelanggar norma. Pada persoalan, makalah Coase 1960 (dalam karya bukunya James S. Coleman) tentang masalah kerugian sosial langsung menjadi relevan. Coase tidak memfokuskan diri pada norma tetapi pada persoalan tentang bagaimana kasus-kasus yang melibatkan pemberlakuan eksternalitas oleh seorang pelaku kepada pelaku lain dapat diputuskan dengan hukum.

Implikasi teori ini terhadap norma terpisah, jika eksternalisasi yang diberlakukan oleh aktivitasnya cukup besar sehingga orang-orang yang

mengalami eksternalitas terdorong untuk memaksa pelaku agar menghentikan aktivitasnya. Maka disinilai norma hukum diperlukan, untuk memberikan ketegasan berupa sanksi terhadap pengguna narkoba dalam hal ini ada berbagai macam sanksi yang bisa diterima oleh seorang klien. Salah satunya adalah, melakukan rehabilitas merupakan sanksi yang mereka dapat karena melakukan penyalahgunaan narkoba.

Tujuan dari norma hukum adalah memaksa dengan tegas para pelanggar norma berupa sanksi, dalam hal ini setiap daerah atau tempat memiliki berbagai macam norma hukum sesuai dengan aturan yang mereka sepakati.

Tabel diagram berikut melihat perubahan yang terjadi terhadap klien yang dilihat dari fungsi norma hukum, peneliti melihat dari dua perbandingan yakni sebelum dan sesudah berada di Balai Rehabilitas BNN Baddoka. Aturan yang dimaksud disini adalah aturan yang berada di daerah tempat tinggal klien sebelum berada dan wilayah Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Dari data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, peneliti melihat bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap klien dimana sebelum mereka berada di Balai Rehabilitas 66.7% merasa biasa saja saat melanggar hukum dan sikap mereka juga biasa saja dan 33.3% menjawab tidak takut untuk mengulang kesalahan atau melanggar hukum. Sedangkan setelah klien berada di Balai Rehabilitas BNN 83.3% mengungkapkan bahwa mereka takut dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hukum dan 16.7% menjawab biasa saja. Hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa setelah mereka menjalankan proses dna program yang berada di Balai Rehabilitasi membuat mereka sadar akan bahaya mereka jika melanggar hukum yang sudah ditetapkan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan perlu adanya tindakan mempertegas penanaman nilai dan norma untuk menertibkan masyarakat agar sadar akan hukum yang sudah diatur oleh negaranya.

Pencapaian sesuatu yang disebut optimum secara sosial melalui redistribusi hak dan ancaman sanksi menegaskan kemungkinan bahwa para pelaku yang mengalami eksternalitas dapat menggunakan kontrolnya atas peristiwa-peristiwa selain itu dari tindakan-tindakan yang menimbulkan eksternalitas tersebut-peristiwa yang menjadi kepentingan pelaku sasaran. Kontrol mereka atas peristiwa semacam itulah yang memungkinkan peristiwa tersebut digunakan sebagai sanksi atau sanksi potensial, dan pentingnya (atau “nilai”) peristiwa tersebutlah yang menentukan apakah sanksi tersebut akan efektif.

Kontrol sosial adalah berbagai macam prosedur yang dengannya anggota kelompok mendefinisikan dan merespon perilaku yang menyimpang. Kontrol sosial dijumpai di semua lapisan kelompok kehidupan di rumah dan di tempat tinggal, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan dipenjara ataupun di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan sebagainya. Di masing-masing bidang, anggota berpartisipasi dalam membangun atau mereformasi standar normatif tertentu, dan mereka menggunakan berbagai macam prosedur dalam merespons perilaku yang menyimpang dari standar tersebut dan dalam menciptakan kepatuhan pada standar itu. Prosedur ini mencakup banyak bentuk persuasi, ajakan/imbauan dan paksaan.

C. Pelembagaan Nilai dan Norma

Menurut Elly (2011) proses pertumbuhan norma dapat dilihat dari pola-pola kebiasaan berikut sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggarnya. Masing-masing pengertian tersebut memiliki dasar yang sama, yaitu norma-norma sosial memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai petunjuk arah bagi tingkah laku didalam kehidupan sosial. Proses ini dikelompokkan dalam empat macam, akan tetapi oleh sosiolog lainnya ditambah satu lagi yaitu law (Hukum) sehingga menjadi lima macam, yaitu:

a. Cara (Usage)

Cara atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi kebiasaan melalui frekuensi penularan terhadap tindakan, kebiasaan kemudian menjadi berlaku sebagai produk dari hubungan sosial antar-individu di dalam masyarakat yang tidak mengakibatkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Program Manager Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengungkapkan adapun cara yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi untuk memulihkan klien dengan berbagai prosedur, dimana prosedur yang dilewati memiliki berbagai metode, hal inipun diungkap oleh Manajer Balai Rehabilitasi BNN yaitu Saldi, dimana Saldi mengungkapkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien, yaitu:

“....Bagaimana melakukan adaptasi pada lingkungan baru, saat mereka masuk fase stabilisasi atau rehabilitasi Medis, kita juga dari sosial ada disana. Dimana rehab medis dan rehab sosial berkolaborasi untuk membantu proses rehabilitasi. Sosial membantu memperkenalkan program sehingga saat klien join ke rehabilitasi sosial klien sudah tidak kaget lagi dengan keadaan disana. Dan mereka juga diberi pilihan sesuai kebutuhannya. Dimana dalam pilihan itu mereka tahu apa tujuannya mereka datang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka....” (SL, 24/08/2020)

Lebih lanjut Program Manajer (PM) Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dapat dijelaskan bahwa ada proses-proses ataupun tahapan yang harus dilewati oleh klien sampai mereka dinyatakan pulih dan kembali ke keluarga. Untuk melihat tingkat keparahan calon klien maka sebelum masuk ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dilakukan tahapan tes awal. Selain itu dalam penanganan klien itu sendiri ada dua hal yakni rehab medis dan rehab sosial. Pertama rehabilitasi medis memusatkan perhatian pada kesehatan fisik klien itu sendiri, melihat seberapa besar pengaruh zat narkoba yang ada pada tubuh klien, pada proses ini dilakukan pemutusan penggunaan zat. Pemutusan pemakaian zat biasa disebut *withdrawel* dan pada saat bersamaan dilakukan detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh klien. Kedua adalah rehabilitasi sosial, dimana pada tahap ini fokus pada *cognitive dan behavior* klien. Disini akan terlihat tingkat keparahan atau

tingkat ketergantungan klien dari narkoba. Pada tingkat dengan keparahan berat maka akan dilakukan intervensi rehabilitasi selama 6 bulan dengan fokus perbaikan behavior, pada tingkat keparahan sedang dan ringan maka intervensi yang digunakan adalah perubahan cognitive dengan durasi waktu rehabilitasi selama 3 bulan

Salah satu bentuk keputusan mata rantai penggunaan narkoba juga dibenarkan oleh salah satu klien yang berinisial DK, dimana DK mengungkapkan bahwa:

“... di sini (Balai Rehab), kita tidak diberi narkoba, hanya dibiarkan saja, tetapi jika saya pusing atau ada rasa sakit yang saya rasakan dalam diri saya, saya diberi obat dan diperiksa. Disini diajarkan mengenai sholat, mengaji, berbuat baik dan sebagainya..” (Dk, 08/2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti dapat melihat bahwa bukan hanya para staf dan pihak rehab yang melakukan keputusan rantai penggunaan narkoba tetapi klien juga harus ikut serta dalam keputusan rantai penggunaan narkoba itu sendiri. Hal ini tergambar dengan jelas bahwa keputusan rantai penggunaan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri tetapi harus ada dukungan dan semangat ingin sembuh dari klien itu sendiri.

b. Kebiasaan (*Folkways*)

Folkways atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, karena dirasakan kebiasaan itu dianggap baik, enak dirasakan dan banyak manfaatnya dan sebagainya, sehingga banyak orang yang menyukainya. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan, unsur-unsur masyarakat dan kebudayaan tidak selalu mengalami perbedaan yang seimbang. Ada unsur-unsur yang dengan cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sulit untuk berubah.

Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah berubah dari pada unsur-unsur kebudayaan kerohanian. Apabila terdapat unsur-unsur yang tidak memiliki hubungan (relevansi) yang erat, tidak ada persoalan mengenai tidak adanya keseimbangan lajunya perubahan-perubahan. Misalnya, suatu perubahan pada gaya hidup remaja, dahulu remaja menghabiskan waktunya dengan membantu orang tua dan berkumpul

dengan teman sebayanya, jika memiliki masalah mereka akan menemui orang tuanya, berbeda dengan masa sekarang anak remaja akan fokus pada hidupnya sendiri tidak memikirkan orang lain, banyak dari mereka jika memiliki masalah akan melampiaskannya dengan minum-minuman ataupun narkoba dan masih banyak lagi. Semakin maju dan berkembangnya teknologi membuat perubahan semakin cepat, dampak dari perubahan yang tidak seimbang membuat masalah-masalah baru semakin bermunculan. Hal ini dapat peneliti kaitkan dengan perubahan pola hidup remaja terhadap penggunaan zat terlarang yaitu narkoba. Dalam penanganan penyalahgunaan zat terlarang ini memiliki banyak fase yang harus dilakukan salah satunya adalah pemutusan rantai penggunaan bahan zat terlarang yaitu narkoba, minum-minuman dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana pemutusan narkoba, obat-obatan, minuman dan sebagainya. Hal ini didukung oleh Program Manajer Balai Rehab dimana dalam pernyataannya, yaitu:

“... klien akan mengetahui saat dia masuk pertamakali di balai rehab ini. Contoh dari kewajiban dia harus mematuhi bahwa disini tidak ada kekerasan, mendapatkan layanan sama, tidak merokok, minum-minuman, dan narkoba juga sebagainya. Dimana klien yang merokok diluar harus bisa beradaptasi bahwa disini tidak boleh merokok dan itu efeknya sangat bagus sekali bahwa ternyata ketergantungan rokok dan adiksi ada keterkaitannya. Walaupun itu rokok hanya sebatas irisan..” (SL, 25/08/2020).

Hal ini pun juga diungkapkan oleh salah satu klien yang berinisial DK, yang mengungkapkan bahwa untuk menyembuhkan diri mereka dari ketergantungan akan zat narkoba mereka harus diberikan kebiasaan baru. Cara menghentikan kebiasaan dahulu mereka dengan memberikan aturan yang kuat disertai sanksi dan juga diberikan kegiatan baru yang secara berulang-ulang akan membuat mereka terbiasa dan melupakan kebiasaan lama mereka, dari sinilah para klien akan sadar apa yang mereka lakukan dahulu adalah salah. Adapun ungkapan DK, yaitu:

“...saya yang dahulu terbiasa bebas disini tidak diberi kebebasan, disini diajarkan banyak keterampilan dan pembelajaran juga aturan-aturan baru, jika saya melanggar aturan saya akan

diberikan sanksi. Disini juga dibiasakan tepat waktu dan mandiri..”
(DK, 20/08/2020).

Suatu teori dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori *Culture Lag* (ketertiban budaya dan kelambanan budaya atau keterlambata gerak kultur) dari William F. Ogburn (1964). Menurut teori *culture lag* ini, apabila aneka dari kebudayaan dalam masyarakat berkembang secara tidak seimbang dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka kebudayaan akan mengalami proses kelambatan kultural (keterlambatan budaya). Kondisi sosial sesama ini sering kali menimbulkan masalah sosial atau disorganisasi atau disintegrasi sosial.

Seperti yang dikatakan oleh Talcott Parsons dalam teorinya Agil yang mengungkapkan bahwa sebuah sistem harus mengulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan itu dengan kebutuhannya (dalam George Ritzer, 2015. Hal 117).

Hal ini dapat dikatakan bahwa hilangnya keakraban (intimitas) organik dari relasi sosial itu dianggap sebagai pertanda utama dari masyarakat yang tengah mengalami proses disorganisasi atau disintegrasi, yang kemudian digantikan dengan pola individualistik ekstrim serta nafsu mementingkan diri sendiri. Ditandai pula oleh kontak-kontak sosial yang atomistis dan relasi yang terpecah-pecah. Dengan demikian, para anggotanya mengalami frustrasi dan terhalang dalam pemenuhan kebutuhan manusia serta keinginan-keinginan pribadinya. Disorganisasi sosial merupakan dampak dari perkebembangan teknologi, ilmu pengetahuan, industri, dan urbanisasi, yang menimbulkan banyak pergeseran nilai normatif dan perubahan dalam masyarakat sehingga bagian-bagian masyarakat itu tidak bisa diintegrasikan dan tidak bisa terorganisasi secara sempurna.

c. Tata Kelakuan (*Mores*)

Tata kelakuan mencerminkan perilaku yang semakin mantap, dimana norma-norma sosial semakin menentukan dan menghasilkan perilaku individu atau kelompok agar kelakuannya tidak menyimpang dari nilai dan norma sosial. Tingkatan pengawasan sosial antar individu dan antar

kelompok semakin tinggi dan kuat. Tata kelakuan sudah menempati posisi kuat dimana salah satu pihak memiliki kekuatan memaksa, pada pihak lain memiliki kekuatan melarang atas suatu perbuatan para anggotanya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat yang ada di dalamnya menyesuaikan perbuatannya dengan tatakelakuan tersebut. Tata kelakuan disini memiliki berbagai peranan yakni:

a) Tata kelakuan memberikan batas-batas pada kelakuan-kelakuan individu, selain itu tata kelakuan juga merupakan alat untuk memerintah dan melarang anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan. Dalam hal ini batasan-batasan yang dimaksud adalah batasan bagaimana klien diatur pola hidupnya dari klien bangun tidur sampai mereka tidur kembali hal ini berguna untuk mengontrol keseharian klien dan memberikan arahan juga kegiatan yang bermanfaat agar tidak mengingot kembali mengenai narkoba. Tujuan dari pemberian kegiatan ini adalah untuk melatih, membimbing dan memberikan pengajaran mengenai masih banyak kegiatan positif lainnya yang mereka bisa lakukan selain menggunakan narkoba dan hal-hal lain yang bisa merusak dan melanggar aturan hukum. Kontrol sosialpun jadi lebih mudah dilakukan dan apa yang Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga klien inginkan untuk kepulihan dari ketergantungan dari Narkoba semakin berkurang.

b) Tata Kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, artinya kelakuan memaksa anggotanya untuk menyesuaikan tindakannya dengan tata kelakuan kemasyarakat yang berlaku, sehingga pihak lain juga berusaha menerima orang lain karena kesanggupannya menyesuaikan diri di dalam kelompoknya. Dalam tata kelakuan disini adalah bagaimana proses adaptasi klien di Balai Rehabilitasi BNN, dimana pada sebelumnya mereka berada diluar yang terbiasa hidup bebas kemudian mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kebiasaan mereka akan diatur dan ditertibkan seperti yang sudah diatur dalam peraturan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter baru dan merubah klien dari kebiasaan buruk menjadi memiliki kebiasaan baik. Hal ini sangat diperlukan

kemampuan beradaptasi guna menyeimbangkan bagaimana kehidupan diluar dengan kehidupan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat yang setiap masyarakat memilikinya. Tata kelakuan yang kekal dan kuat daya integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya, sehingga menjadi adat istiadat (*custom*). Selain tatakelakuan terhadap diri sendiri di Balai Rehabilitasi juga diajarkan bagaimana mereka bisa beradaptasi dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan metode penyembuhan TC yaitu metode pemulihan berkelompok artinya mereka sembuh bukan karena diri mereka sendiri tetapi mereka pulih karena usaha dan kerja keras mereka bersama yaitu dari pihak klien lainnya di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Hal ini bisa disimpulkan bahwa solidaritas mampu membuat mereka bisa bersama-sama melewati masa pemulihan dari ketergantungan narkoba. Dengan rasa solidaritas terhadap kelompok ini akan mampu membuat mereka lepas dan bisa bebas dari narkoba.

d. Adat-istiadat (*custom*)

Custom atau adat istiadat adalah pola-pola kelakuan yang tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan mengikat pada para anggotanya, sehingga bagi yang melanggar adat istiadat tersebut akan menderita sanksi yang keras yang kadang-kadang jatuhnya sanksi tersebut tidak secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh salah satu klien yang berinisial DK, dimana DK mengungkapkan bahwa:

“...Jika dahulu saya tidak peduli dengan aturan-aturan di lingkungan tempat tinggal saya, bahkan banyak yang mengucilkan saya dan memandang saya buruk. Tetapi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka saya diajarkan bagaimana harus sopan santu ke orang yang lebih tua, menghargai orang lain, menghargai waktu, saling bergotong royong membantu teman dan sebagainya, jika tidak maka kita mendapat teguran dan nasehat secara langsung dari pembina...” (DK, 20/08/2020).

Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

e. Hukum (law)

Laws atau hukum merupakan tata kelakuan sosial yang dibuat secara formal dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Hukum merupakan salah satu norma yang memiliki alat kelengkapan, seperti undang-undang, aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, pengadilan, penjara, sekolah hukum dan sebagainya, sedangkan norma lainnya tidak memiliki unsur-unsur kelengkapan seperti unsur-unsur yang ada pada hukum.

Menurut Ronald Akers (1965), hukum adalah agensi kontrol sosial khas. *Pertama*, kontrol legal adalah kontrol eksternal. Kontrol ini dimaksudkan untuk mengarahkan anggota masyarakat kepada kepatuhan/konformitas dengan menggunakan saksi eksternal. Ini berbeda dari kontrol intenal, di mana anggota mengatur diri sendiri sesuai dengan standar normatif yang mereka terima melalui sosialisas. *Kedua*, kontrol legal adalah kontrol formal, ia melibatkan seperangkat aturan yang jelas dan impersonal yang menentukan standar-standar yang harus dipatuhi oleh anggotanya, dan memberikan prosedur eksplisit dan interpersonal bagi pejabat yang bertugas menjaga konformitas. Dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, program rehabilitasi sosial merupakan bagian dari hukum dalam negara dimana tugasnya ialah memulihkan para pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba, dalam hal ini program rehabilitas sosial punya peran penting dalam penegakan hukum. Kontrol langsungnya terhadap pengguna narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, adapun kontrol sosial dilakukan dalam bentuk rehabilitas, untuk melakukan proses rehabilitasi. Adapun standar-standar prosedur yang harus diikuti, yaitu:

“..Prosedur setelah melewati bagian informasi penerimaan dan kelengkapan berkas, kemudian dilakukan screening, untuk melihat ada atau tidak penyalahgunaan zat pada klien tersebut, dimana kita menggunakan ASISST, untuk melihat jenis zat yang digunakan. Kemudian dilakukan assessment untuk melihat tingkat keparahannya, untuk melihat seberapa lama klien menggunakan zat tersebut, jadi itu digunakan sebagai salah satu rencana terapi kedepan apa yang akan kami lakukan Ketika klien masuk dalam tahap falsity...”(IF, 24/07/2020).

Selain pendapat Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, pernyataan pendukung juga diungkapkan oleh Program Manajer Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, yang mengungkapkan proses-proses apa saja yang harus dilewati sebelum menjadi klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, menurut Bro. SN hal yang harus calon klien ketahui adalah:

“...Saat dia masuk, kita pertama harus berkomunikasi sama keluarga dia, selaku penanggung jawab, untuk menghindari hal yang salah persepsi mengenai Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Misalnya ada klien masuk karena dipaksa keluarganya, dijanjikanlah dia dengan berbagai hadiah jika mau masuk Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Saat dia masuk dan menjalani rehabilitasi tetapi pas dia keluar hadiah yang dijanjikan tidak ada, maka proses rehabilitasi yang dijalani pun menjadi sia sia. Jadi sebagai konselor tugas kami adalah memberikan pemahaman dan mempertemukan antara keluarga dan klien untuk tujuan yang sama. Contoh klien direhabilitasi selama 3 atau 6 bulan maka keluarga harus mendorong klien, harus bisa memberikan bukti kepada keluarga bahwa saat keluar nanti dari rehab klien betul-betul sudah berubah. Dalam proses penerapan metode TC tetap aturan HAM menjadi acuan kita dalam memberikan pelayanan...” (SL. 24/07/2020).

Hukum primer atau substantif ditujukan untuk, *pertama*, warga, dengan menyebutkan kewajiban dan hukum atau pelanggaran terhadap klien, dan *kedua* ditujukan untuk pejabat atau aparat, dengan memberikan informasi tentang kewajiban dan hak klien. Hukum sekunder atau prosedural mengatur tindakan pejabat, menspesifikasikan sifat peran mereka, membatasi otoritasnya, dan

sebagainya (Chambliss dan Seidman 1982, hlm:76-80). *Ketiga*, control legal merupakan saksi negatif atau tak langsung. Anggota yang melanggar hukum bisa terkena hukuman, entah itu secara langsung atau tak langsung, yang diberikan wewenang. Perilaku warga dan pejabat dibentuk melalui upaya dari pihak ketiga yang berwenang menegakkan hukum dengan cara-cara yang disepakati secara sosial.

Gagasan hukum adalah agensi yang berusaha untuk menciptakan dan memelihara ketertiban sosial dengan menciptakan dan memelihara ketertiban sosial dengan menciptakan kepatuhan pada sistem standar normatif tertentu harus dikualifikasi dan dikembangkan. Hukum tidak selalu pidana, khusus yang berkaitan dengan pelanggaran nonpredatoris, seperti prostitusi, narkoba dan perjudian, memiliki fungsi simbolik.

Hukum pidana lain, khususnya berkaitan dengan pelanggaran predatoris seperti pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, pencurian, mengandung fungsi simbolik sekaligus instrumental. Hukum itu bukan hanya mendukung nilai tertentu, seperti melindungi kehidupan, keamanan dan properti, tetapi juga berusaha mengontrol dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada pelakunya.

BAB 5

IMPLEMENTASI PRASYARAT FUNGSI AGIL PADA KLIEN DI BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA

Implementasi Prasyarat Fungsi Agil pada Klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Pembahasan selanjutnya di sini adalah untuk menjawab tentang bagaimana berjalannya sistem rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN Baddoka terhadap klien berdasarkan teori fungsionalisme strukturalnya Parsons. Analisa dalam kerangka teori Parsons ini, untuk melihat sejauh mana sistem dan fungsi rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka itu berjalan baik. Keberadaan dan keberlangsungan fungsi rehabilitasi dalam sistem sosial yang terwujud dalam institusi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, bisa dilihat dari kaca mata teori Parsons yang terumuskan dalam A.G.I.L: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integrasi* dan *Latency*. Keempat faktor (AGIL) ini, menjadi tolak ukur bagi efektifitas dan berjalannya praktik rehabilitasi di BNN Baddoka.

Empat faktor tersebut dalam teori fungsionalismenya Parsons disebut dengan *Fase Fungsionalisme Syarat* sebagaimana yang diulas dalam *The Social System and Toward a General Teory of Action*. Empat prasyarat fungsionalisme dalam sistem ini harus dipenuhi oleh semua sistem tindakan

itu—apakah kultural, sosial, kepribadian dan—jika sistem tersebut ingin tetap bertahan hidup dan *sustainable*. Begitu pula, dengan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sebagai sebuah lembaga dan sistem sosial yang melakukan aktivitas dan tindakan sosial tertentu (dalam hal ini praktik rehabilitasi para pecandu Narkoba).

Bagaimana kemudian Teori Fungsional tersebut dalam konteks sistem kerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka? Implementasi Fungsionalisme Parsons ini difungsikan sebagai alat analisa bagi proses-proses aktor sosial yang berinteraksi berdasarkan kerangka kerja di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. Perlu dipahami bahwa pada hakekatnya, sebuah fungsi yang ada di lembaga BNN Baddoka tersebut merupakan sebuah sistem kompleksitas aktivitas atau tindakan yang diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem tersebut”. Karenanya, sebagai sistem sosial lainnya, sistem yang ada di BNN Baddoka ini juga membutuhkan implementasi empat prasyarat fungsional yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

A. Implementasi Prasyarat Fungsi Adaptasi

(Adaptation)

Adaptation adalah sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi. Menurut Novri Susan, 2020 Sistem (nilai-norma-struktur) memaksa individu menerima dan menjalankan tanpa bisa atau boleh mempertanyakan. Peran dan nilai norma sosial adalah *taken for granted*. Demikianpun yang terjadi di Balai, para agen termasuk klien dipaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan Balai sebagai suatu sistem. Sistem yang ada di BNN Baddoka, harus dipedomani oleh para klien, sehingga para klien dapat beradaptasi dengan sistem yang ada dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Para klien harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, nilai dan norma sebagai suatu sistem yang ada di Balai. Sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal para klien dan bahkan cenderung mengancam terhadap keberadaan para klien. BNN harus mampu mengatasi benturan antara sistem BNN Baddoka dengan situasi klien

saat diluar. Penyesuaian tersebut dapat juga melalui penyesuaian dengan metode rehabilitasi. Penyesuaian dengan disiplin ilmu sosiologi misalnya akan mampu memunculkan metode baru dengan pendekatan perpaduan antara sosiologi dengan intervensi dalam TC. BNN Baddoka mengakomodir nilai-nilai Medis, Sosial dan Religi untuk klien supaya mereka mampu beradaptasi dengan sistem rehabilitasi. Kemampuan adaptasi klien dengan sistem yang ada di Balai Baddoka dapat dilihat dalam data frekuensi mengenai tingkat perasaan yang dirasakan klien saat berada di Balai Rehabilitasi BNN.

Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan angka yang bervariasi, dimana pada awal klien berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebanyak 17 % menjawab sangat setuju merasa terpaksa berada di Balai rehabilitasi dan sebanyak 50 % merasa setuju jika mereka awalnya berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka merasa terpaksa, sedangkan sisanya sebanyak 33 % menjawab merasa tidak keberatan berada di Balai Rehabilitasi. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa adaptasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh para klien, sebab tanpa mereka beradaptasi klien tidak akan mampu menjalani program-program yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Selanjutnya data respon klien saat pertama kali berada di Balai Rehabilitasi BNN, menunjukkan tingkat beradaptasi setiap klien. Diantaranya ada 16,7% klien menganggap sangat sulit dan 83,3% mengatakan sulit beradaptasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka karena merupakan lingkungan baru.

Ketika klien sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan dan direncanakan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, maka selama menjalankan kegiatan tersebut masing-masing klien melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pasien (aktor) yang melewati masa pengobatan. Maka selama klien berada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, klien harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem yang ada di Balai. Selanjutnya para agen, staf Balai BNN Baddoka akan membuat strategi perencanaan untuk menentukan metode apa yang cocok sesuai dengan

kebutuhan klien, para staf berperan bersama-sama dengan klien membuat rencana rehabilitasi yang cocok demi mencapai tujuan kepulihan klien. Disamping itu klien diminta berperan aktif dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya klien yang ingin pulih dari ketergantungan zat narkoba.

Nilai adaptasi yang dilakukan oleh BNN Baddoka ini terdapat pada upaya mengkomodifikasi nilai-nilai medis, sosial dan religi yang ada dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem rehabilitasi. Nilai sendiri merupakan bagian dari sistem kelembagaan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Ada tiga unsur utama yang membentuk sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka: pertama adalah unsur kelembagaan (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka), unsur aktor (klien), dan unsur nilai (norma dan keutamaan yang harus dijunjung tinggi). Ketiga komponen utama ini saling terkait dan membentuk sebuah sistem dan struktur yang utuh. Prinsip nilai dan norma sendiri merupakan bagian integral dari sistem kelembagaan secara menyeluruh, yang menyangkut institusi-institusi lain yang tercakup dalam Balai Rehabilitasi BNN maupun klien itu sendiri. Dua unsur terakhir ini, Balai dan Klien, mempunyai keterkaitan yang erat dengan institusi nilai dan norma.

Seluruh program dan proses rehabilitasi merupakan suatu sistem yang dibangun Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Nilai dan norma tidak bisa diabaikan. Seperti dalam Profil Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar.

Herry Priyono menyebutkan bahwa dalam operasionalitasnya, BNN Baddoka telah mengklasifikasi nilai menjadi dua kategori utama *pertama*, nilai pokok, dan kedua, nilai penunjang. Nilai-nilai pokok yang dimaksud adalah nilai-nilai wajib diketahui, dijalankan, ditaati dan dipertahankan oleh seluruh komponen dan agen dalam sistem kelembagaan BNN Baddoka. Nilai pokok ini terdiri dari dua macam: 1) nilai-nilai medikal, dan 2) nilai-nilai sosial dan nilai agama. *Kedua* adalah nilai penunjang yaitu nilai-nilai yang dianjurkan untuk diketahui oleh segenap komponen, dijalankan, dan dipatuhi terdiri dari: 1) nilai budaya, seperti kepedulian terhadap lingkungan, 2) nilai seni, seperti seni lukis, seni rupa, kerajinan tangan, dan seni musik, dan 3) nilai jurnalistik, seperti pelatihan dan penugasan jurnalistik.

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai unit pelaksana teknis dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Pusat memiliki pengertian tersendiri tentang makna nilai, yang penting ditanamkan ke dalam diri klien, demi prosedur dan proses pemulihan klien itu sendiri. Balai Baddoka setidaknya mengklasifikasi nilai menjadi dua kelompok, yaitu: 1) nilai medis, dan 2) nilai sosial.

Terkait dengan pelembagaan dan penanaman nilai di dalam sistem BNN Baddoka, di dalam *Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi* disebutkan tentang adanya intervensi layanan yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi kepada klien. Aktifitas intervensi ini lahir, menurut Agutinus Solliu, dikarenakan adanya bentuk-bentuk pergeseran, penyelewengan, dan perubahan pada sistem nilai, baik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Dampak dari adanya pergeseran sistem nilai ini kemudian muncul gangguan, ketegangan, konflik, dan ketidakseimbangan sosial (Solliu, 2019).

Intervensi itu didorong oleh adanya hasrat atau keinginan untuk kembali hidup wajar. Maka, dalam rangka mengembalikan pada kehidupan normal tersebut, dibutuhkan sebuah strategi jitu dan efektif yang bukan hanya bertumpu pada usaha-usaha fisik-medis, melainkan juga berlandaskan pada nilai-nilai rohani-spiritual. Nilai-nilai ini harus tertanam dalam diri seseorang. Maka, proses intervensi sesungguhnya tahap-tahap penanaman nilai tersebut, sehingga proses itu sejatinya juga bagian dari pola edukasi atau pendidikan karakter. Jika merujuk pada konsepnya, pendidikan karakter sesungguhnya merupakan wujud dari usaha dan proses penanaman nilai-nilai hidup manusia yang paling baik ke dalam diri seseorang sehingga terbentuk sebuah watak atau kepribadian yang baik. Pendidikan secara praktis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai, terutama nilai kecerdasan, moral, dan religiusitas yang semua unsur ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, yaitu membina kepribadian manusia secara ideal. Hal yang paling utama ditekankan dalam penanaman nilai ini adalah budi pekerti yang luhur. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengungkapkan bahwa:

“...Adanya perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan klien, dimana kita melihat masing-masing klien. Dimana jika ada klien yang memberontak dan tidak terima berada di Balai maka akan dipisahkan terlebih dahulu dari temannya,

ditempatkan di suatu tempat, maka disitu akan dilakukan konsultasi ke dokter psikiater, psikologi, pembina mental, dimana mereka yang baru masuk akan diberi motivasi ke klien tersebut, sehingga mereka mau menerima kondisi, dan mereka bisa dikembalikan ke facility bersama teman-temannya. Dimana upaya-upaya ini dilakukan untuk membuat mereka (klien) mampu beradaptasi..”
(IF, 24/07/2020).

Nilai budi pekerti yang luhur itu digali untuk ditanamkan pada seseorang sebagai bentuk pendidikan karakter. Nilai hidup manusia yang paling baik yang disebut dengan budi pekerti luhur, di antaranya bisa diambil dan digali dari realitas masyarakat itu sendiri (Suparno, 2002:62). Pola inilah yang juga dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk praktik rehabilitasi. Dalam pelebagaan berupa penanaman nilai kepada klien, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga mengambil nilai-nilai budi pekerti atau nilai-nilai moral, agama, budaya bahkan seni dari masyarakat. Nilai-nilai etis, estetis dan religius dari masyarakat ini disarikan sebagai bagian dari sistem rehabilitasi dalam lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melalui sejumlah norma, aturan, dan etika. Nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari sistem BNN Baddoka ini difungsikan menjadi salah satu dasar untuk melakukan rehabilitasi korban Narkoba. Dalam konteks inilah, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melakukan apa yang disebut oleh Parsons dengan adaptasi sistem fungsional.

Meski demikian, dalam konteks adaptasi ini, jika merujuk pada pengalaman Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, nilai etis dan religius yang bersifat rohani-vertikal maupun nilai sosial-medis yang bersifat jasmani-horisontal sama-sama diakomodir. Pelebagaan berupa penanaman nilai-nilai agama yang menanamkan unsur keimanan mempunyai porsi yang sama besarnya dengan penanaman nilai-nilai medis dan sosial kepada para klien. Hal ini misalnya dibuktikan dengan wujud pelayanan klien yang tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Prosedur HAM menjadi nilai jasmani-horisontal yang dipratikkan dan bisa dijumpai dalam lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Proses pelebagaan nilai sebagai bagian dari adaptasi ini, juga menjadi prinsip dan dasar bagi *Therapeutic community (TC)*. Di dalam *Manual Book Program Badan Narkotika Nasional: Prosedur Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi (BNN) Baddoka, Therepeutic Community* dijelaskan bahwa TC adalah sekelompok orang yang memiliki problem sama, dimana mereka berkumpul untuk saling tolong-menolong untuk mengatasi problem yang dihadapinya. Prinsip TC adalah *man helping man to help himself*, yaitu seseorang yang menolong orang lain demi menolong dirinya sendiri. Akan tetapi untuk bisa menolong diri sendiri, selain didukung oleh profesionalitas (menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya jasmani/fisik), juga harus didukung dengan adanya nilai keyakinan, yaitu:

- a) Setiap orang bisa berubah;
- b) Kelompok bisa mendukung untuk berubah;
- c) Setiap individu harus bertanggung jawab;
- d) Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan; dan
- e) Adanya partisipasi aktif.

(Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:5).

Dalam TC ini sesungguhnya berlaku proses adaptasi, di mana melalui nilai dan norma yang ditanamkan, para klien diyakinkan bahwa manusia sejatinya bisa berubah dari buruk ke baik dengan cara membiasakan diri dan mempelajari ulang segala hal yang baik dalam dirinya sehingga hal-hal buruk menjadi hilang dari diri orang tersebut.

Melalui strategi TC ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sejatinya mengajak para klien untuk beradaptasi dengan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena TC yang menjadi prinsip kerja BNN Baddoka telah menyediakan seperangkat etika dan nilai yang mengajarkan keyakinan baik bagi para klien. Beberapa nilai kebaikan dan etika tersebut bisa dilihat sejumlah afirmasi moral yang banyak dipampang dan dibahas dalam lingkungan TC. Nilai dan etika yang diakomodir oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini sangat kontras dengan *sub-culture* 'kehidupan jalanan' yang selama ini dianut oleh pecandu.

Pelembagaan nilai dan norma kemudian nampak bahwa para pecandu ini yang awalnya terbiasa dengan kehidupan gelap; terbiasa hidup dalam nilai-nilai buruk, ketika masuk ke dalam lingkungan BNN Baddoka mulai dibiasakan dan diadaptasikan dengan nilai-nilai yang baik sebagai pengganti dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pecandu pada kehidupan sebelumnya. Nilai-nilai yang diadaptasikan di BNN Baddoka ini, seperti sudah dikatakan, diambil, dan diangkat dari nilai-nilai sosial masyarakat dan agama. Diantara nilai dan etika atau norma dalam TC yang menjadi sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tersebut antara lain:

- a) HONESTY; kejujuran, dipercaya sebagai hal mendasar dalam treatment yang efektif untuk menciptakan pemulihan yang stabil, hidup sesuai aturan dan hubungan interpersonal yang sehat;
- b) ACT AS IF (and soon you will become); bertindak sebagaimana yang seharusnya – sikap dan emosi berubah seiring perubahan perilaku;
- c) I AM MY BROTHER KEEPER; aku adalah pelindung saudaraku – tanggung jawab sosial untuk saling melindungi dalam hal yang baik;
- d) PERSONAL RESPONSIBILITY, tanggung jawab pribadi – klien diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena menyalahkan orang lain hanya akan merusak kekuatan diri sendiri;
- e) NO FREE LUNCH; tidak ada yang gratis – dituangkan dalam sistem privilege dalam TC;
- f) PRIDE IN QUALITY; semua yang dilakukan dengan sebaik-baiknya akan mendatangkan kualitas yang memberi kepuasan batin;
- g) WHAT GOES AROUND SHALL COMES AROUND; semua hal pasti ada konsekuensinya – memperlakukan orang lain seperti kita juga ingin diperlakukan, mengajarkan adanya hukum karma;
- h) RESPONSIBLE CONCERN; kepedulian yang bertanggung jawab – peduli kepada orang lain bentuknya tidak hanya dengan memberikan hal yang menyenangkan kepadanya, membuat orang itu berbuat tidak melanggar merupakan sebuah kepedulian yang bertanggung jawab, begitulah yang dinamakan tough love;

- i) HERE & NOW; sekarang dan saat ini – klien didukung untuk menghabiskan energinya pada hal-hal yang mampu ia kontrol (fokus) serta memaafkan dirinya dan orang lain mengenai kesalahan masa lalu;
- j) KNOW THYSELF; mengenali diri sendiri–refleksi, self-awareness, pemahaman terhadap diri sendiri sangat penting untuk bertumbuh dan memaafkan masa lalu.

(*Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:6-7*).

Secara metodologis, pola rehabilitasi dalam TC yang dipraktekkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini mempunyai tujuan utama: untuk membuat anggota komunitas kembali sehat dan produktif sesuai perannya dalam keluarga dan masyarakat dengan cara: pertama, mengubah *sub-culture* (kebiasaan pecandu) yang selama ini telah melekat dengan cara mengajarkan pemahaman baru yang lebih membangun (konstruktif). Kedua, mengubah *faulty belief system* (sistem kepercayaan / nilai diri yang salah) yang selama ini dianut oleh klien sebagai seorang pecandu dengan cara memberikan pengetahuan baru yang benar dan valid tentang dampak penyalahgunaan zat dan kemampuan bantu diri (self-help) (*Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:6-7*). Dari metodologinya ini bisa dilihat dengan jelas bahwa dalam pola pemulihan BNN Baddoka melalui programnya yang bernama TC ini telah berlaku prinsip adaptasi terhadap nilai-nilai.

Selain penanaman nilai Kesehatan, sosial dan agama, Balai Rehabilitasi Baddoka juga melakukan praktik rehabilitasi dengan melembagakan dengan menanamkan nilai terapi kesenian dll. Di sinilah nilai estetika juga diakomodir BNN Baddoka sebagai sistem rehabilitasi. Jadi dalam hal proses adaptasi ini, yang diserap oleh BNN Baddoka sebagai nilai di lingkungan BNN Baddoka bukan hanya berasal dari agama dan norma masyarakat, tetapi juga dari seni dan budaya. Nilai-nilai seni dan budaya juga diakomodir menjadi bagian sistem BNN Baddoka yang mana nilai-nilai ini juga ditanamkan sebagai proses pemulihan kepada klien.

Salah satu program rehabilitasi melalui kegiatan kesenian itu, tidak sedikit karya seni yang telah diproduksi oleh klien, seperti kerajinan tangan,

lukisan, dan juga karikatur. Ini juga bagian dari proses adaptasi kepada nilai-nilai baik, di mana, untuk terbiasa dengan nilai-nilai baik dan terhindar dari nilai-nilai buruk, energi dan aktivitas para klien diarahkan untuk hal-hal yang produktif dan kreatif. Mereka dibiasakan untuk menghasilkan sejumlah karya. Dengan demikian energi dan pikiran mereka terbiasa tersalurkan melalui kerja kreatif dan positif, bukan melalui aktivitas yang destruktif dan negatif.

Para klien BNN Baddoka itu pun berhasil melahirkan sejumlah produk karya yang cukup membanggakan. Pada Juni 2019 misalnya karya seni hasil kerja kreatif para klien Balai Rehabilitasi Baddoka telah dipamerkan pada acara Pagelaran Seni 2019 dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Pagelaran seni HANI 2019 ini menampilkan berbagai karya kesenian seperti Tari Pagellu asal Toraja, *band performance* yang dibawakan oleh Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. Selain itu juga ditampilkan *performing arts* seperti *frestyle* jugling bola dan *modern dance*, penghargaan lomba juara seni karikatur, dan launching film pendek tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di mana semua itu merupakan hasil karya klien.

Namun demikian, keberhasilan pelebagaan nilai dalam proses pemulihan klien, sejatinya, tidak hanya bertumpu pada laporan psikologis klien. Latar belakang klien, mulai dari agama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan tingkat pendidikan, juga harus diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian dari pihak lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sebab, latar belakang sosial, budaya dan agama juga menjadi dasar penentu bagi penilaian. Dari data tahun 2016 hingga tahun 2019, misalnya, latar belakang agama para klien cukup beragam, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Usia mereka berkisar antara 13-64 tahun. Jenis kelaminnya pun berbeda-beda, ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Ada yang masih lajang juga ada yang sudah menikah. Bahkan, tingkat pendidikannya pun berbeda-beda dari SD, SLTP, SMA, hingga Perguruan Tinggi (Data Klien 2016-2019).

Keberagaman latar belakang sosial, budaya, agama, dan pendidikan ini juga tentunya menjadi pertimbangan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

dalam melakukan rehabilitasi, dengan kata lain, proses rehabilitasi dan penilaian bahkan evaluasi praktik pemulihan BNN Baddoka diadaptasikan pada keragaman latar belakang tersebut. Dalam proses adaptasi nilai dan norma ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memahami bahwa penanaman nilai menjadi semakin efektif dan efisien dalam proses pemulihan hanya jika disesuaikan dengan kebutuhan klien sekaligus latar belakang mereka. Memahami kebutuhan mengenai layanan setiap klien dengan demikian tidaklah sama, dan pendekatan geografi massa menjadi jembatan untuk memahami perilaku klien (F. Syam, 2019).

Praktik pelembagaan berupa penanaman nilai sebagai bagian dari syarat fungsional Parson, adaptasi, di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini berlangsung dalam rangka untuk mengembalikan perilaku sosial para klien yang dianggap telah menyimpang dari norma dan nilai-nilai masyarakat umum. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga telah menentukan beberapa contoh perilaku menyimpang atau melanggar dari nilai-nilai dan norma masyarakat sehingga pelakunya perlu dikembalikan lagi ke batas normal, di antaranya adalah *adult-Child-of-an-Alcoholic Traits, Anger, Antisocial Behavior, Anxiety, hyperactivity disorder, bipolar, family conflict, impulsivity*, dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya.

B. Implementasi Prasyarat Fungsi Pencapaian (*Goal Attainmen*)

Pencapaian Tujuan. Menurut Novi Susan, 2020 sistem yang sudah ada membagi peranan untuk setiap individu yang menjadi anggotanya. Sebagai sebuah sistem kelembagaan, BNN Baddoka membagi secara rapi peranan para agen. Artinya sistem yang ada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar akan berjalan harmonis jika para agen (staf Balai) dan para aktor (klien) dapat menjalankan perannya dengan baik. Diharapkan klien yang ada di Balai Rehabilitasi mampu membangun tujuan berada dibalai yang ingin dicapai selama menjalani rehabilitasi. Klien sudah mempunyai rencana untuk mengikuti program rehabilitasi. Mereka sudah mempunyai perubahan

pada diri. Mereka sudah mempunyai kekuatan untuk pulih. Pada pencapaian tujuan di harapkan para klien sudah mampu melakukan *preparation* menuju *action*.

Menurut data penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2019, menunjukkan adanya pengaruh zat narkoba dalam tubuh klien, dimana data di atas menjelaskan bahwa narkoba sangat berperan besar dalam merubah pola hidup klien. Klien merasakan dampak dari pemutusan narkoba. Terdapat 16.7% klien menjelaskan bahwa mereka hilang kendali sedangkan sisanya 83.3% menganggap bahwa dampak narkoba juga sangat besar dalam diri mereka sehingga mereka merasakan perubahan yang signifikan.

Implementasi fungsi pencapaian tujuan yang berlangsung pada sistem rehabilitasi, diharapkan dapat melaksanakan fungsi mendefinisikan tujuan pokok pemerintah yang berkenaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama terbebasnya generasi muda dan masyarakat pada narkoba. Peningkatan kualitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba menjadikan pencapaian tujuan yang maksimal.

Kapasitas hukum pidana untuk mengubah sikap dan perilaku adalah isu kontroversial. Salah satu argumen menyatakan hukum tidak dapat menciptakan perubahan itu. Herbert Spencer dan William Graham Summer menegaskan bahwa hukum tidak dapat menghilangkan adat-istiadat masyarakat, hukum menfleksibelkan sentimen orang namun tidak dapat secara independen dapat mengubah sentimen tersebut. Legislasi yang tidak disandarkan pada adat istiadat yang lemah. Jadi, hukum mengungkapkan perubahan namun ia sendiri tidak menciptakan perubahan. Hukum mungkin dibentuk oleh sentimen orang, namun ia dapat menjadi sasaran untuk menyusun program perubahan.

Sebagai mekanisme edukasi dan koersif, hukum dapat mengubah nilai dan norma orang serta perilaku mereka. Jeremy Bentham dan pengikutnya mengklaim bahwa hukum dapat merestrukturisasi masyarakat dalam rangka mengatasi problem baru dan memenuhi kebutuhan baru. Juri Soviet yang terkemuka, seperti S.F. Kechekyan, memandang hukum sebagai alat untuk

menghilangkan cara berfikir dan bertindak tertentu dan melengkapi anggota masyarakat dengan perspektif dan pada perilaku yang sesuai dengan ideologi.

Para sosiologi menyadari bahwa sikap dan perilaku orang dibentuk melalui sosialisasi, namun mereka juga mengetahui bahwa hukum memang dapat mengubah (lihat Turk, 1972). Ada bukti bahwa beberapa hukum memang dapat mengubah sikap dan perilaku di bidang seperti pendidikan, perumahan, hubungan kerja, dan transportasi. Pada saat yang sama, ada bukti bahwa yang hukum menimbulkan perubahan yang tak tampak, tak terduga, dan tak diinginkan, dan ada hukum yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak menimbulkan perubahan.

Sebagai sebuah lembaga rehabilitasi, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tujuannya jelas yaitu memulihkan para pasien pecandu Narkoba. Tujuan ini bagian dari sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Dalam kerangka nilai dan norma ini, tujuan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berusaha mengembalikan kehidupan para klien ke dalam kehidupan normal dengan menerapkan sejumlah nilai kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan Parsons bahwa pada aspek Pencapaian Tujuan ini sistem BNN Baddoka menetapkan sejumlah skala prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang telah teradaptasikan itu untuk mencapai tujuan besarnya. Dalam kerangka teori fungsionalisme Parson, tujuan besar Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini yang diusung dan diusahakan oleh segenap komponen dan para agennya.

Pencapaian tujuan dari sistem BNN Baddoka ini secara umum bisa dilihat dari visi dan misi lembaga ini. Adapun visi dari BNN Baddoka adalah menjadi pusat layanan terbaik dalam bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Sementara misi balai rehabilitasi BNN Baddoka adalah memberikan layanan secara terpadu dan profesional, mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi, serta melakukan operasional research dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi.

Skala prioritas tersebut diwujudkan dengan mengacu pada sejumlah standar. Dalam kerangka pencapaian tujuan ini, Balai Rehabilitasi BNN

Baddoka mempunyai standar penilaian. Standar penilaian berikut tahap-tahapnya yang ada didalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini mengacu pada standar yang diterapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, mengingat Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sendiri merupakan bagian dari BNN RI. Pemenuhan persyaratan fungsi pencapaian tujuan dalam sistem BNN Baddoka ini bisa juga dalam program TC. Dalam hal ini, program *Therapeutic Community* (TC) Balai Rehabilitasi Baddoka menetapkan dua fase: Fase A dan Fase B. Pada Fase A, seorang individu klien harus didampingi oleh konselor untuk menjalani beberapa tugas tertentu. Pada Fase A ini, ada Dua Belas (12) Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Klien telah menjalani program di fase A kurang lebih 30 hari dengan menunjukkan perkembangan/progres yang baik;
- b) Klien wajib memahami dan mematuhi: cardinal rules, major rules, dan house rules;
- c) Klien telah membuat jurnal feeling, sign by MOD;
- d) Klien berpartisipasi aktif dalam setiap group/sesi (morning meeting & wrap up), serta membawakan atau memberikan : awareness 5 kali, Issue 5 kali, intra personal pull up 5 kali, personal pull up 3 kali, pull up board 2 kali, motivasi 5 kali, penghargaan 4 kali, suggest TOTD 3 kali, dan menyebutkan 20 jargon yang dibuktikan dengan sign MOD;
- e) Membuat 3 *theme writing* elaborasi perangkat rumah (*tools of house*);
- f) Partisipasi aktif dalam konfrontasi rumah;
- g) Membuat resume riwayat pemakaian dan alur program yang dilalui;
- h) Mampu memahami dan menghafal serenity prayer dan the creed.
- i) Menyelesaikan kriteria religi;
- j) Membawakan seminar tentang pengertian penerimaan diri, manfaat dan tujuan penerimaan diri, serta issue di dalam diri;
- k) Menjadi moderator/conduct seminar klien sebanyak 3 kali, dan
- l) Klien telah melakukan individual counseling, family dialogue, dan statik group minimal 2 kali. (Sollu, 2019:5).

Fase A dengan 12 Kriteria tersebut sesungguhnya contoh dari standar nilai pemulihan yang ditetapkan dan diterapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Setelah Fase A selesai, klien akan melanjutkan tahap rehabilitasinya pada Fase B yang meliputi 17 Kriteria berbeda dibanding pada Fase A. Program TC Fase B ini diselenggarakan untuk mengetahui dan mendapatkan penilaian Kriteria Fase *House of Faith*. Adapun dalam rangka untuk mengetahui dan mencapai penilaian Kriteria *Fase House of grow* dengan Program TC yang sama, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengeluarkan buku panduan berbeda dengan kriteria berbeda pula. Kategori dan klasifikasi dari kriteria tersebut pun berbeda:

- 1) *Pertama*, Kriteria Fase Penerimaan (*Acceptance*), yang terdiri atas 12 kriteria;
- 2) *Kedua*, Kriteria Fase Perubahan (*Change*), yang terdiri atas 16 kriteria;
- 3) *Ketiga*, Kriteria Fase Sosialisasi, yang terdiri atas ada 11 kriteria.

Selain itu, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga menerbitkan buku evaluasi/penilaian terkait konsep pemulihan klien berdasarkan keanggotaan. Pada tahap penilaian ini, ada sejumlah fase yang juga harus dilewati:

- a) fase pertama adalah *Younger Member-Primary* dengan 7 kriteria;
- b) fase kedua adalah *Middle Member-Primary* dengan 13 kriteria;
- c) fase ketiga adalah *Older Member-Primary* dengan 11 kriteria;
- d) fase keempat adalah *observation* dengan 7 kriteria;
- e) fase kelima adalah *vocational* dengan 6 kriteria dan
- f) fase keenam adalah *survival* dengan 5 kriteria.

Berdasarkan prasyarat fungsional Pencapaian Tujuan di BNN Baddoka yang melalui beragam fase dan standar tersebut ditegaskan bahwa seorang individu klien ditetapkan telah pulih oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka apabila telah menyelesaikan fase demi fase dengan mendapatkan poin maksimal pada setiap kriteria (Sollu, 2019:5).

Jadi, dalam implementasi fungsional Pencapaian Tujuan ala Parsons ini, nilai merupakan aspek yang menjadi acuan sebuah tindakan rehabilitasi dalam BNN Baddoka. Di mana, para klien dalam proses pencapaian tujuan ini didorong untuk merefleksikan diri sebagai upaya untuk menyerap makna

dalam kehidupan, sehingga refleksi mendalam ini, diharapkan menjadi pendorong bagi para klien untuk merubah kepribadiannya ke arah yang lebih positif.

Sebagaimana dikatakan Mansur Isna bahwa sesuatu bisa dianggap bernilai apabila penghayatan reflektif seseorang berhasil meraih makna nilai dan memandangnya sebagai sesuatu yang sangat berguna atau sangat signifikan bagi kehidupan dirinya. Maka, pencapaian setiap orang dalam pencapaian nilai ini berbeda-beda. Perbedaan dalam memahami dan menghayati sesuatu sebagai perkara yang bernilai adalah perbedaan tingkat kedalaman refleksi. Namun, perbedaan tingkat kedalaman refleksi ini akan mempunyai nilai manfaat dan tidak menghalangi relasi yang menghubungkan antara subjek nilai (manusia) dengan objek nilai (Isna, 2001:98).

Relasi antara subyek dan obyek nilai itu kemudian melahirkan sebuah tindakan sosial yang berlandaskan nilai. Tindakan sosial berbasis nilai ini bisa berlangsung secara emosional, intelektual, atau kombinasi keduanya. Dalam kenyataannya, seorang individu melakukan tindakan sosial tertentu lebih karena dorongan emosinya juga karena dorongan intelektualitasnya atau bahkan dorongan kedua-duanya. Gabungan antara dorongan emosional dan refleksi intelektual inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan prinsip atau norma, dan prinsip dan norma ini akan bernilai jika diaktualisasikan ke dalam tindakan sosial (Isna, 2001). Tindakan sosial ini sendiri merupakan tindakan yang bertujuan, dan tujuan dalam tindakan sosial itu sendiri tersembunyi di dalam norma dan prinsip nilai tersebut.

Artinya bahwa dalam konteks klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, nilai dan norma ini melandasi tindakan sosial mereka yang mengarah pada satu tujuan yakni penyembuhan secara total. Hal ini misalnya bisa ditemukan dalam catatan harian para klien yang isinya berbeda-beda. Dengan demikian dari fakta ini bisa juga dipahami bahwa nilai yang sama kemudian ditanamkan dan diajarkan oleh Balai Rehabilitasi Baddoka kepada klien yang beragam latar belakangnya, maka nilai dan norma tersebut akan ditangkap, diinternalisasi, dan diimplementasikan secara berbeda-beda dalam kehidupan mereka. Namun perbedaan penghayatan dan respon terhadap

nilai dan norma ini tetap mengacu pada satu tujuan utama yakni terjadinya perubahan kepribadian para klien ke tahap yang normal alias pulih dari jerat penyalahgunaan Narkoba.

C. Implementasi Prasyarat Fungsi Integrasi

Implementasi syarat integrasi menurut Parsons, pada fase ini para klien diharapkan sudah berada pada *stage action dan maintenance* menurut Prochaska dan De Clemente. Artinya telah terjadi perubahan perilaku pada diri klien. Mereka diharapkan sudah mampu memaknai suatu nilai dan menjalankan norma yang ada dalam masyarakat. Klien sudah berada pada fase akhir menjalani rehabilitasi. Para klien sudah mempunyai ketrampilan untuk melakukan integrasi dengan masyarakat umum. Mampu berintegrasi dengan kehidupan normal. Menurut Novi Susan Sistem menyediakan mekanisme sanksi (hukuman) dan reward (penghargaan) kepada setiap individu berdasar pada pelaksanaan peranan masing-masing. Penilaian kemampuan klien berdasarkan buku kriteria penilaian klien yang dipegang oleh konselor. Dalam hal ini konselorlah yang memberikan penilaian terhadap perkembangan perubahan diri klien.

Diharapkan klien pada Fase Integrasi dan Maintenance sudah mampu berintegrasi dengan kehidupan normal, kebiasaan balai sebagai personifikasi masyarakat luas. Klien sudah dianggap pulih. Sudah sehat fisik dan psikis, sudah mampu menjalankan fungsi sosialnya dan sudah bisa melupakan narkoba.

Hidup terstruktur merupakan bentuk kegiatan menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan rencana yang sudah dirancang sedemikian rupa, untuk mencapai tujuan dalam hidup. Hal ini tergambar dari klien di Balai Rehabilitasi yang dimana sebelum berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mereka hidup bebas tanpa aturan dan sanksi, tetapi setelah berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, hidup mereka dan kegiatan sehari-haripun diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu yang terbuang tanpa ada kegiatan.

Menurut data, kegiatan mereka selama berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sangat terstruktur dan tersusun sedemikian rupa. Sebanyak 83.3% klien menjawab bahwa hidup dan keseharian mereka diatur oleh Balai Rehabilitasi dari mereka bangun tidur pagi hingga mereka tertidur malam kembali, sedangkan sisanya 16.7% klien menjawab bahwa mereka merasakan dampak yang signifikan dalam diri mereka bahwa dahulu mereka yang hidup sesuai dengan kemauan mereka, tanpa ada yang mengatur dan mengawasi berbanding terbalik di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang kegiatannya diatur dan diawasi.

Hal ini membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa para klien yang selama menggunakan narkoba hidup keseharian mereka tidak teratur secara sistematis maksudnya adalah kegiatan sehari-hari klien yang tidak terjadwal dengan baik hal ini disebabkan karena mereka memilih hidup bebas dibandingkan hidup terstruktur dan terencana.

Dalam pada itu, nampak bahwa jika proses prasyarat fungsi integrasi atas dasar sistem nilai dan norma yang dilakukan oleh lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah melakukan normalisasi perilaku dan keseimbangan yang dinamis dalam diri klien. Hal ini berarti telah memungkinkan terwujud integrasi sosial yang dibutuhkan oleh klien dalam memulihkan diri mereka dari ketergantungan terhadap narkoba, sehingga mereka tidak akan lagi menggunakan narkoba.

Integrasi merupakan syarat fungsional dalam konsepnya Parsons yang berusaha mengintegrasikan atau mensinergikan seluruh komponen dan unsur yang ada dalam lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Di dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, sinergitas antar bagian dan elemen merupakan hal yang niscaya dilakukan demi meraih tujuan utama (*Goal Attainment*). Mengenai pemenuhan syarat integrasi fungsional dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini bisa dilihat dari misi lembaga rehabilitasi ini: memberikan layanan secara terpadu dan profesional, mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi, serta melakukan *operasional research* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi. Jadi aspek integrasi ini secara konseptual dan inheren

sudah terkandung dalam sistem lembaga Rehabilitasi BNN Baddoka karena melalui misinya itu, ditekankan pola pelayanan terpadu dan profesional. Hal ini menyiratkan adanya kesatuan dan sinergitas antar unsur dan kelompok dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Kemudian aspek integrasi antar komponen ini secara strukturalis dan profesional bisa dilihat dari penempatan para tenaga-tenaga ahli Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di bidang masing-masing dengan tetap mengacu pada tujuan dan cita-cita bersama. Penempatan posisi para pejabat dan tenaga ahli ini bagi B Siswanto Sastrohadiryo (dalam Suwanto, 2012:138) bagian dari unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan dan keahliannya. Meski demikian, dalam sistem dan lembaga apapun kemampuan, kecakapan dan keahlian dari masing-masing individu atau aktor ini harus terintegrasikan sehingga membentuk sistem kerja profesional dan optimal.

Pada aspek integrasi ini, sebagaimana yang dijelaskan Parsons, para individu dan aktor yang ada di dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melakukan proses sosialisasi dan internalisasi yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran mereka untuk mengabdikan pada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari pemenuhan syarat integrasi inilah tercipta sebuah komunitas dalam BNN Baddoka yang mana komunitas ini terbangun pola relasi dan kerja saman antar individu dalam menjalankan fungsi terapi dan rehabilitasi. Tujuan komunitas sendiri, kalau merujuk pada pendapatnya De Leon (1997) adalah untuk memfasilitasi perubahan sosial dan psikologis dari masing-masing individu. Keberadaan komunitas sebagai refleksi sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini sesungguhnya masih berhubungan erat dengan program TC yang telah disinggung di atas. Dalam TC segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu yang telah terstruktur dan tersistematisasikan disusun sedemikian rupa untuk memfasilitasi perubahan pada diri klien.

Jika merujuk pada Parsons soal syarat fungsional integrasi ini, di dalam sistem TC yang berlangsung di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga dikenal beragam elemen yang satu sama lain saling terkait. Ada sejumlah

elemen atau unsur pokok TC dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang telah terbangun sebagai sebuah sistem integratif, di mana elemen-elemen ini, selain menyinggung aktor juga menekankan adanya nilai dan norma tertentu:

- a) ROLES: setiap anggota komunitas memiliki perannya masing-masing dan harus dihargai;
- b) FEEDBACK SYSTEM : mengajarkan anggota komunitas memberi masukan dan mendengarkan saran;
- c) ROLE MODELLING: semua anggota komunitas mempunyai tanggung jawab bersikap baik agar menjadi contoh untuk anggota lain;
- d) COLLECTIVE FORMAT: hampir semua kegiatan bersifat kelompok, namun bertujuan untuk perubahan individual yang mengajarkan kebersamaan dan kerjasama;
- e) NORMA & VALUE: TC dianggap sukses yang aturan dan nilainya dipercayai oleh semua anggota komunitas;
- f) STRUCTURE & SYSTEM: TC memiliki struktur dan sistem yang mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan kepada semua anggota komunitas;
- g) OPEN COMMUNICATION: mengajarkan klien aktif dan terbuka dalam mengutarakan pikiran dan perasaannya;
- h) RELATIONSHIP: mengajarkan kembali kodrat mantan pecandu sebagai manusia yang merupakan anggota dari keluarganya dengan memberi pengetahuan *healthy relationship*;
- i) TERMINOLOGI: jargon, slogan dan istilah-istilah yang ada dalam program bertujuan untuk menumbuhkan kekompakan dalam komunitas.

(Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:8).

Pada poin pertama dijelaskan bahwa setiap anggota komunitas (baca: komponen sistem) bekerja sesuai dengan tugas dan keahliannya masing-masing dan harus dihargai. Pernyataan ini sesungguhnya mencerminkan unsur norma dan nilai. Aspek norma di sini terletak pada profesionalitas di mana setiap individu dalam sistem atau komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka haruslah bekerja sesuai dengan tugas dan

keahliannya. Tidak diperkenankan seseorang melakukan peran dan tugas di luar kewenangannya. Dalam konteks ini pula terlihat nilai profesionalitas. Lalu nilai lainnya terdapat pada penegasan perlunya penghargaan (*appreciation*) terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh masing-masing individu tersebut.

Dalam beberapa hal nampak nilai untuk saling menghargai dan mendukung antar individu dalam sebuah sistem. Kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini bukan berarti pola kerja yang terpisah-pisah dan berjalan sendiri-sendiri. Dengan prinsip fungsional integrasi yang dicetuskan Parsons ini, elemen *Role* dalam sistem dan komunitas BNN Baddoka terkoordinasikan di dalam satu komando yang mengarahkan pada satu tujuan besarnya (*Goal Attainment*). Karenanya meskipun prinsip *Role* ini meneguhkan perlunya kerja sesuai dengan *job description* masing-masing orang, namun masing-masing individu tetap berada dalam garis komando yang sama untuk mengintegrasikan mereka.

Syarat integrasi dari Parsons yang berjalan di dalam sistem atau komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini sesungguhnya juga sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen keorganisasian yang dicetuskan oleh Henry Fayol. Daniel A. Wren and Arthur G. Bedeian dalam *The Evolution of Management Thought* menjelaskan prinsip organisasi dari Henry Fayol, yang diantaranya adalah pembagian kerja (*division of work*) dan remunerasi atau sistem penggajian. (Wren and Bedein, 2009: 216-221). Syarat integrasi sangat berperan penting dalam pembinaan klien saat berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka oleh karena itu diperlukannya penerapan nilai-nilai dan norma terhadap klien hal ini juga di tegaskan oleh program manager Balai Rehabilitasi BNN Baddoka oleh Bro Saldi yang mengungkapkan bahwa:

“.....Di rehabilitasi sangat penting pelayanan saat difase-fase akhir. Dimana klien diberi pemahaman manajemen pemulihan. Bagaimana mereka bisa membuat program pemulihan dirumah sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di rumahnya dia bangun pagi jam berapa, aktifitas apa dengan siapa, hal-hal apa yang harus diperhatikan. Hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekurangan dia itu semua tidak akan berguna tanpa ada semangat atau support dari keluarga atau orang-orang terdekat

itu sendiri. Jadi mereka keluar memiliki rencana sendiri, dimana rencana itu mereka akan gunakan sendiri untuk manajemen diri mereka sendiri..." (SL, 24/07/2020).

Unsur *Roles* dalam sistem kerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini memenuhi dua unsur manajemen keorganisasian ini, yakni pembagian kerja dan apresiasi. Pembagian kerja terhadap para individu dalam sebuah organisasi, komunitas atau sistem menurut Fayol merupakan sebuah usaha untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya masing-masing individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Hal ini karena dalam faktanya kemampuan manusia sangat terbatas baik dalam konteks pengetahuan, kebutuhan waktu, tenaga dan perhatian. Maka, keterbatasan yang ada pada individu ini bisa dijalankan oleh individu lain yang memiliki kemampuan untuk itu. Dalam konteks *Roles* yang ada di dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, aspek pembagian kerja ini terdapat pada penegasan tentang masing-masing individu bekerja sesuai dengan perannya.

Poin kedua, prinsip *Roles* ini juga mengandung unsur dan karenanya kompatibel dengan prinsip manajemen organisasi berikutnya yakni remunasi. Aspek remunasi ini, menurut Fayol, adalah pembayaran upah secara adil juga memberikan kepuasan yang maksimal untuk para pegawai dan majikan. Dengan menggunakan sistem remunasi yang adil dan memuaskan, dimaksudkan untuk merangsang para pegawai untuk bisa bekerja lebih tekun lagi. Analisis Fayol ini jelas untuk sebuah perusahaan sehingga dirinya dalam aspek remunasi ini langsung dikaitkan dengan gaji karyawan. Akan tetapi prinsip manajemen Fayol ini juga bisa diterapkan dalam lembaga atau komunitas lain, termasuk dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Dalam elemen *Roles* yang menjadi salah satu unsur TC di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, selain ditegaskan soal kerja secara profesional dan terbagi-bagi juga ditegaskan soal perlunya penghargaan. Tentu saja penghargaan atau apresiasi terhadap para individu yang bekerja sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing ini harus adil sehingga para pegawai atau individu yang bekerja di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka bisa terpacu

semangatnya untuk semakin semangat dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Apresiasi ini pada dasarnya juga bagian dari nilai bagi kinerja seseorang.

Bekerja secara profesional dan apresiasi yang layak dan adil maka fungsi integrasi-nya Parsons bisa terwujud dalam sistem BNN Baddoka. Integrasi bagi tiap-tiap komponen dalam sebuah sistem atau komunitas, termasuk dalam lingkungan BNN Baddoka ini, juga ditopang oleh kerja yang profesional dan apresiasi yang adil. Jika masing-masing individu bekerja tidak profesional sehingga masing-masing otoritas dan peran saling tumpang tindih lalu apresiasi yang diberikan tidak memenuhi syarat adil dan layak, maka bisa dipastikan aspek integrasi ini tidak akan tercapai. Di dalam sistem BNN Baddoka, syarat fungsional integrasi ini tercapai juga karena ditopang oleh dua hal tersebut: kerja profesional (sesuai dengan perannya masing-masing) dan apresiasi yang adil dan layak.

Kemudian elemen kedua dalam TC yang ada di dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah Feedback System: pemberian masukan dan mendengarkan saran. Elemen ini juga bagian dari upaya memenuhi syarat fungsional integrasi dalam sistem BNN Baddoka. Jika dikaitkan dengan prinsip manajemen organisasinya Fayol, elemen *Feedback system* ini masuk kategori inisiatif. Inisiatif menurut Fayol merupakan prinsip manajemen yang menyatakan bahwa seseorang kepala harus pandai dalam memberikan inisiatif. Inisiatif ini muncul dari dalam diri seorang yang mempergunakan daya pikir dan intelektualnya untuk melahirkan ide-ide baru yang segar demi perbaikan sistem.

Inisiatif di dalam sebuah sistem dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu yang bernilai guna bagi *problem solving* (penyelesaian masalah) dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam elemen TC Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini, inisiatif sebenarnya tidak hanya ditekankan pada pundak pemimpin, melainkan pada seluruh elemen atau individu yang terlibat. Masing-masing individu didorong untuk memberikan masukan sekaligus mendengarkan saran demi terciptanya kemajuan sekaligus sinergitas dalam menjalankan kerja organisasi. Dengan saling memberi dan menerima

gagasan atau ide itulah sinergitas dan kekompakan atau yang menurut Parsons integrasi bisa diwujudkan.

Elemen berikutnya adalah *Role Modelling* di mana semua anggota komunitas mempunyai tanggung jawab bersikap baik agar menjadi contoh untuk anggota lain. Elemen TC ini juga merupakan wujud dari upaya melakukan integrasi. Dengan adanya *Role Model*, maka setiap individu diarahkan untuk merujuk pada model yang diidealkan tersebut. Dalam elemen *Role Model* ini nilai yang ditekankan adalah nilai keteladanan, di mana masing-masing individu harus bisa menjadi contoh bagi individu lain. Singkatnya, masing-masing individu bisa saling belajar dari sesamanya. Di sinilah kemudian letak pemenuhan syarat integrasi dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Memberikan dan mendengarkan ide atau gagasan dari masing-masing individu yang terlibat, maka diharapkan terjadi perubahan atau transformasi sistem ke arah yang lebih baik. Maka, elemen *Role Model* ini kalau ditarik ke dalam teori kepemimpinan bisa dikategorikan sebagai aspek kepemimpinan transformasional. Tipologi kepemimpinan atau manajemen transformasional menurut BM.Bass adalah kemampuan untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar dari pada yang direncanakan sebelumnya dan untuk mencapai imbalan internal (Bass, 1981). Dengan elemen *Role Model* ini sejatinya masing-masing individu, terutama pemimpin, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya atau bawahan lainnya untuk bekerja keras demi mencapai target dan tujuan utama yang ditargetkan.

Elemen nilai selanjutnya dalam TC BNN Baddoka adalah *Collective Format* di mana hampir semua kegiatan bersifat kelompok, namun bertujuan untuk perubahan individual yang mengajarkan kebersamaan dan kerjasama. Seperti dikatakan, bahwa dalam prinsip integrasinya Parsons ini, masing-masing orang bekerja sesuai dengan peran dan bidangnya, tetapi harus tetap terintegrasi. Dalam prinsip manajemennya Fayol, elemen *collective format* ini masuk kategori semangat kesatuan (*Esprit de Corps*). Prinsip kesatuan ini merupakan wujud kesetiaan kelompok. Di mana, ini merupakan prinsip

manajemen yang setiap individu atau orang yang menjadi bagian dari sistem atau komunitas harus mempunyai rasa kesatuan senasib sepenanggungan yang bisa menciptakan semangat kerja sama yang lebih baik. Namun, semangat kesatuan ini bisa muncul hanya jika masing-masing individu mempunyai kesadaran bahwa tiap personal berarti bagi personal yang lain. Dengan elemen *collective format* ini menunjukkan bahwa Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah memenuhi syarat fungsional integrasi seperti yang dilontarkan oleh Parsons demi berjalannya sistem yang telah dibangun.

Menurut Norma and Value (nilai) merupakan salah satu elemen dalam TC yang ada di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai wujud untuk membangun integrasi. Norma dan Value sebagai salah satu elemen TC ini menyatakan bahwa TC dianggap sukses jika aturan dan nilainya dipercayai oleh semua anggota komunitas. Artinya, norma dan nilai ini merupakan pedoman dan prinsip yang harus dipegang oleh setiap individu dalam komunitas. Dari sinilah kemudian, masing-masing individu atau personal diikat oleh sejumlah norma dan nilai sehingga mereka berada dalam integrasi sistem yang ada. Tanpa ikatan norma dan nilai ini, integrasi yang diusahakan sulit dicapai. Dalam prinsip manajemennya Fayol, elemen norma dan nilai ini bisa direpresentasikan dalam bentuk prinsip keadilan (*equity*). Prinsip keadilan menurut Fayol merupakan sesuatu yang bisa memunculkan kesetiaan dan ketaatan karyawan dengan cara mengkoordinasikan keadilan dan kebaikan para manajer di dalam memimpin para bawahan dan memacu tumbuhnya rasa tunduk kepada pemimpin.

Memakai prinsip norma dan nilai, juga berlaku untuk masing-masing pegawai atau individu Balai Rehabilitasi BNN Baddoka diperlakukan secara layak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan diberlakukan secara adil maka masing-masing individu akan menunjukkan loyalitasnya pada sistem dan komunitas sehingga prinsip integrasi benar-benar terwujud sebab jika masing-masing individu sudah tidak lagi loyal pada sistem dan malah saling mengedepankan kepentingannya sendiri maka tidak mungkin terwujud integrasi. Melalui elemen norma dan nilai (*value*) setiap

individu dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menjadi terikat dan terintegrasikan ke dalam sistem secara keseluruhan.

Elemen berikutnya dalam TC adalah *Structure & System*. Ini merupakan kemestian yang ada dalam sebuah organisasi, komunitas atau sistem sosial apapun. Setiap sistem sosial atau lembaga atau komunitas apapun jelas mempunyai struktur dan sistem di dalamnya. Termasuk dalam TC BNN Baddoka, *Structure & System* ini mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan kepada semua anggota komunitas. Dengan keteraturan dan kedisiplinan inilah masing-masing orang atau individu bisa diintegrasikan, dan bisa digerakkan secara bersama-sama untuk meraih tujuan bersama. Karenanya, elemen *Structure & System* ini juga bagian penting dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk membangun integrasi.

Bicara soal struktur di dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, selain struktur kepengurusan juga dikenal dengan struktur nilai perubahan sebagai perangkat utama terapi dan rehabilitasi. Ada empat struktur perubahan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang masing-masing mengandung integrasi nilai untuk memfasilitasi dan menuntun klien demi memperbaiki aspek kehidupan yang telah dirusak oleh adiksi (Narkoba). Adapun empat struktur terapis perubahan tersebut adalah yaitu:

a) BEHAVIOUR MANAGEMENT SHAPING (Pembentukan / Pemangkasan Tingkah Laku)

Klien mempelajari kembali teknik dan sistem perubahan perilaku dengan menggunakan *tools of the house* secara benar sehingga terbentuk kembali perilaku klien yang produktif sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat.

Reles & function sebagai klien di dalam program TC, yaitu:

1. Dalam menjalankan program primary, TC klien akan diatur untuk menjalankan aktivitas harian mereka.
2. Ada hirarki atau penempatan level dari klien itu sendiri,
3. Biasanya untuk klien yang baru masuk/menjalankan program, akan ada Buddy system (penjagaan dari senior klien).

4. Walaupun memang tidak ada senioritas di dalam program TC, tetapi hirarki akan tetap berjalan yang digunakan untuk mempelajari/menjalankan program dengan pemahaman yang maksimal.
5. Hubungan di dalam program TC itu sendiri:
6. Ada peraturan-peraturan yang memang harus dipatuhi dan sangat sakral untuk lancarnya menjalankan program.
7. Peraturan itu sendiri memang sudah dirancang dan dibentuk seperti berikut ini: Budaya TC sangat kental dengan anti-drug dan anti kekerasan, yang paling utama dari rules TC adalah: *No Drug, No Violencen* dan *No Sexual Acting Out*.

Uraian diatas merupakan gambaran singkat mengenai program di dalam TC, nilai untuk pemulihan dengan harapan memberikan pemahaman dan pembentukan perilaku yang lebih baik lagi. Dimana seperti yang diungkapkan oleh salah satu konselor adiksi Bro YS menegaskan, bahwa:

“...salah satu bentuk dari salah satu program *behaviour management shaping* (pembentukan/pemangkasan tingkah laku) adalah dengan pembentukan perilaku klien. Dimana klien diberikan ajaran dan pengertian mengenai perilaku yang baik seperti apa dan bagaimana, meskipun kadang mereka melakukan kesalahan sebisa mungkin kita (konselor atau pendamping) akan memberikan pengarahan kepada mereka salah satu pembelajaran jika mereka melakukan hal atau tindakan negatif adalah diberikan sanksi kesalahan berupa teguran atau pembelajaran atas kesalahan, kemudian kita cari tahu bagaimana perasaan mereka sebelum, saat melakukan dan sesudah melakukan tindakan tersebut, baru langkah selanjutnya cari tahu apa alasannya dan terakhir kita akan beri sanksi. Dari semua proses itu akan ada solusi pemecahan atas tingkah laku yang mereka lakukan dan dengan proses itu semua akan ada pembelajaran yang mereka dapatkan...” (YS, 09/10/2020).

Keteraturan dan kestabilan masyarakat yang terus menerus dianggap sebagai kondisi yang menyimpang. Atas dasar itu, perspektif ini

mengabaikan arti penting perubahan sosial sebagai sarana menjaga keutuhan sistem sosial. Menurut perspektif ini, untuk dapat memahami perubahan sosial, diperlukan pemahaman mengenai masyarakat dalam kondisi statis.

Perspektif fungsional struktural mempunyai beberapa asumsi dasar menurut Berghe (dalam Lauer, 1982 dalam Nanang Martono, 2016. Hal 9): masyarakat harus dianalisis sebagai keseluruhan, sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, hubungan sebab akibat bersifat jamak dan timbal balik, sistem sosial senantiasa berada dalam kondisi “keseimbangan dinamis”, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu, integrasi yang sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisasi melalui institusionalisasi, perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi dan melalui penemuan-penemuan internal dan masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.

b) EMOTIONAL DAN PSYCHOLOGICAL (Pengelolaan Aspek Emosi dan Psikologis)

Klien dituntun untuk memahami permasalahan diri sehingga mampu belajar mengurangi beban perasaannya. Klien juga difasilitasi dalam meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis. Ini bisa dilakukan melalui kelompok statik group, teguran rekan sebaya serta kegiatan dan tugas-tugas lain yang melibatkan kemampuan mengelola emosi.

Klien mengetahui permasalahan dan mengurangi beban perasaan klien, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis, ini bisa dilakukan melalui kelompok statik group, teguran rekan sebaya apabila emosional dan lain-lain kerja kelompok yang berhubungan.

Seperti yang diungkap oleh salah satu konselor adiksi Bro YS, bahwa:

“...klien memiliki beragam emosi dan bagaimana mereka dapat mengatasi emosi mereka, sebagai seorang konselor

dituntut untuk selalu profesional dan tidak memiliki batasan emosi, karena konselor merupakan orang yang harus mampu membantu dan mampu menyelesaikan masalah yang klien alami dan hadapi selama berada di masa rehabilitasi. Konselor juga dituntut untuk mampu menstabilkan emosi diri sendiri dan juga orang lain..”(YS. 09/10/2020).

Masyarakat sebagai sistem sosial dalam pandangan struktur fungsional memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi karena pada dasarnya masyarakat terutama klien mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan mengadaptasi dirinya dengan sesuatu yang baru berasal dari dalam maupun dari luar. Mekanisme yang dimiliki suatu sistem sosial cenderung menunjukkan kemampuannya dalam menjadikan dirinya tetap dalam keadaan yang seimbang. Perubahan yang terlalu cepat memang dapat merusak sistem.

c) INTELLECTUAL AND SPIRITUAL (Pengembangan Proses Berpikir dan Kerohanian)

Klien diberikan pemahaman dengan meningkatkan aspek pengetahuan dan nilai spiritual, moral, etika agar lebih mudah menjalani Recovery dan mampu menghadapi permasalahan ini bisa dilakukan melalui seminar tentang pendidikan bahaya narkoba, memberikan contoh, rekreasi dan penanaman nilai-nilai agama.

Hal inipun diterapkan di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana dilembaga ini terdapat program-program yang nantinya dapat membantu klien hidup kembali di masyarakat, maksudnya adalah saat klien sudah selesai menjalani masa rehabilitasi maka klien akan dikembalikan kepada keluarganya dan mereka akan memulai kehidupan baru lagi di masyarakat. Kembalinya mereka ke masyarakat, klien harus memiliki bekal pengetahuan dan keahlian khusus yang akan mendorong mereka menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan ini salah satu konselor Bro YS, mengungkapkan:

“....di Balai Rehabilitasi ini banyak klien yang memiliki tingkat pendidikan yang beragam (meskipun mayoritas dari mereka memiliki pendidikan yang rendah), dengan ini Balai membuat program kerja dimana program itu akan membantu klien

memiliki kesibukan selama mereka menjalani program rehabilitasi, dan program ini juga mampu membuat mereka melupakan narkoba dan zat adiktif lainnya. Salah satu program yang kita miliki adalah moving class dimana kelas ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mereka dalam hal keterampilan contoh: dalam bidang komunikasi, las, bercocok tanam dan lain sebagainya..." (YS, 09/10/2020).

Pemikiran Spencer (1820-1903) (dalam Nanang Martono, 2016) diawali sebuah pandangan bahwa masyarakat adalah sebuah organisme. Artinya ada kesamaan antara masyarakat dengan organisasi biologis, sehingga ada kesamaan melihat masyarakat dengan cara melihat organisme biologis. Pandangan ini sama dengan dasar pemikiran Comte. Masyarakat sebagai organisasi biologis menurut Spencer, dimaknai sebagai sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang, melalui proses evaluasi. Ibarat manusia, ketika mengalami pertumbuhan, ia akan mengalami penambahan volume (berat badan) serta penambahan kepadatan, penambahan bagian-bagian tertentu atau mengalami kepadatan struktur yang lebih rumit. Bagian-bagian tertentu atau mengalami kepadatan struktur yang lebih rumit. Manusia memiliki telinga, hidung, mata, mulut, hati, jantung yang terpisah namun fungsinya saling melengkapi. Hal demikian berlaku juga dalam masyarakat, didalamnya ada bagian-bagian yang terpisah namun saling melengkapi. Masyarakat memiliki lembaga pemerintah, hukum, pendidikan yang fungsinya juga saling melengkapi.

Klien dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang bantu diri dan dampak adiksi dalam kehidupan. Pengetahuan tersebut akan membangkitkan kembali proses berpikir (kognitif) sehingga akan mempengaruhi pula produktivitas perilaku. Klien dituntun untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar selain dirinya dalam dunia ini yang akan membantunya dalam mengatasi adiksi dan memelihara pemulihan seumur hidupnya. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan aspek pengetahuan dan nilai spiritualnya. Kegiatan-kegiatan dalam tema Intellectual & Spiritual ini bisa berupa seminar dampak narkoba, rekreasi, ibadah dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

d) VOCATIONAL AND SURVIVAL SKILLS (Keterampilan Kerja, Bersosialisasi dan Bertahan Hidup)

(Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:8-9)

Klien belajar untuk beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat dengan bantuan struktur kerja yang ada di dalam program dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar dapat menjadi bekal dan dapat diterapkan setelah selesai menjalankan program.

Melalui struktur perubahan tersebut, klien didorong belajar untuk beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dengan bantuan struktur kerja di dalam program. Tujuan program ini, untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal yang dapat diterapkan setelah selesai menjalani program. Struktur di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini lebih berupa rangkaian dan perpaduan nilai yang digunakan untuk melakukan perubahan pada diri pecandu Narkoba. Struktur ini juga mengandung aspek integrasi, yakni integrasi nilai-nilai ke dalam diri klien. Lalu pada akhirnya, mendorong para klien itu untuk terintegrasi atau menyatu lagi dengan norma-norma sosial, budaya dan agama yang ada dalam masyarakat.

Kemudian, jika dikaitkan dengan prinsip manajemennya Fayol, *Structure & System* yang ada pada TC BNN Baddoka ini wujud dari tiga prinsip manajemen: Disiplin (*Discipline*), Ketertiban (*Order*) dan Rangkaian Perintah (*Chain of Command*). Nilai dalam struktur kepengurusan ini lebih diproyeksikan kepada para aktor, terutama para pengurus, di lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Disiplin merupakan elemen yang sangat berhubungan dengan wewenang atau otoritas. Jika wewenang tidak bisa berjalan dengan semestinya, maka bisa dipastikan semangat disiplin akan hilang. Maka, pemegang otoritas paling tidak harus bisa menanamkan rasa disiplin pada dirinya sendiri sehingga nantinya ia mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Sikap disiplin mencakup kesungguhan hati, kerajinan, ketekunan, loyalitas, kebiasaan, tata krama, kepatuhan antara organisasi dengan warganya.

Dalam BNN Baddoka aspek kedisiplinan ini jelas dimasukkan ke dalam struktur dan sistem sekaligus pada norma dan nilai.

Nilai dan norma kedisiplinan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini salah satunya bisa dilihat pada sejumlah aturan (*rules*) kepada konselor. Sejumlah itemnya, aturan yang dikenakan kepada para konselor antara lain bahwa seorang konselor dalam BNN Baddoka harus (1) Menjaga *Pride and Quality*: dimana konselor harus mengenakan pakaian rapi dan menggunakan pakaian dinas BNN pada saat bekerja, (2) *On time*: Konselor harus datang tepat pada waktu tugas yang telah ditentukan, (3) Prinsip yang dipakai adalah 24 hours services (pelayanan 24 jam). Berhubungan dengan hal tersebut seluruh Konselor dan staf yang terkait di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka wajib kembali ke Fasilitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka apabila diperlukan, dan (4) Konselor bertanggung jawab untuk menjaga kerapian dan kebersihan meja kerja maupun *Staf office*. Ini merupakan contoh prinsip kedisiplinan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai bagian upaya untuk melakukan prinsip integrasi sebagaimana dalam teori Parsons.

Kemudian prinsip manajemen berikutnya adalah ketertiban. Nilai ketertiban dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini sesungguhnya juga masuk dalam elemen struktur dan sistem juga dalam norma dan nilai. Nilai ketertiban ini juga bagian dari usaha melakukan integrasi. Prinsip ketertiban ini bahkan sangat dibutuhkan demi terciptanya kondusifitas. Sebuah sistem bisa terintegrasi jika lingkungan disekitar sistem itu kondusif, sebuah lingkungan sekitar kondusif jika ada ketertiban. Maka jika ketertiban tidak ada, bisa dipastikan sistem yang ada tidak akan bisa mengalami integrasi bahkan sebaliknya akan semakin terpecah-pecah. Sebab, pada umumnya tidak ada orang atau kelompok yang dapat bekerja pada keadaan kacau alias tidak kondusif. Namun, ketertiban pada suatu sistem bisa terwujud apabila semua unsur-unsur dan individu di dalamnya memiliki disiplin dan ketertiban yang tinggi. Dari sinilah ketertiban juga ditekankan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melalui sejumlah norma dan aturan demi terintegrasinya sistem yang ada sehingga mendorong berjalannya sistem tersebut semakin lancar.

Berikutnya adalah Rangkaian Perintah (*Chain of Command*). Dalam dunia manajemen organisasi, rangkaian perintah ini merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas kebawah harus selalu mengambil jarak yang terdekat, karenanya muncul yang namanya hirarki atau struktur. Struktur atau hirarki ini dibutuhkan demi kesatuan arah perintah. Rantai perintah ini berjalan berdasarkan jumlah tingkatan yang ada dari otoritas tertinggi sampai tingkat yang paling rendah dalam sebuah sistem atau organisasi. Garis otoritas dalam sistem hirarki ini jaraknya tidak boleh terlalu jauh karena akan mempersulit distribusi perintah dari otoritas yang ada di atasnya. Di dalam BNN Baddoka rangkaian perintah ini jelas ada. Dan prinsip ini juga bisa masuk di dalam elemen TC struktur and sistem. Sistem dan struktur yang ada dalam BNN Baddoka inilah yang mengarahkan lembaga ini menuju satu arah dan tujuan sehingga terbangun integrasi. Hal inipun diungkapkan oleh Bro SL, dimana:

“...Ada manager, dibawah manager ada penanggung jawab konselor atau koordinator konselor, mereka ada 14 orang di bagi dalam Tim A dan Tim B, dimana sesuai masa pandemic ini ada masuk hari ini dan ada yg masuk besok. Dirumah program sendiri, dibagi menjadi 4 program dimana masing-masing satu penanggung jawab yaitu deputi. 1 rumah program ada 4 staff atau program teknisi. Pembagian kerja konselor sebagai motivator, dimana kita memberikan pelayanan terhadap klien sesuai dengan kebutuhannya. Dimana tugas konselor adiksi sendiri akan fokus ke adiksinya. Jika diperlukan penanganan kearah emosional dia akan fokus ke psikolog, misalnya mengenai keagamaan dia akan fokus ke mental....” (SL, 24/07/2020).

Menurut Laurer (1982) (dalam Nanang martono, 2016. Hal 48-49) tekanan Spencer dalam menjelaskan kaitan lembaga masyarakat organisme biologis tampak dalam uraiannya mengenai lembaga sosial yang berfungsi untuk menopang, mendistribusikan serta mengatur kerja masyarakat. Fungsi menopang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, menurut Specer fungsi ini diibaratkan sebagai fungsi untuk memberikan makanan dalam tubuh. Fungsi distribusi masyarakat dapat dijumpai dalam masyarakat yang kompleks yang dilakukan oleh lembaga ekonomi.

Pandangan Spencer mengenai perkembangan masyarakat, memasukan perhatian pada penambahan jumlah (kuantitas) dan kualitas hubungan antar bagian dalam sistem. Spencer menjelaskan hukum perkembangan organisme tersebut berlaku secara umum, setiap perkembangan akan menyangkut evolusi diri dari yang sederhana menjadi sesuatu yang kompleks (Soekanto, 1989, Sztompka, 1994).

Elemen berikutnya *Open Communication* (komunikasi terbuka). Elemen ini mengajarkan klien asertif dan terbuka dalam mengutarakan pikiran dan perasaannya. Prinsip ini sangat penting dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan bahkan dalam organisasi atau komunitas apapun. Apalagi hal ini juga terkait terapi atau rehabilitasi klien atau pasien narkoba. Sebuah aktivitas rehabilitasi bisa berjalan dengan benar, dan bisa mencapai hasil maksimal jika antara individu, terutama antara klien dengan pihak petugas medis atau konselor saling terbuka komunikasinya. Kejujuran (*fairness*) dan keterbukaan (*transparansi*) harus dijunjung tinggi sehingga bisa menguak persoalan yang sesungguhnya.

Prinsip keterbukaan komunikasi ini, selain sebagai media untuk memperlancar aktivitas rehabilitasi terhadap klien, juga untuk menumbuhkan keakraban dan kedekatan antar pihak. Di sinilah *open communication* dalam sistem BNN Baddoka ini sesungguhnya juga bagian dari pemenuhan syarat fungsional integrasi yang dicetuskan Parsons. Kecapakan dan keterbukaan dalam komunikasi antar komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini utamanya ditekankan kepada para konselor. Salah satu aturan yang harus dilaksanakan oleh konselor adalah tentang prinsip intensitas komunikasi (*always communicate*).

Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa apabila salah seorang konselor berhalangan datang, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk menghubungi supervisor-nya (Deputi atau Kordinator Konselor) dan konselor yang bersangkutan diwajibkan mencari staf lainnya yang dapat menggantikan jam kerjanya pada saat itu (Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:4)

Elemen TC Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berikutnya adalah *Relationship* (hubungan), yakni sebuah unsur dalam sistem TC yang mengajarkan kembali kodrat mantan pecandu Narkoba sebagai manusia yang merupakan anggota dari keluarganya dengan memberi pengetahuan *healthy relationship* (hubungan yang sehat). Prinsip ini bisa dikatakan sebagai syarat fungsional bagi integrasi dalam sistem sosialnya Parsons karena sebuah integrasi tidak mungkin dilakukan oleh individu dengan kelompok tanpa adanya hubungan yang sehat. Apa yang disebut dengan Hubungan yang adalah sebuah hubungan yang menghasilkan yang terbaik dalam diri seseorang dan membuat orang tersebut merasa nyaman dengan diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak berarti hubungan yang “sempurna”, meski demikian sangat penting karena untuk membuat jiwa seseorang tenang dan nyaman. Dan hal ini penting bagi usaha rehabilitasi seperti yang telah dipraktikkan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Ada sejumlah ciri khas sebuah hubungan bisa dikatakan sebagai hubungan yang sehat (*healthy relationship*). Sebuah hubungan bisa dikatakan sebagai hubungan yang sehat, sebagaimana dikatakan oleh pakar psikologi klinis asal Georgetown University, Andrea Benor (28/12/2018) jika di dalamnya ada:

- a) kepercayaan (*trust*).
- b) kesabaran (*patient*).
- c) empati (*emphaty*).
- d) kasih sayang dan perhatian (*affection and interest*).
- e) fleksibilitas (*flexibility*).
- f) apresiasi (*appreciation*).
- g) ruang perkembangan (*room for growth*).
- h) menghormati (*respect*).
- i) timbal balik (*reciprocity*).
- j) resolusi konflik yang sehat (*healthy conflict resolution*).
- k) individualitas dan batasan-batasan (*individuality and boundaries*).
- l) keterbukaan dan kejujuran (*openness and honesty*).

Kemudian elemen terakhir TC BNN Baddoka yang bisa memenuhi syarat fungsional integrasinya Parsons adalah *Terminologi* yakni adanya sejumlah jargon, slogan dan istilah-istilah yang ada dalam program bertujuan untuk menumbuhkan kekompakan dalam komunitas. Terminologi ini merupakan elemen di BNN Baddoka yang mencerminkan nilai semangat transformatif. Jargon-jargon atau semboyan-semboyan ini banyak dipampang di dinding-dinding atau ruang-ruang publik di lingkungan komunitas BNN Baddoka. Dengan jargon atau semboyan yang menumbuhkan semangat itu, kekompakan dan sinergitas bisa semakin kuat sehingga integrasi sistem di dalamnya bisa semakin kokoh.

D. Implementasi Prasyarat Fungsi Latensi

Syarat fungsional dalam konsep sistem sosialnya Parsons yang terakhir adalah Latensi. Aspek laten dalam konsep sosialnya Parsons ini secara umum terdiri dari dua tindakan: *pertama* adalah pertahanan pola dan pengurangan ketegangan, di mana sebuah sistem tindakan sosial harus, menghasilkan kesatuan komponen yang cocok atau kompatibel dengan sistemnya (masalah “mempertahankan pola”), dan *kedua*, sebuah sistem yang ada harus meminimalisir ketegangan yang muncul. Bagaimana kemudian prinsip latensi ini berjalan dalam sistem kelembagaan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berdasarkan rangkaian nilai dan norma di dalamnya?

Sistem yang berjalan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar tersebut senantiasa berusaha untuk melengkapi, memelihara dan memperbaiki dirinya baik dengan cara memberikan motivasi pada para kliennya maupun melalui pendekatan kultural yang mampu menciptakan dan menopang motivasi demi terpeliharanya sistem yang ada. Seorang pecandu dalam pemulihannya tidak dikenal istilah sembuh. Seorang pecandu tidak bisa sembuh karena penyakit ketergantungan narkoba atau dikenal dengan istilah adiksi merupakan penyakit kronis, residual, dan gampang relaps. Kronis artinya suatu penyakit yang cukup berat. Menyerang otak sehingga mempengaruhi perilaku seseorang. Residual artinya sangat membekas

dalam diri pecandu, dan gampang relaps. Seorang mantan pecandu sangat gampang kambuh kembali ketika ada masalah. Bahaya latensi kekambuhan sangat besar bagi seorang mantan pecandu ketika tidak mampu mempertahankan pola bebas dari penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi buat seorang pecandu pada dasarnya berlangsung seumur hidup. Ketika muncul suatu masalah pribadi dalam hidup mantan pecandu, bahaya latensi kecanduan dapat muncul kembali.

Upaya memelihara dan menanamkan ajaran yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terhadap diri klien maka perlu diadakan program penyembuhan yang mampu mendukung kegiatan dan ajaran yang diberikan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka kepada klien, Seperti yang katakan oleh Bro HS dalam pernyataannya beliau mengungkapkan bahwa:

“...perlu ada pendekatan kepada para klien secara intensif, dalam penerapan nilai dan norma juga di gunakan metode TC dalam penanamannya, dengan cara memberi perlakuan sama tetapi dalam tindakan pendekatan perlu dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing klien..” (HS, 20/08/2020).

Adapun ungkapan pernyataan dari Bro SL yaitu:

“...rehabilitasi itu sendiri awalnya mengakomodasi terapi modifikasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, terutama dibidang adiksi, banyak layanan atau terapi yang bisa digunakan klien-klien kalau dikembangkan dalam adiksi itu sendiri ada istilah kerangka kerjanya. Dimana ada berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan perilakunya, berdasarkan tentang religinya atau vocationalnya. Jadi, saat datang klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini setelah dilakukan assessment atau screening, kita akan melihat kebutuhannya mengarah kemana misalnya contoh klien butuh penenangan religi lebih dalam maka kita bawa kerumah program yang fokus akan religi. Seandainya ini klien butuh pada fokus perilaku maka kita bawa ke rumah rawatan yang mengarah pada behavior, jadi TC dimodifikasi untuk melakukan individual treatment plan dan kedepannya kita berencana adakan moving class merubah seseorang dari kelompok ke kelompok lain sesuai dengan kebutuhan individu..”(SL, 24/07/2020).

John Dewey dan Dorwin Cartwright (1922) mengungkapkan Untuk mengubah karakter atau hendak mengubah kondisi-kondisi si objektif maka harus yang masuk ke dalam kebiasaannya. Skema penilaian, sikap menyalahkan dan memuji, pemberian hukuman dan penghargaan, adalah bagian dari kondisi-kondisi tersebut, kita tidak dapat mengubahnya secara tak langsung dengan memodifikasi kondisi, dengan memilih dan mempertimbangkan tujuan yang melibatkan perhatian dan yang memengaruhi keinginan.

Perilaku, sikap, keyakinan dan nilai-nilai individual semua karakter dalam kelompok di mana dia berada. Seberapa agresif atau kooperatif seseorang, seberapa besar rasa percaya diri atau penghargaan dirinya, seberapa semangat dan produktif kerjanya, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia yakini sebagai baik dan benar, semuanya adalah karakteristik yang ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok. Dalam pengertian, mereka adalah properti dari kelompok dan relasi antar orang. Apakah mereka berubah atau menolak perubahan akan bergantung pada sifat dari kelompok tersebut, usaha untuk mengubahnya harus dikaitkan dengan dinamika kelompok.

Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana praktisnya lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini melakukan implemtasi terhadap empat prasyarat fungsional tersebut? Jika merujuk pada tema besar dari penelitian ini adalah fungsi rehabilitasi dalam pelembagaan nilai dan norma bagi para pecandu Narkoba, maka praktik atau tindakan yang dilakukan dalam pemenuhan syarat tersebut adalah terkait dengan institusionalisasi nilai dan norma sebagai bagian utama dalam praktik rehabilitasi.

Artinya, pelembagaan nilai dan norma sebagai bentuk rehabilitasi ini merupakan wujud dari sistem sosial yang keberadaannya juga ditopang oleh keempat prasyarat fungsional di atas. Dalam proses latensi inipun harus ada proses pemeliharaan, dimana proses pemeliharaan ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma yang sudah ditanamkan dalam diri klien semenjak mereka berada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Dalam proses rehabilitasi di BNN Baddoka ada Namanya pasca rehab dimana pada

masa ini sangat penting peran keluarga dalam menjaga nilai dan norma yang sudah klien terima di balai, artinya peran keluarga sebagai kelompok mikro (kelompok kecil) sangat besar perannya dalam membantu klien Kembali pulih dan jauh dari jangkauan narkoba guna mencegah terjadinya relaps kembali. Cara tersebut diantaranya adalah (Buku panduan Individual Treatment Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, 2017):

- 1) Mempertahankan hubungan konselor;
- 2) Mempertahankan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka;
- 3) Menjaga jarak dengan teman sesama PIC;
- 4) Adanya pengawasan orang tua; dan
- 5) Adanya pendampingan terhadap klien secara berkala dari pihak keluarga.

Langkah-langkah inilah yang bisa dilakukan pada klien yang sudah melewati masa rehabilitasi, dimana proses inilah yang di sebut proses pasca rehab, kemudian program pasca rehab akan di tindak lanjuti oleh pihak BNNP.

Dimana dalam pandangan Parsons dalam teorinya AGIL mengungkapkan adanya pendekatan-pendekatan yang dilihat dari kaca mata sosiologi, dalam pendekatan ini ada dua konsep pendekatan yaitu dilihat dari kelompok mikro dan kelompok makro.

Kelompok mikro adalah segala sesuatu yang membahas interaksi hubungan antar individu dalam lingkup pandang yang terbatas dan terpusat pada tarik menarik hubungan interaksi yang sempit, terbatas, dan khusus atau dengan kata lain meneliti permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat kecil seperti keluarga, sedangkan di dalam Balai Rehabilitasi yang dimaksud kelompok mikro adalah kelompok-kelompok kecil yang di bentuk sesuai dengan proses atau tahap pemulihannya, dimana dalam proses atau tahap ini klien dibedakan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan rumah yang ditempatinya missal ada kelompok Re-Entry unite ada juga kelompok detox, dalam kelompok-kelompok ini dibedakan sesuai dengan penanganan dan perkembangan pasien dan ada juga indicator-

indikator kenapa klien dimasukkan dalam kelompok tersebut. Sedangkan kelompok makro adalah segala sesuatu yang membahas tentang masalah atau sistem sosial secara total yang mencakup aspek masyarakat secara luas atau difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi teori tentang: evolusionisme, sistem, konflik, perubahan sosial, dan stratifikasi sosial, dalam metode di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dimana Balai Rehabilitasi adalah suatu kelompok makro karena ada beberapa unsur yang memiliki fungsi dan peran berbeda-beda tetapi tujuan sama yaitu memulihkan klien, dalam hal ini Balai rehabilitasi mempunyai peran besar dalam pemulihan pasien, dengan adanya para staf, konselor, staf medis, staf sosial dan system-sistem lainnya yang mempunyai peran besar dalam proses penyembuhan pasien dari ketergantungan terhadap narkoba.

Prinsip latensi yang berupa pertahanan pola dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini salah satunya tercermin dalam rumusan lima pilar dalam TC. Metode TC dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menyediakan lingkungan belajar sosial dan pemulihan bagi klien dengan menggunakan 5 pilar untuk membuat agar sebuah program dalam sistem Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tetap kokoh. Kelima pilar ini terus diupayakan tegak dan kuat oleh semua anggota komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka agar program pemulihan yang menjadi aktivitas utama lembaga itu tetap bertahan dan berjalan efektif.

Adapun lima pilar TC yang memenuhi syarat latensi untuk pertahanan pola dalam sistem BNN Baddoka adalah sebagai berikut:

1) FAMILY CONCEPT (Konsep Kekeluargaan).

TC adalah komunitas yang bersifat Milieu, yaitu sesuatu yang dilingkupi dengan kehidupan sosial yang rutin dengan aktivitasnya, terdapat hubungan antar manusia di dalamnya, memiliki nilai-norma yang dianut, dan memiliki struktur yang jelas. Penerapan sistem kekeluargaan yang Milieu di dalam program bertujuan untuk memperbaiki kembali nilai hidup di dalam keluarga. Menyamakan persepsi seluruh anggota komunitas agar bersama-sama menjadi bagian dari sebuah keluarga karena pada dasarnya dalam

kehidupan nyata setiap klien adalah anggota dari keluarganya di rumah masing-masing.

Penerapan sistem kekeluargaan didalam program yang bertujuan untuk memperbaiki kembali nilai hidup didalam keluarga. Menyamakan seluruh anggota komunitas agar bersama-sama menjadi bagian dari sebuah keluarga. Hal ini dijelaskan oleh salah satu konselor adiksi yang menyatakan bahwa:

“....salah satu program kegiatan yang kita lakukan adalah makan bersama-sama, sholat atau menjalankan ibadah secara berjamaah atau bersama-sama, dimana tujuannya adalah semua dirasakan sama-sama, kebersamaan dengan keluarga yang harus mereka dapatkan, dimana disini mereka diberi penanaman bahwa inilah bentuk keluarga yang seutuhnya, dengan program ini dapat mendorong klien mampu berpikir positif untuk memahami apa esensinya sebuah keluarga seutuhnya...” (YS, 09/10/2020).

Mempelajari dinamika sosial keluarga memang sangat menarik. Parsons (Nanang Martono, 2016) pernah menyatakan bahwa di dalam keluarga, banyak sekali terdapat nilai-nilai yang sangat unik, nilai yang bersifat partikular ketika seorang individu tersebut harus mempelajari nilai-nilai baru, nilai-nilai yang belum didapatkan di dalam keluarga, dia akan belajar bahwa dunia sosial ini sangat luas dan kompleks. Ketika di dalam keluarga, individu selalu hidup dalam lingkungan yang dipenuhi rasa kasih sayang namun, ketika ia masuk dalam lingkungan masyarakat, ia akan berkenalan dengan persaingan, kebencian, kejahatan.

Keluarga menjadi lembaga yang sangat penting karena dari keluargalah akan terbentuk berbagai karakter individu. Meskipun budaya yang dijalankan dalam keluarga bersifat unik, namun budaya keluarga juga dapat mencerminkan budaya masyarakat tempat keluarga tersebut berada. Selain itu, keluarga merupakan tempat pertama bagi individu untuk mengenal berbagai peran-peran sosial.

Konsep kekeluargaan ini merupakan praktik terapi para pecandu Narkoba yang berbasis pada komunitas dan keluarga. Konsep ini penting dilakukan dalam lembaga rehabilitasi Narkoba, termasuk yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka karena para klien atau pecandu itu sangat berhubungan dengan faktor–faktor lingkungan–sosial yang kompleks, termasuk terkait dengan faktor nilai, norma, tradisi, budaya yang ada di masyarakat dan keluarga. Banyak anak yang memilih untuk menghisap candu atau mengonsumsi Narkoba karena faktor keluarganya yang berantakan, atau karena lingkungan sosial tempat dia hidup telah rusak. Karenanya, jika sistem rehabilitasi dan terapi yang dijalankan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini bisa diharapkan untuk tetap bertahan dan berkembang, maka sistem keluarga atau komunitas ini tidak bisa diabaikan dalam praktek rehabilitasi dan terapi. Nilai dan fungsi dari komunitas, lingkungan dan keluarga harus tetap dijadikan sebagai model utama dalam menjalankan pola rehabilitasi oleh BNN Baddoka.

Konsep kekeluargaan ini kemudian disebut juga sebagai rehabilitasi berbasis komunitas. Terapi model ini menjadikan lingkungan atau suasana (*milieu*) dengan seluruh aspek yang menopangnya. Pola inilah yang dikenal dengan *Therapeutic Milieu*. Meski demikian, pola *Therapeutic Milieu* sebenarnya bukan sekedar lingkungan melainkan budaya penyembuhan yang kaya akan hubungan interpersonal terapeutik dan perhatian kerjasama dengan pasien; penampilan fisiknya yang senyaman mungkin dan diatur untuk memberikan keamanan dan kenyamanan optimal bagi pasien, perawat dan semua yang memasuki lingkungan.

Kata kuncinya kemudian adalah komunitas sosial sebagai sebuah bentuk “keluarga” bagi pasien. *Therapeutic Community* (TC) ini kemudian disebut pula suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Sehingga salah satu prinsip yang harus dipegang oleh tiap-tiap klien yang menjadi satu “keluarga” besar klien adalah menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga

keluarga atau komunitas yang dibentuk untuk para klien ini bisa melahirkan perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

Seperti dikatakan Winanti (2018) bahwa konsep *Therapeutic Community* ini pada dasarnya menolong diri sendiri yang bisa dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa: a). Setiap orang bisa berubah. b). Kelompok bisa mendukung untuk berubah. c). Setiap individu harus bertanggung jawab. d). Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan, dan e). Adanya partisipasi aktif.

Menurut Ferenando B. Perfas, ada lima komponen struktural utama TC, dan setiap komponen memiliki seperangkat prinsip praktik: Komponen struktural: (1) struktur perawatan, Komponen struktural: (1) struktur perawatan, (2) kondisi perawatan, (3) peran dan fungsi staf, (4) intervensi perawatan biopsikososial dan (5) hasil dan umpan balik pengobatan (Perfas, tth:2). Aspek-aspek atau komponen terapi berbasis komunitas ini pula yang dipraktikkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melalui Konsep Kekeluargaan (*Family Milieu Concept*).

2) PEER PRESSURE (Tekanan Rekan Sebaya).

Menciptakan tekanan positif antar anggota komunitas yang dapat memicu perubahan ke arah positif dengan menggunakan teknik yang ada di dalam "Therapeutic Community".

Tekanan Rekan Sebaya (*Peer Pressure*). Sebagai upaya untuk mempertahankan pola rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga diimplementasikan tekanan teman sebaya. Hal ini untuk memberikan *positive pressure* antar klien yang yang dapat memicu perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan teknik yang ada di dalam "Therapeutic Community". Prinsip pilar ini adalah mengawasi antar sesama anggota agar tidak kembali terjerumus ke dalam perilaku negatif.

Pola untuk saling mengawasi ini juga didukung dengan sejumlah aturan dan sistem nilai yang diterapkan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Salah satu sistem nilai dan norma yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan *Peer Pressure* ini adalah diterapkannya Cardinal Rules di dalam komunitas Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Seperti yang dijelaskan dalam

Manual Program Badan Narkotika Nasional bahwa *Cardinal Rules* adalah peraturan tertinggi yang paling prinsipil dalam rumah program. Di dalam sistem norma ini, ditegaskan bahwa apabila klien melanggar *Cardinal Rules*, maka ia akan mendapat pembelajaran melalui sesi tertinggi yaitu *General Meeting*. Supaya masing-masing klien tidak melanggar sistem nilai dan norma ini, maka mereka harus saling mengawasi antar mereka sendiri; mereka harus saling menekan untuk tidak melanggar.

Cardinal Rules digunakan demi mencegah pelanggaran terhadap hal-hal paling mendasar yang merupakan sebuah kejahatan yang bisa merusak tatanan nilai pribadi, komunitas bahkan masyarakat luas. Adapun *Cardinal rules*, sebagaimana yang ada di dalam BNN Baddoka terdiri dari berbagai larangan yang meliputi:

- a) NO DRUGS: larangan mengonsumsi narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya.
- b) NO SEX: larangan melakukan hubungan seksual, sesama/lawan jenis)
- c) NO VIOLENCE: larangan melakukan tindakan kekerasan.
- d) NO VANDALISM: larangan melakukan tindakan pengrusakan.
- e) NO STEALING: larangan melakukan tindakan pencurian (*Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:11*).

Poin-poin norma dan nilai dalam *Cardinal Rules* tersebut, bisa ditambah atau dikurangi atau disesuaikan jenisnya dengan kebutuhan dan *culture* yang berlaku dalam rumah program. Misalnya jika memang dalam komunitas dan rumah program perlu ditegakkan larangan merokok, maka poin di atas bisa ditambah dengan aturan larangan merokok bagi seluruh anggota komunitas. Hal yang penting dari *Cardinal Rules* ini adalah bagaimana masing-masing klien bisa memperbaiki perilakunya melalui sejumlah norma dan sistem nilai yang telah diterapkan. Pola seperti ini juga bagian dari fungsi latensi seperti dalam sistem sosialnya Parsons karena hal itu merupakan bagian dari usaha untuk mempertahankan pola rehabilitasi dan terapi yang telah berlangsung lama.

- 3) THERAPEUTIC SESSION (Sesi Terapi).

Pembinaan emosional/psikologis dan kognitif yang memberikan nilai terapi dalam bentuk berbagai kegiatan untuk meningkatkan harga diri dan perkembangan pribadi guna menunjang proses pemulihan (*recovery*).

Sesi Terapi (*Therapeutic Session*). Ini juga bagian dari fungsi latensi sebagai bentuk mempertahankan pola dalam sistem sosial dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai salah satu pusat rehabilitasi para pengguna Narkoba. Program terapi ini dipraktekkan melalui pembinaan emosional (psikologis) dan kognitif dalam rangka memberikan nilai terapi dalam bentuk berbagai aktivitas untuk meningkatkan kepribadian guna menunjang proses pemulihan (*recovery*).

Sesi terapi sendiri merupakan bagian dari praktek rehabilitasi yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Proses rehabilitasi di BNN Baddoka ini sekarang mengalami perkembangan. Hal ini misalnya telah dilakukan pemisahan antara pola rehabilitasi dan terapi para pecandu Narkoba usia anak-anak dengan orang dewasa. Sebagaimana dilaporkan oleh Wiwik Windilarsih bahwa sejak Maret 2018, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka telah membuka program khusus untuk anak dan remaja yang usianya sekitar 12-16 tahun dengan kategori tingkat penggunaan ringan - sedang dan lama rehabilitasi selama 2 bulan.

Dibukanya pelayanan rehabilitasi anak dan remaja ini, lanjut Windiarsih, diharapkan dapat mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara metodis, program rehabilitasi dan terapi anak dan remaja ini berbeda dengan yang diterapkan pada orang dewasa, sebab anak dan remaja ini perlu penanganan khusus terutama dalam hal memperhatikan hak-hak dasar anak seperti non diskriminasi, memenuhi kepentingan terbaik untuk anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak serta partisipasi dari anak berdasarkan dirinya sendiri dan dorongan apalagi paksaan dari orang lain.

Masih menurut Windiarsih, meskipun di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga menggunakan konsep *Therapeutic Community* (TC), namun pola yang dipraktikkan tetap berbeda dengan pola *Therapeutic Community* (TC) pada rehabilitasi dewasa. Hal ini karena membutuhakn pola-pola

dimodifikasi dengan pendekatan keluarga, di mana keterlibatan keluarga di sini merupakan hal vital dalam program pemulihan. Pola pendekatan keluarga yang dilakukan pada rehabilitasi anak dan remaja yang dilakukan di BNN Baddoka, kata Windiarsih, menggunakan cara *Family Dialog* dan *Family Retreat*. Meski demikian, program terapi bagi anak-anak dan remaja ini juga ditekankan pada pendidikan informal sehingga anak dan remaja yang menjadi korban penyalahan Narkoba tersebut tetap mendapatkan beberapa pendidikan pengetahuan dasar sesuai kebutuhan, seperti pendidikan matematika, bahasa Inggris dan pendidikan moral. Program terapi lainnya yang diterapkan sebagai bentuk pelayanan rehabilitasi anak dan remaja di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, kata Windiarsih, adalah pendidikan keagamaan, pendidikan mengenai bahaya narkoba dan zat lainnya, pendidikan pola hidup sehat, pendidikan seks, HIV dan penyakit menular, pendidikan karakter, pencegahan kekambuhan serta psikoterapi dan psikoedukasi (Windiarsih,10/8/2018).

Jadi, sebagai pemenuhan apa yang disebut Parsons dengan fungsi pertahanan pola sistem sosial ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga mengembangkan sistem terapi bagi para klien. Dengan pengembangan pola terapi ini, maka sistem sosial yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, utamanya yang berbasis pada norma dan nilai bisa terus bertahan dan dikembangkan. Pengembangan pola terapi ini pada dasarnya juga meniscayakan transformasi sistem nilai dan norma yang digunakan dalam lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, sebab sistem nilai dan norma yang diterapkan pada anak dan remaja misalnya tentu berbeda dengan yang diterapkan pada orang dewasa.

4) SPIRITUAL SESSION (Sesi Spiritual).

Proses meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman spiritual serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai hubungan diri klien dengan Tuhan dan juga lingkungannya.

Salah satu unsur universal dalam kehidupan umat manusia adalah agama (atau disebut juga dengan sistem religi). Agama merupakan bagian dari sistem religi. Comte misalnya, telah merumuskan sebuah teori bahwa

tahap awal perkembangan manusia adalah tahap teologis. Pada tahap ini manusia akan merasakan keberadaan sesuatu (benda) yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan dirinya.

Disisi lain, agama juga sering dituding memiliki disfungsi bagi terwujudnya integrasi sosial. Agama dipandang sebagai sumber berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan keyakinan atau perbedaan agama sering kali memicu konflik ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, konsepsi mengenai agama sebenarnya sudah dikenal sejak manusia hidup di bumi, hanya saja konsep agama pada awalnya masih terbatas, hanya mencakup hubungan manusia dengan kekuatan supranatural. Agama belum menjadi pedoman dalam perilaku manusia sehari-hari, agama seolah terpisah dengan perilaku perkembangan pola pikir manusia, sehingga agama juga memainkan peran yang sangat besar dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Untuk itu agama juga diposisikan sebagai agen perubahan sosial.

Selain itu, dalam *Cardinal Rules* yang ada di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga diterapkan *Sesi Spiritual*. Ini merupakan pola mempertahankan sistem sosial di BNN Baddoka yang berbasis pada nilai dan norma, terutama nilai dan norma agama. Proses spiritual di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini dilakukan demi meningkatkan nilai-nilai dan pemahaman spiritual serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan hubungan diri klien dengan Tuhan dan juga lingkungannya.

Dilihat dari sistem sosialnya Parsons, penerapan nilai-nilai spiritual pada klien ini juga bagian dari fungsi latensi, mengingat pola yang diterapkan dalam sistem rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka bukan hanya mengakomodir nilai-nilai medis, melainkan juga nilai-nilai sosial, budaya dan agama. Artinya, sistem sosial rehabilitasi di BNN Baddoka, keberadaannya juga ditopang oleh nilai-nilai religius. Hal ini karena nilai-nilai keagamaan juga menjadi sistem yang efektif bagi proses penyembuhan klien. Dari sinilah, sesi spiritual juga bagian dari upaya Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mempertahankan pola dan sistem sosialnya yang didalamnya juga dibangun oleh nilai-nilai keagamaan.

5) ROLE MODELLING (Ketauladanan).

Proses pembelajaran di mana anggota komunitas saling belajar dan mengikuti ketauladanan didalam komunitasnya (contoh positif). Belajar untuk saling memiliki dan menjadi panutan satu sama lain. Semua anggota komunitas adalah contoh bagi anggota yang lainnya sehingga harus menunjukkan sikap yang positif (Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:10-11).

Sistem sosial BNN Baddoka, seperti dalam *Cardinal Rules* juga dipertahankan melalui Keteladanan (*Role Modelling*). Sebagai usaha untuk memnuhi syarat fungsional latensi dalam sistem sosialnya Parsons, BNN Baddoka menjadikan prinsipo keteladanan sebagai dasar menjaga sistem itu agar tetap sustainabel. Prinsip keteladanan ini, merupakan proses pembelajaran di mana anggota komunitas atau kliens bisa saling belajar dan mengikuti keteladanan di dalam komunitasnya. Masing-masing klien dituntut untuk saling belajar dan saling menjadi panutan; klien satu menjadi contoh atau teladan lainnya. Karenanya, semua anggota klien harus menampilkan sikap positif karena masing-masing mereka menjadi contoh bagi sesamanya. Program keteladanan dengan demikian, paling tidak di BNN Baddoka, selain sebagai bagian dari cara melakukan rehabilitasi juga menjadi pola pertahanan sistem sosial yang ada di dalamnya.

Selanjutnya, seperti sudah disebutkan bahwa syarat pemenuhan fungsi latensi Parsons ini, selain diwujudkan dalam pembentukan pola juga diwujudkan dalam bentuk meminimalisir ketegangan yang muncul. Supaya sebuah lembaga atau sistem sosial tetap bertahan dan berkembang, maka sebisa mungkin ketegangan dan konflik yang ada di dalamnya harus diminimalisir. Tentu saja sebuah sistem sosial tidak mungkin seratus persen bersih dari konflik. Termasuk di dalam komunitas BNN Baddoka, tentunya ada banyak konflik dan ketegangan yang terjadi. Akan tetapi sebuah sistem sosial yang baik tentulah harus mampu mengelola dan meminimalisir ketegangan dan konflik yang muncul sehingga ketegangan dan konflik yang terjadi itu tidak semakin membesar dan berpotensi merusak sistem sosial yang ada.

Sebagai upaya memenuhi fungsi latensi di ranah minimalisasi konflik dan ketegangan ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga mendasarkan pada sejumlah nilai dan norma terhadap seluruh anggota komunitas, termasuk kepada klien. Tentu saja agar tidak terjadi gejolak atau konflik belakangan, sistem nilai dan norma ini dibentuk melalui kesepakatan, atau siapa saja yang masuk menjadi bagian dari komunitas BNN Baddoka harus mensepakati dengan sistem nilai dan norma yang berlaku.

Soal penerapan nilai dan norma di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai upaya untuk mengurangi dan mungkin mencegah ketegangan dan konflik yang terjadi, di antaranya, bisa dilihat pada sistem norma yang diterapkan terhadap para konselor dan klien. Sistem nilai dan norma yang diterapkan oleh para konselor pada prinsip non-diskriminasi. Dengan prinsip ini ditegaskan bahwa para konselor tidak dilarang untuk men-diskriminasikan klien, berdasarkan ras, agama, kecacatan, kebangsaan, jenis kelamin dan golongan ekonomi. Konselor harus memperlakukan seluruh klien yang ada di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka secara setara atau sama (Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:3).

Menurut sistem sosial apapun, diskriminasi merupakan salah satu sumber bagi lahirnya ketegangan dan konflik antar individu maupun antar kelompok. Diskriminasi merupakan cermin dari ketidakadilan, di mana telah terjadi pengkotak-kotakan antar individu atau kelompok berdasarkan status sosial atau latar belakang sosial seseorang seperti ras, suku, agama dan sejenisnya. Dalam diskriminasi ini biasanya terjadi pengelompokan atau pembedaan antara kelompok yang diutamakan dan yang tidak diutamakan. Individu atau pihak yang diutamakan dalam sistem yang diskriminatif ini biasanya akan mendapat *privillage* atau hak-hak istimewa, sementara kelompok atau individu yang tidak diutamakan, akan diabaikan atau bahkan diterlantarkan hak-haknya. Praktek yang tidak adil ini karenanya seringkali memicu kecemburuan sosial sehingga melahirkan ketegangan dan konflik. Karenanya, sebagai upaya untuk memenuhi syarat fungsi latensi dalam hal meminimalisir konflik dan ketegangan dalam sistem sosial ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga menerapkan prinsip non-diskriminasi

terhadap para klien. Para konselor yang berperan penting dalam penanganan para klien dituntut untuk berlaku fair, adil dan legaliter terhadap seluruh kliennya. Dengan bersikap non-diskriminatif dan non-sekatrian ini, maka semua klien merasa diperlakukan sama (egaliter) dan hak-hak mereka terpenuhi tanpa ada pengecualian. Singkatnya, pelayanan BNN Baddoka terhadap para klien berjalan secara adil.

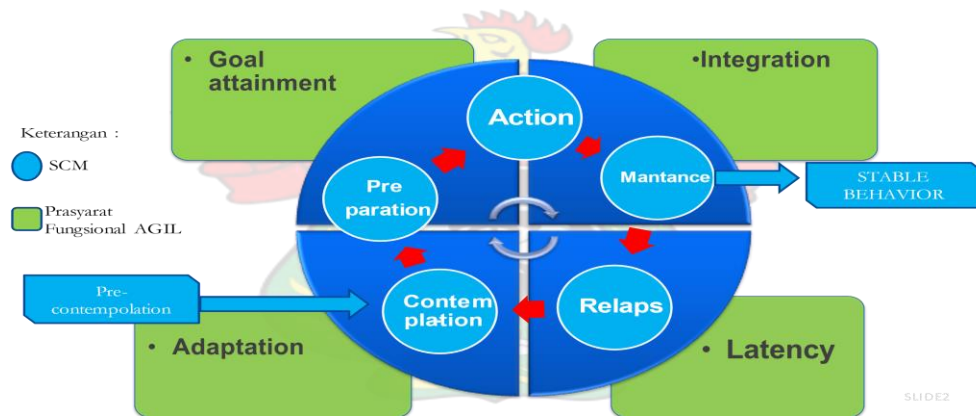
Munculnya konflik dan ketegangan bisa dicegah dan diminalisir sehingga sistem sosial di dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka bisa tetap berjalan tanpa terganggu dengan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Tentu saja prinsip non-diskriminasi ini merupakan salah satu cara saja untuk mencegah dan meminimalisir ketegangan dalam sistem sosial atau komunitas di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Prinsip-prinsip nilai dan norma lainnya, seperti profesionalitas, kejujuran dan kemanusiaan juga diakomodir sebagai bagian integral dari sistem sosial Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Selain kepada para konselor, sistem nilai dan norma demi meminimalisir konflik dan ketegangan juga diterapkan kepada para klien. Di antara contoh nilai dan norma yang diterapkan kepada klien ini adalah diterapkannya *Major Rules*. *Major Rules* adalah peraturan utama yang mengatur hal-hal penting dalam rumah program. Jadi dalam sistem norma dan nilai ini, apabila dijumpai ada klien melanggar *Major Rules*, maka ia akan mendapat pembelajaran melalui sesi Family Hair Cut (FHC). *Major Rules* ini dibagi dua: *pertama* adalah *House Rules*: peraturan yang muncul melalui kesepakatan komunitas dalam suatu rumah program agar segala kegiatan dalam rumah program tersebut berjalan efektif dan kondusif. Klien yang melanggar *house rules* akan mendapatkan pembelajaran melalui tahapan sesi yang berlaku dalam rumah program. Apabila *house rules* ini masih juga sering dilanggar, maka item *house rules* yang dimaksud bisa dinaikkan statusnya, dan kedua adalah *awareness*: peringatan yang sering diberikan secara verbal dalam sesi *morning meeting* atau *morning briefing* sehingga untuk lebih efektifnya diberikan dalam bentuk tertulis karena sering berulang. Apabila sudah diberikan nilai *awareness* secara tertulis namun masih saja ada klien yang melanggarnya, maka item peringatan yang dimaksud bisa

dinaikkan statusnya (*Manual Book Program Badan Narkotika Nasional, 2019:11-12*).

Gambar 5.1

Perpaduan Implentasi Funsional AGIL dengan Stage of Change Model Untuk mengetahui tingkat perubahan/penerimaan diri Klien



BAB 6

JUSTIFIKASI TEORI ANTHONY GIDDENS DALAM PROSES REHABILITASI

A. Teori Stukturasi

Berbicara tentang fungsi dan sistem sosial tidak bisa dilepaskan dari mazhab strukturalisme. Sedangkan teori strukturasi dari Anthony Giddens yang lebih menekankan pada upaya untuk menganalisa struktur masyarakat dengan cukup mendalam, terutama menyangkut karakter aktif dan reflektif dari manusia, dianggap paling cocok untuk penelitian ini. Perilaku manusia bukan saja hasil dari kekuatan eksternal yang mengontrol tetapi juga lahir dari pemahaman para pelaku tindakan (Giddens, 2010: xi).

Paling sedikit, fokus Teori Strukturasi Giddens pada tiga topik utama; tindakan manusia (*human action*), manusia (*the acting self*), dan interaksi yang dikonseptualisasikan dan dihubungkan pada institusi. Sederhananya lagi, strukturasi menjadikan tema agensi dan institusi sosial sebagai topik utamanya (Giddens, 2010: xiii). Giddens, dalam memahami struktur dibanding dengan para fungsionalis lain, tidak lantas menghilangkan unsur utama teori strukturalisme pada umumnya. Giddens tetap menekankan agensi dan struktur sebagai unsur utama teorinya. Namun, dapat dikatakan bahwa strukturasi Giddens berdasar pada premis bahwa dualisme (subjek dan objek) disusun sebagai dualitas struktur. Hal ini dimaksudkan bahwa agen sosial dan struktur sosial sama-sama bekerja dan bersenyawa (Giddens, 2010: 22, 25).

Agen sebagai subjek di dalam 'kurungan' sedang struktur jauh lebih dinamis dan aktif. Agen adalah manusia yang selalu berkarya dan berkreasi. Tidak heran bila Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu tentang motivasi tak sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif (Giddens, 2010: 64). Sebab, terbentuknya kehidupan sehari-hari berakar dari kesadaran maupun ketidaksadaran manusia dalam bertindak. Setiap manusia memiliki alasan dan argumentasi di balik setiap tindakan mereka. Inilah yang hendak dicari oleh Giddens, dan karenanya pendekatan psikologi menjadi dibutuhkan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Giddens bahwa ada agen-agen yang berfungsi sebagai salah satu struktur, di Balai Rehabilitasi ada bagian-bagian agen yang berfungsi untuk membantu klien dalam proses penyembuhan, salah satunya yaitu dengan pendekatan psikologi, seperti yang diungkapkan salah satu konselor yaitu SL, yang mengungkapkan bahwa:

“Pembagian kerja konselor sebagai motivator, dimana kita memberikan pelayanan terhadap klien sesuai dengan kebutuhannya. Dimana tugas konselor adiksi sendiri akan fokus ke adiksinya. Jika diperlukan penanganan kearah emosional dia akan fokus ke psikolog, misalnya mengenai keagamaan dia akan fokus kemental...”(SL, 24/07/2020)

Hal inipun juga didukung dengan ungkapan oleh salah satu klien yang berinisial HL, yang mengungkapkan, bahwa:

“Pada saat diluar saya melakukan kesalahan tidak ditegur tetapi saat berada di Balai saya banyak belajar misalnya: disini ada kesalahan ditegur dan dijelaskan kenapa bisa salah dan saya harus bagaimana untuk mengatasi biar tidak melakukan tindakan seperti diberikan arahan yang jelas dan penyampaiannyapun bisa saya terima dengan senang hati. Dahulu tidak berpikir tentang hal kedepannya bagaimana dan tidak bisa menahan diri dari emosi. Dahulu jika tersinggung akan perlakukan atau perkataan orang lain maka saya langsung bertindak sedangkan sekarang sudah mulai banyak berubah” (HL, 08/01/2021).

Dari ungkapan diatas bisa peneliti simpulkan, bahwa dalam proses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini tidak lepas dari struktur yang membentuk dan mengatur mereka sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang utuh demi mencapai cita-cita bersama.

Konsep strukturasi dalam teori sosiologi Anthony Giddens cukup populer dalam kajian sosiologi kontemporer. Namun sebagai suatu teori, terkesan agak sulit dipahami dan seolah-olah abstrak. Tetapi, ketika dipahami dan dielaborasi secara lebih luas konsep strukturasi, sebenarnya cukup menarik dan dapat dijadikan alat analisis yang tajam terutama mengenai relasi antara agen (aktor) dan struktur (sistem) dalam kehidupan masyarakat sebagai fakta sosial yang objektif. Inti teori strukturasi terletak pada tiga konsep utama yaitu tentang “struktur”, “sistem”, dan “dualitas struktur” (Giddens, 2010: 25), lebih khusus lagi dalam hubungannya antara agen (pelaku, aktor) dan struktur. Menurut Giddens, seperti dikutip Ritzer dan Goodman (2008: 568), bahwa “Setiap penelitian ilmu sosial atau sejarah pasti melibatkan pengaitan antara tindakan (seringkali digunakan secara sinonim dengan *agensis*) dengan struktur. Giddens dengan teori strukturasinya menekankan kajian pada “praktik sosial yang tengah berlangsung” sebagaimana dinyatakannya, bahwa “ranah dasar studi ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman aktor individu, ataupun eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu”.

Strukturasi memandang pentingnya praktik sosial baik dalam aksi maupun struktur kehidupan masyarakat. Strukturasi mengacu pada “suatu cara dimana struktur sosial (*social structure*) diproduksi, direproduksi, dan diubah di dalam dan melalui praktik-praktik sosial”. Pengertian strukturasi dikaitkan dengan konsep dualitas struktur, dimana struktur-struktur diproduksi dan direproduksi baik oleh tindakan-tindakan manusia maupun melalui medium tindakan sosial. Teori strukturasi Giddens mencakup tentang kemampuan intelektual aktor-aktor, dimensi spasial dan temporal tindakan, keterbukaan dan kemungkinan tindakan dalam kehidupan sehari-

hari, dan kekeliruan pemisahan antara agen dan struktur (*agency and structure*) dalam sosiologi.

Menurut teori strukturasi, domain dasar ilmu-ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi dalam ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu (Giddens, 2010).

B. Pandangan Tentang Struktur

Pandangan Giddens tentang struktur berbeda dengan pandangan strukturalisme atau pos-strukturalisme, meskipun hingga batas tertentu konsep Giddens mengenai struktur tidak mudah untuk dipahami dan mengundang kritik. Menurut pandangan Giddens struktur itu sebagai “rules and resources” yakni tata aturan dan sumber daya (Jari dan Julia, 1991), yang selalu diproduksi, serta memiliki hubungan dualitas dengan agensi, serta melahirkan berbagai praktik sosial sebagaimana tindakan sosial. Jika konsep tersebut kita bawa pada praktik-praktik rehabilitasi yang berlangsung pada struktur lembaga BNN, maka pembinaan yang dilakukan terhadap klien merupakan upaya produksi dan reproduksi sikap, perilaku, dan cara berpikir normatif melalui pelebagaan nilai-nilai dan norma-norma positif yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Pelebagaan nilai-nilai dan norma yang positif mampu merubah sikap dan perilaku klien menjadi pribadi yang bertolak belakang dengan perilaku mereka sebelum klien berada di Balai, sebab dengan penanaman nilai dan norma klien kembali mampu berfikir lebih terbuka dan sadar akan apa yang mereka lakukan, hal ini diungkapkan oleh salah satu klien yang berinisial AW, yang mengungkapkan bahwa:

“Pelajaran yang paling besar yaitu menjadi roll modelling dengan menunjukkan perubahan diri terutama nilai-nilai dan norma yang diutamakan untuk dilihat oleh masyarakat umum terutama diri sendiri, sebagai mantan pecandu narkoba. Karena jika tidak diterapkan nilai dan norma dalam diri sendiri bagaimana orang lain akan mempercayai apa yang saya katakan jika saya tidak membuktikan perubahan pada diri saya sendiri” (AW, 08/01/2021).

Selain AW, ada juga klien yang berinisial HL, mengungkapkan bahwa:

“Pada saat diluar saya melakukan kesalahan tidak ada yang bisa ditegur dan menjelaskan kesalahan saya tetapi saat berada di Balai saya banyak belajar misalnya: disini ada kesalahan di tegur dan dijelaskan kenapa bisa salah dan saya harus bagaimana untuk mengatasi biar tidak melakukannya lagi. Tindakan seperti itu diberikan arahan yang jelas dan penyampaiannyapun bisa saya terima dengan senang hati. Dahulu tidak berpikir tentang hal kedepannya bagaimana dan tidak bisa menahan diri dari emosi, dahulu jika tersinggung akan perlakuan atau perkataan orang lain maka saya langsung bertindak sedangkan sekarang sudah mulai banyak berubah” (HL, 08/01/2021).

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses-proses rehabilitasi yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sangat erat kaitannya dengan nilai dan norma yang dimana pada saat dahulu klien menganggap norma dan nilai adalah sesuatu yang tidak penting sehingga bagi mereka mudah untuk melanggar nilai dan norma itu tetapi saat mereka berada di Balai klien belajar dan memahami apa pentingnya nilai dan norma untuk diri mereka sendiri, sehingga membuat mereka sadar bahwa nilai dan norma sangat penting dan sangat diperlukan oleh manusia terutama bagi manusia yang hidup bermasyarakat. Pelembagaan nilai dan norma di Balai tidak lepas dari peran struktur yang dibentuk oleh suatu lembaga guna melancarkan proses rehabilitasi.

Menurut Teori Strukturalisme, struktur dipandang sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial serupa,

sebagai kerangka atau morfologi sebuah organisme atau tiang penyangga sebuah bangunan, yang berada di luar tindakan manusia. Kritik Giddens kepada strukturalisme ialah, bahwa pandangan strukturalisme terutama strukturalisme-fungsional cenderung lebih tertuju pada “fungsi” daripada “struktur” dan meletakkan struktur sebagai sesuatu yang berada di luar (Giddens, 1993).

Bagi Giddens struktur merujuk pada aturan-aturan dan sarana-sarana atau sumber daya yang memiliki perlengkapan-perlengkapan struktural yang memungkinkan pengikatan ruang dan waktu yang mereproduksi praktik-praktik sosial dalam sistem-sistem sosial kehidupan masyarakat. Giddens (2010) memformulasikan konsep struktur, sistem, dan strukturasi sebagai berikut:

Struktur	Sistem	Strukturasi
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial.	Relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler.	Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri.

Adanya kelengkapan-kelengkapan struktural itu, maka suatu struktur memungkinkan munculnya keberadaan praktik-praktik sosial bersifat sistemik. Karena itu, Giddens memaknai struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin, berada di luar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan, dan ditandai dengan ketidakhadiran subjek. Sedangkan sistem sosial secara rutin melibatkan struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia dan direproduksi sepanjang ruang dan waktu.

Struktur menurut Giddens, ialah “hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumber daya)hal-hal yang memungkinkan adanya praktik sosial yang dapat dipahami kemiripannya diruang dan waktu serta yang memberi mereka bentuk sistemis” (Ritzer dan Goodman, 2008). Menurut Giddens

bahwa “struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia”. Dalam pandangan Giddens, berdasarkan konsep ‘dualitas struktur’ dalam hubungan antara agen dan struktur (*agency and structure*), bahwa ‘struktur’ merupakan medium sekaligus hasil dari tindakan yang ditata secara berulang oleh struktur. Ditekankan pula tentang ‘keterinformasian’ aktor yang tergantung pada pengetahuan dan strategi yang ada untuk meraih tujuan (Abercrombie, Hill dan Turner, 2010).

Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu antara tindakan dan peristiwa. Sedangkan struktur adalah “aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial” (Priyono, 2002: 19). Sedangkan sistem sosial, “memproduksi praktik sosial, atau mereproduksi hubungan antara aktor dengan kolektivitas yang diatur sebagai praktik sosial yang terorganisasi” (Ritzer dan Goodman, 2008). Melalui agen dan struktur yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, mengharuskan tindakan dari petugas dan khususnya klien agar selalu tertib dalam ruang dan waktu yang diawasi secara terus-menerus dapat menghasilkan pribadi yang baik dikemudian hari.

Berbeda dengan pandangan strukturalisme yang memandang struktur berada di luar (eksternal) yang menentang dan mengekang pelaku, teori strukturasi Giddens memandang objektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan agen atau pelaku. Struktur bukanlah benda semata melainkan yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial (*social practices*). Praktik sosial itu bersifat berulang dan berpola dalam lintas ruang dan waktu. Praktik sosial itu dapat berupa kebiasaan-kebiasaan. Praktik sosial seperti itu dapat berlangsung kapan dan dimana saja. Dalam praktik sosial yang berpola dan berulang itulah terjadi dualitas antara pelaku (tindakan) dan struktur. Dualitas relasi tersebut terletak dalam fakta bahwa struktur mirip dengan pedoman, yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial berlangsung (Priyono, 2010).

Dalam teori strukturasi, Giddens melihat tiga gugus struktur. Pertama, struktur penandaan atau struktur *signifikasi* (*signification structure*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Struktur tersebut tampak nyata dalam bentuk perhatian petugas rehabilitasi dalam bentuk memberikan pelayanan dan kebutuhannya, mampu memberikan perubahan perilaku positif pada klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Kedua, struktur *penguasaan* atau *dominasi* (*domination structure*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (*economy*). Penguasaan petugas rehabilitasi terhadap fasilitas dan pencapaian tugas pokok dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk mengarahkan tujuan pembinaan kepada klien hingga waktu yang telah ditentukan. Ketiga, struktur *pembenaran* (*legitimation structure*) yang menyangkut skema peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Pada struktur ini, klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka menerima segala bentuk keputusan dari petugas rehabilitasi dan melegitimasi jika fungsi *signifikasi* dan *dominasi* berjalan dengan baik.

Giddens sangat konsisten melihat struktur dalam kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak lepas dari tindakan manusia yang berada di dalamnya, begitu pula sebaliknya. Mengenai hubungan antara struktur dan tindakan Giddens selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

“Lingkungan sosial tempat kita hidup tidak hanya terdiri dari berbagai macam kejadian atau tindakan yang acak yang terstruktur. Ada peraturan yang mendasari dalam bagaimana orang berperilaku dan dalam hubungan di mana mereka berdiri satu sama lain. Pada tingkat tertentu, akan bermanfaat untuk menggambarkan karakteristik struktural masyarakat yang menyerupai struktur bangunan. Sebuah bangunan memiliki dinding, lantai dan atap, yang bersama-sama memberinya bentuk tertentu. Tetapi metafora bisa sangat menyesatkan jika diterapkan terlalu ketat. Sistem sosial terdiri dari tindakan dan hubungan manusia: apa yang memberi mereka pola ini adalah pengulangan mereka melintasi periode waktu dan jarak ruang. Dengan demikian ide-ide reproduksi dan struktur sosial sangat terkait erat satu sama lain dalam analisis sosiologis. Kita harus memahami masyarakat manusia

seperti bangunan yang setiap saat direkonstruksi oleh batu bata yang menyusunnya. Tindakan kita semua dipengaruhi oleh karakteristik struktural masyarakat di mana kita dibesarkan dan hidup; pada saat yang sama, kami menciptakan kembali (dan juga sedikit banyak mengubah) karakteristik struktural dalam tindakan kami” (Giddens, 1993: 18).

Giddens menyatakan bahwa lingkungan sosial tempat manusia berada, tidak hanya terdiri dari aneka peristiwa atau tindakan yang kebetulan, namun merupakan sesuatu yang terstruktur. Ada keteraturan yang mendasari dalam cara orang berperilaku dan dalam hubungan dimana mereka berdiri satu sama lain. Pada dasarnya, sistem sosial terdiri dari tindakan manusia dan berbagai hubungan tentang apa yang memberi pola dan bagaimana pengulangnya diseluruh periode waktu dan jarak ruang. Dengan demikian ide-ide reproduksi dan struktur sosial itu sangat erat terkait satu sama lain dalam analisis sosiologis.

Berdasarkan Teori Strukturasi, Giddens mengaitkan struktur dan tindakan sosial itu dalam relasi agensi, yang melahirkan praktik-praktek sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara tersusun atau terstruktur yang berpola dan bukan sebagai suatu kebetulan. Fokus yang penting dari teori strukturasi adalah hubungan antara agensi dengan struktur (*agency and structure*), yakni untuk menjelaskan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dengan struktur. Bahwa antara agensi dan struktur tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain, keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama. Semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi dan struktur terjalin erat dalam aktivitas atau praktik yang terus menerus dijalankan manusia.

Menurut Giddens, aktivitas “tidak dilakukan oleh aktor sosial, namun secara berkelanjutan diciptakan ulang melalui sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, agen menghasilkan sejumlah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas ini” (Ritzer dan Goodman, 2008).

Agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas peristiwa yang di dalamnya individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan peristiwa itu tidak akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi. Agen, menurut Giddens “memiliki kemampuan menciptakan perbedaan sosial di dunia sosial. Lebih kuat lagi, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan; jadi, aktor tidak lagi menjadi agen jika ia kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Giddens jelas mengakui adanya sejumlah hambatan terhadap aktor, namun tidak berarti bahwa aktor tidak memiliki pilihan dan tidak menciptakan perbedaan.

Bagi Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektivitas karena tindakan melibatkan kekuasaan, atau kemampuan mengubah situasi. Jadi teori strukturasi Giddens dalam Ritzer dan Goodman (2008: 571) menempatkan kekuasaan pada aktor dan tindakan yang bertolak belakang dengan teori-teori yang cenderung mengabaikan orientasi tersebut dan justru mementingkan niat aktor (fenomenologi) atau struktur eksternal (fungsionalisme struktural)”.

Menurut teori strukturasi Giddens, hubungan antara agen dan struktur bersifat dualitas, bukan hubungan dualisme. Dalam pandangan Giddens, merupakan sesuatu yang sudah jelas jika dikatakan ada perbedaan antara pelaku (agen, aktor) dan struktur, sebagaimana dikatakan ada keterkaitan antara struktur dan pelaku atau sebaliknya. Persoalannya adalah, apakah perbedaan dan hubungan antara pelaku dan struktur itu bersifat dualisme (tegangan atau pertentangan) atau dualitas (timbang-balik). Giddens melihatnya sebagai dualitas (*duality*) dan bukan dualisme sebagaimana yang telah menjadi pandangan umum ilmu-ilmu sosial yang mempertentangkan pelaku (agen) versus struktur (Priyono, 2000: 18).

Dualitas antara struktur dan pelaku terletak dalam proses dimana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Struktur analog dengan *langue* (yang mengatasi ruang dan waktu), sedangkan praktik sosial analog dengan *parole* (dalam waktu dan ruang). Berdasarkan prinsip dualitas tersebut itulah dibangun teori strukturasi (Priyono, 2000: 19). Adapun ruang dan waktu menurut Giddens,

bukanlah arena atau panggung tindakan, tetapi merupakan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan, karena itu waktu dan ruang harus menjadi unsur integral dalam teori ilmu-ilmu sosial (Priyono, 2000: 20). Mengenai relasi antara agen dan kekuasaan dalam struktur sosial, Giddens mengajukan pertanyaan penting: apakah watak hubungan logis antara tindakan dan kekuasaan? Berikut penjelasan Giddens tentang agen dan kekuasaan:

“...Meskipun penjelesan tentang isu ini sangatlah kompleks, relasi mendasar yang ada bisa dengan mudah ditunjukkan. Mampu ‘bertindak lain’ berarti mengintervensi dunia, atau menjaga diri dari intervensi semacam itu, dengan dampak mempengaruhi suatu proses atau keadaan khusus dari urusan-urusan. Hubungan ini mengandaikan bahwa menjadi seorang agen harus mampu menggunakan (secara terus menerus di dalam kehidupan sehari-hari) sederet kekuasaan kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan oleh orang lain. Tindakan bergantung pada kemampuan individu untuk ‘memengaruhi’ keadaan urusan atau rangkaian peristiwa yang telah ada sebelumnya. Seorang agen tidak lagi mampu berperan demikian jika dia kehilangan kemampuan untuk ‘memengaruhi’, yaitu menggunakan suatu jenis kekuasaan. Banyak kasus menarik bagi analisis sosial bepusat di sekitar batasan-batasan dari apa yang dipandang sebagai tindakan, saat ketika kekuasaan seseorang dibatasi oleh sederet keadaan tertentu. Akan tetapi, yang pertama penting untuk diketahui adalah bahwa keadaan-keadaan dari pembatas sosial yang membuat para individu ‘tidak memiliki pilihan’ tidak boleh disamakan dengan terputusnya tindakan seperti itu. ‘Tidak memiliki pilihan’ bukan berarti bahwa tindakan telah tergantikan oleh reaksi (seperti kedipan seseorang ketika ada gerakan cepat di dekat matanya). Mungkin kondisi ini tampak begitu jelas sehingga tidak diperlukan lagi. Tetapi, sejumlah mazhab sosial terkemuka, terutama yang bersinggungan dengan objektivisme dan ‘sosiologi struktural’ belum mengakui pembedaan itu. Mazhab-mazhab sosial itu menganggap bahwa pembatas-pembatas sosial bekerja mirip seperti

kekuatan-kekuatan alam, seolah-olah 'tidak memiliki pilihan' sama ketika tidak kuasa menahan dorongan dari tekanan-tekanan mekanis" (Giddens, 2010: 22-23).

Giddens mengakui adanya konsep kekuasaan sebagai kemampuan transformatif, yang mendahului subjektivitas atau terbentuknya kemampuan introspeksi dan mawas diri, yang dalam ilmu sosial pada umumnya bersifat dualisme antara subjek dan objek. Dalam konsepsi tersebut kekuasaan-kekuasaan kerap kali didefinisikan dalam kaitan dengan maksud atau kehendak, yakni sebagai "kemampuan untuk menggapai hasil-hasil yang diinginkan dan dimaksudkan". Giddens juga memahami makna kekuasaan dalam dua sisi, yakni di satu pihak sebagai "kemampuan para aktor dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang disukai", di pihak lain kekuasaan sebagai "mobilisasi bisa yang dilekatkan ke dalam institusi-institusi". Namun Giddens melihat kekuasaan dalam kaitan dualitas struktur. Dalam memaknai kekuasaan yang dipahaminya, Giddens memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Sarana atau sumber daya (yang terpusat melalui signifikasi dan legitimasi) merupakan kelengkapan-kelengkapan terstruktur dari sistem-sistem sosial, yang diproduksi dan direproduksi oleh para agen pintar selama terjadinya interaksi. Kekuasaan tidak terkait secara intrinsik dengan pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam konsepsi ini, penggunaan kekuasaan menyifati bukan jenis perilaku, namun seluruh tindakan, dan kekuasaan itu sendiri bukanlah sumber daya. Sumberdaya-sumberdaya merupakan sarana penggunaan kekuasaan, sebagai unsur rutin instansiasi perilaku dalam reproduksi sosial. Kita tidak boleh memandang struktur-struktur dominasi yang melekat dalam institusi-institusi sosial mirip seperti memerintah 'tubuh-tubuh patuh' yang bertindak laksana benda-benda mekanis sebagaimana dalam pandangan ilmu sosial objektivis. Kekuasaan dalam sistem-sistem sosial yang memiliki suatu kontinuitas di sepanjang ruang dan waktu mengandaikan rutinisasi relasi-relasi kemandirian dan ketergantungan di antara para aktor atau kelompok dalam konteks-konteks interaksi

sosial. Akan tetapi, semua bentuk ketergantungan menawarkan sejumlah sumber daya yang memberikan kemampuan bagi para bawahan untuk bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas para atasan mereka. Inilah yang saya sebut dengan dielaktika kendali (*dialectic of control*) dalam sistem sosial” (Giddens, 2010: 24-25).

Selain itu, alasan dari setiap tindakan manusia atau agen tidak lahir di ruang hampa. Sebaliknya, tindakan manusia lahir dari ketergantungan baik pada sesama individu maupun kelompok, lingkungan, dan konteks interaksi sosialnya. Di sini Giddens menawarkan konsepnya tentang “geografi-waktu” dan “regionalisasi” (Giddens, 2010: 169, 183). Dua konsep ini bertujuan untuk melihat bagaimana agen berinteraksi dengan ruang-waktu yang menjadi konteks kehidupan sosialnya.

Strukturasi Giddens tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang masyarakat dan sistem sosial (Giddens, 2010: 250). Masyarakat dalam semua kategorinya, baik masyarakat berbudaya kesukuan, masyarakat kelas di era modern, maupun negara-bangsa yang dikenal abad kontemporer, menjadi acuan dari konteks analisis tindakan sosial. Konteks sosial ini adalah struktur yang tidak menutup kemungkinan dapat diinternalisasi oleh individu sebelum kemudian melahirkan tindakan dengan alasan tertentu.

Pada level puncak, saat manusia merefleksikan diri dan struktur di luar diri secara sadar dan kritis. Perubahan pastilah terjadi. Giddens melihat adanya hubungan antara teori sosial dan teori evolusi, dan antara evolusi dengan sejarah. Perubahan sosial merupakan hukum sejarah (Giddens, 2010: 353, 366, dan 399).

C. Relasi Struktural antara Klien dan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

Bentuk program pemulihan yang ditawarkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan penerimaan-penerimaan atau penyesuaian-penyesuaian

oleh klien atas pertimbangan-pertimbangan dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, maka terciptalah struktur sosial baru. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan klien sedang berinteraksi menuju satu tatanan sistem sosial baru secara bersama-sama. Fenomena sosial ini dapat dinyatakan seperti hubungan antara pengharapan, kelompok masyarakat, peran-peran sosial, norma-norma sosial, jaringan komunikasi, dan institusi sosial. Setiap elemen ini berinteraksi, saling terpengaruh dan mempengaruhi, baik secara sadar atau tidak, untuk melahirkan aksi-aksi sosial yang konsekuensi-konsekuensinya tidak terprediksi. Inilah alasan, tempo pemulihan yang dibutuhkan oleh masing-masing klien tidak sama. Begitu pun Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tidak dapat memprediksi secara akurat tempo pemulihan kondisi fisik dan mental masing-masing klien.

Hanya saja, sekalipun tidak ada prediksi akurat atas konsekuensi-konsekuensi dari setiap aksi sosial, bagi Giddens, struktur tetaplah dapat memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Namun, tindakan mereka juga bertujuan menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Teori strukturasi memandang bahwa masyarakat atau sistem-sistem sosial, terus terang tidak akan ada tanpa agensi manusia. Agen-agen inilah yang menciptakan sistem sosial baru, mereproduksi atau mengubahnya, dengan jalan menata kembali apa yang sudah ada dalam kontinuitas praksis mereka (Giddens, 2010:212).

Pada momen inilah, para petugas Balai Rehabilitasi selalu mengamati dan menganalisa perkembangan psikis dan fisik klien, untuk menjadi bahan pertimbangan tahap-tahap rehabilitasi berikutnya dari waktu ke waktu. Dalam proses rehabilitasi sangat berperan besar terhadap proses perubahan klien, dimana dari mereka (klien) berada pada pengaruh zat adiktif Kembali sehat tanpa pengaruh zat adiktif kembali harus melewati proses yang panjang dan bertahap, dari proses inilah penerapan nilai dan norma yang dilakukan agen yaitu Lembaga Balai Rehabilitasi BNN Baddoka yang dalam sosiologi disebut sebagai stuktur yang berperak aktif dalam menanamkan konsep nilai dan norma yang klien pahami sebelum berada dibalai, konsep yang ditanamkan itulah nanti yang akan menyembuhkan klien dari pengaruh zat adiktif

sehingga klien dapat Kembali menjalankan fungsi dan peran mereka Kembali di lingkungan masyarakat.

Refleksi, evaluasi, dan kreasi demi pemulihan klien secara lebih efektif adalah alamiah. Karena manusia merupakan agen pelaku, yang bertujuan memiliki alasan-alasan atas aktivitas-aktivitasnya, serta mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang. Aktivitas-aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif. Yakni, aktivitas sosial yang bertujuan supaya aktivitas-aktivitas tertentu tercipta dalam rangka mengekspresikan dirinya sendiri secara terus-menerus, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka butuh akan data-data terbaru tentang perkembangan mutakhir pencapaian kesehatan tubuh dan mental klien (Fitria, 2019).

Buku catatan yang dimiliki oleh setiap klien menjadi pegangan para terapis yang bekerja di Balai Rehabilitasi Baddoka, buku catatan itu berisikan berbagai program yang harus mereka jalani selama mereka berada di Balai Rehabilitasi. Di dalam buku tersebut tergambar pencapaian-pencapaian kesehatan dan juga tugas-tugas yang dikerjakan oleh masing-masing klien. Begitu pun, apabila ada satu klien yang tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam buku panduan tersebut, maka ia tidak bisa naik ke tingkat fase berikutnya. Aturan seperti ini sebenarnya mencerminkan kerangka kerja agen sosial dalam berinteraksi. Sebab, dalam teori strukturasi, terdapat tiga dimensi penting pada *resources*, pertama, pemahaman (*interpretation, understanding*). Pemahaman berarti cara-cara agen sosial memahami sesuatu. Cara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam memahami perkembangan psikis dan fisik klien.

Kedua, moralitas atau arahan yang tepat. Inilah cara-cara agen sosial memandang tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi dengan baik oleh klien maka tidak akan membuat klien bersangkutan segera keluar dengan catatan positif dari lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Karenanya, poin-poin dalam buku tugas harus dipenuhi dengan baik dan sempurna. Ketiga, kekuasaan dalam bertindak. Hal ini terkait cara-cara agen mencapai suatu keinginan.

Semua pihak (Balai Rehabilitasi dan klien) bersepakat bahwa ada aturan-aturan real dan konkrit yang harus dipenuhi bersama. Tiga dimensi tersebut, dalam teori strukturasi, memengaruhi tindakan agen. Karenanya, tindakan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka maupun klien ini sama-sama diperkuat oleh struktur pemahaman, moralitas, dan kekuasaan. Salah satunya lewat buku panduan kesehatan.

Pemenuhan klien terhadap kewajiban dan peraturan yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dengan kata lain, adalah bentuk interaksi antar agen. Masing-masing individu saling membicarakan satu topik tertentu, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dan klien. Sementara hak dan kewajiban tersebut dimanifestasikan menjadi norma atau aturan yang berlaku, yang kemudian diinterpretasikan oleh setiap individu klien dan menjadi arahan tingkah laku mereka selama tinggal di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Kekuatan yang masing-masing klien miliki memungkinkan mereka mencapai tujuan bersama, yakni dinyatakan pulih, berhak keluar dari lingkungan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, dan kembali bergaul ke dalam kehidupan masyarakat, dengan catatan dan citra yang kembali baik.

Kembalinya klien ke lingkungan masyarakat dengan kondisi tubuh dan mental yang baik bukan saja tujuan dari segala upaya Balai Rehabilitasi Baddoka. Lebih dari itu, pulihnya klien menjadi inti struktur, yang diperjuangkan melalui seperangkat aturan dan sumber daya yang sudah diorganisasikan secara rekursif, berada di ruang dan waktu, disimpan dalam koordinasi, kesegarannya sebagai jejak-jejak memori, dan ditandai oleh "ketiadaan subyek". Ketiadaan subjek berarti ketiadaan agen, dimana peran balai rehabilitasi dan klien bukan perkara penting selama tujuan berupa masyarakat yang jauh dari narkoba sudah tercapai. Ini juga tujuan akhir dari dualitas struktur, di mana struktur dijadikan sebagai media dan hasil perilaku sosial diorganisir secara rekursif. Sifat-sifat struktural dari sistem sosial semacam ini secara terus-menerus terlibat dalam produksi dan reproduksi. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka akan terus bekerja aktif selama sebagian anggota masyarakat masih terjerembab ke dalam penggunaan narkoba.

Begitupun negara terus berkewajiban memfasilitas tersedianya balai rehabilitasi sebagai perwujudan menjalankan amanah undang-undang.

Menurut penjelasan terdahulu, maka proses rehabilitas klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka bergantung pada aspek nilai yang dipegang bersama oleh para agen. Namun, Balai Rehabilitasi Baddoka sebagai unit pelaksana teknis dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Pusat memiliki pengertian tersendiri tentang makna nilai. Peran dan fungsi nilai ini begitu penting untuk dilembagakan kedalam kesadaran klien, demi proses pemulihan klien itu sendiri (Fitria, 2019).

Balai Rehabilitas Baddoka setidaknya mengklasifikasi nilai menjadi dua kelompok, yaitu: 1) nilai medis, dan 2) nilai sosial. Pelayanan medis yang dimaksud adalah layanan kesehatan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Balai Rehabilitasi Baddoka. Sedangkan nilai sosial diberikan dengan harapan terjadinya perubahan polapikir (kognitif) dan perubahan perilaku (behavior).

Pelembagaan nilai adalah cara kerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk mempercepat perubahan atau penerimaan diri klien. Pelembagaan dengan cara penanaman nilai tercantum dalam Buku Saku Standar Pelayanan Rehabilitasi, yang kemudian disebut sebagai "intervensi". Pengertian "Intervensi" bagi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah layanan yang diberikan kepada klien/klien. Aktifitas intervensi ini lahir disebabkan adanya bentuk-bentuk pergeseran, penyelewengan, dan perubahan pada sistem nilai yang ada dalam masyarakat, baik dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok (Fitria, 2019).

Akibat yang ditimbulkan oleh penyelewengan dan pergeseran sistem nilai tersebut adalah munculnya gangguan, ketegangan, konflik, dan ketidakseimbangan sosial. Sementara di sisi lain, dorongan untuk kembali hidup wajar dan normal menjadi bagian motivasi intervensi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Untuk itulah, diperlukan adanya strategi efektif dan efisien agar dapat mengembalikan kondisi kacau menjadi normal. Selama proses intervensi inilah, proses pelembagaan nilai berlangsung (Fitria, 2019).

Pelembagaan nilai adalah praktek pendidikan itu sendiri. Bahkan, pendidikan karakter didefinisikan sebagai proses penanaman nilai, nilai hidup manusia yang paling baik adalah budi pekerti yang luhur, yang dapat diambil dan digali dari realitas masyarakat itu sendiri. Mohammad Noor Syam mengatakan bahwa pendidikan secara praktis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai, terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama. Semua aspek ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, yaitu membina kepribadian manusia yang ideal. Berbicara tentang pendidikan agama ini, agama menjadi salah satu komponen pembentuk nilai. Semua agama memang memiliki acuan nilai yang sama, yaitu kitab suci mereka, dimana sistem nilai yang diyakini berbeda satu sama lain. Rumayulis mencontohkan, di dalam Islam, ada tiga bagian nilai: nilai keimanan, nilai ritual ibadah, dan nilai akhlak (Suparno, 2002:62). Adapun ungkapan salah satu klien yaitu AW yang beranggapan bahwa selama berada di Balai klien merasa banyak perubahan:

“Semenjak tidak menggunakan narkoba dan memulai rehabilitasi saya mulai memahami nilai-nilai dan norma, tidak ceroboh, sudah mulai mau mendengarkan masukan dari orang lain, belajar tepat waktu, ibadah, kehidupan semakin teratur, banyak sekali perbedaan yang saya rasakan dalam diri saya semenjak saya berada di balai rehabilitasi ini. Dimana hal yang saya sadari bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan adanya penerimaan diri, dimana awalnya saya sebelum berada disini, saya hanya peduli sama narkoba dan menjadi orang sok pemberani, sedangkan di sini (Balai Rehabilitas) saya merasa diri saya harus banyak belajar” (AW, 08/01/2021).

Adapun klien lain yang mengungkapkan proses perubahan penanaman nilai dan norma selama klien berada di balai yaitu berinisial ZA, yang mengungkapkan bahwa:

“.... Saat saya menggunakan narkoba, saya jarang bergaul dengan masyarakat umum bergaul dengan sesama pengguna dan menyibukkan diri dirumah dengan bermain smarth phone. Tidak mengingat Tuhan, hanya mengingat sepintas. Disini saya saat berada di Balai saya

merasakan kuasa Tuhan yang sangat besar, dan saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sesi religi semakin besar perubahannya yang saya dapatkan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara bergaul juga diajarkan bagaimana untuk mampu bergaul dan mampu berbagi kesesama, dimana melakukan tindakan sedikit saja ditegur hal itu bermakna nanti saat kita berada di masyarakat akan ada stigma-stigma yang terlontar dimasyarakat. Stigma yang dilontarkan oleh masyarakat beragam maka saya akan menerima diri dan menahan diri yaitu menunjukkan bahwa saya sudah berubah menjadi lebih baik lagi selama berada di Balai, staf sangat membantu kami para klien untuk terbebas dari narkoba, dengan metode-metode, penerapan nilai-nilai dan norma yang diatur membuat kami (klien) bisa berubah menjadi lebih baik dan terlepas dari narkoba...” (ZA, 08/01/2021).

Berdasarkan temuan lapangan yang terjadi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, pelembagaan dengan jalan penanaman nilai medis, nilai sosial dan nilai agama sama-sama diakomodir secara bersamaan. Pendidikan agama menanamkan nilai-nilai keyakinan ditekankan sama besarnya dengan porsi penekanan nilai-nilai medis dan nilai sosial kepada para klien. Pada saat bersamaan, praktek penanaman nilai oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama memberikan pelayanan kepada klien tidak boleh melanggar Hak Asasi Manusia. Aturan HAM adalah nilai insaniah yang dipratikkan dan dengan mudah ditemukan dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka (Fitria, 2019).

Selain pelembagaan dan penanaman nilai religi (agama) dan sosial, Balai Rehabilitasi Baddoka juga melakukan rehabilitasi dengan penanaman nilai kultural, di antaranya terapi musik dan kegiatan kesenian lainnya. Dalam proses rehabilitasi melalui kegiatan kesenian ini, tidak sedikit karya seni yang telah dihasilkan oleh klien, seperti kerajinan tangan, lukisan, dan juga karikatur (Fitria, 2019). Dalam hal ini Bro HS selaku konselor senior yang mengungkapkan bahwa:

“...bukan hanya psikologinya dan kesehatan fisik kita obati, tetapi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga diajarkan berbagai hal guna untuk menunjukkan kepada masyarakat

bahwa mereka (pengguna narkoba) juga bisa pulih, produktif dan menjalankan fungsi sosialnya dan mampu menjalani hari-hari seperti manusia normal pada umumnya. Kurangnya penerapan Nilai & Norma dalam masyarakat dapat membuat mereka kembali lagi menjadi kecanduan narkoba. Kurangnya penghayatan akan pentingnya nilai dan norma menjadi salah satu alasan banyak orang menjadi kecanduan narkoba. Sehingga TC dan ditambah nilai dan norma perlu diperdalam untuk mengembalikan klien menjadi pulih...” (HS, 20/08/2020).

Efektifitas pelembagaan dan penanaman nilai dalam proses pemulihan klien, sejatinya, tidak saja bergantung pada laporan psikologis klien. Latar belakang klien, mulai dari agama, jenis kelamin, usia, status perkawinan, dan tingkat pendidikan, juga menjadi bahan evaluasi dan penilaian dari pihak lembaga Balai Rehabilitasi Baddoka. Contoh, bila dilihat dari data tahun 2016 hingga tahun 2019, latar belakang agama para klien beragam, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Usia mereka berkisar dari 13-64 tahun. Laki-laki dan perempuan, baik menikah maupun belum menikah, juga menjadi klien. Bahkan, tingkat pendidikan mereka juga beragam mulai dari SD, SLTP, SMA, hingga Perguruan Tinggi (report, 2019).

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka melihat bahwa penanaman nilai menjadi semakin efektif dalam proses pemulihan tatkala disesuaikan dengan kebutuhan klien sekaligus latar belakang mereka. Anthony Giddens juga melihat bahwa individu tidak saja bergantung pada sesama individu, tetapi juga pada konteks interaksi sosial. Karenanya, diperlukan teknik/pendekatan “geografi-massa” (Giddens, 2010:41). Geografi massa berarti upaya untuk memahami kebutuhan dasar klien akan layanan yang masing-masing klien butuhkan, dan karenanya kebutuhan dasar tersebut tidak sama. Pendekatan georaf-massa ala Giddens menjadi jembatan untuk memahami perilaku klien, dan akan dicatatkan ke dalam buku laporan kesehatan masing-masing klien.

Praktik penanaman nilai di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini berlangsung untuk mengembalikan perilaku sosial para klien yang dianggap telah menyimpang dari kewajaran masyarakat umum. Balai Rehabilitasi BNN

Baddoka mendefinisikan beberapa contoh perilaku menyimpang yang perlu dikembalikan lagi ke batas normal, antara lain *adult-Child-of-an-Alcoholic Traits, Anger, Antisocial Behavior, Anxiety, hyperactivity disorder, bipolar, family conflict, impulsivity*, dan banyak perilaku menyimpang lainnya. Semua definisi konseptual semacam ini tidak lepas dari kepentingan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk berinteraksi dengan klien sebagai agen-agen sosial, di mana peran agen-agen tersebut sangatlah urgen.

Secara garis besar, hubungan antara agen (Balai dan klien) dan struktur (idealisme dan tujuan rehabilitasi) terjadi berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu yang relatif konsisten. Sementara itu, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi betapa pun kecilnya perubahan itu. Perubahan terjadi ketika kapasitas ini menggejala secara luas, sehingga terjadilah derutinisasi. Derutinisasi menyangkut proses di mana skema yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya, tidak lagi memadai sebagai prinsip pengorganisasian berbagai praktik sosial. Dengan kata lain, idealisme yang sedang diperjuangkan harus melahirkan praktik sosial baru. Dari sinilah, pemahaman yang akurat oleh para terapis Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sangatlah penting. Sebab, masing-masing klien memiliki kebutuhan akan layanan yang berbeda-beda. Pengetahuan lama tentang klien tertentu tidak cukup untuk menjadi pegangan pelayanan rehabilitasi bagi klien lain yang baru.

Menurut Teori Strukturasi, sistem sosial eksis sebagai praktik-praktik yang terus-menerus direproduksi. Praktik sosial senantiasa mengalami dinamika dan perubahannya sendiri. Praktik sosial adalah proses yang penuh kemungkinan, dan didasarkan pada aktivitas para pelaku yang berubah dan selalu berbeda. Inilah sketsa ringkas dari teori strukturasi Giddens untuk membaca konteks proses penyembuhan klien ini. BNN Baddoka, selain melalui cara medis, juga berupaya untuk menanamkan nilai-nilai non-medis terhadap klien, sehingga klien dapat kembali menjadi "anggota" masyarakat. Dalam teori strukturasi Giddens, kembalinya klien menjadi anggota masyarakat yang baik disebut perubahan sosial.

Berdasarkan *Handbook of Value: Perspectives from Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology, and Sociology*, Christine Tappolet dan Mauro Rossi melihat definisi nilai secara filosofis sebagai perkara yang dianggap positif untuk dilakukan. Jika sebagian orang melihat pengetahuan dan keadilan sebagai nilai, berarti pengetahuan dan keadilan merupakan perkara-perkara yang positif untuk dipromosikan (Brosch & Sanda, 2000:15). Dalam kasus-kasus sosial, seperti persoalan imigran, Gabriel M. Jiga-boy, Gregory R. Maio, Geoffrey Haddock, dan Katy Tapper mengatakan bahwa kesetaraan, toleransi dan kejujuran (*fairness, tolerance, and equality*) merupakan nilai penting sekaligus solusi berjangka panjang untuk mengatasi persoalan imigran (Brosch & Sanda, 2000:15).

Pengertian nilai dan fungsi nilai, pada akhirnya, dapat berbeda-beda sesuai konteks kebutuhan. Perbedaan definisi tentang nilai tidak menghalangi adanya kesepakatan substansial. Nilai tetap dipahami sebagai esensi yang melekat dan sangat berguna bagi kehidupan manusia (Thoha, 1996: 61). Nilai juga mengandung kebaikan dan penting sekali bagi kemanusiaan (Purwadaminta, 2000:45).

Adapun jika dilihat dari sifatnya, nilai merupakan perkara abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta. Nilai tidak saja menyangkut perkara baik dan buruk, tetapi juga menuntut penghayatan sosial tentang hal-hal yang dikehendaki, disenangi, maupun yang tidak dikehendaki-tidak disenangi. Bagi Milton Rekeach dan James Bank, nilai adalah bagian dari tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem keyakinan. Nilai ini menjadi standar acuan atau rujukan tentang perkara yang harus dilakukan dan harus dihindari (Kartawisastra, 1980:1).

Gambaran yang lebih sistematis tentang nilai datang dari Louis D. Kattsof bahwa nilai memiliki tiga pengertian. *Pertama*, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. Namun, manusia dapat secara langsung memahami dan mengalami nilai yang berupa kualitas tersebut dan mendapatinya di dalam objek-objek. Dari sini, tolak ukur nilai dapat berupa subjektifitas maupun sekaligus objektifitas. *Kedua*, nilai adalah objek kepentingan, baik yang berada dalam pikiran manusia maupun realitas

objektif dari objek tersebut. *Ketiga*, nilai merupakan pemberian atau produk yang diciptakan oleh situasi kehidupan sehari-hari manusia (Maarif, 2007:114).

Klien yang telah memenuhi standar nilai dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ini dinyatakan sebagai orang yang sudah pulih, layak kembali ke kehidupan normal masyarakat pada umumnya. Dengan pemenuhan atas standar nilai tersebut, Balai Rehabilitasi BNN memiliki kepercayaan diri untuk menyatakan klien telah pulih. Nilai kepulihan tidak saja diukur dari parameter ilmu kesehatan dan kedokteran melainkan juga kepulihan yang diukur dari standar nilai agama, kultur, sosial, kesenian, dll. Sebelum meraih penilaian dari Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebagai orang yang pulih, tahap demi tahap proses rehabilitasi harus dijalani dengan progres perkembangan pemulihan tersebut, tercatat dengan rapi dalam buku catatan kesehatan masing-masing klien yang tidak sama.

D. Strukturasi Menurut Teori Giddens

Teori Giddens yang memusatkan perhatiannya pada praktik sosial yang berulang adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Berstein mengatakan dalam Rizter (2008: 508) bahwa ‘tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh mempengaruhi antara agen struktur’ dalam Ansar Arifin (2012: 26).

Berkaitan dengan itu, menurut Giddens (1984: 29), bahwa setiap struktur besar memiliki tiga gugus struktur yang membangunnya, ketiga gugus struktur itu adalah: (1) struktur signifikasi yang berkaitan dengan skemata simbolik dan wacana, (2) struktur dominasi, yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi), dan (3), struktur legitimasi yang berkaitan dengan skema aturan normatif yang tertuang dalam tata hukum/aturan main dalam Ansar Arifin (2012: 27).

Selanjutnya, tingkat stabilitas dan flaktuasi suatu struktur jaringan akan ditentukan oleh keseimbangan hubungan dalam tiga gugus tersebut. Mengenai terbentuk dan berubahnya suatu struktur jaringan itu, ada tiga

pengandaian penting yaitu diajukan dalam teori strukturasi ini (Giddens, 1984: 16-25).

1. Struktur jaringan diadukan sebagai medium (perantara) interaksi sekaligus juga sebagai instrument bagi para pelaku jaringan konsekuensinya, struktur bagi para pelaku jaringan konsekuensinya, struktur jaringan bukan hanya memiliki dimensi untuk mengekang (*constrait*) perilaku actor (individual) supaya sesuai dengan norma-norma dan regulasi-regulasi yang ada di dalamnya.
2. Dengan tingkat otonomi yang dimiliki para pelaku jaringan, baik individu maupun organisasi, mereka memiliki apa yang disebut sebagai kemampuan mawas diri, *self-reflection* (Giddens, 1984: 41-45). Dalam arti, bahwa para pelaku jaringan dianggap memiliki kapasitas kekuasaan yang kuat (*agential power*) untuk mengubah dan atau mempertahankan struktur jaringan.
3. Adanya interaksi-interaksi yang terjadi secara berulang-ulang yang didasari pada kepentingan praktis (bidang kehidupan) yang akan membentuk dan mengubah struktur itu (Giddens, 1984: 162-213).

Dalam tulisan Ansar Arifin (2012) menyimpulkan bahwa, tiga pengandaian dalam teori strukturasi yang diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa terbentuknya dan berubahnya struktur jaringan terjadi lewat hubungan dualitas antara struktur jaringan dan tindakan-tindakan para pelaku jaringan. Selanjutnya, meskipun *agent* (actor) memiliki peran penting dalam proses interaksi, namun struktur juga memiliki peran yang menentukan (lihat, Giddens dalam Priyono, 2003). Perilaku sosial para aktor diarahkan, dibatasi, dibentuk, dan bahkan yang berupa struktur signifikasi, struktur dominasi dan struktur legitimasi.

1. Signifikasi, Bingkai Interpretasi, dan Komunikasi

Proses Rehabilitasi dalam TC sangat unik. TC diorganisasikan dalam tingkatan posisi yang menghendaki tegas terhadap pertanggungjawaban pada masing masing tahapan rehabilitasi.

Dalam struktur signifikasi metode rehabilitasi menggunakan berbagai pendekatan yaitu:

a. Menciptakan kontak awal

Apabila petugas Balai telah berhasil melaksanakan wawancara masuk dan membantu klien mencari tingkat motivasi yang sesuai, komitmen untuk berubah dibuktikan dalam kontrak perawatan awal, yang disetujui dan ditandatangani. Kontrak tersebut harus merangkum pernyataan kebutuhan klien dan tujuannya. Klien harus memahami pentingnya perawatan untuk memuaskan kebutuhan dan tujuan serta harapan-harapan yang harus dipenuhi.

b. Menjelaskan langkah berikutnya dalam proses rehabilitasi terhadap klien.

Klien memahami masa-masa perawatan dan melaksanakan kegiatan yang telah dibuat, langkah-langka selanjutnya dalam perawatan, dijelaskan secara detail.

c. Penerapan teori yang sesuai dengan kognitif

Unsur-unsur ketidak cocokan atau ketidak sesuaian ini mengacu pada "kognitif" yang membenarkan sesuatu bahwa seseorang mengetahui dirinya sendiri, perilakunya, dan sekitarnya. Orang-orang mengalami ketidaksesuaian kognitif atau suatu pernyataan penderitaan mental ketika mereka menemukan diri mereka berperilaku dengan cara tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai, atau yang mendukung kepercayaan mendapat yang tidak sesuai dengan kepercayaan yang lain atau pendekatan yang mereka yakini (Griffin, 1997) dalam Buku Metode Therapeutic Community (2009: hal 64-65).

Sifat pertentangan dari ketidaksesuaian mengarahkan kita juga untuk merubah perilaku atau kepercayaan yang berbeda untuk menghindari perasaan tidak menyenangkan yang dihasilkan. Lebih jauh lagi, makin penting persoalan yang terpancang dan lebih hebat konflik antara perilaku dan kepercayaan, lebih kuat ketidaksesuaian yang kita alami. Teori merupakan alat bermanfaat untuk formulasi strategi mempengaruhi perubahan sikap.

Perhatian utama dari proses rehabilitasi adalah proses wawancara, wawancara awal diperlukan untuk melakukan interpretasi terhadap tingkat ketergantungan calon klien. Interpretasi juga diperlukan untuk mengetahui

gangguan perilaku kognitif atau gangguan behavioral, penyakit fisik yang mungkin ada, gangguan hubungan dengan keluarga dan gangguan sosial. Mendapatkan informasi awal mengenai klien juga diperlukan untuk menyusun rencana terapi yang tepat bagi klien

Informasi lainnya seperti latar belakang keluarga, kehidupan sosial, lingkungan sosial klien akan didapatkan melalui wawancara atau diskusi. Menurut Dale dan Marsh (2000) dalam buku Standar Rehabilitasi TC (2012) mengatakan bahwa pengembangan profesionalitas staf pada berbagai layanan terapi baik dalam bidang adiksi maupun dalam bidang-bidang lainnya. Terkait dengan pengembangan dan dukungan bagi staf untuk meningkatkan kemampuan melakukan interpretasi maka diperlukan proses sebagai berikut :

- a. Ketersediaan kesempatan berlatih, baik bersifat magang maupun teoritis untuk meningkatkan kapasitas ketrampilan dan pengetahuan staf;
- b. Tersedianya supervisi yang efektif dan suportif untuk membangun proses belajar dan dukungan yang berkesinambungan;
- c. Adanya struktur organisasi yang memungkinkan untuk mempraktikkan ilmu dari pelatihan;
- d. Tersedianya media komunikasi bagi staf untuk belajar dari kegagalan maupun kesuksesan.

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam signifikasi. Komunikasi yang terbangun antar para profesional sesuai bidang tugas keilmuan masing-masing sangat penting dalam Balai. Komunikasi yang biasa dilakukan dalam Balai dikenal dengan istilah case conference. Setiap permasalahan klien yang timbul akan dibicarakan secara tuntas oleh para staf “profesional” Balai untuk mencari jalan penyelesaiannya.

Hal yang penting sekali adalah terbangunnya komunikasi yang intensif antara staf Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dengan para klien. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu rencana terapi yang bersifat individual karena klien diposisikan sebagai objek yang harus dirubah namun dalam waktu yang bersamaan berperan sebagai agen perubahan bagi diri sendiri maupun untuk menjadi “peer” sebagai model panutan bagi klien

lainnya. Menurut Delon dalam BNN 2012 komunikasi terbuka dan keterbukaan pribadi (open communication dan personil disclosure) akan membantu klien untuk membangun harga diri, membina kepercayaan kepada orang lain, menjadi mawas diri dan berkembang pribadinya. Signifikansi-interpretasi-komunikasi, terkait erat dengan pelebagaan nilai dan norma dalam Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Balai secara struktur sangat signifikan dalam pelebagaan nilai dan norma dengan jalan memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan interpretasi terhadap pendekatan terapi yang tepat bagi diri seorang klien berdasarkan kebutuhannya, pada saat bersamaan klien mendapat kesempatan melakukan interpretasi tentang segala program dan fasilitas yang ada di Balai. Interpretasi terhadap metode dan permasalahan klien menjadi hal yang penting untuk dikomunikasikan baik antara staf profesional Balai Baddoka maupun antara staf dengan klien.

2. Dominasi, Fasilitas, dan Kekuasaan

Penerapan paksaan dalam proses rehabilitasi, yaitu sumber paksaan internal dan eksternal untuk pecandu yang mencari celah masuk perawatan adalah penting. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mempunyai fasilitas untuk mendukung kekuasaan yang ada di Balai. Fasilitas-fasilitas yang tersedia semuanya mendukung kekuasaan yang dimiliki oleh Balai. Sejak seorang pecandu diterima dan dinyatakan sebagai klien maka pada saat itu dominasi Balai berlaku kepada Klien tersebut. Fasilitas yang tersedia seperti sumber daya manusia Balai bekerja secara simultan melaksanakan tugas pokok masing masing sesuai dengan bidang tugasnya. Fasilitas sarpras juga mendukung Balai dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dari sisi medis, maka semua klien yang baru masuk akan diperiksa kesehatannya secara lengkap seperti darah lengkap, rontjen paru-paru, gigi, psikologi dan lain lain. Demikianpun ruang rumah rawatan dilengkapi dengan pengamanan yang sangat ketat seperti CCTV, tralis dan kelengkapan keamanan lainnya.

Semua kelengkapan tersebut diatas bekerja secara bersama-sama untuk mendukung kekuasaan Balai terhadap klien yang ada di Balai. Para klien diatur oleh suatu sistem yang ada. Klien beraktifitas atas perintah para

staf Balai. Dapat disimpulkan bahwa Balai BNN Baddoka bekerja sangat sesuai dengan pendekatan struktur dominasi menurut Giddens.

Konselor sebagai *partner recovering* bagi seorang klien selama berada di Balai sangatlah besar kekuasaannya terhadap klien. Seorang klien bisa naik fase dalam proses rehabilitasi ditentukan oleh hasil penilaian konselor. Bahkan seorang klien dinyatakan pulih juga atas penilaian konselor. Penilaian konselor tentu didukung oleh data-data dari bidang lain. Penulis melihat bahwa dominasi-fasilitas-kekuasaan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berlaku terhadap para klien.

3. Legitimasi, Norma, dan Sanksi

Tahapan dalam proses rehabilitasi memiliki proses dan tahapan yang harus dilalui, seperti konsep yang diungkapkan oleh Giddens bahwa dikenal istilah Legitimasi-Norma-Sanksi sangat berlaku di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Balai Baddoka mempunyai legitimasi. Mempunyai dasar hukum melaksanakan rehabilitasi. Dasar hukum rehabilitasi medis dari Dinas Kesehatan dan dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi sosial dari dinas Sosial Pemprov Sulsel. Disamping itu Balai mempunyai metode yang sudah diakui sebagai metode pelaksanaan rehabilitasi. Karena mempunyai dasar pijakan hukum, mempunyai metode yang jelas, aturan yang jelas, pegawai yang mumpuni dan didukung dengan sarana prasarana yang cukup lengkap, sehingga lembaga ini mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi.

Balai Rehabilitasi BNN mempunyai aturan main dalam melaksanakan tugas fungsinya. Setiap tindakan diatur dalam SOP. Standar operasi prosedur sudah mendapat pengesahan dari pimpinan Balai sehingga dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan di Balai Rehabilitasi. Setiap tindakan yang melanggar SOP akan mendapat sanksi. Dalam Balai terdapat banyak norma norma yang tidak boleh dilanggar oleh setiap klien. Ketika terjadi pelanggaran terhadap norma norma itu maka terhadap klien tersebut akan mendapat "sanksi" atau dalam Balai disebut mendapat pembelajaran. Pembelajaran ini sudah diatur bentuk dan teknis

pelaksanaannya. Salah satu bentuk evaluasi harian adalah adanya Morning Meeting yaitu semacam rapat evaluasi terhadap seluruh kegiatan sehari sebelumnya. Setiap klien diberi kesempatan untuk menyampaikan pengamatannya terhadap temannya terutama jika terjadi pelanggaran norma dalam rumah rawatan. Laporan pada morning meeting akan ditindak lanjuti oleh konselor untuk memberikan “sanksi” pembelajaran terhadap klien yang melakukan pelanggaran. Menurut buku standar rehabilitasi TC, sanksi merupakan suatu sistem yang terintegrasi dalam sistem manajemen klinis dan komunitas melalui sebuah pembelajaran perilaku. Dalam TC sanksi dapat dikelompokkan menjadi suatu pernyataan koreksi secara verbal maupun tindakan kedisiplinan. Bilamana koreksi tersebut valid maka klien harus menunjukkan penerimaan koreksi dengan mengemukakan komitmen untuk merubah diri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian pemenuhan signifikasi, dominasi dan legitimasi dalam pelebagaan nilai dan norma di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Sehingga teori Strukturasi menurut Giddens sangat tepat dipakai sebagai pijakan ilmiah untuk melihat pelaksanaan proses pelebagaan nilai dan norma di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

BAB 7

PENERIMAAN DIRI KLIEN PADA BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA

Penerimaan diri klien ditandai dengan terjadinya pemulihan kesehatan fisik maupun psikis klien, serta ditunjukkan dengan terjadinya perubahan perilaku sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga layak untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat normal. Proses-proses yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam pemulihan klien seperti penanaman nilai memberikan manfaat dan perubahan pola hidup klien karena para klien itu sendiri terbuka dan lapang dada untuk menerima saran-saran kesehatan, religius, dan sosial dari staf Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Giddens menyebut penerimaan ini sebagai perubahan sosial. Teori strukturasi memungkinkan agen untuk mendapatkan kemampuan diri mengubah situasi. Artinya, teori ini mengakui besarnya agen dalam menentukan suatu praktik sosial.

Kemampuan agen merubah situasi sangat erat kaitannya dengan konsep refleksi kritis agen struktural dalam teori strukturasi Anthony Giddens. Konsep refleksi kritis menghargai perubahan yang selalu terjadi di dalam proses strukturasi oleh para agen sosial, betapapun kecilnya perubahan itu dihasilkan oleh mereka. Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitoring (mengambil jarak) ini meluas, sehingga berlangsung proses lain yang disebut "de-rutinisasi". Konsep derutinisasi ini menyangkut gejala sosial, dimana struktur yang sudah ada selama ini menjadi aturan dan sumber daya atas

praktik sosial kita, tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial. Sistem-sistem yang sedang berlangsung tidak memadai untuk apa yang sedang diperjuangkan. Langkah menuju praktik sosial baru harus melepaskan diri dari sistem yang sudah ada. Inilah derutinisasi. Dengan kata lain, perubahan struktur sosial dapat diartikan sebagai perubahan skema sosial, agar ia lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus dan sedang berkembang menuju bentuk baru (Priyono, 2002:30).

Derutinisasi ini terjadi pada para klien di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Selama mereka menjalani proses pemulihan dengan mematuhi aturan dan menerima program yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, saat itulah terjadi derutinisasi. Perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan para klien baik secara personal maupun kolektif, baik dalam porsi besar dan cepat maupun kecil dan perlahan. Namun, ketika mereka sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, sudah tidak tampak lagi bahwa mantan klien ini dahulunya pernah jatuh ke dalam kehidupan kelam akibat narkoba. Sebab, jejak-jejak korban narkoba sudah terhapus dari tubuh dan mentalitas mereka. Derutinisasi dalam konteks spesifik ini dapat diartikan bahwa klien sudah tidak lagi meninggalkan jejak pengaruh narkoba dalam diri mereka. Namun demikian, sepanjang proses pemulihan (rehabilitasi) terhadap pecandu narkoba (klien), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memiliki standar-standar penilaian dan kriteria-kriteria fase tertentu. Misalnya, untuk Program *Therapeutic Community* (TC), Balai Rehabilitasi Baddoka menetapkan dua fase; Fase A dan Fase B. Pada Fase A, seorang individu klien harus menjalani beberapa tugas tertentu. Klien menjalani program detoksifikasi dan program entry unit selama 1 bulan. Pada Fase A ini, ada Dua Belas (12) Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu (Fitria, 2019):

- a) Klien telah menjalani program di fase A kurang lebih 30 hari dengan menunjukkan perkembangan/progres yang baik,
- b) Klien wajib memahami dan mematuhi: *cardinal rules*, *major rules*, dan *house rules*,

- c) Klien telah membuat jurnal feeling, sign by MOD,
- d) Klien berpartisipasi aktif dalam setiap group/sesi (*morning meeting&wrap up*), serta membawakan atau memberikan : awareness 5 kali, Issue 5 kali, intra personal pull up 5 kali, personal pull up 3 kali, pull up board 2 kali, motivasi 5 kali, penghargaan 4 kali, suggest TOTD 3 kali, dan menyebutkan 20 jargon yang dibuktikan dengan sign MOD,
- e) Membuat 3 theme writing elaborasi perangkat rumah (*tools of house*)
- f) Partisipasi aktif dalam confrontation rumah
- g) Membuat resume riwayat pemakaian dan alur program yang dilalui
- h) Mampu memahami dan menghafal *serenity prayer* dan *the creed*
- i) Menyelesaikan kriteria religi
- j) Membawakan seminar tentang pengertian penerimaan diri, manfaat dan tujuan penerimaan diri, serta issue di dalam diri
- k) Menjadi moderator/conduct seminar klien sebanyak 3 kali, dan
- l) Klien telah melakukan individual counseling, family dialogue, dan static group minimal 2 kali.

Fase A dengan 12 Kriteria di atas hanyalah contoh dari standar nilai pemulihan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Setelah Fase A selesai, klien akan melanjutkan pada Fase B yakni program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial sesungguhnya adalah rehabilitasi yang sebenarnya. Terdapat 17 Kriteria yang harus dilalui klien. Fase ini terbagi atas dua rumah rawatan yaitu rumah faith yakni rawatan tiga bulan dan rumah rawatan enam bulan yakni rumah grow. Kedua rumah rawatan ini memakai program TC dengan pemangkasan perilaku cognitive untuk rumah faith dan pemangkasan behavior untuk rumah rawatan enam bulan. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mengeluarkan buku panduan berbeda dengan kriteria berbeda pula. Klasifikasinya pun berbeda. Pertama, Kriteria *Fase Acceptance*. Pada fase ini ada 12 kriteria. Kedua, Kriteria *Fase Change*. Pada fase ini ada 16 kriteria. Ketiga, Kriteria Fase Sosialisasi. Pada fase ini ada 11 kriteria (Report, 2018).

Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga mengeluarkan buku evaluasi/penilaian terkait konsep pemulihan klien berdasarkan keanggotaan.

Terdapat dua bentuk Buku Penilaian Kriteria yaitu buku penelian rehabilitasi jangka pendek faith, 3 bulan dan jangka panjang growth 6 bulan.

Pada program jangka Panjang 6 bulan terdapat tiga fase yakni fase *Younger Member-Primary* dengan 7 kriteria, dilanjut fase berikutnya yang disebut *middle member-primary* dengan 13 kriteria, disusul fase yang disebut *older member-primary* dengan 11 kriteria, kemudian ada fase *observation* dengan 7 kriteria, fase *vocational* dengan 6 kriteria, dan fase *survival* dengan 5 kriteria. Seorang individu klien ditetapkan telah pulih oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka apabila telah menyelesaikan fase demi fase dengan mendapatkan poin maksimal pada setiap kriteria (Report, 2018).

Berdasarkan tahapan-tahapan serta hasil yang diperoleh dari rehabilitasi di Balai Rehabilitas Baddoka sebagaimana uraian di atas menjadi bukti bahwa metode atau cara rehabilitasi terhadap klien sangat efektif untuk tujuan derutinisasi kebiasaan hidup lama di bawah pengaruh narkoba. Untuk lebih jelasnya, proses berlangsungnya derutinisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Penerimaan diri klien ditandai dengan munculnya penyesalan pada diri klien dan ingin berubah kearah yang lebih baik. Telah menyesali perbuatan sebelumnya dan mempunyai keinginan untuk berubah dan mampu mempertahankan kepulihannya. Penerimaan diri klien ditandai dengan terjadinya pemulihan Kesehatan fisik maupun psikis, serta ditunjukkan dengan terjadinya perubahan perilaku sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga layak untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat normal

Gambar 7.1
Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar 2017

Jenis Kelamin	Vol	Comp	Ket		Total
			Selesai Program	Tidak Selesai Program	
Laki-laki	178	61	127	112	230
Perempuan	9	3	9	3	12
					251

Catatan:

Tidak Selesai Program:

1. Masa TAT habis
2. Issue Medis
3. Cuti Habis
4. Dipulangkan
5. Ditarik keluarga
6. Ditarik penyidik
7. Rawat jalan
8. Rumah Damping
9. Split

Gambar 7.2
Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar 2018

Jenis Kelamin	Vol	Comp	Ket		Total
			Selesai Program	Tidak Selesai Program	
Laki-laki	215	66	189	92	281
Perempuan	20	12	20	12	32
					313

Catatan:

Tidak Selesai Program:

1. Masa TAT habis
2. Issue Medis
3. Cuti Habis
4. Dipulangkan
5. Ditarik keluarga
6. Ditarik penyidik
7. Rawat jalan
8. Rumah Damping
9. Split

Gambar 7.3
Data Klien Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar 2019

Jenis Kelamin	Vol	Comp	Ket		Total
			Selesai Program	Tidak Selesai Program	
Laki-laki	232	53	225	62	287
Perempuan	15	1	16	1	17
					304

Catatan:

Tidak Selesai Program:

1. Issue Medis
2. Dipulangkan
3. Rujuk
4. TAT Habis
5. Rumah Damping

Sumber: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makasar

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa proses rehabilitasi oleh Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berjalan sangat efektif, karena dalam proses rehabilitasi, para klien dapat menerima sistem nilai yang dibuat oleh Balai. Hal ini selaras dengan pendapat Isna bahwa nilai bermanfaat bagi manusia

sebagai acuan tindakan. Sesuatu dianggap bernilai apabila penghayatan reflektif seseorang berhasil meraih makna nilai dan melihatnya sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan dirinya. Namun, pencapaian setiap orang berbeda dibanding orang lain dalam melihat manfaat nilai. Perbedaan satu orang dengan orang lain dalam melihat sesuatu sebagai perkara yang bernilai adalah perbedaan tingkat penghayatan. Perbedaan tingkat penghayatan akan manfaat nilai tidak menghalangi relasi yang menghubungkan antara subjek nilai (manusia) dengan objek nilai (Isna, 2001:98). Atas dasar perbedaan kapasitas per individu ini, Balai Rehabilitasi BNN Baddoka memberikan layanan kebutuhan berbeda atas klien.

Hubungan yang erat antara subjek dan objek nilai ini meniscayakan lahirnya tindakan sosial yang berbasis nilai. Tindakan berbasis nilai dari klien ini adalah bukti konkrit penerimaan klien atas peran dan fungsi Balai Rehabilitasi BNN Baddoka. Dengan kata lain, apa yang dimanifestasikan ke dalam tindakan klien adalah sistem nilai yang dicita-citakan oleh Balai Rehabilitasi Baddoka. Hubungan yang erat berbasis nilai semacam ini dapat bersifat emosional ataupun intelektual, atau bahkan berupa kombinasi dari keduanya. Seseorang bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sosial kadang didasari nilai yang sangat emosional, dan kadang pula nilai yang bernuansa intelektual. Kombinasi antara emosi dan intelektualisme ini melahirkan apa yang disebut norma dan prinsip. Norma dan prinsip ini menjadi bernilai apabila telah diejawantahkan ke dalam aksi sosial (Isna, 2001:98).

Alhasil, nilai tidak saja menjadi acuan dari tindakan manusia, tetapi juga menjadi sistem norma, prinsip-prinsip keyakinan dan intelektualisme. Manusia yang berpegang pada nilai akan melahirkan tindakan yang bernilai, sekalipun dengan kualitas berbeda-beda. Dalam kasus pengalaman Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, klien berpegang teguh pada aturan dan resep-resep, dan tahap demi tahap proses pemulihan. Hal itu dapat ditemukan dalam buku catatan harian para klien yang merekam *trackrecord* kehidupan dan progres pemulihan selama di balai rehabilitasi BNN Baddoa. Artinya, sekalipun nilai yang ditanamkan oleh Balai Rehabilitasi sama namun proses

penerimaan terjadi berbeda, ditangkap dan diinternalisasi dengan cara berbeda, dan tingkat implementasinya pun dalam kehidupan klien secara berbeda-beda.

Perbedaan-perbedaan dalam proses pemulihan ini adalah dinamika sosial, yang tidak berpengaruh pada struktur besar, yakni tercapainya jiwa dan tubuh yang bebas dari pengaruh narkoba. Tercapainya proses pemulihan dapat dilihat dari buku saku yang klien diberikan oleh klien, dimana buku saku itu terdapat capaian-capaian apa yang klien lakukan selama berada di balai, didalam buku tersebut terdapat program-program yang harus diikuti klien guna untuk mengukur sampai ditingkat mana klien mampu menguasai dan mampu menjalankan program yang di berikan oleh Balai Rehabilitasi dalam proses pemulihan klien tersebut. Dalam buku saku itu juga terdapat berbagai kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada pelebagaan fungsi nilai dan norma serta penanaman nilai dan norma terhadap klien untuk menunjang proses rehabilitasi selama berada di Balai rehabilitasi BNN Baddoka.

Klien yang akan mengakiri program rehabilitasi dilakukan pengecekan terakhir dalam suatu kegiatan yaitu apa yang disebut *staf confrontation (SC)*. SC ini bersifat evaluasi terakhir terhadap seorang klien. Klien dinilai apakah sudah layak atau belum keluar dari Balai. Apakah sudah memenuhi syarat untuk Kembali kemasyarakat. Seluruh rangkaian pelaksanaan rehabilitasi dibicarakan dalam SC. Klien diberi kesempatan untuk menceritakan riwayat awal mula memakai narkoba. Kemudian apa yang klien rasakan selama menjalani rehabilitasi. Klien diwajibkan mengevaluasi perjalanan hidupnya mulai dari pertama pakai, menjadi pecandu, hingga mereka berada dalam Balai. Klien diwajibkan membuat dan memaparkan rencana hidupnya kedepan, termasuk bertahan dari lingkungan yang mungkin mempengaruhi untuk memakai narkoba Kembali dan termasuk jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah pulang dari Balai. Para staf memberi masukan-masukan penting sebagai bekal ketika klien sudah Kembali dari Balai. Hal terpenting lainnya yang dibicarakan dan SC adalah penilaian dari para staf apakah seorang klien sudah dapat atau belum boleh keluar dari Balai.

Penilaian terhadap klien boleh tidaknya keluar dari Balai tergantung dari keputusan sidang SC. Jika masih ada tugas yang belum tuntas maka biasanya klien diwajibkan menyelesaikan tugas tersebut sebelum dibolehkan pulang. Seorang klien yang telah dibolehkan pulang berarti menurut kriteria Balai klien tersebut sudah pulih. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan pola kepulihannya ketika mereka berada ditengah-tengah masyarakat. Pengawasan keluarga sangat dibutuhkan agar seorang klien dapat bertahan dari kepulihannya.

Klien pulih adalah sehat, produktif, dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

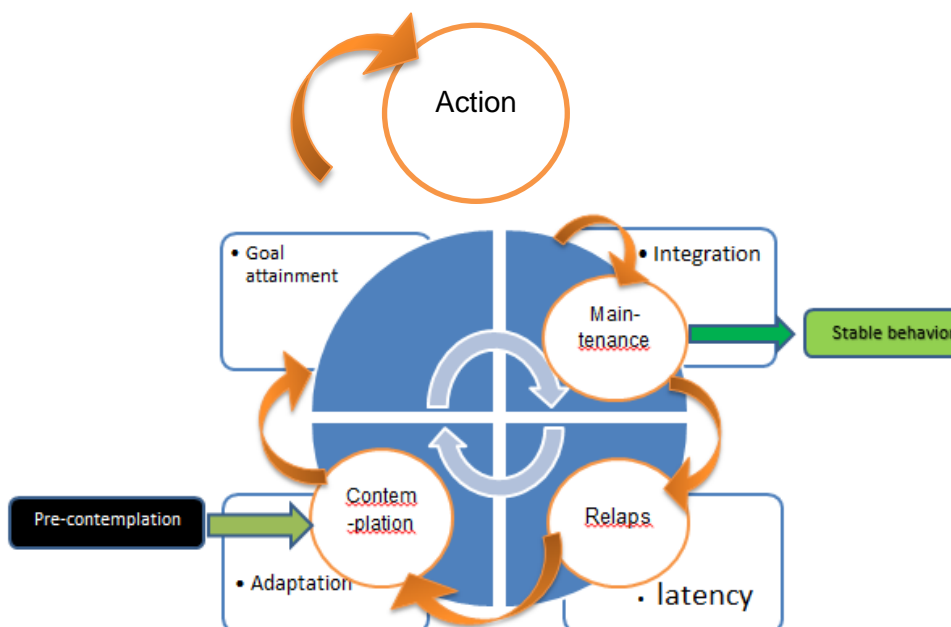
Gambar 7.1

Keterbaruan Penelitian Pelembagaan Nilai dan Norma



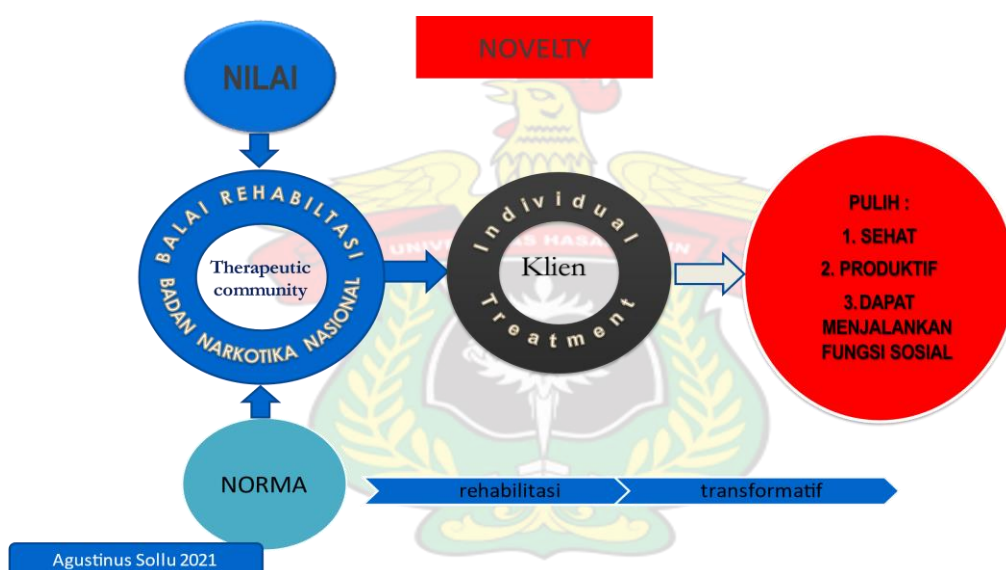
Gambar 7.2

Korelasi teori Agil dengan Stage of Change Model untuk melihat tingkat perubahan diri klien



Gambar 7.3

Rehabilitasi Transformatif



Daftar Pustaka

- . Deconstructing the Therapeutic Community: A Practice Guide for Addiction Professionals. California: CreateSpace, 2012.
- . Manajemen Penelitian. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2007: Alimandan. Jakarta:Rajawali Pers, 1985.
- A.O.F, Dian. Walking Paper. Makassar: Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, T.Th..
- Abdullah M. Ahmad. 2019. Model Implikasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kabupaten Bulukumba. Makassar. Program Pascasarjana Unhas.
- Al-Barry, M. Dahlan Y. Dan L. Lya Sofyan Yacub. Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual. Cet. I; Surabaya: Target Press, 2003.
- Ali, Zainuddin. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin Ansar. 2012. Nelayan Dalam Perangkap Kemiskinan (Studi Strukturasi Patren-Klien Dan Perangkap Kemiskinan Pada Komunitas Nelayan Di Desa Tamalate, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan). Makassar. Program Pasca Sarjana Unm.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. Xiii; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006.
- Badan Narkotika Nasional. 2010. Screening Brief Intervention And Referral To Treatment Skrining, Intervensi Singkat Dan Rujukan Terapi (Sbirt). Jakarta Timur.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta Timur.

- Badan Narkotika Nasional. 2018. Walking Paper Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka, Makassar 2018. Makassar.
- Badan Narkotika Nasional. 2019. Petunjuk Teknis Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba. Jakarta Timur
- Bakhtiar, Muhammad Ilham Dan Suehartono Syam. "Terapi Holistik Terhadap Pecandu Narkotika". *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 1 No. 3 (Februari 2018), H. 225-231. <https://doi.org/10.26539/1385> (Diakses 15 Oktober 2018).
- Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar. Walking Paper. Makassar: Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka, 2016.
- Bass, B.M. *Stogdils Handbook Of Leadership, A Survey Of Theory And Research, Revised And Ekspanted Editon*: New York: Free Press, 1981
- Berns, Roberta M, 2007, *Child, Family, School, Community, Socialization and Support*, Wadsworth Cengage Learning, diakses 10 Januari 2016, dari BookFi Database.
- Bonior, Andrea, *What Does A Healthy Relationship Look Like?*, Dalam <https://www.psychologytoday.com> (28/12/2018)
- Brosch, T. & Sanda, D. *Handbook Of Value: Perspectives From Economics, Neuroscience, Philosophy, Psychology, And Sociology*. Uk: Oxford University Press.
- Burlian Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta. Pt. Bumi Aksara.
- Chaplin, J.P. *Dictionary Of Psychology*, Terj. Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Coleman S. James. 2011. *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations Of Social Theory*). Bandung. Penerbit Nusa Media
- Creswell W. John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Creswell W. John. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiyah. *Kesehatan Psikologi Islam*. Jakarta: Cv. Hajimas Agung, 1988. De Leon, George. *The Therapeutic Community: Theory, Model, And Method*. New
- David Scott, Helena Gosling. *Before Prison, Instead Of Prison, Better Than Prison: Therapeutic Communities As An Abolitionist Real Utopia*.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S, 1994. *The Sage Handbook of Qualitative Research (terjemahan)*, Thousand Oaks, California, SAGE Publications.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalurannya Dan Segera Rehabilitasi*. Jakarta: BNN, 2015.
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001. Gassing, Abdul Qadir. "Fiqih Lingkungan: Telaan Kritis Tentang Penerapan Hukum
- George De Leon. *Is The Therapeutic Community An Evidence-Based Treatment? What The Evidence Says*. *The International Journal Of Therapeutic Community*. National Development And Research Institutes, Usa. Date 31, 2, 2010.
- George De Leon. *Therapeutic Community Elements: Theory, Model, And Method*. Center For Therapeutic Community Research At Ndri, Inc. New York City

- George Deleon. Volume I: The Therapeutic Community Perspective. The Therapeutic Community. Odyssey House.
- Giddens, Antony. 2010. Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, Elva Yeni Boru Dan Dedi Andriansyah, "Pengaruh Pelaksanaan Metode Therapeutic Community Terhadap Pecandu Narkotika Di Sibolangit Centre," *Anthropos*, Vol. I No. 1 (24 Juli 2013), H. 10.
[Http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/525](http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos/article/view/525) (Diakses 5 Mei 2019).
- Gudmunson, Clinton dan Danes, Sharon, 2011, Family Financial Socialization: Theory and Critical Review, *Journal of Family and Economic Issues*, No. 33, Pp: 644-667.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hagan E. Frank. 2013. Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Isna, Mansur. 2001. Diskursus Pendidikan Islam. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Jabir, Abdul. "Sistem Pembinaan Keagamaan Pada Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka". Tesis. Makassar: Pps Universitas Muslim Indonesia, 2017.
- Javier Fern ´andez-Montalvo,¹jos ´Ej.L´Opez-Go ´ni,²cristina Illescas,²natalia Landa,³and I ´naki Lorea². Evaluation Of A Therapeutic Community Treatment Program: A Long-Term Follow-Up Study In Spain. 2008 Informa Healthcare Usa, Inc.

- Kartawisastra. 1980. Strategi Klarifikasi Nilai. Jakarta: P3g Depdikbud.
- Kelly, J.B dan Emery, R.E, 2003, Children's Adjustment Following Divorce: Risk and Resilience Perspectives, Family Relations, Vol.52, Pp:352-362.
- Linda Gowing¹, Richard Cooke¹, Andrew Biven², And David Watts. Australasian Therapeutic Communities Association (Atca). Towards Better Practice In Therapeutic Communities. Australasian Therapeutic Communities Association, 2002.
- Lindsay and Beach, 2004, Socialization and Social Interaction Throughout Life Course, Essentials of Sociology, Pp:1-9.
- Ma'sum, Sumarno. Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat. Jakarta: Cv. Haji Masagung, 1987.
- Maarif. 2007. Revitalisasi Pendidikan Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manual Book Program Badan Narkotika Nasional: Prosedur Teknis Pelaksanaan Program Rehabilitasi (BNN) Baddoka, Therepeutic Community, 2019
- Marbun, Rocky Dkk.. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru. Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2012.
- Marianne T. Marcus, Joy Schmitz, Gerald Moeller, Patricia Liehr, Stanley G. Cron, Paul Swank, Susan Bankston, Deidra D. Carroll, L. Kian Granmayeh. Mindfulness-Based Stress Reduction In Therapeutic Community Treatment: A Stage 1 Trial. The American Journal Of Drug And Alcohol Abuse, 35:103–108, 2009. Informa Healthcare Usa, Inc.
- Mead, George H, Socialization and Social Interaction Throughout the Life Course dalam Essentials of Sociology, Lindsay Linda L and Beach Stephen, Prentice Hall.
- Morissan. 2015. Metode Penelitian Survei. Jakarta. Jakarta. Prenadamedia.

- Muh. Iqbal Latief, Agustinus Solli. 2019. Social Challenges Of Teen In Recovery From Drugs Addictions: A Case Study Of Makassar, Indonesia. Enfermiria Clinica.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narwoko Dwi J. & Bagong Suyanto, (editor), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Kencana, 2010.
- National Institute On Drug Abuse (Nida). 2008. Principles Of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (Third Edition), U.S.
- National Institute On Drug Abuse. Therapeutic Community: Advances In Research And Application. 1994. U.S. Department Of Health And Human Services.
- Oruh Shermina. 2017. Heropnam Gangguan Jiwa (Studi Sosiologi Kesehatan Terhadap Klien Yang Kambuh Pada Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Di Kota Makassar. Makassar. Program Studi Pascasarjana Unm.
- Parsons, Talcott, The Structure Of Social Action, New York: Mcgraw-Hill, 1937.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/liv/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/liv/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

- Perfas, B. Fernando. *Therapeutic Community: A Practice Guide*. Indiana: iUniverse, 2003.
- Perfas, Fernando B., *The Major Structural & Practice Principle Of Therapeutic Community*, New York, Usa: Addiction Training Consultant, Tth
- Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 1979.
- Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Priyono, Herry, *Profil Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar, 2018 (Ebook Gratis, 2018)*
- Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen . *Therapeutic Communities For Addictions In Europe: Development, Current Practices And Available Evidence*. Ghent University, Belgium Department Of Orthopedagogics . March 2014
- Purwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Penelitian Data Dan Informasi BNN Ri. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017*.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur
- Ritzer, Goerge. 2011. *Sociological Theory*. America, New York: The McGraw-Hill Companies. Diakses 21 Agustus 2015, dari BookFi Database.

- Rummel, R.J. "Social Behavior and Interaction." dalam Understanding Conflict And War: Vol. 2: The Conflict Helix. Beverly Hills, CA: Sage Publications Database.
- Saldana, Justin, 2013, Power and Conformity in Today's School, Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, No 1, Pp:228-232.
- Sarah Paget, Josie Thorne, Arun Das . Service Standards For Therapeutic Communities, 9th Edition. June 2015. The Royal College Of Psychiatrists, London, Uk.
- Soekanto Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Depok. Pt Rajagrafindo Persada.
- Sudaryono. 2018. Metodologi Penelitian. Depok. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujatno. Adi. Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri, dengan kata pengantar oleh Muladi. Jakarta: Teraju, 2008.
- Sunarti, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Supardin. Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Suparno. 2002. Pendidikan Budi Pekerti Di Sekolah: Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Kanisius.
- Supraja, dkk. 2013. Alienasi, Fenomenologi, dan Pembebasan Individu. Yogyakarta: Lingkar Studi Mikrososiologi UGM.
- Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2004.

- Taklifi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Makassar: Iain Alauddin, 8 Februari 2005.
- The Sage Handbook of Qualitative Research (terjemahan). 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Therapeutic Milieu, Dalam <https://www.carefulnursing.ie>, 5/6/2020)
- Therapeutic Community Curriculum Trainer’s Manual. U.S. Department Of Health And Human Services. 2006.
- Thoha. 1996. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyu. 2017. Efisiensi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Berorientasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Puskesmas Wilayah Perkotaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Makassar. Program Pascasarjana Unhas.
- WHO (Western Pacific Region). Integration of Harm Reduction Into Abstinence- Based Therapeutic Communities: A Case Study of We Help Ourselves. Geneva: WHO, 2006.
- Windiarsih, Wiwik, Rehabilitasi Anak Dan Remaja Di Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka, Dalam <https://rehabilitasi.bnn.go.id>(10/8/2018)
- Wren, Daniel A. And Arthur G. Bedeian, The Evolution Of Management Thought. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2009. York: Springer Publishing Company, 2000.

RIWAYAT PENULIS



Agustinus Sollu, lahir di Toraja 18 Agustus 1967. Anak kedua dari enam bersaudara. Ayah adalah seorang guru, kepala sekolah di SMEA Kristen Makale dan Ibu seorang ibu rumah tangga. Istri 1 orang dan 4 orang anak (3 perempuan dan 1 laki-laki). Tumbuh dan besar di Makale dalam lingkungan para pendidik yaitu para guru guru di Makale. Karena tumbuh dalam lingkungan pendidik maka kami sangat tertarik dengan dunia pendidikan

Riwayat Pendidikan: SD 5 Makale 1981, SMP Negeri 1 Makale 1984, SMA Katolik Makale 1987, Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin jurusan Arkeologi pada tahun 1987 dan Universitas Bung Karno Jakarta Jurusan Hukum tahun 2012, Menyelesaikan Magister di Universitas Indonesia Jurusan Ketahanan Nasional Kajian Narkoba Tahun 2011 dengan predikat cumlaude, SEMA PAPP ABRI 1997, DIKTAP POLRI 1997, SELAPA POLRI 2008, DIKLAT PIM II 2017, KIBI Polri 2000 tahun 1999, DASPA RESERSE 2003.

Riwayat Pekerjaan: Paur Sistem Binnis Binjah Desumdaman Polri sejak tahun 1997, Pasi Lis Subdit Jarahmus Desumdaman Polri tahun sejak tahun 2001, Ksbg Kerjasama International Set Lakhar BNN sejak tahun 2003, Kasi Penyelenggara dan Kerjasama Balai Diklat BNN sejak tahun 2009, Kabag Ortala Ro Kepeg dan Organisasi BNN sejak Tahun 2013.

Penghargaan: Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun.

Karya Penulis:

1. Analisis Hukum Efektifitas Pusat Rehabilitasi Korban Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Serta Penanggulangannya Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Lembaga Rehabilitasi Madani Mental Health Care Foundation. Universitas Bung Karno, Jakarta 2112
2. Social Challengers of teen in recovery from drugs Addiggtions: A case study of Makasar, Indonesia, Enfermeria Clinica, 2020

RIWAYAT PENULIS



Prof. Dr. dr. H. M. Alimin Maidin. MPH merupakan putra kelima dari sebelas bersaudara yang lahir di Amparita pada tanggal 14 April 1955, memiliki dua orang putra dan tiga orang putri dari hasil perkawinan dengan Ny. Hj. Fatmawati Tjambi, MM.

Riwayat Pendidikan: Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di Kabupaten Pinrang Prov. Sulawesi Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan SAA tamat 1973, SMA tamat 1975 di Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara. Melanjutkan Kuliah di Fakultas Kedokteran Unhas yang ditamatkannya pada tahun 1984, gelar MPH diperoleh dari Ann Arbor University, Michigan USA di tahun 1990, Doktor Fakultas Kedokteran 2004, Pengukuhan Guru Besar FKM Unhas sejak 1 Maret 2006.

Riwayat Pekerjaan: Direktur Hasanuddin Centre for Tobacco Control and NCD Prevention (Hasanuddin CONTACT), Fakultas Kesehatan Masyarakat, universitas Hasanuddin, 2018-2020, Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2014-2016, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin tahun 2010-2014, Konsultas AUSAID 2000-2002, Konsultan World Bank 2002, Konsultan UNICEF 1993-2005 dan 2007, Konsultan WHO 2006 – September 2007.

Penghargaan: Ketua Remaja Tauladan di Makassar 1979, Mendapatkan Rekor MURI (Museum Rekord Indonesia) 2008, Setya Lencana 20 Tahun PNS oleh Presiden RI 2010, Penyuluh Pantan 14=5 Tahun Non Stop HIV/AIDS di Sulsel 2008 oleh Gubernur Sulsel.

Karya Penulis:

1. Ekonomi dan Pembiayaan Sektor Kesehatan diterbitkan pada tahun 2013, dengan ISBN 978-602-9023-44-2.
2. Perencanaan Sektor Kesehatan diterbitkan pada tahun 2016, dengan ISBN 978-602-1308-21-9
3. Clarifying the Debate on Population-Based Screening for Breast Cancer with Mammography A Systematic Review Of Randomized Controlled Trials on Mammography with Bayesian Meta-Analysis and Causal Model (Jurnal Medicine, 2017)
4. Midwives Versus Traditional Birth Attendants(TBA),study cases of life history of TBAs and Midwives at Five Districts of South Sulawesi, UNICEF 1996

RIWAYAT PENULIS



Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D merupakan putra kelahiran Makale 27 Agustus 1963. Hingga saat ini, merupakan salah satu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin

Riwayat Pendidikan: Memperoleh gelar sarjana di Universitas Hasanuddin Jurusan Sosiologi Tahun 1988, Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gajah Mada Jurusan Ilmu Kependudukan tahun 1998, Kemudian memperoleh gelar doctor di UKM Malaysia Jurusan Sosiologi tahun 2017.

Riwayat Pekerjaan: Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Penghargaan: Satyalancana Karya Satya X Tahun, pada tahun 2010 dari Presiden RI dan Satyalancana Karya Satpa XX Tahun, pada tahun 2019 dari Presiden RI.

Karya Penulis:

1. Sejahtera pada Usia Lanjut: Kajian Upacara *Rambu Solo'* di Makale Utara, Tana Toraja
2. Humanisasi Anak: Refleksi terhadap upaya penyelamatan Generasi Bangsa
3. Pemuda dan Kemiskinan
4. Kesejahteraan Anak: Konsep dan Fakta
5. Compromise in Traditional Ceremonies: A Case Studi of the Rambu Solo' Ceremony in Toraja Regency.
6. Transformation of Traditional Ceremony as rational choice: A case study of Toraja Society in Indonesia
7. Change in health behavior of adolescents drugs addicts in Makassar.
8. Utilization of Natural Resources and Social Security in Fishermen Families on Salemo Island and West Rangas, South Sulawesi Provinsi.

RIWAYAT PENULIS



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS. lahir di Makassar 27 Desember 1961, merupakan dosen Departemen Antropologi Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin

Riwayat Pendidikan: SD Santo Yakobus Makassar, Tamat Tahun 1973, SMP Negeri III Makassar, Tamat Tahun 1979, SMA Negeri III Makassar, Tamat Tahun 1981, S1. Program Studi Antropologi Universitas Hasanuddin, Tamat Tahun 1987, S2. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, Tamat Tahun 1991, S3. Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Makassar, 2012.

Riwayat Pekerjaan: Pembantu Rektor III Universitas Pancasakti Tahun 1992- 1995, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pancasakti Tahun 1995-1998, Direktur Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim (NGO), tahun 1994-2009, taf Ahli DPRD Kota Makassar, Tahun 2009 – Sekarang, Ketua Program Studi Doktorat (S3) Antropologi FISIP UNHAS, Tahun 2019-sekarang

Penghargaan: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, pada tahun 2002, dari Presiden RI, Penghargaan Atas Prestasi Sebagai Wisudawan Doktor Terbaik 1, pada tahun 2012 dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, dan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, pada tahun 2013 dari Presiden RI.

Karya Penulis:

1. Perangkap Kemiskinan dan Kekerasan Struktural Dalam Relasi Patron- Klien. Orbit. Tahun 2013.
2. Strategi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kerakyatan. Refleksi Terhadap Masterplan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Sulawesi Barat Dan Wakatobi Sulawesi Tenggara. Makassar. PT. Maupa Masagena Media Kreasindo. Tahun 2013.

RIWAYAT PENULIS



Dr.Drs.Andi M. Rusdi Maidin,SH. M.Si., merupakan putra ke 6 dari 11 bersaudara, yang terlahir dari ayah hyang bernama H. Maidin Daengmassagoni dan terlahir dari ibu putri bangsawang arung Amparita yang bernama Andi Jawaria Dalle Petta Lapakampi. Beliau dilahirkan di Pinrang, 22 Desember 1959.Dengan alamat Jln.Ujung Pandang Baru 6 no. 15 Makassar.Beliau dilahirkan di Wanua Sawitto Kabupaten Pinrang yang di karuniai oleh seorang putri dan tiga orang putra, hasil pernikahan dari Dr. Rajamemang, S.Sos., M.Si

Riwayat Pendidikan: SD No. 3 Kab. Pinrang, Sekolah Menengah Pertama 2 Jln Ternate Ujung Pandang, Sekolah Menengah Negeri 1 Ujung Pandang , Melanjutkan kuliahh Universitas Hasanuddin Jurusan Sosiologi tahun 1987 dan Universitas “45” Jurusan Hukum Tahun 2004, menyelesaikan Magister di Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi Pembangunan dan menyelesaikan gelar Doktor di Universitas Negeri Makassar tahun 2015.

Riwayat Pekerjaan: Dosen Fisipol Universitas “45” (sekarang Universitas Bosowa) sejak tahun 1988, Direktur yayasan kemandirian

Penghargaan:

Karya Penulis:

1. Model Kepemimpinan Uwatta Dalam Komunitas Tolotang Benteng, di Amparita kabupaten Sidenreng Rappang, Agama dan Masyarakat
2. Perencanaan pemimpin dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai negeri sipil di kantor kecamatan Tamalanrea, Tahun 2000.